



PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025

BUKU I



BAPPELITBANGDA

-  (0231) 321991
-  bappelitbangda@cirebonkab.go.id
-  bappelitbangda.cirebonkab.go.id
-  Jalan Sunan Kalijaga No. 11, Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RKPD disampaikan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi Jawa Barat adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat APBD-P Provinsi Jawa Barat adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

22. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
25. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
26. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
28. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
30. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
31. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran Perubahan RPD 2025-2026.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUPA/PPAS-P dan Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD
Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025, Memuat Evaluasi pelaksanaan kinerja RKPD beserta Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025, permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan Tahun 2025, Inovasi yang mendukung penyelesaian permasalahan dan Isu Strategis, Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan program kolaborasi;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Memuat rencana program prioritas daerah Perubahan RKPD Tahun 2025, rencana pendanaan program dan kegiatan, rencana program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dan rencana pendanaan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada perubahan RKPD Tahun 2025;
 - f. Bab VI penutup
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Target Sasaran Pembangunan Daerah, Penambahan dan/atau Pengurangan Program dan Kegiatan Daerah dan Target Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana kerja yang terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pendanaannya dapat bersumber dari:
 - a. APBD-P;
 - b. APBD-P Provinsi;
 - c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Perubahan Renja;
 - b. pelaksanaan Perubahan Renja; dan
 - c. hasil capaian Perubahan Renja.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. target dan capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. target dan capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. target dan capaian Indikator SPM;
 - e. target dan capaian IKK; dan
 - f. target dan capaian Indikator TPB.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan didukung aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator Kinerja Hasil, Dampak dan sasaran strategis Perangkat

- Daerah dan kinerja daerah, sesuai hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024.
- (6) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator Hasil masing-masing Program, indikator capaian sasaran perangkat daerah.
 - (7) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (8) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Dokumen P-RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Secara substansi Dokumen P-RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 serta merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

P-RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itu, P-RKPD ini harus mampu mewujudkan visi dan misi serta prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan dilakukannya penyesuaian sesuai dinamika regulasi dan perkembangan kondisi aktual di Kabupaten Cirebon. Dengan harapan Dokumen P-RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 mampu menjawab tantangan dan isu strategis pada periode pembangunan Tahun 2025.

Dalam proses penyusunan P-RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan P-RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga dokumen P-RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk Kabupaten Cirebon. Walhamdulillahirobbilalamin.

Cirebon, 14 Mei 2025
BUPATI CIREBON,

H. IMRON



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025	I-12
BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2025	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja RKPD Sampai Triwulan I Tahun 2025	II-1
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tujuan dan Sasaran RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-2
2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-46
2.1.3. Evaluasi Capaian RPD Tahun 2025-2026	II-58
2.1.4. Capaian Kinerja Makro Pembangunan	II-65
2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-65
2.1.6. PDRB Perkapita.....	II-73
2.1.7. Laju Inflasi	II-75
2.1.8. Indeks Gini.....	II-76
2.1.9 Kemiskinan	II-79
2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-84
2.1.11 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-87
2.1.12 Angka Harapan Hidup (AHH)	II-91
2.1.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-93
2.1.14 Evaluasi Program 100 Hari Kerja Bupati Terpilih.....	II-99
2.1.15 Evaluasi Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-106
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-112
2.2.1 Permasalahan Daerah.....	II-113
2.2.2 Permasalahan Terkait Aspek Pelayanan Umum	II-115
2.2.3 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025.....	II-130



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Eksisting Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Hingga Triwulan II Tahun 2025.....	III-1
3.1.2. PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-9
3.1.3. Ekspor dan Impor Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-11
3.1.4. Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-12
3.1.5. Inflasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-13
3.1.6. Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-14
3.1.7. Indeks Gini.....	III-19
3.1.8. Kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-20
3.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-24
3.1.10. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Tahun 2025	III-27
3.1.11. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi	III-42
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-52
3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-54
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-58
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-61
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-68
3.3. Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah	III-71
3.3.1. APBN.....	III-71
3.3.2. Dana Masyarakat/Umat.....	III-72
3.3.3. <i>Corporate Social Responsibility</i> (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))	III-72
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-4
4.1.1. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Kebijakan Strategis Lainnya.....	IV-4
4.1.2. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-7
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon	IV-9
4.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon	IV-19
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-26
4.2.1. Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025	IV-26
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	IV-29



4.3.	Inovasi yang Mendukung Penyelesaian Permasalahan dan Isu Strategis	IV-87
4.4.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	IV-89
4.4.1.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	IV-91
4.4.2.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon	IV-92
4.5.	Program Kolaborasi	IV-95
4.5.1.	Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing UMKM	IV-95
4.5.2.	Program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	IV-111
4.5.3.	Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Pariwisata	IV-129
4.5.4.	Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	IV-141
4.5.5.	Program Kolaboratif Penanggulangan Kemiskinan	IV-145
4.5.6.	Program Kolaboratif Penurunan Stunting	IV-160
4.5.7.	Program Kolaboratif Pengendalian Inflasi Daerah	IV-169
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1.	Rencana Program Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025	V-1
5.2.	Rencana Pendanaan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah	V-3
5.3.	Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025	V-11
5.4.	Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	V-15
BAB VI	PENUTUP	VI-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RKPD Tahun 2023 Terhadap Dokumen Lain	I-10
Gambar 2.1	Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan I Tahun 2025.....	II-45
Gambar 2.2	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan I Tahun 2025.....	II-46
Gambar 2.3	Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon	II-55
Gambar 2.4	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - Triwulan I Tahun 2025	II-56
Gambar 2.5	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 - Triwulan I Tahun 2025	II-57
Gambar 2.6	Rata-Rata Capaian Serapan Anggaran Perangkat Daerah	II-58
Gambar 2.7	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 (Milyar Rupiah)	II-69
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kab. Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-71
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) dari Tertinggi hingga Terendah	II-72
Gambar 2.10	Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 (%)	II-74
Gambar 2.11	Laju Inflasi Kab. Cirebon, Prov.Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 (Persen).....	II-75
Gambar 2.12	Perbandingan Indeks Gini Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2024.....	II-77
Gambar 2.13	Gini Ratio Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) dari yang Rendah ke Tinggi	II-78
Gambar 2.14	Persentase Kemiskinan di Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2024.....	II-80
Gambar 2.15	Kemiskinan Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)	II-83
Gambar 2.16	Capaian IPM Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018–2024 (Poin)	II-84
Gambar 2.17	IPM Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) dari yang Tinggi ke Rendah	II-86
Gambar 2.18	Harapan Lama Sekolah Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-88
Gambar 2.19	HLS Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen).....	II-89



Gambar 2.20	Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-90
Gambar 2.21	RLS Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)	II-91
Gambar 2.22	Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-92
Gambar 2.23	UHH Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)	II-93
Gambar 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2024 (Persen)	II-94
Gambar 2.25	TPAK Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen).....	II-95
Gambar 2.26	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018–2024 (Persen).....	II-96
Gambar 2.27	TPT Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)	II-98
Gambar 2.28	Grafik Tingkat Keberhasilan Inovasi di Kabupaten Cirebon Per Triwulan I 2025	II-112
Gambar 3.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-2
Gambar 3.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	III-3
Gambar 3.3	LPE dan Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon, 2020-2024 ..	III-10
Gambar 3.4	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	III-11
Gambar 3.5	Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024 (Persen)	III-13
Gambar 3.6	Perkembangan indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2021-2024	III-15
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Cirebon (persen), 2021 - 2024.....	III-16
Gambar 3.8	Perbandingan TPT dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-17
Gambar 3.9	Perbandingan Perubahan Pencapaian TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024	III-18
Gambar 3.10	Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 .	III-20
Gambar 3.11	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024.....	III-21



Gambar 3.12	Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024	III-24
Gambar 3.13	Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024	III-26
Gambar 3.14	Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024	III-26
Gambar 3.15	Realisasi Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024 (Ribu Rupiah).....	III-27
Gambar 3.16	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.....	III-42
Gambar 3.17	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	III-43
Gambar 3.18	Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025	III-43
Gambar 3.19	Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon	III-54
Gambar 3.20	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, 2019-2023	III-55
Gambar 3.21	Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023.....	III-75
Gambar 4.1	Strategi Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	IV-141
Gambar 4.2	Program Kolaboratif Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-146
Gambar 4.3	Penanggulangan Stunting Kolaboratif.....	IV-160
Gambar 4.4	Strategi Pengendalian Inflasi	IV-170



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-2
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi Terhadap Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	II-3
Tabel 2.3	Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Sampai Dengan Trwiulan I Tahun 2025	II-47
Tabel 2.4	Realisasi dan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2025-2026	II-59
Tabel 2.5	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon.....	II-65
Tabel 2.6	Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Miliar Rupiah), 2018-2024.....	II-67
Tabel 2.7	Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Miliar Rupiah), Tahun 2018-2024	II-68
Tabel 2.8	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Persen), Tahun 2018-2024	II-69
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (persen), 2018-2024	II-70
Tabel 2.10	Perbandingan LPE Kab./Kota di Jawa Barat Tahun 2024(%)	II-72
Tabel 2.11	PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024	II-73
Tabel 2.12	Gini Ratio Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	II-77
Tabel 2.13	Garis Kemiskinan dan Angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-80
Tabel 2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2018–2024	II-81
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024.....	II-82
Tabel 2.16	IPM Kab./Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024	II-85
Tabel 2.17	HLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	II-88
Tabel 2.18	RLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	II-90
Tabel 2.19	UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	II-92



Tabel 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024 (Persen).....	II-94
Tabel 2.21	Tabel Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024.....	II-97
Tabel 2.23	Pelayanan Izin Usaha Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-99
Tabel 2.24	Pelayanan Infrastruktur Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-99
Tabel 2.25	Pelayanan Administrasi Kependudukan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-101
Tabel 2.26	Pelayanan Persampahan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih..	II-101
Tabel 2.27	Pelayanan Penanganan Pengangguran Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-101
Tabel 2.28	Pelayanan Penanganan Banjir Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-102
Tabel 2.29	Pelayanan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-103
Tabel 2.30	Pelayanan Jaminan Kesehatan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-104
Tabel 2.31	Pelayanan Jaminan Kesehatan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-104
Tabel 2.32	Pelayanan Penyediaan Pangan Murah Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih	II-104
Tabel 2.33	Kegiatan Pengembangan Kampung Literasi yang Telah dilaksanakan	II-105
Tabel 2.34	Kegiatan Pengembangan Kampung Literasi.....	II-105
Tabel 2.35	Pelayanan Percepatan SILTAP dan APBDes Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih.....	II-106
Tabel 2.36	Daftar Inovasi Daerah Per Triwulan I Di Kabupaten Cirebon Tahun 2025.....	II-109
Tabel 2.37	Identifikasi Permasalahan Pokok Daerah (Permasalahan Makro Pembangunan)	II-113
Tabel 2.38	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-116
Tabel 2.39	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja pada pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025	II-131
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024.....	III-4



Tabel 3.2	PDRB dan LPE Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2023-2024.....	III-5
Tabel 3.3	Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-6
Tabel 3.4	PDRB ADHK (Milyar Rupiah) dan Peranannya (Persen) Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-7
Tabel 3.5	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-8
Tabel 3.6	Perbandingan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-9
Tabel 3.7	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-10
Tabel 3.8	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-12
Tabel 3.9	Perbandingan Perubahan TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar, 2020-2024.....	III-19
Tabel 3.10	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2020-2024	III-22
Tabel 3.11	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-23
Tabel 3.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-23
Tabel 3.13	Capaian IPM Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten-Kabupaten di Sekitarnya, 2020–2024	III-25
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025	III-33
Tabel 3.15	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Persen)	III-34
Tabel 3.16	Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2024-2025.....	III-35
Tabel 3.17	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025	III-36
Tabel 3.18	Realisasi Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha untuk 4 (Empat) Sektor Dominan Kabupaten Cirebon Tahun 2025	III-41
Tabel 3.19	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.....	III-41
Tabel 3.20	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.....	III-44



Tabel 3.21	Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2023, Target Tahun Berjalan 2024 dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.....	III-57
Tabel 3.22	Realisasi Belanja Tahun 2022 - 2023, Target Tahun Berjalan 2024 dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.....	III-66
Tabel 3.23	Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 - 2023, Target Tahun Berjalan 2024 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	III-70
Tabel 3.24	Alokasi APBN-TP Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024.....	III-71
Tabel 4.1	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025.....	IV-2
Tabel 4.2	Target Sasaran Pembangunan Nasional	IV-5
Tabel 4.3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2025.....	IV-7
Tabel 4.4	Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cirebon 2025-2026.....	IV-10
Tabel 4.5	Indikator Tujuan dan Sasaran dan Target 2025-2026.....	IV-11
Tabel 4.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025	IV-21
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	IV-31
Tabel 4.8	Keterkaitan isu strategis Kabupaten Cirebon dengan Isu strategis Provinsi Jawa Barat dan Nasional	IV-37
Tabel 4.9	Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Program Prioritas Daerah.....	IV-39
Tabel 4.10	Penjelasan atas Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-41
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-42
Tabel 4.12	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025.....	IV-46
Tabel 4.13	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Sasaran pembangunan Daerah dan Indikator sasaran daerah Tahun 2025	IV-47
Tabel 4.14	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Daerah dan Program Tahun Anggaran 2025	IV-49
Tabel 4.15	Dukungan Program Prioritas Daerah pada RKPD 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	IV-61
Tabel 4.16	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-84



Tabel 4.17	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025.....	IV-86
Tabel 4.18	Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat..	IV-90
Tabel 4.19	Isu, Strategi dan Kebijakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044	IV-93
Tabel 4.20	Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing UMKM	IV-96
Tabel 4.21	Tagging Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2025.....	IV-112
Tabel 4.22	Tagging Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Pariwisata Tahun 2025	IV-130
Tabel 4.23	Indikasi Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh.....	IV-143
Tabel 4.24	Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025....	IV-147
Tabel 4.25	Daftar Perangkat Daerah Pengampu Dan Pendukung Serta Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025	IV-161
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025	V-2
Tabel 5.2	Rencana Kerangka Anggaran Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025	V-3
Tabel 5.3	Rencana Kerangka Anggaran Perubahan RKPD 2025 Terhadap APBD 2025	V-5
Tabel 5.4	Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025.....	V-8
Tabel 5.5	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025	V-13
Tabel 5.6	Alokasi Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perubahan RKPD Tahun 2025.....	V-18



BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien maka pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Cirebon harus memperhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Selain menyusun perencanaan, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah agar terwujud:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD/RPD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD;
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan;



- f. kesesuaian nilai target indikator kinerja berdasarkan hasil evaluasi, penggunaan SiLPA berdasarkan laporan keuangan **audited** tahun sebelumnya atau mengenai peraturan-peraturan terbaru dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang perlu diacu; dan
- g. penyusunan Perubahan RKPD selain untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan penganggaran serta mewujudkan efisiensi berbagai sumber daya pada pembangunan daerah, juga sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengendalian dan evaluasi meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka sisa waktu 6 (enam) bulan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Barat. Perencanaan pembangunan disamping harus mematuhi norma konsistensi kebijakan, Perubahan RKPD tetap harus mampu menjawab permasalahan atau isu strategis dan kebutuhan masyarakat paling mendesak. Meskipun, di dalam RPJMD/RPD belum mengantisipasi suatu masalah atau isu pembangunan (baru).

Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan dari rangkaian kebijakan pembangunan jangka menengah daerah RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan memperhatikan visi, misi, serta program



Kepala Daerah terpilih dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, Perubahan RKPD memuat prioritas pembangunan yang konsisten terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD/RPD) untuk dapat menjawab kebutuhan atau tantangan pembangunan terkini;
2. Secara normatif, Perubahan RKPD merupakan dasar penyusunan Kerangka Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P);
3. Secara operasional, Perubahan RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 dan tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang mana menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. kondisi yang menyebabkan saldo keuangan daerah mengalami defisit sehingga diharuskan melakukan rasionalisasi anggaran pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- d. penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru; serta
- e. dukungan terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi tahun 2025 melalui fokus pada pelaksanaan arah kebijakan pembangunan nasional yang meliputi: (berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024),
 - 1) penurunan tingkat kemiskinan;
 - 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - 3) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.



Selain kondisi di atas, Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh perubahan pada belanja daerah sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Komponen belanja daerah yang mengalami efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional. Kebutuhan terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya harus dilaksanakan secara efisien dan berkelanjutan untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui proses pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. **Pendekatan Teknokratik** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- **Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD**, meliputi Analisis ekonomi dan keuangan daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025, Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah, Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Perumusan program,



kegiatan dan Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

- **Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD**, disusun berdasarkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi. Rancangan Akhir Perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- **Penetapan Perubahan RKPD, berpijak pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD** Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025. Perubahan RKPD sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2025. Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon, dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional dengan landasan operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan;



19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021/Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 nomor 23);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;



42. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Seri E.4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
46. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);
47. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 72);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
49. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83), dan
50. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 900.1.12/11/BKAD Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan



jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

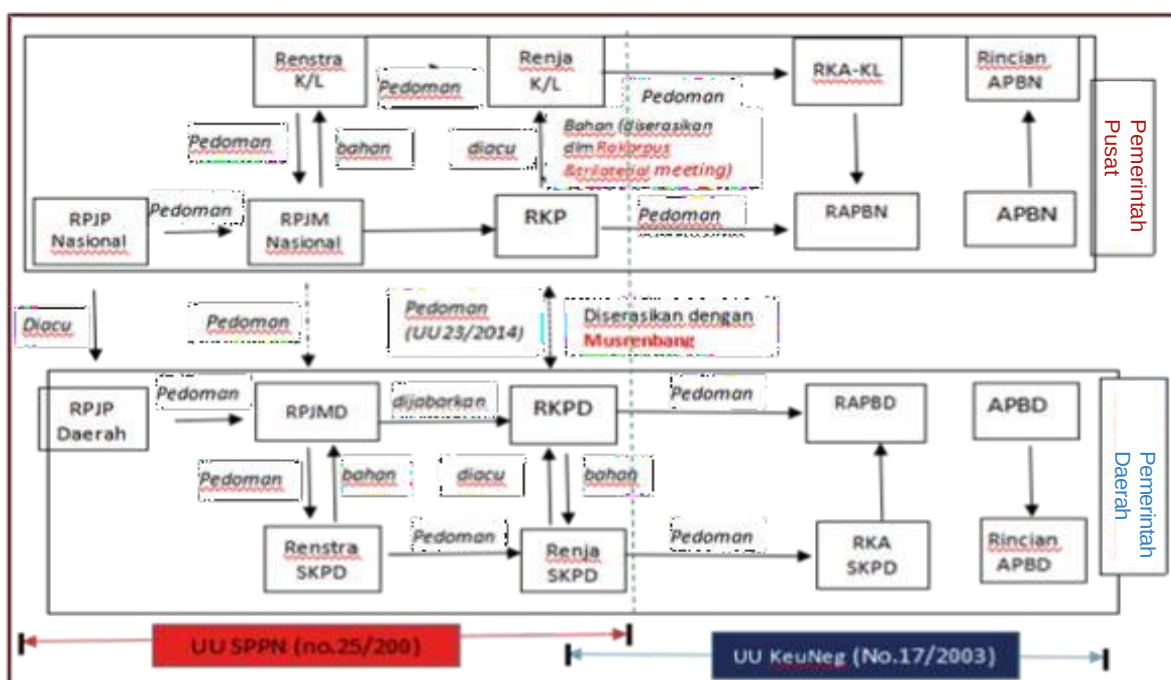
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen RKPD Terhadap Dokumen Lain



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017



Berdasarkan gambar di atas RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3). RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2025, RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024–2044 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan RKPD Tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS-P Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD-P 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kinerja RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025, yaitu:

- a. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2025;



- c. Menjadi landasan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen P-RKPD.
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;** memuat hasil evaluasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD/RPD, serta permasalahan pembangunan daerah yang mencakup permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan terhadap tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan asumsi pencapaian target pembangunan sampai akhir tahun.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;** menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan tahun berjalan sampai dengan triwulan I, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta penyesuaian angka defisit anggaran dengan jumlah SILPA audited kedalam rencana pembangunan.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, pencapaian sasaran sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi



daerah beserta kerangka pendanaan dan gambaran tingkat pencapaian kinerja sampai akhir tahun.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dan disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan perubahan tahun perencanaan pembangunan (P-RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD.

BAB VI Penutup; mengemukakan kaidah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan P-RKPD.



BAB II

EVALUASI HASIL SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025



Untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah.

Agar terwujud sinergi perencanaan maka tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD pemerintah daerah sebagai penjabaran dari RPJMD harus mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD provinsi dan RKP Nasional. Namun meskipun demikian dalam pelaksanaannya berpeluang terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang direncanakan akibat terjadi perubahan yang mendasar diantaranya terjadi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada tahun berjalan secara berkala.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja RKPD Sampai Triwulan I Tahun 2025

Pada tahap penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD. Hal ini dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan RKPD. *Checklist* pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD Tahun 2025 dilakukan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD Kabupaten Cirebon telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD.

Selanjutnya, dari hasil pengendalian dan evaluasi agar RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD, maka pada saat penyusunan KUA PPAS dan RKA akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD. Selain itu, akan dilakukan juga evaluasi hasil RKPD yang disusun dan dilaporkan per triwulan pada Tahun 2025. Evaluasi hasil RKPD akan diperoleh dari Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.



2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tujuan dan Sasaran RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Cirebon salah satunya dapat dilihat dari capaian sasaran pembangunan yang merupakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Indikator tersebut terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran yang dihitung setiap triwulan untuk melihat ketercapaian kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan akhir Triwulan I 2025 serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai (Tabel 2.1.).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun pertama dalam RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Selanjutnya, pada subbab ini disajikan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran SKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Tabel 2.2) dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut tetap dapat memberikan informasi penting mengenai kinerja penyelenggaraan setiap perangkat pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel 2. 2 Hasil Evaluasi Terhadap Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENDIDIKAN						-
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	61.26	60.00	97.94	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	Persen	98.75	94.11	95.30	Sangat Tinggi
Meningkatnya Mutu dan Relefans Pendidikan	Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon	Persen	100.00	93.13	93.13	Sangat Tinggi
Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Point	94.50	84.41	89.32	Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	68.50	75.65	110.44	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Tatakelola Dinas Pendidikan	Indeks Pelayanan	Poin	84.00	82.72	98.48	Sangat Tinggi
DINAS KESEHATAN						-
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75.20	74.98	99.71	Sangat Tinggi
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat.	Persentase Keluarga Sehat	Persen	42.00	44.00	104.76	Sangat Tinggi
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Kab. Cirebon	Persen	68.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai LKIP Dinas Kesehatan	persen	73.20	78.00	106.56	Sangat Tinggi



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						-
Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	point	81.19	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Prosentase Intensitas Tanam	Persen	90.00	32.33	35.93	Sangat Rendah
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Handal	prosentase Kemantapan Jalan	Persen	85.20	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah	Prosentase Pemenuhan SPM dan Bangunan Penampungan Sampah	Persen	63.03	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Layanan Jasa Konstruksi	Rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang	prosentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	22.22	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP Pemda	Point	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUTR	Nilai LKIP DPUTR	point	78.00	80.00	102.56	Sangat Tinggi
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						-
Meningkatkan Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Wilayah yang Mantap	Nilai	89.23	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas Perumahan	Prosentase Permukiman yang tertata	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya kualitas permukiman yang layak dan sehat	Prosentase luasan kawasan permukiman yang layak dan sehat	Persen	49.56	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib	Persentase Pemanfaatan tanah yg sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Penanganan Sengketa tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Prosentase tanah aset pemda yang bersertipikat hasil dari pengadaan tanah	Persen	70.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola Pemerintah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKIP DPKPP	NILAI	73.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						-
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat	point	70.65	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	Persen	76.55	6.33	8.27	Sangat Rendah
Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada	Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	Persen	65.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	Persen	0.25	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	83.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah.	Nilai/Kategori	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai LKIP Perangkat Daerah.	Nilai/Kategori	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						-
Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban umum daerah sub urusan kebakaran	Persen	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Prosentase penurunan resiko kebakaran tingkat kerugian	Persen	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	94.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						-
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Risiko Bencana	Point	140.25	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.54	0.14	25.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Poin	74.00	18.48	24.97	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai LKIP BPBD	Poin	74.00	18.48	24.97	Sangat Rendah
DINAS SOSIAL						-
Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	Persen	10.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Terpenuhinya layanan kebutuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terlayani kebutuhannya	Persen	15.52	2.96	19.09	Sangat Rendah
Terwujudnya peningkatan kemampuan PSKS	Persentase Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial yang terampil	Persen	30.95	0.00	0.00	Sangat Rendah
Mewujudkan Nilai-nilai Kepahlawanan pada masyarakat kabupaten Cirebon	Persentase partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Nilai-nilai Kepahlawanan	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Poin	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai LKIP Dinas Sosial	Poin	70.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						-
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	63.08	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	poin	72.17	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon	Persen	12.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Udara	poin	61.31	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	50.75	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai LKIP	Persen	71.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Point	3.75	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Cakupan Keluarga yang memiliki Dokumen Kependudukan Lengkap	Persentase Keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap	Persen	84.00	58.20	69.29	Sedang
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai LAKIP Disdukcapil	Persen	85.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						-
Meningkatnya Status rata rata Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun (IDM)	Persen	0.79	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan kemandirian desa melalui tata kelola Pemerintahan Desa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa yang laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah terverifikasi	Persen	15.00	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Kab. Cirebon	Persen	68.50	79.65	116.28	Sangat Tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	73.40	79.65	108.51	Sangat Tinggi
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						-
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	Persen	0.48	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Total Fertility Rate	Poin	2.18	2.12	97.25	Sangat Tinggi
Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	73.25	0.00	0.00	Sangat Rendah
Terlindunginya Kelompok Rentan (perempuan dan anak) terhadap kekerasan	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi	Persen	0.55	0.02	4.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai Sakip	Persen	69.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Nilai LKIP DPPKBP3A	Nilai LKIP DPPKBP3A	Persen	70.70	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS PERHUBUNGAN						-
Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap	Prosen	89.23	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Yang Berkeselamatan	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi	Titik	7.00	1.00	14.29	Sangat Rendah
	Rasio ketersediaan sarpras Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	Persen	71.79	84.63	117.89	Sangat Tinggi
	Prosentase Jumlah Kendaraan Laik Fungsi per Total Jumlah Kendaraan Wajib Uji	Persen	64.08	17.05	26.61	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP Perangkat Daerah	Poin	69.00	72.45	105.00	Sangat Tinggi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						-
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Poin	3.25	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Poin	2.98	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Indeks Domain Layanan SPBE	Poin	3.05	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	2.00	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	68.50	75.70	110.51	Sangat Tinggi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKIP	Nilai	70.75	75.70	107.00	Sangat Tinggi
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH						-
Meningkatnya Daya Saing Wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	5.20	0.10	1.92	Sangat Rendah
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	Persen	5.20	0.20	3.85	Sangat Rendah
Meningkatnya Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang berkembang nilai Omzetnya	Prosentase Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dan berkembang nilai Omzetnya	Persen	10.00	1.00	10.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	NILAI SAKIP PEMDA	Persen	84.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai LKIP Dinas Koperasi dan UKM	Poin	90.00	30.00	33.33	Sangat Rendah
Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	Persen	15.03	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT, volume usaha dan aset koperasi	Persen	40.98	15.00	36.60	Sangat Rendah
Merevitalisasi koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Jumlah koperasi tidak aktif yang tidak melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Persen	2.00	0.20	10.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						-
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Cirebon	Persen	20.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Triliun Rupiah	10.00	2.63	26.30	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip	Nilai	68.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai LKIP DPMPTSP	Poin	83.95	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						-
Meningkatnya prestasi kepemudaan di tingkat provinsi	indeks perolehan prestasi kepemudaan di tingkat provinsi	Prestasi	0.60	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Persentase pemuda yang aktif, produktif dan kreatif	poin	6.02	0.60	9.97	Sangat Rendah
Meningkatnya prestasi olahraga	Peringkat prestasi olahraga multi event di tingkat provinsi yang rutin dilaksanakan tiap tahun	Peringkat	7.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Prestasi olahraga Kabupaten Cirebon di Tingkat Provinsi	Indeks perolehan medali olahraga multi event di tingkat provinsi	Poin	19.30	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai Sakip	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dispora	Nilai Lkip	Nilai	61.20	66.60	108.82	Sangat Tinggi
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	10.00	0.37	3.70	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP PEMDA	NILAI	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai LKIP Disbudpar	NILAI	70.55	70.55	100.00	Sangat Tinggi
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						-
Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	5.42	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya budaya Literasi masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Poin	44.67	68.97	154.40	Sangat Tinggi
Meningkatkan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Poin	77.07	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya nilai hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Cirebon	Nilai Laporan Audit Kearsipan Kategori Baik	Poin	65.04	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis	Persen	60.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP Perangkat Daerah	Poin	69.80	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS KETENAGAKERJAAN						-
Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6.65	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang link and match dengan DUDIKA	Persentase tenaga kerja (pencaker yang terdaftar) bersertifikat kompetensi	Persen	28.00	6.81	24.32	Sangat Rendah
Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota dan melalui program transmigrasi	Persen	72.00	7.50	10.42	Sangat Rendah
Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	Perusahaan	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah daerah	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketenagakerjaan	Nilai LKIP Dinas Ketenagakerjaan	Persen	70.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						-
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	80.28	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya konsumsi Pangan dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga pangan Beras	Skor PPH Konsumsi	Poin	94.40	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Skor PPH Ketersediaan	poin	75.82	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	persen	4.63	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	9.34	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	LKIP	Nilai	69.95	0.00	0.00	Sangat Rendah
DINAS PERTANIAN						-
Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	4.63	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya produksi komoditas pertanian unggulan	Produksi Gabah Kering Panen (GKP)	Ton	708,140.00	71,691.00	10.12	Sangat Rendah
	Produksi mangga	Ton	40,780.00	2,476.00	6.07	Sangat Rendah
	Populasi domba	Ekor	311,418.00	270,278.00	86.79	Tinggi
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Daerah	Poin	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian	Poin	72.00	73.90	102.64	Sangat Tinggi
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						-
Meningkatkan kinerja sektor perindustrian	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan	Persen	5.43	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya nilai produksi sektor industri pengolahan	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan Menurut Jenis Komoditi Industri Unggulan di Kabupaten Cirebon	Rupiah	397.608.7808.000	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	2.20	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya perdagangan dalam negeri	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp Milyar	8,906.04	5,390.80	60.53	Rendah
Meningkatnya daya saing ekspor	Laju pertumbuhan nilai ekspor	Persen	25.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatakan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Persen	69.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persen	71.55	74.85	104.61	Sangat Tinggi
SEKRETARIAT DAERAH						-
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Poin	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
	IKM	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP-Pemda)	Nilai SAKIP-Pemda	Poin	68.00	96.76	142.29	Sangat Tinggi



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM-Pemda)	IKM-Pemda	Poin	86.30	97.66	113.16	Sangat Tinggi
Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	IKK	Persen	60.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Persen	60.00	24.60	41.00	Sangat Rendah
SEKRETARIAT DPRD						-
Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kualitas Kebijakan	Persen	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Fasilitas Fungsi Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Persentase Jumlah Peraturan Perundangan yang Ditetapkan	Persen	95.00	5.26	5.54	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Poin	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkanya Akutabilitas Kienrja Sekretariat DPRD	Nilai LKIP Sekretariat DPRD	Poin	72.20	0.00	0.00	Sangat Rendah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						-
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	90.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Perencanaan Daerah	Persen	87.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Persen	30.00	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya implementasi Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan di perangkat daerah	Persen	30.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda	Nilai LKIP Bappelitbangda	Nilai	76.52	0.00	0.00	Sangat Rendah
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						-
Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	4.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan	Penetapan Rancangan APBD dan Perubahan APBD yang Sesuai dan Tepat Waktu	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun sesuai dengan ketentuan	Persen	100.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai LKIP BKAD	Nilai	76.70	0.00	0.00	Sangat Rendah
BADAN PENDAPATAN DAERAH						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mendukung kemandirian fiskal daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Nilai	0.21	19.80	9,428.57	Sangat Tinggi
Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Rasio pajak daerah terhadap PAD	Persen	50.99	92.81	182.02	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Poin	71.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Nilai Sakip Pemda	poin	68.50	70.45	97.23	Sangat Tinggi
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						-
Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Implementasi Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Poin	315.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Poin	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP BKPSDM	Poin	73.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
INSPEKTORAT						-
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP	Level	3.02	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya persentase tindak lanjut temuan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Penemuan	Persen	60.00	10.00	16.67	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya nilai kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3.01	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Nilai SAKIP	Skor	70.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	Skor	75.00	77.00	102.67	Sangat Tinggi
KECAMATAN WALED						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Ketertiban Umum	Persen	65.00	7.84	12.06	Sangat Rendah
Meningkatnya status kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa membangun (IDM) (skala 100)	Poin	0.76	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pemerintahan Desa dan Koordinasi ketertiban umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	34.00	34.00	100.00	Sangat Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	69.50	25.70	36.98	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Waled	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75.00	78.45	104.60	Sangat Tinggi
KECAMATAN CILEDUG						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Skala 100	Point	0.82	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh Kecamatan	Persen	85.00	16.00	18.82	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDes dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	30.00	10.00	33.33	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ciledug	Nilai LKIP Kecamatan	Nilai	75.00	69.60	92.80	Sangat Tinggi
KECAMATAN LOSARI						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.74	0.20	27.03	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	80.00	15.78	19.73	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	35.00	6.00	17.14	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Point	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Losari	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75.00	20.00	26.67	Sangat Rendah
KECAMATAN PABEDILAN						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	95.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Persen	0.67	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh Kecamatan	Persen	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nihil	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pabedilan	Nilai Lakip Kecamatan	Nilai	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN BABAKAN						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	85.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Persen	0.74	0.19	25.68	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	85.00	11.81	13.89	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	85.00	0.49	0.58	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Point	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Babakan	Nilai LAKIP Kecamatan	Persen	60.00	17.06	28.43	Sangat Rendah
KECAMATAN GEBANG						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	87.50	20.00	22.86	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.74	0.00	0.00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	85.00	20.00	23.53	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	35.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	20.00	29.20	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gebang	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	60.00	20.00	33.33	Sangat Rendah
KECAMATAN KARANGSEMBUNG						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Poin	0.74	0.20	27.03	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	84.00	25.00	29.76	Sangat Rendah
	(Persentase) Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	75.00	25.00	33.33	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Sakip Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangsembung	Nilai LKIP Kecamatan	Persen	82.00	15.00	18.29	Sangat Rendah
KECAMATAN LEMAHABANG						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0.76	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Presentase Jumlah Pelanggar Perda Yang ditangani/ Dikordinasikan Oleh Kecamatan	Persen	65.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	20.00	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lemahabang	Nilai LKIP Kecamatan	Point	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN SUSUKANLEBAK						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Point	3.50	1.00	28.57	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Poin	0.80	0.25	31.25	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	80.50	20.00	24.84	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	39.00	25.00	64.10	Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Persen	68.50	20.00	29.20	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Susukan Lebak	LKIP Kecamatan	Persen	84.50	25.00	29.59	Sangat Rendah
KECAMATAN SEDONG						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0.79	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	35.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sedong	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75.00	25.94	34.59	Sangat Rendah
KECAMATAN ASTANAJAPURA						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.74	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	40.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Astanajapura	Nilai LAKIP Kecamatan	Poin	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN PANGENAN						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	95.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuaan dan Kemandirian Desa	Nilai IDM	poin	0.76	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Presentase Jumlah Pelanggar Perda Yang ditangani/ Dikordinasikan Oleh Kecamatan	Persen	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Presentase Jumlah Desa Yang penetapan Perdes Tentang RKPDes dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	20.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Sakip Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangenan	Nilai Lakip Kecamatan	Point	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN MUNDU						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum.	IKM Daerah	point	79.00	12.00	15.19	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (skala 100)	point	0.73	0.30	41.10	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Prosentase jumlah pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh Kecamatan	Persen	75.00	20.00	26.67	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang penetapan Perdes tentang RKPDes dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	26.00	10.00	38.46	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	68.50	55.00	80.29	Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mundu	Nilai LKIP Kecamatan	Persen	66.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN BEBER						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Poin	0.85	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	35.00	20.00	57.14	Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Beber	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75.00	20.19	26.92	Sangat Rendah
KECAMATAN TALUN						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Prosen	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0.66	0.06	9.39	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Prosen	55.00	3.87	7.03	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	55.00	3.87	7.03	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Talun	Nilai Lakip Kecamatan	Nilai	73.00	16.92	23.18	Sangat Rendah
KECAMATAN SUMBER						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	IKM Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0.73	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	85.00	5.00	5.88	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	85.00	5.00	5.88	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumber	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	74.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN DUKUPUNTANG						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0.76	0.67	88.16	Tinggi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	75.00	75.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	30.00	30.00	100.00	Sangat Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Sakip Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dukupuntang	Nilai Lakip Kecamatan	Nilai	66.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN PALIMANAN						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Point	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.83	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	71.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16.66	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Palimanan	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN PLUMBON						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Poin	87.81	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0.76	0.15	19.74	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	persen	75.00	15.00	20.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	40.00	20.00	50.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Plumbon	Nilai LAKIP Kecamatan	Point	75.00	20.00	26.67	Sangat Rendah
KECAMATAN DEPOK						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.77	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	71.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16.66	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	61.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN WERU						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Nilai	0.81	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	84.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	84.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Weru	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	83.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN KEDAWUNG						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.74	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	72.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	60.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedawung	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	60.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN GUNUNGJATI						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Nilai	87.50	0.00	0.00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	IDM Kecamatan Gunung Jati	Persen	0.81	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh Kecamatan	Persen	70.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	30.00	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gunung Jati	Nilai LAKIP Kecamatan	Nihil	70.40	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN KAPETAKAN						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indek kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya status Kemajuan dan kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0.83	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh Kecamatan	Persen	75.00	12.36	16.48	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	75.00	12.36	16.48	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapetakan	Nilai LAKIP Kecamatan	Poin	75.00	12.36	16.48	Sangat Rendah
KECAMATAN KLANGENAN						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan	Poin	0.84	0.65	77.38	Tinggi



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Prosen	78.00	80.00	102.56	Sangat Tinggi
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Prosen	44.44	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Klangeran	Nilai LAKIP Kecamatan	nilai	68.00	4.00	5.88	Sangat Rendah
KECAMATAN ARJAWINANGUN						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	87.50	20.05	22.91	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Persen	84.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	69.00	6.90	10.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	85.00	8.50	10.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	nilai	68.50	23.25	33.94	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arjawinangun	Nilai LAKIP Kecamatan	Persen	5.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN PANGURAGAN						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Persen	0.82	0.10	12.20	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	80.00	15.00	18.75	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	80.00	15.00	18.75	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Panguragan	Nilai LAKIP Kecamatan	Poin	83.00	41.00	49.40	Sangat Rendah
KECAMATAN CIWARINGIN						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.88	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh Kecamatan	Persen	72.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	37.50	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	62.00	68.90	111.13	Sangat Tinggi
KECAMATAN SUSUKAN						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	87.50	87.50	100.00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan	Persen	70.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	50.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	68.50	100.00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	5.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN GEGESIK						-
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Persen	0.67	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	75.00	18.75	25.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	75.00	18.75	25.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas tata kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	4.00	1.00	25.00	Sangat Rendah
KECAMATAN KALIWEDI						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan	Persen	81.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh Kecamatan	Persen	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	50.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kaliwedi	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	5.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN KARANGWARENG						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Poin	81.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Persen	0.74	1.24	167.57	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	85.00	14.16	16.66	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	85.00	14.16	16.66	Sangat Rendah
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan	Sakip pemda	Point	75.00	6.25	8.33	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karang Wareng	Nilai LAKIP Kecamatan	Poin	68.00	11.34	16.68	Sangat Rendah
KECAMATAN TENGAH TANI						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.79	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	73.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	35.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tengah Tani	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN GEMPOL						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.74	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	60.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Gempol	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	60.00	58.15	96.92	Sangat Tinggi
KECAMATAN PASALEMAN						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.73	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan Koordinasi ketertiban umum	Persentase jumlah desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	35.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	85.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pasaleman	Nilai LKIP Kecamatan	Nilai	83.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN PLERED						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.83	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	72.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	20.00	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Plered	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	61.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN PABUARAN						-
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	IKM Daerah	Point	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Point	0.83	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	73.00	73.00	100.00	Sangat Tinggi
	Persentase jumlah desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	25.00	25.00	100.00	Sangat Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Sakip Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pabuaran	Nilai LAKIP Kecamatan	Point	68.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN GREGED						-
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Ketertiban Umum	IKM Daerah	Persen	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangunan (IDM) (Skala 100)	Poin	0.85	0.00	0.00	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah pelanggaran perda yang ditangani atau dikordiansikan oleh kecamatan	Persen	80.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
	Persentase jumlah desa yang penetapan perdes tentang RKPDes dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	35.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Greded	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	75.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
KECAMATAN JAMBLANG						-
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	IKM Daerah	Poin	87.50	12.00	13.71	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0.80	0.30	37.50	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	65.00	10.00	15.38	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	25.00	10.00	40.00	Sangat Rendah
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	68.50	15.00	21.90	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jamblang	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	63.00	13.00	20.63	Sangat Rendah
KECAMATAN SURANENGGA						-



PERANGKAT DAERAH / TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	RASIO	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Poin	87.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)(Skala 100)	Persen	0.75	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	70.00	13.25	18.93	Sangat Rendah
	Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	30.00	9.52	31.73	Sangat Rendah
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suranenggala	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	72.00	15.00	20.83	Sangat Rendah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						-
Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Prosentase Masyarakat yang menerapkan hasil Pembinaan Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Persen	84.84	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Prosentase Masyarakat yang menerapkan hasil Pembinaan Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Persen	84.84	16.37	19.29	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Persen	68.50	0.00	0.00	Sangat Rendah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon	LAKIP Badan Kesbangpol	Nilai	74.50	17.86	23.97	Sangat Rendah

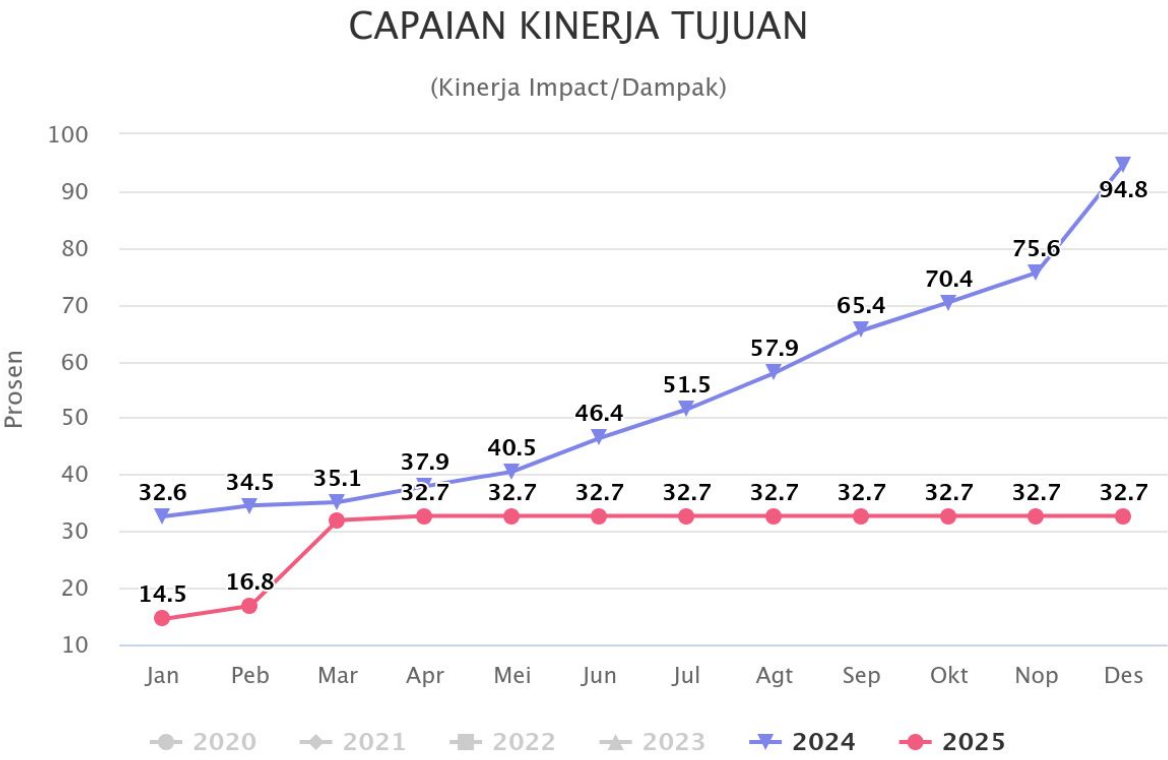
Sumber : olahan data aplikasi SIMONEK Sampai Triwulan I Tahun 2025



Berdasarkan tabel 2.2 di atas dan hasil olahan rata-rata capaian realisasi dan Target Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Grafik 2.1 dan Grafik 2.2), menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat pemerintahan daerah pada periode tersebut berturut-turut sebesar 32,7% dan 33,6%. Rendahnya kinerja tujuan dan sasaran disebabkan rata-rata target pencapaiannya ditetapkan masuk pada Triwulan III atau IV sehingga masih terlihat masih rendah. Capaian kinerja tujuan dan sasaran secara umum masih rendah dikarenakan berhubungan langsung capaian kinerja anggaran dan sub kegiatan yang masih rendah (Tabel 2.3).

Perlu upaya percepatan terkait masih rendahnya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RKPD di Triwulan I Tahun 2025 tersebut dengan melakukan langkah-langkah strategis dan sinergitas antar sektor sehingga diharapkan diakhir tahun 2025 target-target capaian tujuan dan sasaran RKPD dapat tercapai.

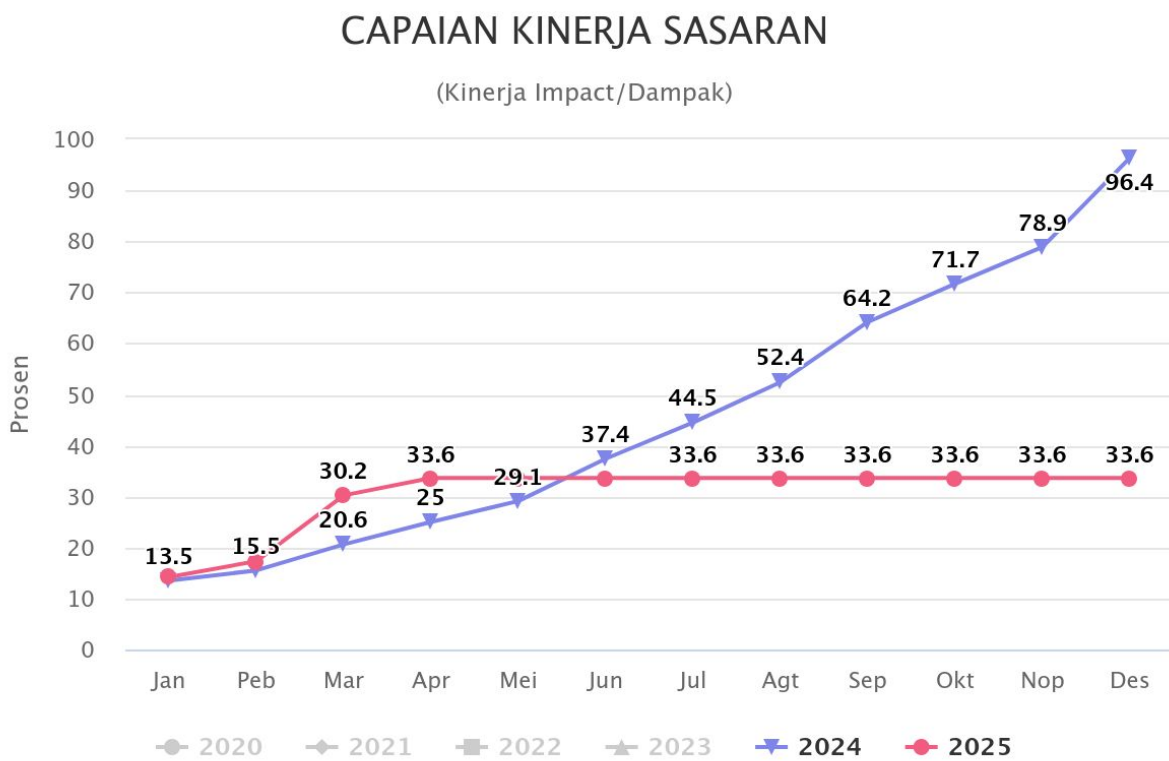
Gambar 2.1
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan I Tahun 2025



Sumber : olahan data aplikasi SIMONEK Tahun 2024 Sampai Triwulan II Tahun 2025



Gambar 2.2 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan I Tahun 2025



Sumber : olahan data aplikasi SIMONEK Tahun 2024 Sampai Triwulan II Tahun 2025

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Program Dan Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Program dan Kegiatan merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program dan Kegiatan dalam setiap periode pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat program sampai tingkat sub kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Kinerja program dan kegiatan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program dan kegiatan untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan akhir Triwulan I serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai (Tabel 2.1), dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Tabel 2. 3 Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS PENDIDIKAN	4	15	150	1,574,305,115,019.00	223,390,501,145.00	14.19	Sangat Rendah	89.20	Tinggi	0.00	Sangat Rendah	1.10	Sangat Rendah
DINAS KESEHATAN	5	24	109	925,381,485,731.00	155,334,075,998.00	16.79	Sangat Rendah	70.75	Sedang	0.00	Sangat Rendah	1.80	Sangat Rendah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	11	24	73	310,571,743,237.00	14,677,573,165.00	4.73	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	5.47	Sangat Rendah	7.08	Sangat Rendah
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9	20	51	22,432,922,600.00	2,377,565,552.00	10.60	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	18.96	Sangat Rendah
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	9	35	16,288,768,700.00	3,474,737,995.00	21.33	Sangat Rendah	8.33	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	6.41	Sangat Rendah
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	11	39	21,513,929,090.00	3,607,889,003.00	16.77	Sangat Rendah	41.67	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	17.42	Sangat Rendah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	12	59	14,290,320,950.00	1,307,924,321.00	9.15	Sangat Rendah	24.99	Sangat Rendah	20.08	Sangat Rendah	8.00	Sangat Rendah
DINAS SOSIAL	6	16	55	15,593,979,634.00	2,508,902,604.00	16.09	Sangat Rendah	24.28	Sangat Rendah	20.78	Sangat Rendah	17.87	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	20	55	48,624,960,540.00	7,240,714,253.00	14.89	Sangat Rendah	11.55	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	12.31	Sangat Rendah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	17	42	14,829,015,796.00	1,714,300,041.00	11.56	Sangat Rendah	86.52	Tinggi	0.10	Sangat Rendah	3.88	Sangat Rendah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	12	70	16,421,457,462.00	3,185,725,265.00	19.40	Sangat Rendah	0.83	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	6.79	Sangat Rendah
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	30	95	23,967,186,000.00	5,028,434,976.00	20.98	Sangat Rendah	60.15	Rendah	12.93	Sangat Rendah	13.49	Sangat Rendah
DINAS PERHUBUNGAN	2	23	112	74,223,975,760.00	12,394,489,059.00	16.70	Sangat Rendah	6.23	Sangat Rendah	8.97	Sangat Rendah	5.80	Sangat Rendah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	13	55	16,084,475,448.00	3,185,197,262.00	19.80	Sangat Rendah	38.61	Sangat Rendah	15.38	Sangat Rendah	14.11	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	16	61	6,366,018,326.00	799,069,123.00	12.55	Sangat Rendah	12.93	Sangat Rendah	3.00	Sangat Rendah	6.01	Sangat Rendah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	14	44	8,875,282,318.00	1,854,847,310.00	20.90	Sangat Rendah	29.99	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	8.33	Sangat Rendah
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	15	49	20,770,228,600.00	2,981,970,392.00	14.36	Sangat Rendah	24.43	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	15.08	Sangat Rendah
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9	22	60	13,344,675,618.00	1,566,155,748.00	11.74	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	19.24	Sangat Rendah
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5	17	45	14,110,756,718.00	3,417,709,093.00	24.22	Sangat Rendah	1.43	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	2.52	Sangat Rendah
DINAS KETENAGAKERJAAN	6	20	49	19,326,719,760.00	2,436,262,236.00	12.61	Sangat Rendah	18.09	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	17.15	Sangat Rendah
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	9	25	82	15,573,971,910.00	2,380,146,994.00	15.28	Sangat Rendah	13.95	Sangat Rendah	1.06	Sangat Rendah	7.66	Sangat Rendah
DINAS PERTANIAN	5	16	50	57,753,323,452.00	9,589,285,714.00	16.60	Sangat Rendah	22.86	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	14.68	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10	21	54	24,184,088,748.00	3,428,485,833.00	14.18	Sangat Rendah	14.28	Sangat Rendah	12.93	Sangat Rendah	14.33	Sangat Rendah
SEKRETARIAT DAERAH	3	19	71	107,202,572,023.00	24,133,989,289.00	22.51	Sangat Rendah	70.50	Sedang	0.00	Sangat Rendah	22.06	Sangat Rendah
SEKRETARIAT DPRD	2	16	51	99,509,528,900.00	21,598,224,349.00	21.70	Sangat Rendah	22.94	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	25.71	Sangat Rendah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	16	63	17,395,656,664.00	2,585,436,758.00	14.86	Sangat Rendah	9.28	Sangat Rendah	3.60	Sangat Rendah	26.39	Sangat Rendah
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	12	75	974,170,218,472.00	37,414,440,230.00	3.84	Sangat Rendah	9.49	Sangat Rendah	26.60	Sangat Rendah	15.78	Sangat Rendah
BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	9	49	37,049,377,270.00	6,148,365,317.00	16.60	Sangat Rendah	50.00	Sangat Rendah	4.56	Sangat Rendah	12.10	Sangat Rendah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	14	68	29,254,653,640.00	4,411,507,870.00	15.08	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	9.60	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
INSPEKTORAT	3	12	45	41,485,730,000.00	8,310,471,773.00	20.03	Sangat Rendah	41.67	Sangat Rendah	30.01	Sangat Rendah	30.81	Sangat Rendah
KECAMATAN WALED	6	16	43	2,749,105,500.00	614,368,164.00	22.35	Sangat Rendah	31.61	Sangat Rendah	24.90	Sangat Rendah	22.25	Sangat Rendah
KECAMATAN CILEDUG	6	16	43	2,931,191,420.00	624,219,769.00	21.30	Sangat Rendah	7.93	Sangat Rendah	2.98	Sangat Rendah	29.65	Sangat Rendah
KECAMATAN LOSARI	6	16	40	2,506,400,200.00	635,551,840.00	25.36	Sangat Rendah	25.36	Sangat Rendah	39.73	Sangat Rendah	23.92	Sangat Rendah
KECAMATAN PABEDILAN	6	16	42	3,000,026,900.00	645,115,262.00	21.50	Sangat Rendah	8.84	Sangat Rendah	20.42	Sangat Rendah	10.58	Sangat Rendah
KECAMATAN BABAKAN	6	16	40	2,665,509,400.00	580,294,041.00	21.77	Sangat Rendah	19.55	Sangat Rendah	15.92	Sangat Rendah	16.21	Sangat Rendah
KECAMATAN GEBANG	6	16	40	2,730,848,560.00	647,595,718.00	23.71	Sangat Rendah	24.39	Sangat Rendah	20.54	Sangat Rendah	17.79	Sangat Rendah
KECAMATAN KARANGSEMBUNG	6	16	41	2,436,436,500.00	502,380,239.00	20.62	Sangat Rendah	25.00	Sangat Rendah	15.04	Sangat Rendah	11.09	Sangat Rendah
KECAMATAN LEMAHABANG	6	16	45	2,651,608,200.00	549,076,683.00	20.71	Sangat Rendah	19.75	Sangat Rendah	40.48	Sangat Rendah	18.44	Sangat Rendah
KECAMATAN SUSUKANLEBAK	6	16	40	2,591,200,300.00	553,885,858.00	21.38	Sangat Rendah	16.15	Sangat Rendah	24.85	Sangat Rendah	16.96	Sangat Rendah
KECAMATAN SEDONG	6	16	42	2,732,060,300.00	626,878,586.00	22.95	Sangat Rendah	29.23	Sangat Rendah	45.24	Sangat Rendah	18.93	Sangat Rendah
KECAMATAN ASTANAJAPURA	6	16	43	2,764,440,700.00	567,531,027.00	20.53	Sangat Rendah	18.04	Sangat Rendah	37.20	Sangat Rendah	12.05	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN PANGENAN	6	16	41	2,424,424,900.00	514,881,659.00	21.24	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	9.67	Sangat Rendah	7.93	Sangat Rendah
KECAMATAN MUNDU	6	16	42	2,667,101,200.00	534,544,966.00	20.04	Sangat Rendah	40.24	Sangat Rendah	16.89	Sangat Rendah	12.70	Sangat Rendah
KECAMATAN BEBER	6	16	42	2,723,506,400.00	647,859,328.00	23.79	Sangat Rendah	32.52	Sangat Rendah	43.68	Sangat Rendah	19.40	Sangat Rendah
KECAMATAN TALUN	6	16	40	2,620,486,000.00	545,064,914.00	20.80	Sangat Rendah	18.92	Sangat Rendah	4.54	Sangat Rendah	9.49	Sangat Rendah
KECAMATAN SUMBER	6	18	57	26,040,175,270.00	3,882,084,613.00	14.91	Sangat Rendah	7.50	Sangat Rendah	4.91	Sangat Rendah	8.00	Sangat Rendah
KECAMATAN DUKUPUNTANG	6	16	42	2,413,614,120.00	601,214,812.00	24.91	Sangat Rendah	12.88	Sangat Rendah	47.73	Sangat Rendah	26.79	Sangat Rendah
KECAMATAN PALIMANAN	6	16	42	2,428,185,700.00	579,226,366.00	23.85	Sangat Rendah	27.16	Sangat Rendah	18.01	Sangat Rendah	11.90	Sangat Rendah
KECAMATAN PLUMBON	6	16	41	2,487,715,920.00	610,899,970.00	24.56	Sangat Rendah	27.48	Sangat Rendah	13.02	Sangat Rendah	18.08	Sangat Rendah
KECAMATAN DEPOK	6	16	42	2,472,107,000.00	539,623,302.00	21.83	Sangat Rendah	20.71	Sangat Rendah	18.30	Sangat Rendah	13.29	Sangat Rendah
KECAMATAN WERU	6	16	40	2,407,102,200.00	597,080,222.00	24.80	Sangat Rendah	20.61	Sangat Rendah	36.46	Sangat Rendah	10.24	Sangat Rendah
KECAMATAN KEDAWUNG	6	16	41	2,202,243,700.00	470,290,142.00	21.36	Sangat Rendah	8.58	Sangat Rendah	18.75	Sangat Rendah	6.30	Sangat Rendah
KECAMATAN GUNUNGJATI	6	16	41	2,594,650,600.00	589,113,225.00	22.70	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	36.98	Sangat Rendah	24.67	Sangat Rendah



PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN KAPETAKAN	6	16	44	2,177,581,500.00	499,992,622.00	22.96	Sangat Rendah	39.61	Sangat Rendah	32.14	Sangat Rendah	5.76	Sangat Rendah
KECAMATAN KLANGENAN	6	16	41	2,489,227,200.00	481,594,797.00	19.35	Sangat Rendah	31.06	Sangat Rendah	41.50	Sangat Rendah	11.71	Sangat Rendah
KECAMATAN ARJAWINANGUN	6	16	41	2,949,673,200.00	684,740,505.00	23.21	Sangat Rendah	31.76	Sangat Rendah	52.83	Rendah	21.27	Sangat Rendah
KECAMATAN PANGURAGAN	6	16	40	2,133,279,900.00	507,370,400.00	23.78	Sangat Rendah	18.95	Sangat Rendah	50.94	Rendah	30.79	Sangat Rendah
KECAMATAN CIWARINGIN	6	16	42	2,601,860,300.00	580,988,818.00	22.33	Sangat Rendah	11.67	Sangat Rendah	19.05	Sangat Rendah	14.67	Sangat Rendah
KECAMATAN SUSUKAN	6	16	41	2,745,665,900.00	628,665,848.00	22.90	Sangat Rendah	19.54	Sangat Rendah	68.75	Sedang	33.93	Sangat Rendah
KECAMATAN GEGESIK	6	16	45	3,246,934,200.00	665,040,294.00	20.48	Sangat Rendah	25.00	Sangat Rendah	16.61	Sangat Rendah	13.28	Sangat Rendah
KECAMATAN KALIWEDI	6	15	40	2,605,671,600.00	543,789,712.00	20.87	Sangat Rendah	20.32	Sangat Rendah	15.78	Sangat Rendah	15.16	Sangat Rendah
KECAMATAN KARANGWARENG	6	16	42	2,301,135,300.00	553,523,160.00	24.05	Sangat Rendah	20.82	Sangat Rendah	7.06	Sangat Rendah	10.79	Sangat Rendah
KECAMATAN TENGAH TANI	6	16	42	2,731,174,500.00	477,493,471.00	17.48	Sangat Rendah	14.64	Sangat Rendah	11.31	Sangat Rendah	7.38	Sangat Rendah
KECAMATAN GEMPOL	6	16	43	2,713,808,900.00	547,888,135.00	20.19	Sangat Rendah	18.89	Sangat Rendah	36.15	Sangat Rendah	19.22	Sangat Rendah
KECAMATAN PASALEMAN	6	16	42	2,815,195,800.00	662,643,197.00	23.54	Sangat Rendah	23.48	Sangat Rendah	46.50	Sangat Rendah	20.33	Sangat Rendah



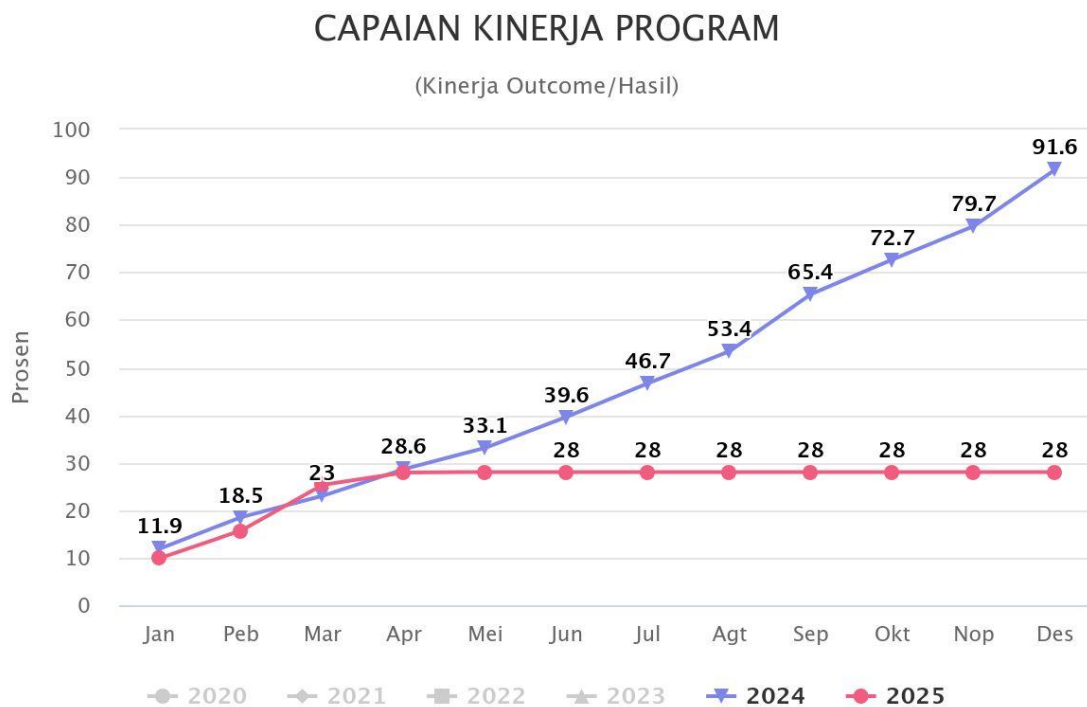
PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
	PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
								(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN PLERED	6	16	42	2,666,051,496.00	647,211,105.00	24.28	Sangat Rendah	24.03	Sangat Rendah	25.00	Sangat Rendah	10.12	Sangat Rendah
KECAMATAN PABUARAN	6	16	41	2,261,550,000.00	460,532,194.00	20.36	Sangat Rendah	14.60	Sangat Rendah	26.04	Sangat Rendah	9.11	Sangat Rendah
KECAMATAN GREGED	6	16	36	2,570,435,000.00	548,376,549.00	21.33	Sangat Rendah	14.86	Sangat Rendah	1.79	Sangat Rendah	5.97	Sangat Rendah
KECAMATAN JAMBLANG	6	17	42	2,486,730,300.00	583,050,310.00	23.45	Sangat Rendah	20.30	Sangat Rendah	17.40	Sangat Rendah	10.58	Sangat Rendah
KECAMATAN SURANENGGALA	6	16	42	2,947,499,200.00	606,012,298.00	20.56	Sangat Rendah	25.57	Sangat Rendah	36.35	Sangat Rendah	15.91	Sangat Rendah
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	82	20,051,619,700.00	3,951,675,778.00	19.71	Sangat Rendah	7.92	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah	6.76	Sangat Rendah
TOTAL	406	1165	3674	4,728,637,373,372.00	602,773,768,567.00	19.27	Sangat Rendah	22.96	Sangat Rendah	17.28	Sangat Rendah	14.25	Sangat Rendah

Sumber: Diolah Bappelitbangda melalui SIMONEK Sampai Triwulan I Tahun 2025



Secara umum, capaian kinerja program rata-rata Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 lebih rendah yaitu sebesar 28,0% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 28,6% (Selisih 0.6% YoY) dan secara umum masuk kategori rendah (Grafik 2.3).

Gambar 2.3 Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

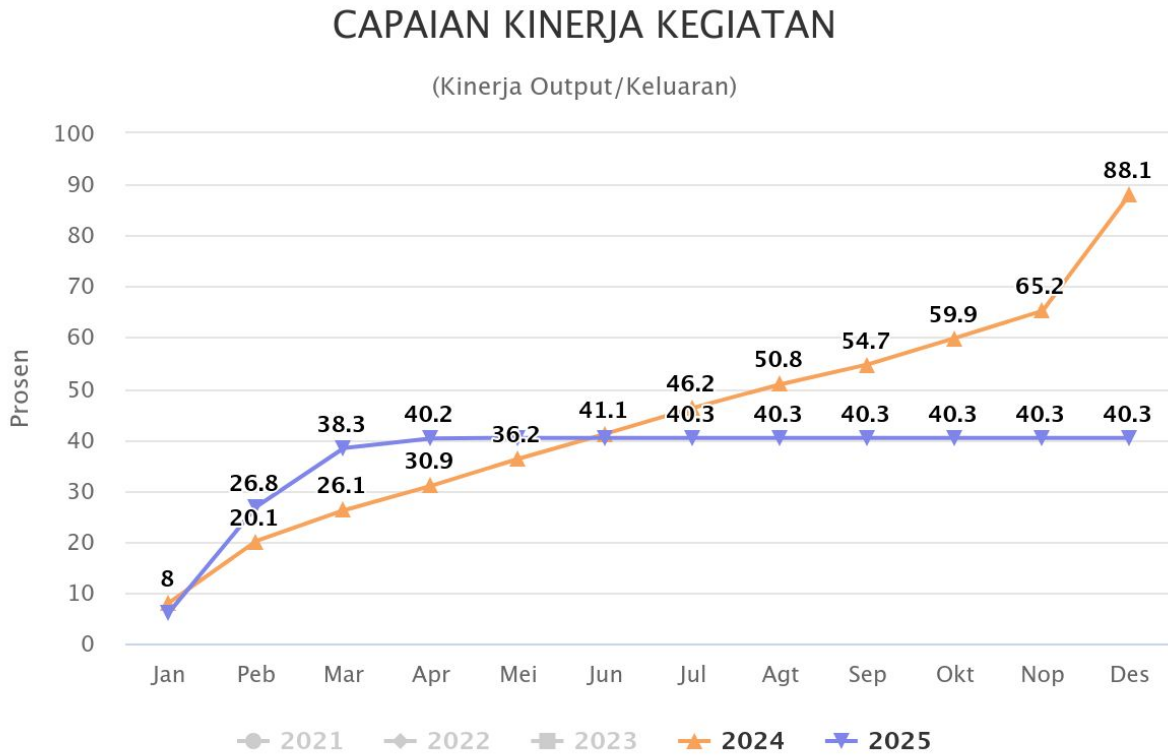


Sumber : olahan data aplikasi SIMONEK Sampai Triwulan I Tahun 2025

Untuk capaian kinerja kegiatan rata-rata Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 40,3% dan secara umum masuk kategori rendah dimana pencapaiannya dibawah 50% (Grafik 2.4).



Gambar 2.4 Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - Triwulan I Tahun 2025

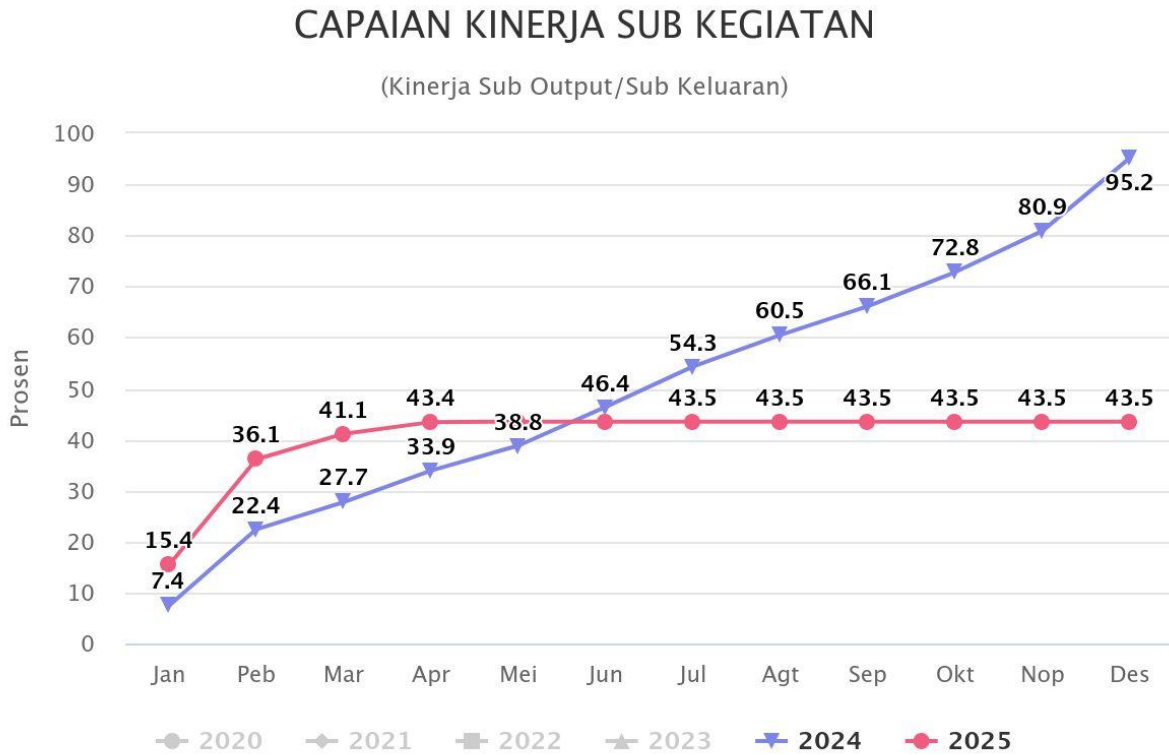


Sumber : olahan data aplikasi SIMONEK Sampai Triwulan II Tahun 2025

Untuk capaian kinerja sub kegiatan rata-rata Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 lebih rendah yaitu sebesar 43,5% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar 46,4% (Selisih 2,9%) dan secara umum masuk kategori rendah dimana pencapaiannya masih dibawah 50% (Grafik 2.5). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terlaksana, terutama disebabkan beberapa kendala baik menyangkut aspek teknis dan non teknis pada pelaksanaan pekerjaan. Hal ini juga berkaitan dengan efektif pelaksanaan kegiatan dan program per bulan Februari 2025 yang menyebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran dan berujung pada ketercapaian kinerja yang masih kurang sesuai dengan target perencanaan yang telah ditentukan. Selain itu, adanya peraturan baru tentang pengadaan barang dan jasa serta beberapa kegiatan masih dalam proses lelang turut andil dalam masih kurangnya capaian kinerja dan anggaran tersebut secara umum.



Gambar 2.5 Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - Triwulan I Tahun 2025



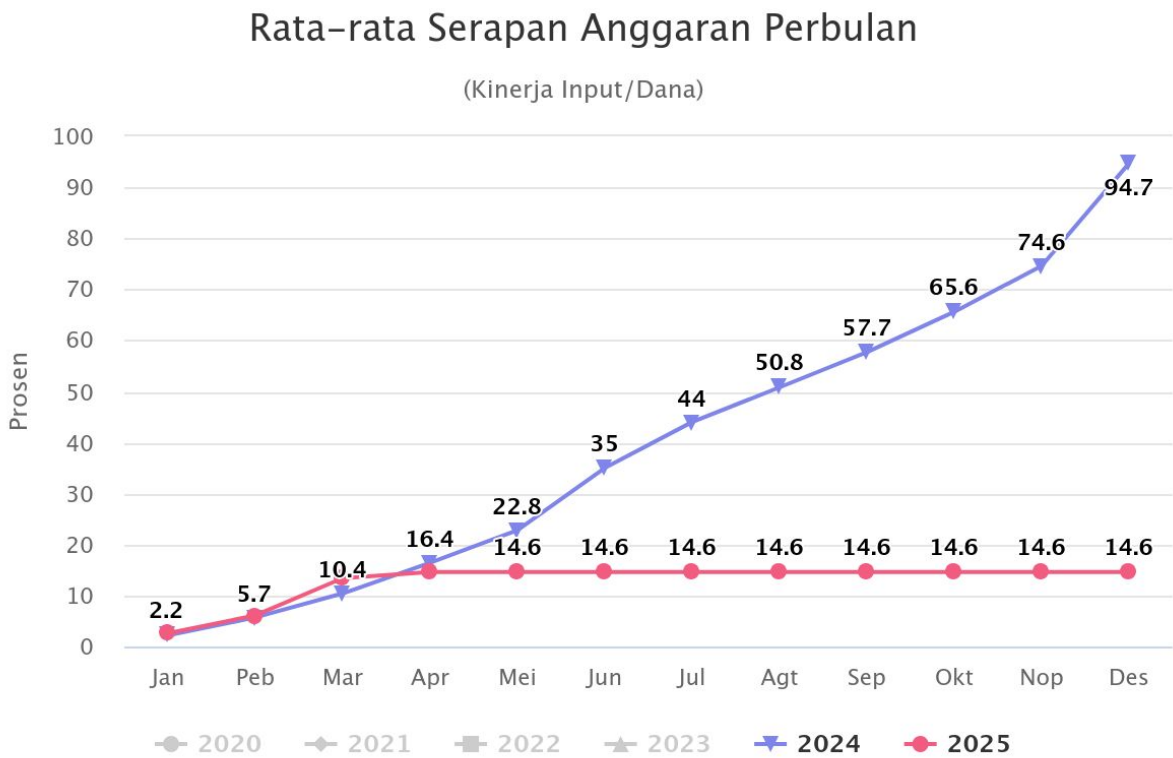
Sumber : olahan data aplikasi SIMONEK Sampai Triwulan I Tahun 2025

Untuk capaian realisasi anggaran rata-rata Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 masih dalam kategori rendah sebesar 14,6% lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun 2024 sebesar 16,4% (Grafik 2.6). Secara umum capaian kinerja dan anggaran di Triwulan I tahun 2025 masih rendah di bawah 50%. Hal ini disebabkan beberapa kendala baik menyangkut aspek teknis dan non teknis pada pelaksanaan pekerjaan. Hal ini juga berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program terkait dengan kegiatan fisik (kontraktual) yang capaiannya masih rendah yang menyebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran dan berujung pada ketercapaian kinerja yang masih kurang sesuai dengan target perencanaan yang telah ditentukan.

Oleh karenanya beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian dalam hal penjadwalan ulang/*rescheduling* rencana pelaksanaan kegiatan, target kinerja, sasaran dengan mengacu pada kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah.



Gambar 2.6 Rata-Rata Capaian Serapan Anggaran Perangkat Daerah



Sumber : olahan data aplikasi SIMONEK Sampai Triwulan I Tahun 2025

2.1.3 Evaluasi Capaian RPD Tahun 2025-2026

Pada RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, terdapat indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Berikut disajikan realisasi capaian tujuan dan sasaran daerah pada tahun 2024 data awal sampai dengan realisasi tahun 2025 serta target pada tahun 2025 dan 2026.



Tabel 2.4 Realisasi dan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2025-2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target RKPD Tahun 2025	CAPAIAN (%)	TARGET P-RKPD 2025
Tujuan 1 : <i>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Perhitungan BPS	Persen	5.83	5.3	110.00	5.83
Sasaran 1 : <i>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan</i>	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikananf	(PDRB sektorSektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n - PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1)/PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 * 100	Persen	0.12	4.63	2.59	4.63
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan	(PDRB sektor industri pengolahan tahun n - PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1)/PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1 * 100	Persen	5.87	5.43	108.10	5.87



Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target RKPD Tahun 2025	CAPAIAN (%)	TARGET P-RKPD 2025
	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$(\text{PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun } n - \text{PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun } n-1) / \text{PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun } n-1 \times 100$	Persen	2.54	2.66	95.49	2.66
	Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	$(\text{PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun } n - \text{PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun } n-1) / \text{PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun } n-1 \times 100$	Persen	2.2	8.88	24.77	8.88
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	Nilai PMTB	Milyar Rp	17,324.56	17418.38	99.46	17418.38
Sasaran 2 : <i>Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah</i>	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap	$(\text{Indeks Ruas Jalan dalam kondisi baik} \times 30 \%) + (\text{Indeks tanam} \times 20\%) + (\text{Indeks Pemenuhan SPM PU} \times 15 \%) + (\text{Indeks Pemenuhan Prasarana Perhubungan} \times 25\%) + (\text{Pemukiman tanpa kumuh} \times 10\%)$	Nilai	89.74	89.23	100.57	89.74
Sasaran 3 : <i>Meningkatnya Kualitas</i>	Indeks Desa Membangun (IDM)	$(\text{IKE} + \text{IKS} + \text{IKL}) / 3$	Nilai	0.796	0.81	98.27	0.81



Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target RKPD Tahun 2025	CAPAIAN (%)	TARGET P-RKPD 2025
Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	Nilai	54.44	62.74	86.77	62.74
	Indeks Risiko Bencana	Perhitungan dari BNPB	Persen	133.04	140.25	105.14	133.04
Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Perhitungan dari Badan Pangan Nasional	Nilai	82.77	82.6	100.21	82.77
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Perhitungan BPS	Poin	72.3	73.65	98.17	73.65
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Nilai	60	61.26	97.94	61.26



Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target RKPD Tahun 2025	CAPAIAN (%)	TARGET P-RKPD 2025
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perhitungan dari Perpustakaan Nasional	Nilai	57.56	54.2	106.20	57.56
Sasaran 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Perhitungan dari BPS	Usia	74.98	75.2	99.71	75.2
	Indeks Ketimpangan Gender	Perhitungan dari BPS	Nilai	0.393	0.4	101.75	0.393
Sasaran 7 : Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Angka Kemiskinan	Perhitungan BPS	Persen	11	10.5	95.24	10.5
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Perhitungan BPS	Persen	6.74	6.65	98.65	6.65
	PDRB Perkapita	Perhitungan BPS	Juta Rupiah	28.14	27.49	102.36	28.14
	Indeks Gini	Perhitungan BPS	nilai	0.374	0.33	86.67	0.33
Tujuan 3 : Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	perhitungan berdasarkan permenpanRB	Poin	80.76	69	117.04	80.76



Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target RKPD Tahun 2025	CAPAIAN (%)	TARGET P-RKPD 2025
Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai AKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	Nilai	66.2	68.5	96.64	68.5
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perhitungan dari BPK	Opini	4	4	100.00	4
	Maturitas SPIP	Perhitungan dari BPKP	Level	3.072	3	102.40	3.072
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Perhitungan Kemenkominfo	Nilai	3.61	3.25	111.08	3.61
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kualitas Kebijakan	Perhitungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Nilai	65	50	130.00	65
	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.45	87.5	97.66	87.5
	Indeks Profesionalisme ASN	Perhitungan dari aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	Nilai	81.1	76.5	106.01	81.1



Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target RKPD Tahun 2025	CAPAIAN (%)	TARGET P-RKPD 2025
	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Perhitungan Sistem Inovasi Daerah dari Kemendagri	Nilai	53.91	58	92.95	58
	Rasio Kamandirian Fiskal	$\text{Rasio Fiskal Daerah} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Nilai	0.17	0.21	79.81	0.21
Tujuan 4 :Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	Rata-Rata Pencapaian Indikator Sasaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	Nilai	67.34	60	112.23	67.34
Sasaran 10 : Meningkatkan Kondusifitas Daerah	Indeks Kondusifitas Wilayah (IKW)	IKW=(Rasio Penyelesaian Konflik Sosial + Rasio Penyelesaian Friksi/Gesekan Antar Umat Beragama + Rasio Pelanggaran Norma Agama, Sosial dan Adat)/3	Nilai	86.3	84.84	101.72	86.3
Sasaran 11 :Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Indeks Ketentrman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentrman dan Ketertiban Umum = (% pelanggaran perda yang ditangani + % Pelanggaran K3 yang terselesaikan + % Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Respon Time)/3*100	Nilai	52.19	53	98.47	53

Sumber: Data diolah dari Bappelitbangda-SIMONEK Tahun 2025
*) Target Tahun 2025 hasil penyesuaian dan kesepakatan Kab/Kota dengan Provinsi Jawa Barat



2.1.4 Capaian Kinerja Makro Pembangunan

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Cirebon salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator makro pembangunan. Adapun hasil capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Cirebon di Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.5 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (POIN)	70,42	70,92	71,59	71,81	72.06	72.30
2	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) (%)	4,61	4,09	4,84	4,85	5.08	5,83
3	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) (%)	10,70	8,11	10,30	7,65	7.15	6.74
4	KEMISKINAN (%)	11,04	12,01	10,94	11,20	10.84	11.00
5	INDEKS GINI (POIN)	0,334	0,355	0,332	0,361	0.339	0.374
6	PENDAPATAN PER KAPITA (JUTA RUPIAH)	24,95	24,47	26,78	25,97	28.74	28,14

Keterangan :
- Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024;
- BPS Tahun 2025

Dari Tabel 3.1 di atas, capaian indikator makro pembangunan secara umum sudah menunjukkan tren positif walaupun beberapa capaian indikatornya belum dipublikasikan dari BPS. Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang telah melampaui target selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2022-2024) sebesar 6,74%. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detil sebagai berikut:

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian kabupaten Cirebon menunjukkan hubungan yang memiliki keterkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Pada tahun 2018-2024, struktur perekonomian Cirebon didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Pendidikan. Secara serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 76,12 persen terhadap total PDRB Kabupaten Cirebon tahun 2024.



Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai angka sebesar 67.196,03 milyar rupiah. Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2018-2024 pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Sektor yang paling besar menyumbang terhadap pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tahun 2024 di Kabupaten Cirebon yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 13.771,00 milyar rupiah atau sebesar 20,49 persen. Sedangkan sektor yang paling kecil yaitu terdapat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 92,47 milyar rupiah atau sebesar 0,14 persen.

Sedangkan Pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai angka sebesar 39.418,27 milyar rupiah. Selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2018-2024 pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHK di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yaitu masing-masing tahun 2018 sebesar 5,02 persen; dan melambat di tahun 2019 sebesar 4,68 persen; serta di tahun 2020 berkontraksi sebesar -1,08 persen yang disebabkan terjadinya pandemi Covid-19. Kemudian di tahun 2021-2024 kembali mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,47 persen; 4,09 persen; 4,85 persen dan 5,83 persen. Sektor yang paling besar menyumbang terhadap pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHK pada tahun 2024 di kabupaten Cirebon yaitu terdapat pada sektor Industri Pengolahan sebesar 8.158,30 milyar rupiah atau sebesar 20,70 persen sedangkan sektor yang paling kecil yaitu terdapat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 41,89 milyar rupiah atau sebesar 0,11 persen.

Berikut di bawah ini merupakan data PDRB (produk Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) menurut lapangan usaha di kabupaten Cirebon tahun 2018-2024.



Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Miliar Rupiah), 2018-2024

No.	Sektor PDRB	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cirebon (Milyar Rupiah)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.211,82	7.592,36	7.893,61	7.952,74	8.822,41	9.161,96	9.917,57
B	Pertambangan dan Penggalian	532,94	520,61	526,24	587,31	609,10	624,99	710,38
C	Industri Pengolahan	9.538,76	10.072,01	10.186,65	10.811,65	11.665,49	12.452,54	13.771,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93,72	101,55	95,23	108,67	110,76	116,17	117,29
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	40,89	46,93	55,23	60,57	63,69	75,68	92,47
F	Konstruksi	5.264,54	5.632,73	5.413,44	5.955,52	6.328,78	6.551,08	7.051,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.067,68	7.578,65	7.175,42	7.735,18	8.047,95	8.333,98	8.774,19
H	Transportasi dan Pergudangan	3.751,42	4.163,19	4.110,76	4.256,39	4.992,66	6.257,44	7.631,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.556,48	1.711,14	1.567,29	1.600,25	1.841,55	2.078,30	2.191,56
J	Informasi dan Komunikasi	1.063,95	1.122,90	1.465,53	1.446,34	1.512,10	1.596,12	1.890,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.686,42	1.865,09	1.934,56	2.130,03	2.353,65	2.590,38	2.692,49
L	Real Estat	1.022,42	1.130,75	1.184,60	1.298,40	1.381,20	1.458,60	1.778,28
M.N	Jasa Perusahaan	362,65	444,92	415,16	451,74	516,88	586,82	595,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.396,80	1.502,24	1.491,69	1.610,24	1.552,18	1.667,37	1.755,76
P	Jasa Pendidikan	2.416,19	2.847,31	3.215,27	3.352,61	3.513,59	3.920,73	4.004,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	896,51	998,60	1.020,92	1.120,75	1.179,98	1.280,93	1.357,12
R.S.T.U	Jasa Lainnya	1.596,09	1.804,83	1.809,98	1.831,56	2.161,76	2.556,68	2.864,09
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		45.499,28	49.135,81	49.561,56	52.309,94	56.653,64	61.309,76	67.196,03

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025.



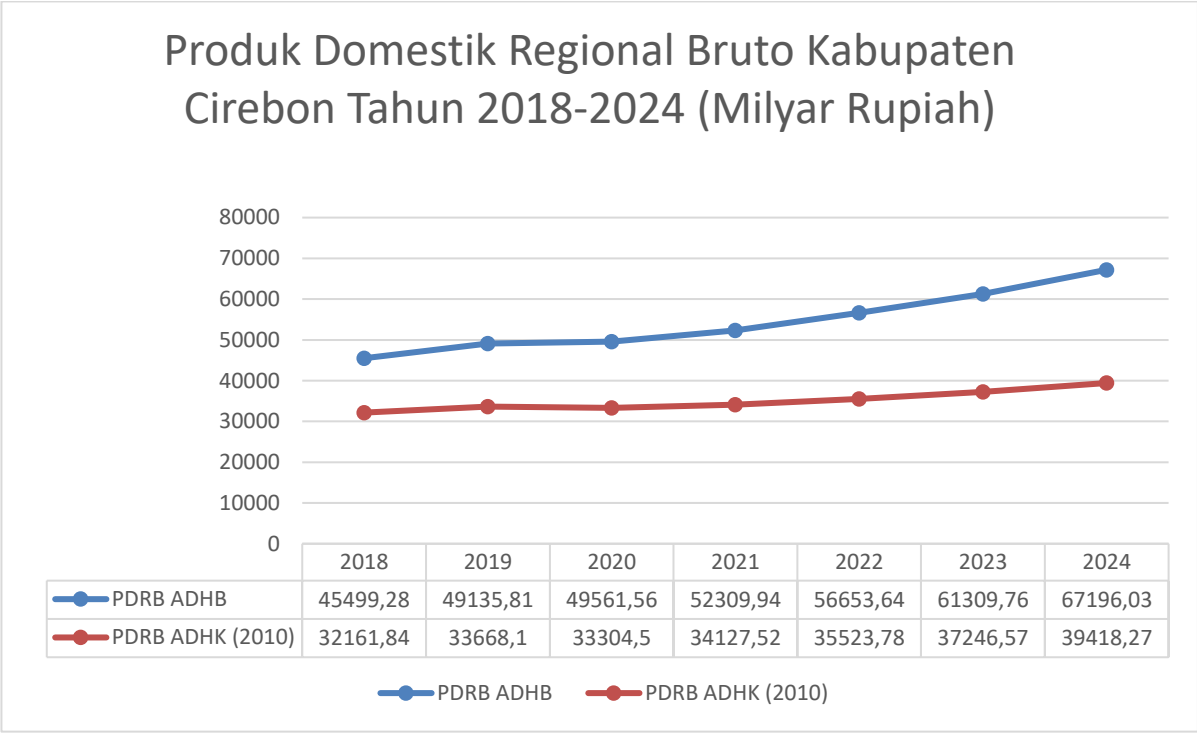
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Miliar Rupiah), Tahun 2018-2024

No.	Sektor PDRB	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kab. Cirebon (Milyar Rupiah)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.531,85	4.485,18	4.563,11	4.559,21	4.741,55	4.640,71	4.646,20
B	Pertambangan dan Penggalian	431,17	416,88	417,12	445,47	445,26	445,08	469,31
C	Industri Pengolahan	6.662,38	6.889,05	6.809,81	6.984,48	7.312,38	7.706,10	8.158,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	53,00	56,63	54,01	61,28	62,24	65,05	65,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,57	28,36	33,19	36,17	37,06	39,64	41,89
F	Konstruksi	3.936,18	4.046,87	3.869,18	4.018,35	4.017,01	4.015,83	4.200,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.011,42	5.242,93	4.874,19	5.036,25	5.151,91	5.256,04	5.389,80
H	Transportasi dan Pergudangan	2.446,49	2.674,48	2.574,72	2.585,90	2.834,17	3.312,59	3.806,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.160,83	1.224,37	1.107,58	1.095,73	1.179,80	1.269,89	1.297,80
J	Informasi dan Komunikasi	1.035,69	1.103,91	1.440,25	1.510,60	1.602,69	1.690,94	2.033,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.191,87	1.286,47	1.303,60	1.365,38	1.376,98	1.445,45	1.519,32
L	Real Estate	775,73	847,61	858,27	938,10	982,82	1.024,04	1.187,72
M.N	Jasa Perusahaan	294,35	321,66	288,51	311,93	343,00	373,06	373,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	870,71	903,40	862,30	854,35	834,58	896,17	979,15
P	Jasa Pendidikan	1.757,89	1.952,55	2.100,66	2.102,32	2.164,28	2.377,38	2.442,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	711,63	794,03	786,74	844,74	887,38	930,90	950,00
R.S.T.U.	Jasa lainnya	1.264,07	1.393,72	1.360,82	1.377,24	1.550,66	1.757,71	1.857,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		32.161,84	33.668,10	33.304,05	34.127,52	35.523,78	37.246,57	39.418,27

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025.



Gambar 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 (Milyar Rupiah)



Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon menurut Lapangan Usaha 2018-2024

Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam tujuh tahun terakhir, terlebih pada tahun 2024 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 67.196,03 milyar rupiah, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,11 persen.

Tabel 2.8
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (Persen), Tahun 2018-2024

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,85	15,45	15,93	15,20	15,57	14,94	14,76
B	Pertambangan dan Penggalian	1,17	1,06	1,06	1,12	1,08	1,02	1,06
C	Industri Pengolahan	20,96	20,50	20,55	20,67	20,59	20,31	20,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,21	0,19	0,21	0,20	0,19	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,11	0,12	0,11	0,12	0,14
F	Konstruksi	11,57	11,46	10,92	11,39	11,17	10,69	10,49



Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,53	15,42	14,48	14,79	14,21	13,59	13,06
H	Transportasi dan Pergudangan	8,25	8,47	8,29	8,14	8,81	10,21	11,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,42	3,48	3,16	3,06	3,25	3,39	3,26
J	Informasi dan Komunikasi	2,34	2,29	2,96	2,76	2,67	2,60	2,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,80	3,90	4,07	4,15	4,23	4,01
L	Real Estate	2,25	2,30	2,39	2,48	2,44	2,38	2,65
M, N	Jasa Perusahaan	0,80	0,91	0,84	0,86	0,91	0,96	0,89
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,07	3,06	3,01	3,08	2,74	2,72	2,61
P	Jasa Pendidikan	5,31	5,79	6,49	6,41	6,20	6,39	5,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,97	2,03	2,06	2,14	2,08	2,09	2,02
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,51	3,67	3,65	3,50	3,82	4,17	4,26
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2018 - 2024.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun menunjukkan perlambatan dan juga pertumbuhan, pada tahun 2018 mencapai 5,02 persen, dan pada tahun 2019 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 4,68 persen. Pada tahun 2020 Kabupaten Cirebon mengalami kontraksi yang mencapai -1,08 persen yang disebabkan oleh kejadian pandemi covid-19. Tahun 2021-2024, pertumbuhan ekonomi kembali positif yakni masing-masing sebesar 2,47 persen; 4,09 persen; 4,85 persen; dan 5,83 persen. Berikut merupakan tabel persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cirebon (persen), 2018-2024

No.	Sektor PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,37	-1,03	1,74	-0,09	4,00	-2,31	0,12
B	Pertambangan dan Penggalan	2,48	-3,32	0,06	6,80	-0,05	-0,04	5,44
C	Industri Pengolahan	5,33	3,40	-1,15	2,56	4,69	5,38	5,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,50	6,84	-4,62	13,46	1,56	4,52	0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	6,75	17,03	8,98	2,46	6,96	5,68
F	Konstruksi	6,98	2,81	-4,39	3,86	-0,03	-0,03	4,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	4,62	-7,03	3,32	2,30	2,02	2,54

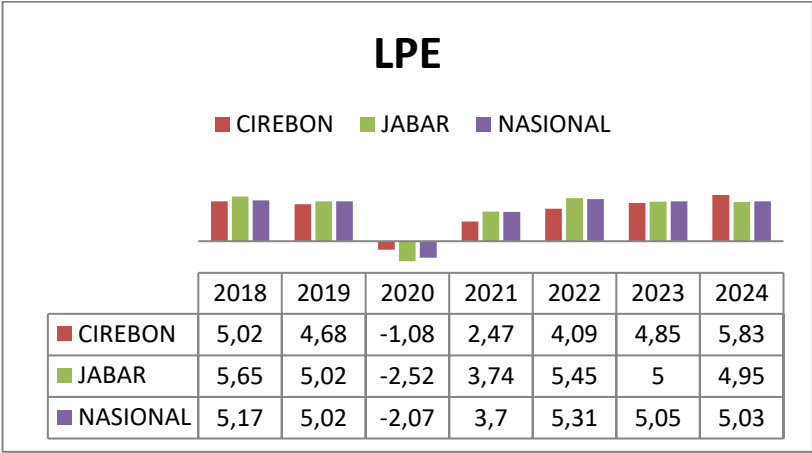


No.	Sektor PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	5,89	9,32	-3,73	0,43	9,60	16,88	14,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	5,47	-9,54	-1,07	7,67	7,64	2,20
J	Informasi dan Komunikasi	9,01	6,59	30,47	4,88	6,10	5,51	20,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,00	7,94	1,33	4,74	0,85	4,97	5,11
L	Real Estate	8,78	9,27	1,26	9,30	4,77	4,19	15,98
M. N	Jasa Perusahaan	8,57	9,28	-10,31	8,12	9,96	8,76	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	3,75	-4,55	-0,92	-2,31	7,38	9,26
P	Jasa Pendidikan	7,81	11,07	7,59	0,08	2,95	9,85	2,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	11,58	-0,92	7,37	5,05	4,90	2,05
R.S .T. U.	Jasa lainnya	4,84	10,26	-2,36	1,21	12,59	13,35	5,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,02	4,68	-1,08	2,47	4,09	4,85	5,83

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menurun signifikan dari tahun 2018 sampai 2019 hingga mencapai angka 4,68 persen pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2020 sampai terkontraksi diangka -1,08 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi gejala perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga perlu melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi menurun ini. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2018-2023 selalu berada dibawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Akan tetapi, di tahun 2024 LPE Kabupaten Cirebon di atas LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Hal tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kab. Cirebon Tahun 2018-2024



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025

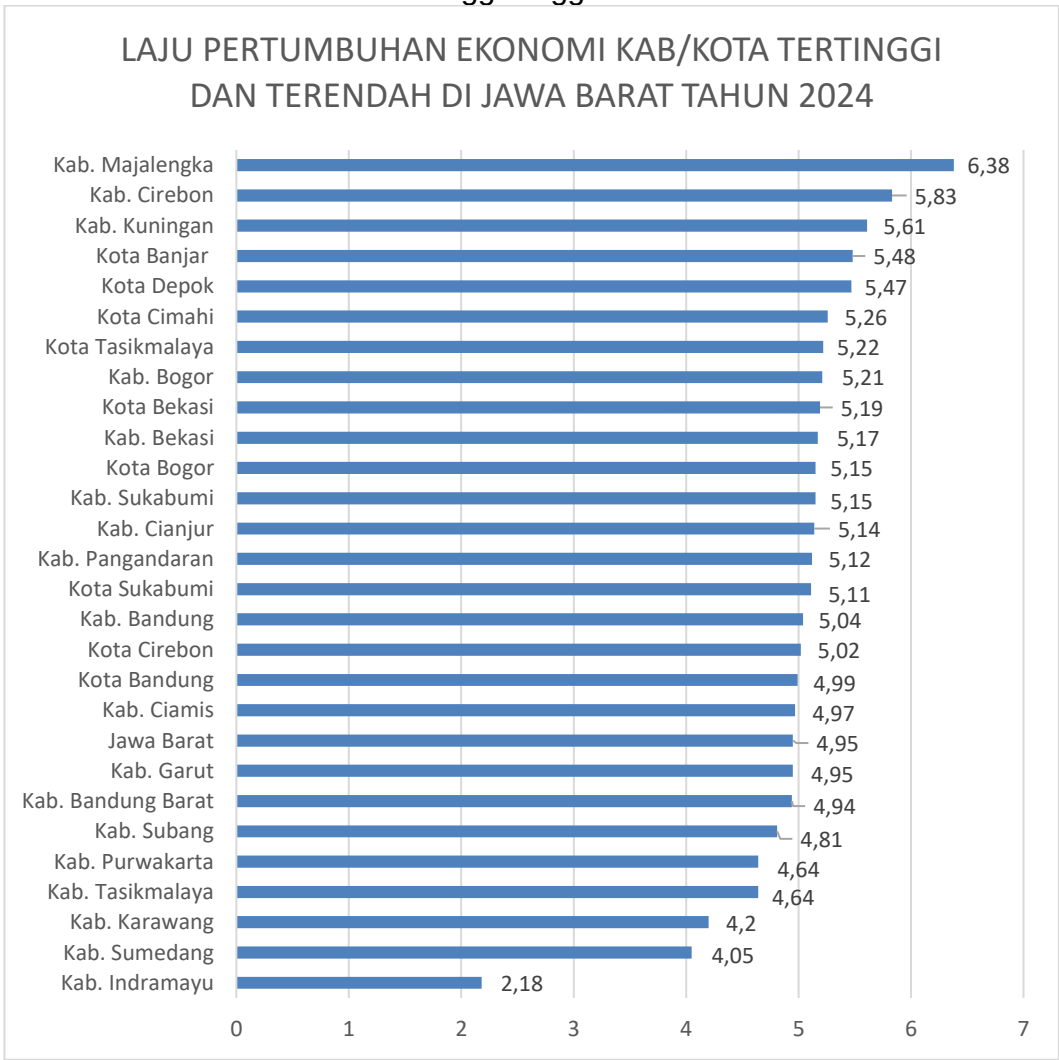


Tabel 2.10
Perbandingan LPE Kab./Kota di Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)

No.	Kabupaten/Kota	LPE	No.	Kabupaten/Kota	LPE
1.	Kab. Bogor	5,21	15.	Kab. Karawang	4,20
2.	Kab. Sukabumi	5,15	16.	Kab. Bekasi	5,17
3.	Kab. Cianjur	5,14	17.	Kab. Bandung Barat	4,94
4.	Kab. Bandung	5,04	18.	Kab. Pangandaran	5,12
5.	Kab. Garut	4,95	19.	Kota Bogor	5,15
6.	Kab. Tasikmalaya	4,64	20.	Kota Sukabumi	5,11
7.	Kab. Ciamis	4,97	21.	Kota Bandung	4,99
8.	Kab. Kuningan	5,61	22.	Kota Cirebon	5,02
9.	Kab. Cirebon	5,83	23.	Kota Bekasi	5,19
10.	Kab. Majalengka	6,38	24.	Kota Depok	5,47
11.	Kab. Sumedang	4,05	25.	Kota Cimahi	5,26
12.	Kab. Indramayu	2,18	26.	Kota Tasikmalaya	5,22
13.	Kab. Subang	4,81	27.	Kota Banjar	5,48
14.	Kab. Purwakarta	4,64		Jawa Barat	4,95

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)
dari Tertinggi hingga Terendah



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025



Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada pertumbuhan ekonomi positif. Ada 17 kabupaten/kota yang berada di atas angka Provinsi Jawa Barat yakni Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Pangandaran, Kota Sukabumi, Kab. Bandung, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kab. Ciamis. Sedangkan Kabupaten Cirebon berada pada posisi kedua tertinggi dari 27 kab/kota di Jawa Barat.

2.1.6 PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk yang menjadi komponen penghitungan pendapatan regional belum dapat dihitung maka yang disajikan adalah PDRB per Kapita.

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

PDRB per kapita:	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB (ribu)	Rp	20.908	22.506	21.869	22.730	24.301	25.974	28.140
ADHK (ribu)	Rp	14.779	15.421	14.696	14.829	15.237	15.779	16.507

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 PDRB Perkapita ADHB mencapai Rp. 20.908.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp. 28.140.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah). Akan tetapi,

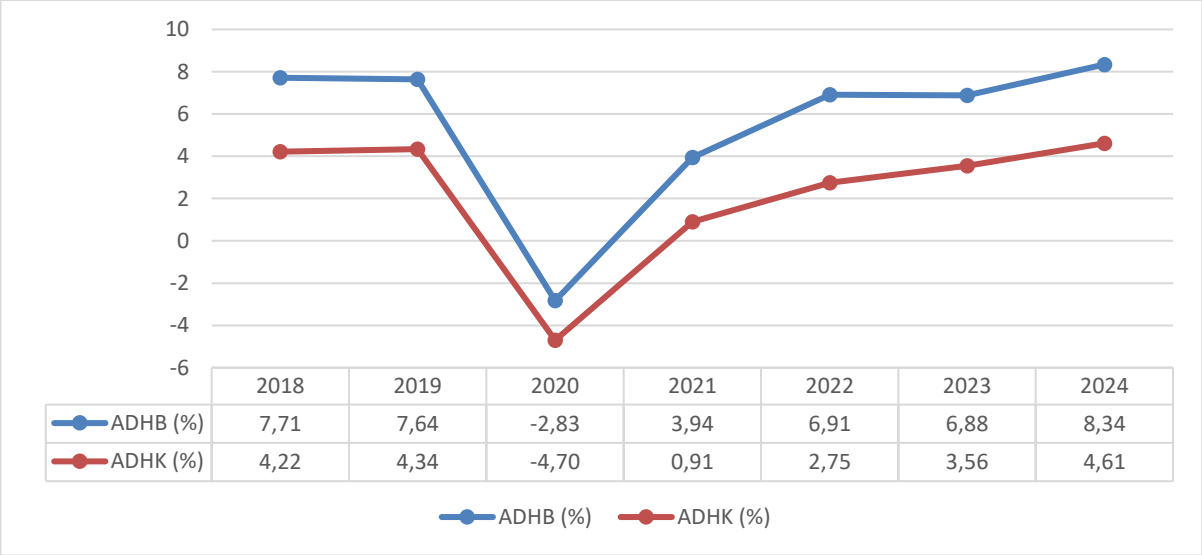


pada tahun 2020 mengalami penurunan dari sebesar Rp. 22.506.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) di tahun 2019 turun menjadi sebesar Rp. 21.869.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) di tahun 2020. Pada tahun 2021-2024 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 22.730.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 28.140.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) di tahun 2024.

Begitu pula dengan PDRB perkapita ADHK yang tiap tahun nya juga selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 angkanya mencapai Rp.16.507.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah) naik dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp.14.779.000,00.(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari pandemic Covid-19 dari Rp.15.421.000,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh satu ribu) di tahun 2019 menurun menjadi sebesar Rp.14.696.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) di tahun 2020. Kemudian tahun 2021-2024 kembali mengalami peningkatan yang menandakan bahwa perekonomian sudah beranjak pulih setelah sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat dari pandemic Covid-19.

Meski demikian, Laju PDRB Perkapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018-2024 terus mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhannya mencapai 4,22 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,34 persen. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yakni berkontraksi sebesar -4,70 persen. Kemudian di tahun 2021 mulai mengalami pemulihan perekonomian dengan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 0,91 persen dan terus meningkat hingga di tahun 2024 sebesar 4,61 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.10 Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 (Persen)



Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka 2025; BPS

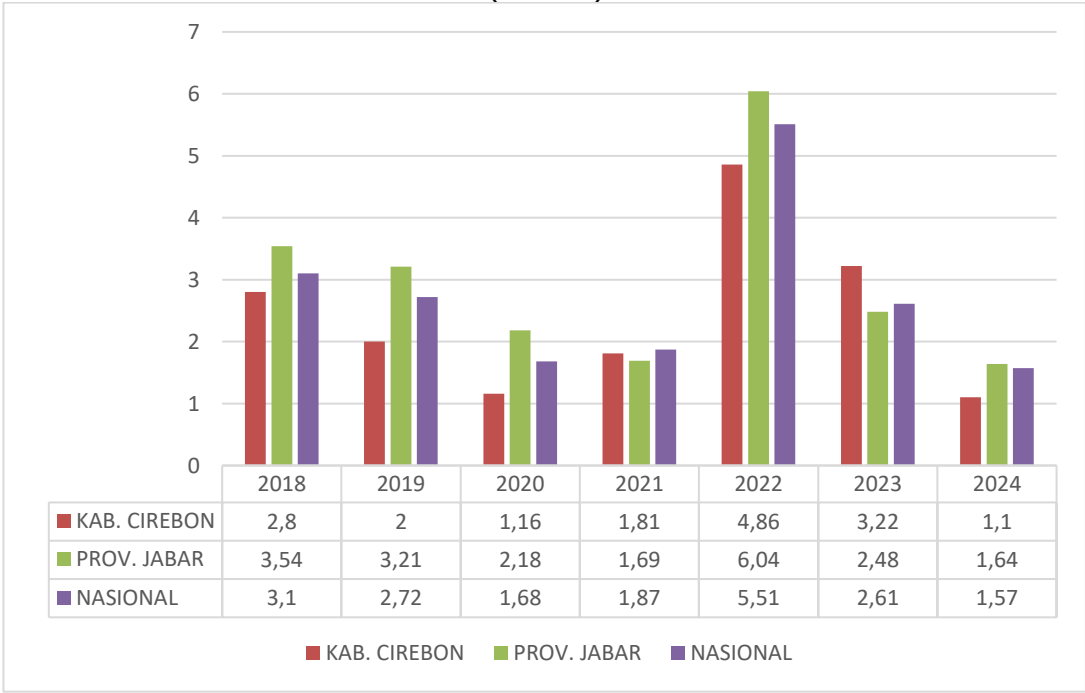


2.1.7 Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (continue). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Cirebon masih tergolong terkendali yang merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana Laju Inflasi pada tahun 2018 mencapai 2,80% dan mulai mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 menjadi 1,16%. Selanjutnya pada tahun berikutnya Laju Inflasi terus mengalami kenaikan menjadi 1,81% di tahun 2021 kemudian meningkat cukup tinggi di tahun 2022 sebesar 4,86% dan di tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,22% serta di tahun 2024 kembali mengalami penurunan inflasi terendah dari 2018 yaitu sebesar 1.10%. Angka laju inflasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 berada di bawah laju inflasi Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 1,64% dan laju inflasi nasional yang berada pada angka 1,57%. Perbandingan laju inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2018-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.11 Laju Inflasi Kab. Cirebon, Prov.Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2018-2024 (Persen)



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2024



Dari grafik di atas terlihat pengendalian inflasi di Kabupaten Cirebon cukup terkendali masih dibawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Cirebon telah cukup baik, meliputi:

I. Ranah Kebijakan :

1. Penerbitan surat edaran gerakan menanam cabai

II. Ranah Operasional

1. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM)
2. Rapat Koordinasi mingguan TPID Bersama Forkopimda dan Stakeholder terkait
3. Monitoring harga bahan pokok di pasar tradisional
4. Koordinasi ketersediaan beras ke Kantor BULOG Sub Divre Cirebon

Sedangkan strategi yang akan dilakukan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam upaya pengendalian inflasi adalah sebagai berikut:

I. Ranah kebijakan

1. Perluasan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM)

II. Ranah Operasional

1. Pembentukan Satuan tugas penanganan Inflasi
2. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Infkasi Daerah (TPID) Kabupaten Cirebon
3. Melaksanakan monev rutin keterjangkauan harga dan pasokan stok bahan pokok penting di berbagai pasar di wilayah Kabupaten Cirebon
4. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait tentang keamanan dan stabilisasi harga dan stok pangan menjelang HBKN Nataru
5. Intensifikasi produksi pertanian untuk menjaga kecukupan pangan

2.1.8 Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dalam bagian ini dijelaskan dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/ pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Pengklasifikasian Indeks Gini adalah sebagai berikut:

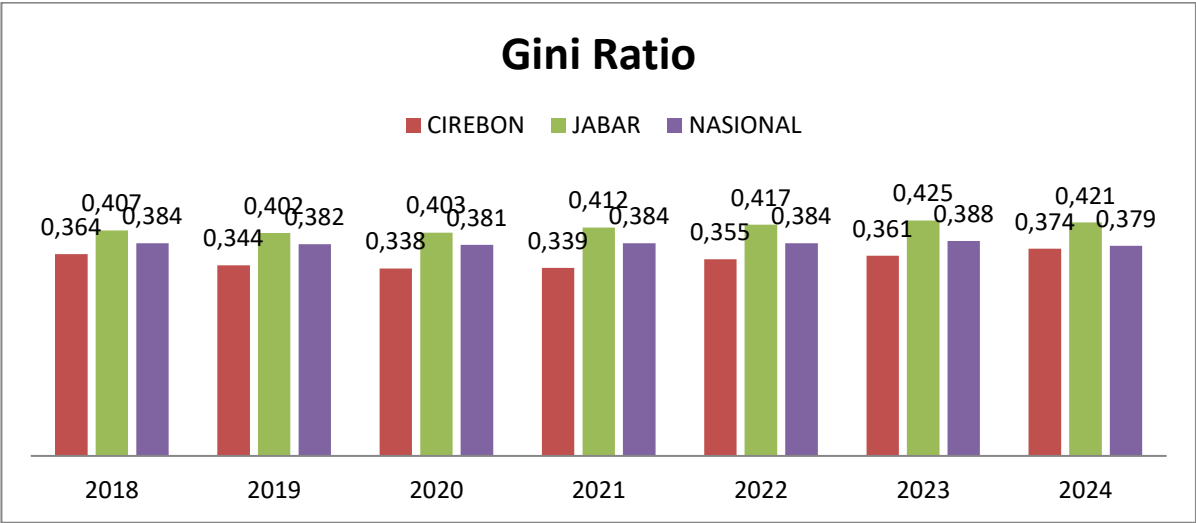


Klasifikasi Indeks Gini:

- < 0,3 → Ketimpangan Rendah
- 0,3 – 0,5 → Ketimpangan Moderat
- > 0,5 → Ketimpangan Tinggi

Selama periode tahun 2019-2024, Indeks Gini Kabupaten Cirebon masuk ke dalam kategori “moderat” dengan kisaran 0,3. Selanjutnya indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 0,319 bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka indeks gini Kabupaten Cirebon lebih baik dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, sebagaimana pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2024



Sumber: Provinsi Jawa Barat dalam Angka, BPS Tahun 2025

Data persentase gini ratio kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Gini Ratio Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

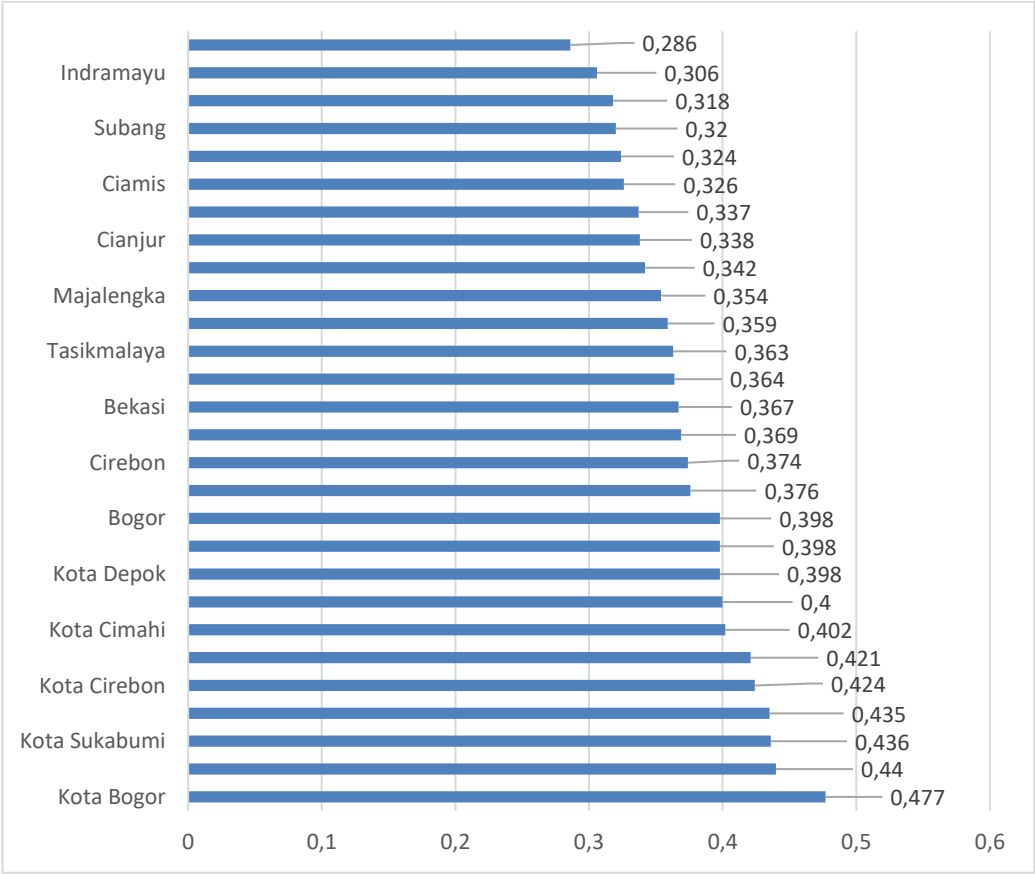
No.	Kabupaten/Kota	LPE	No.	Kabupaten/Kota	LPE
1.	Kab. Bogor	0,398	15.	Kab. Karawang	0,376
2.	Kab. Sukabumi	0,342	16.	Kab. Bekasi	0,367
3.	Kab. Cianjur	0,338	17.	Kab. Bandung Barat	0,400
4.	Kab. Bandung	0,364	18.	Kab. Pangandaran	0,286



No.	Kabupaten/Kota	LPE	No.	Kabupaten/Kota	LPE
5.	Kab. Garut	0,324	19.	Kota Bogor	0,477
6.	Kab. Tasikmalaya	0,363	20.	Kota Sukabumi	0,436
7.	Kab. Ciamis	0,326	21.	Kota Bandung	0,440
8.	Kab. Kuningan	0,369	22.	Kota Cirebon	0,424
9.	Kab. Cirebon	0,374	23.	Kota Bekasi	0,435
10.	Kab. Majalengka	0,354	24.	Kota Depok	0,398
11.	Kab. Sumedang	0,337	25.	Kota Cimahi	0,402
12.	Kab. Indramayu	0,306	26.	Kota Tasikmalaya	0,359
13.	Kab. Subang	0,320	27.	Kota Banjar	0,318
14.	Kab. Purwakarta	0,398		Jawa Barat	0,421

Sumber: Provinsi Jawa Barat dalam Angka, BPS Tahun 2025

Gambar 2.13 Gini Ratio Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) dari yang Rendah ke Tinggi



Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada ketimpangan moderat dengan gini ratio berkisar antara 0,300 hingga 0,500. Hanya 1 kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang tingkat ketimpangannya masih rendah yaitu Kabupaten Pangandaran dengan gini ratio sebesar 0,286. Ada 22 kabupaten/kota yang berada di bawah angka gini ratio Provinsi Jawa Barat yakni Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan,



Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, dan Kabupaten Cirebon. Sedangkan 5 Kabupaten/Kota yang berada di atas angka gini ratio Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi. Untuk Kabupaten Cirebon berada pada posisi peringkat ke-16 tingkat ketimpangan terendah dari seluruh kab/kota di Provinsi Jawa Barat.

2.1.9 Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum. Pengertian hidup layak secara minimum diwakili oleh 20% kelompok terbawah penduduk tidak miskin yang disebut sebagai kelompok acuan.

Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024 adalah sekitar 11,00 persen (atau setara dengan 245.920 jiwa) sedangkan tahun 2023 sebesar 11,20 persen (atau setara dengan 249.180 jiwa). Persentase penduduk kemiskinan tahun 2023-2024 menurun 0,20 persen (atau setara dengan 3.260 jiwa). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon tahun 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi yang mencapai 7,46 persen dan Nasional yang juga mencapai 9,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi.

Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 hingga mencapai 11,00 persen dengan jumlah penduduk miskin 245,92 ribu jiwa lebih disebabkan oleh berkurangnya faktor-faktor produksi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah yang tidak bekerja dan bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sementara dilain pihak garis kemiskinannya meningkat. Hal ini tentu harus menjadi



perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga peningkatan persentase penduduk miskin tersebut dapat ditekan di tahun berikutnya.

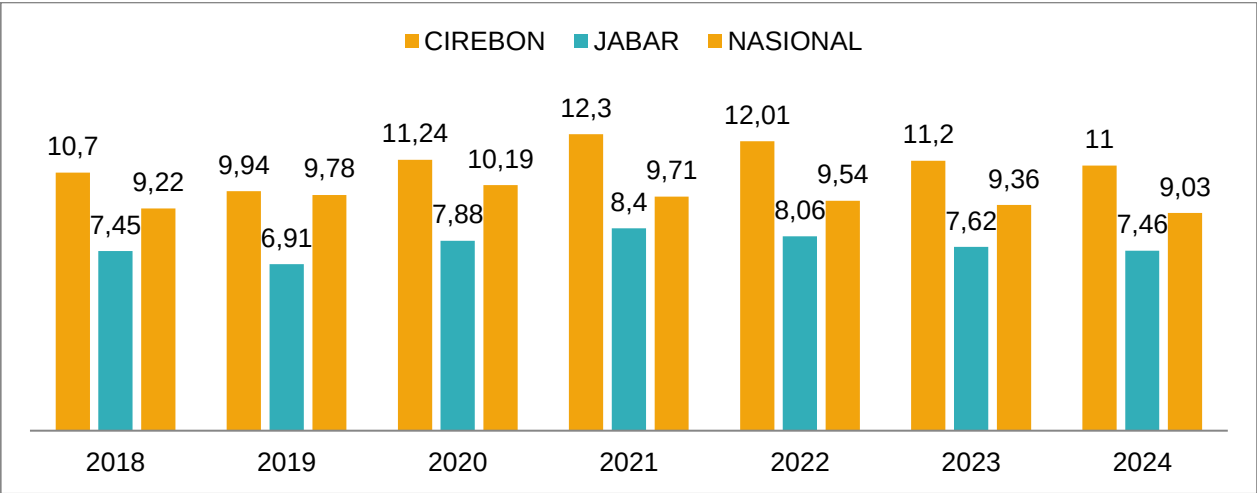
Tabel 2.13
Garis Kemiskinan dan Angka Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Total (Ribu)	Presentase
2017	346.240	279,55	12,97
2018	370.747	232,37	10,70
2019	381.372	217,64	9,94
2020	393.452	247,94	11,24
2021	404.635	271,02	12,30
2022	416.914	266,10	12,01
2023	451.853	249,18	11,20
2024	475.046	245,92	11,00

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 245,92 ribu jiwa atau 11,00 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini menurun dibanding dengan tahun 2023 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 249,18 ribu jiwa atau 11,20 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.14 Persentase Kemiskinan di Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2024



Sumber: Kab. Cirebon Dalam Angka 2025; Prov. Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025



Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Untuk indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai 2,04 dan pada tahun 2021 angkanya turun menjadi 1,94. Akan tetapi di tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 2,27 dan di tahun 2023 kembali menurun menjadi 1,98, begitupun di tahun 2024 kembali menurun menjadi 1,69. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan, dimana pada tahun 2018 angkanya mencapai 0,55 dan pada tahun 2020 turun menjadi 0,24. Akan tetapi di tahun berikutnya terus mengalami peningkatan, yaitu mencapai 0,47 di tahun 2021 dan 0,59 di tahun 2022 dan di tahun 2023 menurun menjadi 0,53 serta di tahun 2024 menurun menjadi 0,36. Hal tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2018–2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2018	2,04	0,55
2019	1,39	0,26
2020	1,30	0,24
2021	1,94	0,47
2022	2,27	0,59
2023	1,98	0,53
2024	1,69	0,36

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025

Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari data tabel 2.27 menunjukkan bahwa indeks keparahannya kemiskinan di kabupaten Cirebon dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 nilainya fluktuatif, pada tahun 2018 indeks keparahannya kemiskinan sebesar 0,55 selanjutnya nilainya menurun hingga tahun 2021 menjadi 0,47. Namun meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 0,59 dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 0,53 serta menurun kembali di tahun 2024 menjadi 0,36. Hal ini menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Lebih lanjut, data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2018-2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

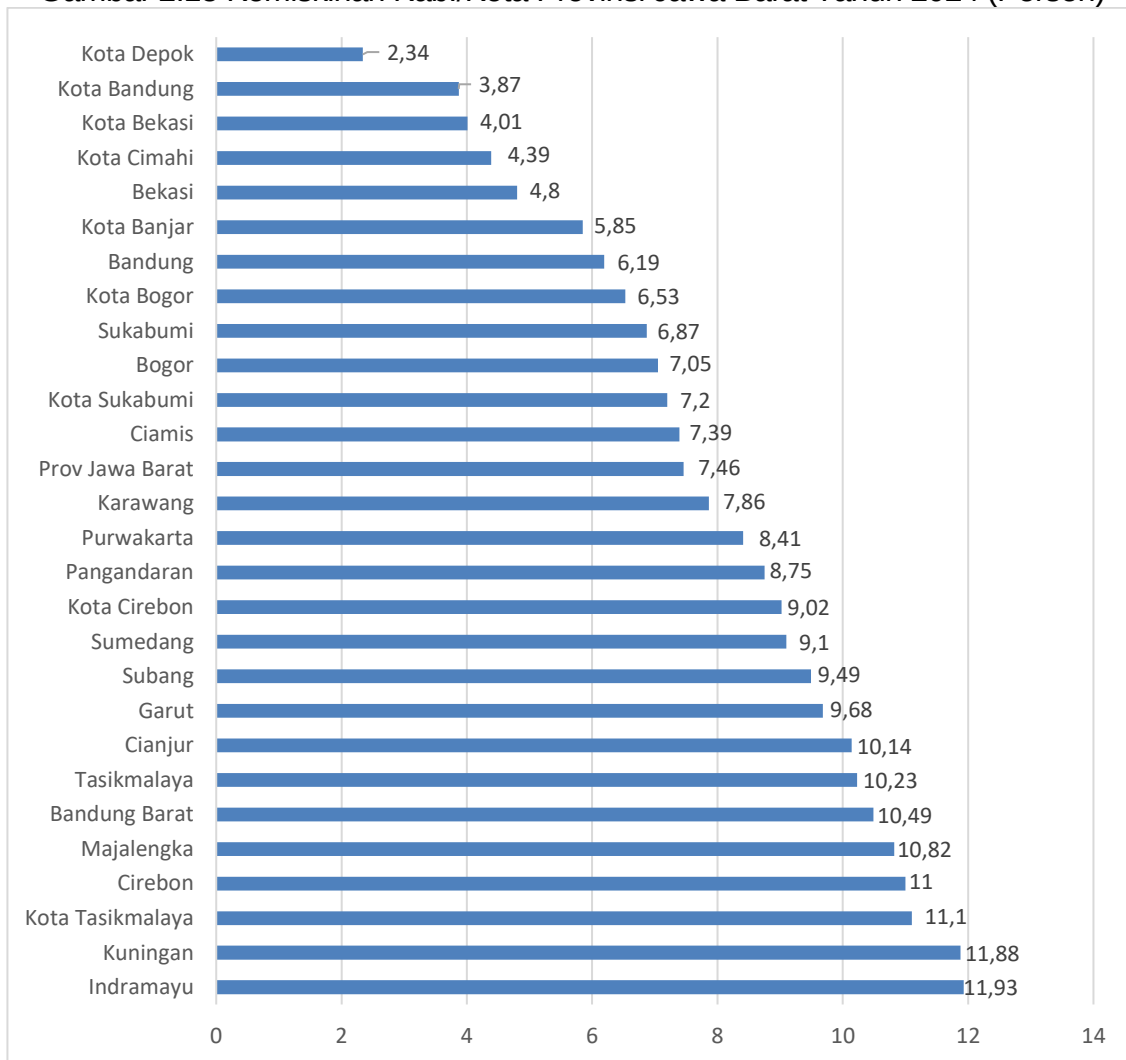
Tabel 2.15 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	7,14	6,91	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
2.	Kabupaten Sukabumi	6,76	6,22	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87
3.	Kabupaten Cianjur	9,81	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22	10,14
4.	Kabupaten. Bandung	6,65	5,94	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19
5.	Kabupaten Garut	9,27	8,98	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
6.	Kabupaten Tasikmalaya	9,85	9,12	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23
7.	Kabupaten Ciamis	7,22	6,65	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
8.	Kabupaten Kuningan	12,22	11,41	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
9.	Kabupaten Cirebon	10,7	9,94	11,24	12,30	12,01	11,20	11,00
10.	Kabupaten Majalengka	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
11.	Kabupaten Sumedang	9,76	9,05	10,26	10,71	10,14	9,36	9,10
12.	Kabupaten Indramayu	11,89	11,11	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93
13.	Kabupaten Subang	8,67	8,12	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
14.	Kabupaten Purwakarta	7,99	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46	8,41
15.	Kabupaten Karawang	8,06	7,39	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
16.	Kabupaten Bekasi	4,37	4,01	4,82	5,21	5,01	4,93	4,80
17.	Kabupaten Bandung Barat	10,06	9,38	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49
18.	Kabupaten Pangandaran	8,12	7,71	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
19.	Kota Bogor	5,93	5,77	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53
20.	Kota Sukabumi	7,12	6,67	7,70	8,25	8,02	7,50	7,20
21.	Kota Bandung	3,57	3,38	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
22.	Kota Cirebon	8,88	8,41	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
23.	Kota Bekasi	4,11	3,81	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01
24.	Kota Depok	2,14	2,07	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
25.	Kota Cimahi	4,94	4,39	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
26.	Kota Tasikmalaya	12,71	11,60	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10
27.	Kota Banjar	5,7	5,50	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85
	Provinsi Jawa Barat	7,25	6,82	7,88	8,40	8,06	7,62	7,46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025



Gambar 2.15 Kemiskinan Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan kemiskinan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Ada 12 kabupaten/kota yang berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yakni Kabupaten Ciamis, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bandung dan Kota Depok. Sedangkan 15 Kabupaten/Kota yang berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang. Untuk Kabupaten Cirebon berada pada posisi tingkat ke-4 kemiskinan tertinggi dari seluruh kab/kota di Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang

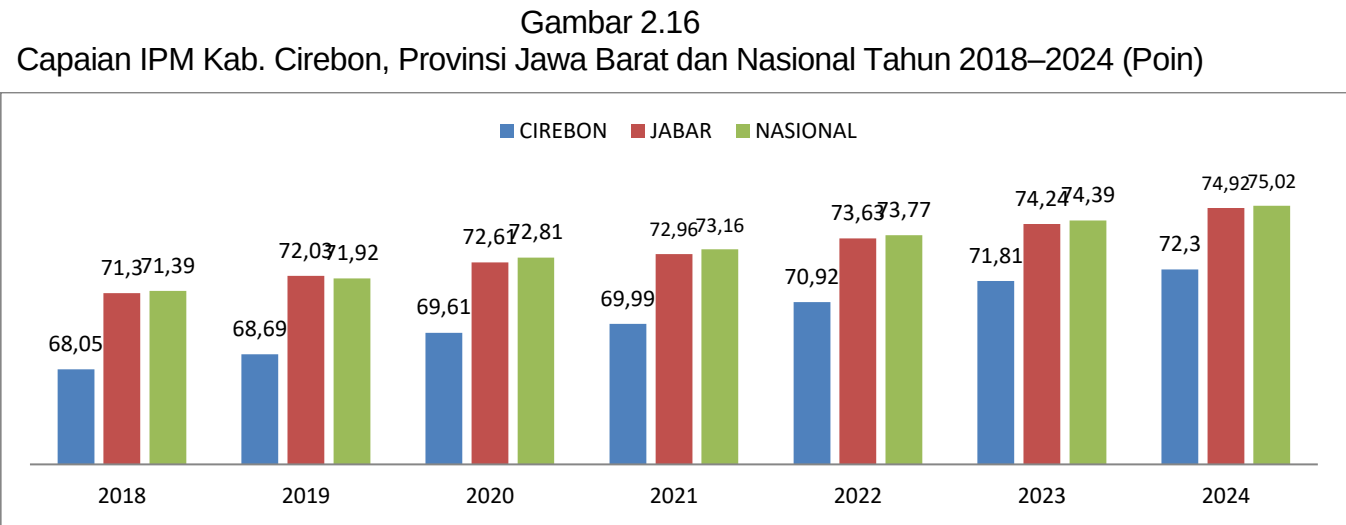


ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya. Kegiatan koordinasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon juga dilakukan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon, upaya yang dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substantif) maupun secara makro (preventif).

2.1.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah tolak ukur utama evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya indikator kinerja makro daerah.

Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional berdasarkan LF SP 2020 untuk periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon berdasarkan perhitungan Sensus Penduduk Lanjutan Long Form Tahun 2020 (LF SP2020) untuk tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan. IPM Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebesar 69,61 poin dan terus meningkat menjadi 71,81 poin pada tahun 2023 dan terakhir menjadi 72,30 poin pada tahun 2024. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional yang mencapai 75,02 poin dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,92 poin.

Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi, yaitu: Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung.

Dari data 4 tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Cirebon yaitu tahun 2020-2024 terus meningkat yaitu peringkat 19 tahun 2020 terus naik jadi peringkat 17 pada tahun 2023, tapi turun lagi peringkat 19 pada tahun 2021 dan naik kembali menjadi peringkat 18 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi peringkat 17 di tahun 2023 dan di tahun 2024 stagnan di peringkat 17, sebagaimana data tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 IPM Kab./Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

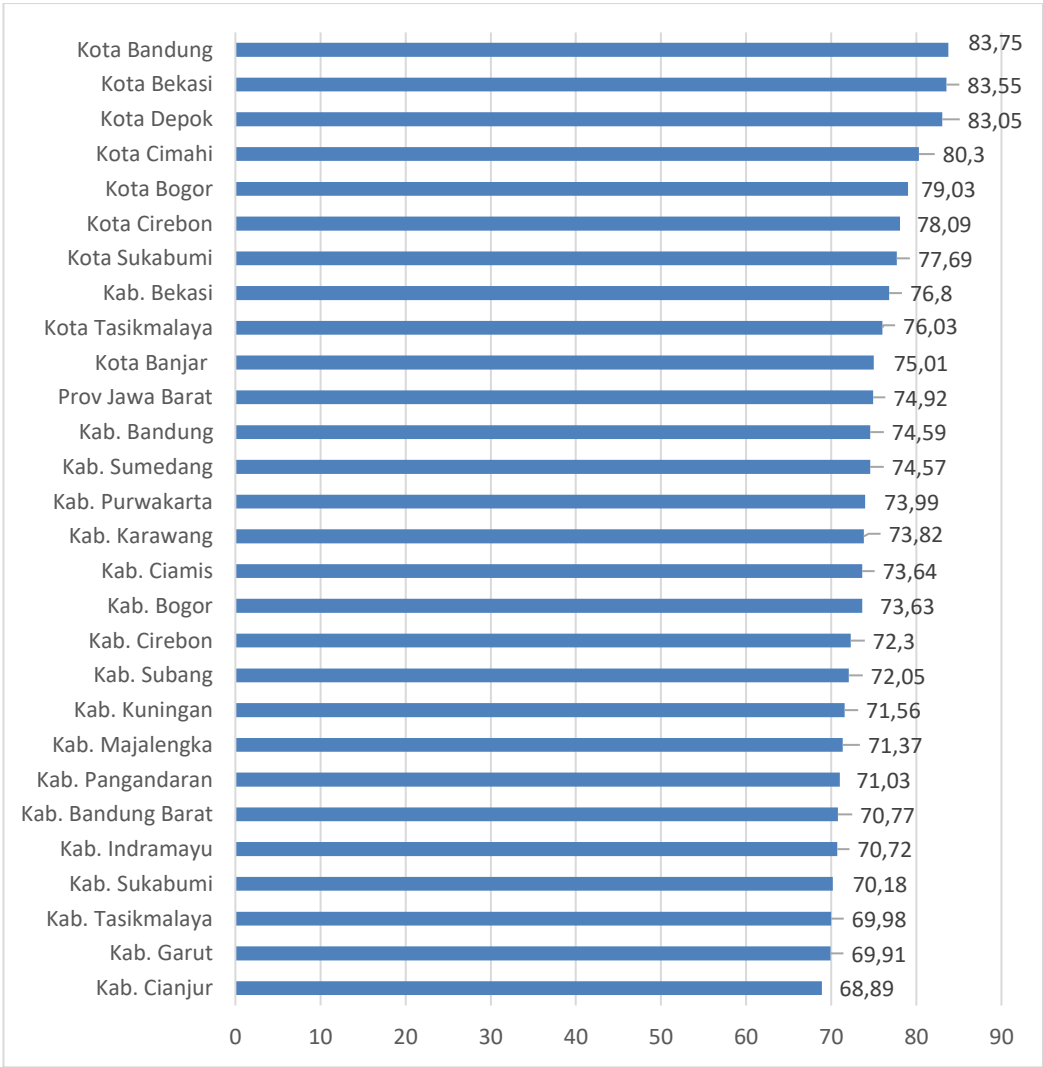
No.	Kab/Kota	IPM (LF SP2020)				
		2020	2021	2022	2023	2024
NASIONAL		72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
JAWA BARAT		72,61	72,96	73,63	74,24	74,92
1.	Kabupaten Bogor	71,63	71,83	72,45	73,02	73,63
2.	Kabupaten Sukabumi	68,14	68,33	68,87	69,71	70,18
3.	Kabupaten Cianjur	66,96	67,16	67,55	68,18	68,89
4.	Kabupaten Bandung	72,69	73,03	73,46	74,03	74,59
5.	Kabupaten Garut	67,20	67,53	68,51	69,22	69,91
6.	Kabupaten Tasikmalaya	67,22	67,43	68,45	69,38	69,98
7.	Kabupaten Ciamis	71,57	72,00	72,52	73,12	73,64
8.	Kabupaten Kuningan	69,66	69,99	70,44	70,99	71,56
9.	Kabupaten Cirebon	69,61	69,99	70,92	71,81	72,30
10.	Kabupaten Majalengka	69,20	69,42	70,18	70,76	71,37
11.	Kabupaten Sumedang	72,48	72,64	73,53	74,02	74,57
12.	Kabupaten Indramayu	68,25	68,60	69,52	70,19	70,72
13.	Kabupaten Subang	69,66	69,84	70,54	71,42	72,05
14.	Kabupaten Purwakarta	72,15	72,31	72,89	73,43	73,99
15.	Kabupaten Karawang	71,56	71,84	72,64	73,25	73,82



No.	Kab/Kota	IPM (LF SP2020)				
		2020	2021	2022	2023	2024
16.	Kabupaten Bekasi	74,47	74,84	75,60	76,13	76,80
17.	Kabupaten Bandung Barat	68,81	69,03	69,82	70,33	70,77
18.	Kabupaten Pangandaran	69,24	69,46	70,21	70,57	71,03
19.	Kota Bogor	76,63	77,11	77,68	78,36	79,03
20.	Kota Sukabumi	75,06	75,44	76,24	77,16	77,69
21.	Kota Bandung	81,78	82,23	82,75	83,29	83,75
22.	Kota Cirebon	75,91	76,26	76,89	77,45	78,09
23.	Kota Bekasi	81,50	81,99	82,52	83,06	83,55
24.	Kota Depok	81,14	81,54	82,02	82,53	83,05
25.	Kota Cimahi	78,09	78,31	79,01	79,69	80,30
26.	Kota Tasikmalaya	74,04	74,31	74,84	75,47	76,03
27.	Kota Banjar	73,08	73,30	73,93	74,45	75,01

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025

Gambar 2.17
IPM Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen) dari yang Tinggi ke Rendah





Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan IPM pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Ada 10 kabupaten/kota yang berada di atas angka IPM Provinsi Jawa Barat yakni Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kab. Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bandung. Sedangkan 17 Kabupaten/Kota yang berada di bawah angka IPM Provinsi Jawa Barat, yakni Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Sumedang dan Kab. Bandung. Untuk Kabupaten Cirebon berada pada posisi tingkat ke-17 IPM tertinggi dari seluruh kab/kota di Provinsi Jawa Barat.

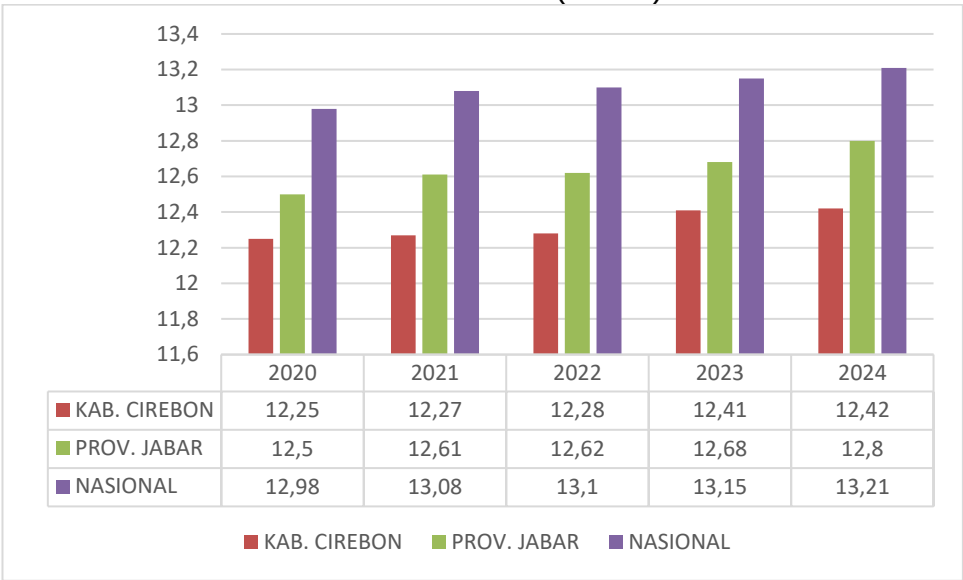
2.1.11 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Penghitungan IPM salah satunya dipengaruhi oleh 2 indikator pendidikan, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Nilai HLS yang semakin tinggi, menggambarkan semakin tinggi pendidikan yang ditempuh. HLS merepresentasikan harapan individu dalam mengenyam pendidikan ketika mencapai usia sekolah yakni 7 tahun.

Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 12,42 tahun yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.



Gambar 2.18 Harapan Lama Sekolah Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: Kab. Cirebon Dalam Angka 2025, BPS; BPS Provinsi Jabar Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025

Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 apabila dibandingkan dengan nilai HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional, maka HLS Kabupaten Cirebon selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional.

Data HLS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat berikut ini.

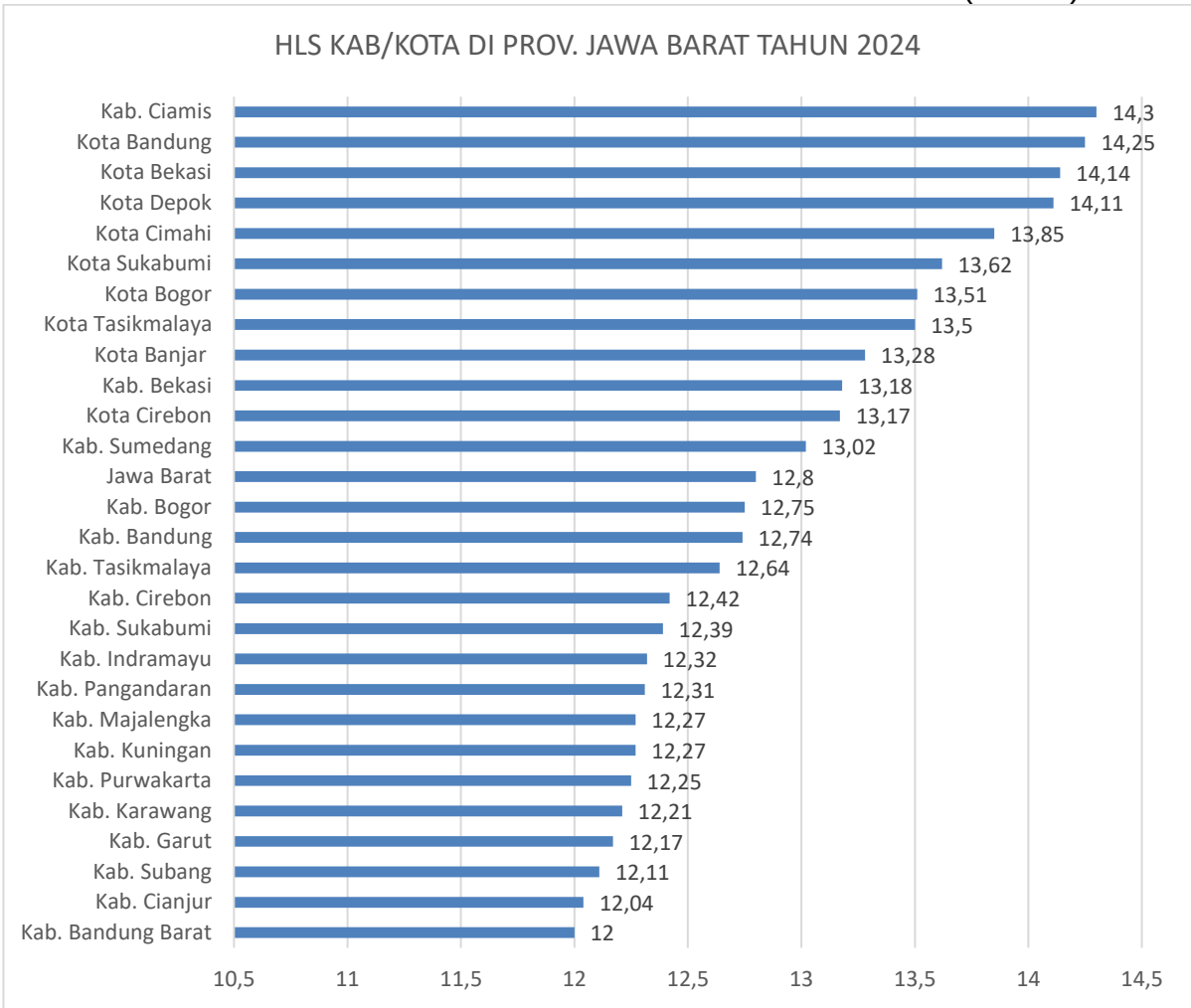
Tabel 2.17 HLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	HLS	No.	Kabupaten/Kota	HLS
1.	Kab. Bogor	12,75	15.	Kab. Karawang	12,21
2.	Kab. Sukabumi	12,39	16.	Kab. Bekasi	13,18
3.	Kab. Cianjur	12,04	17.	Kab. Bandung Barat	12,00
4.	Kab. Bandung	12,74	18.	Kab. Pangandaran	12,31
5.	Kab. Garut	12,17	19.	Kota Bogor	13,51
6.	Kab. Tasikmalaya	12,64	20.	Kota Sukabumi	13,62
7.	Kab. Ciamis	14,30	21.	Kota Bandung	14,25
8.	Kab. Kuningan	12,27	22.	Kota Cirebon	13,17
9.	Kab. Cirebon	12,42	23.	Kota Bekasi	14,14
10.	Kab. Majalengka	12,27	24.	Kota Depok	14,11
11.	Kab. Sumedang	13,02	25.	Kota Cimahi	13,85
12.	Kab. Indramayu	12,32	26.	Kota Tasikmalaya	13,50
13.	Kab. Subang	12,11	27.	Kota Banjar	13,28
14.	Kab. Purwakarta	12,25		Jawa Barat	12,80

Sumber: Provinsi Jawa Barat dalam Angka, BPS Tahun 2025



Gambar 2.19 HLS Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat.

Nilai RLS Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2024 juga mengalami peningkatan dari 6,92 tahun di tahun 2020 menjadi 7,65 tahun di tahun 2024, yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 7,65 tahun atau Kelas 2 SMP semester kedua. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan rata-rata lama sekolah Nasional yang mencapai 8,87 tahun untuk rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan 8,85 untuk rata-rata lama sekolah nasional.



Gambar 2.20
Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS; BPS Provinsi Jabar 2025; Statistik Nasional 2025.

Data RLS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

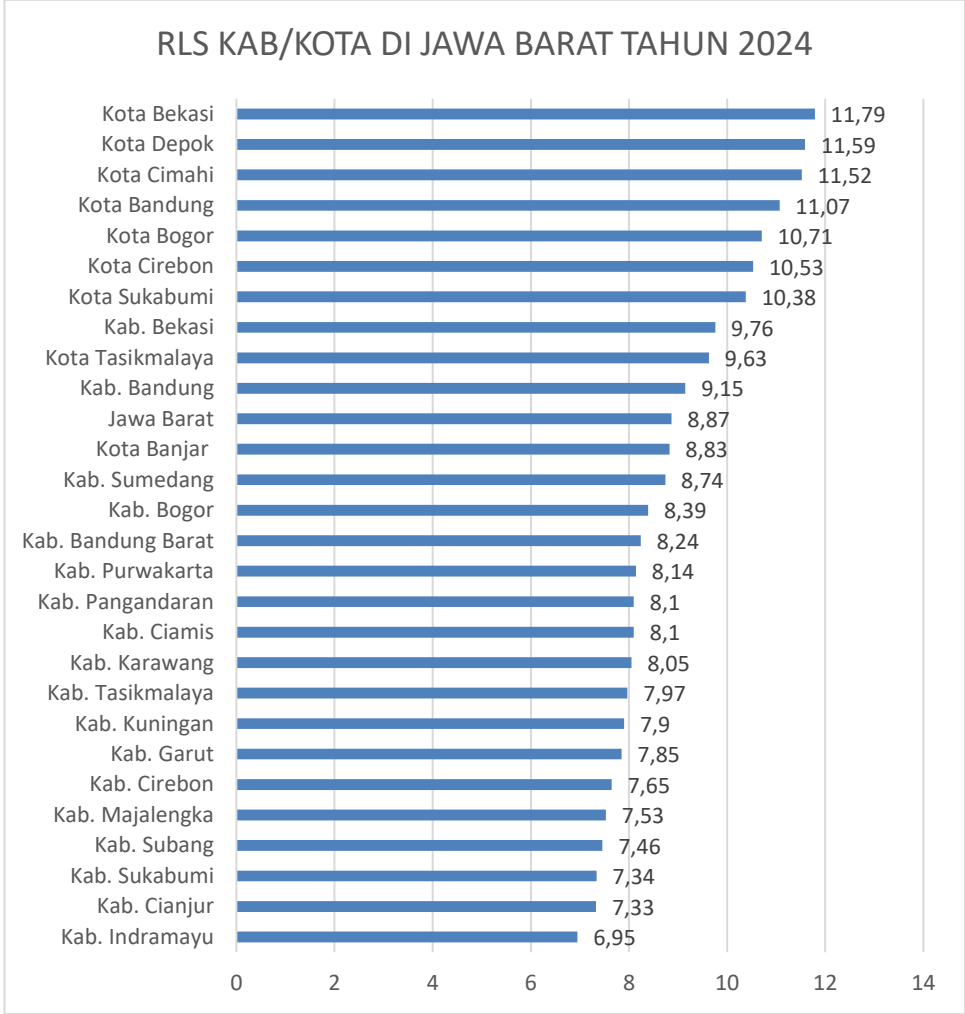
Tabel 2.18 RLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	RLS	No.	Kabupaten/Kota	RLS
1.	Kab. Bogor	8,39	15.	Kab. Karawang	8,05
2.	Kab. Sukabumi	7,34	16.	Kab. Bekasi	9,76
3.	Kab. Cianjur	7,33	17.	Kab. Bandung Barat	8,24
4.	Kab. Bandung	9,15	18.	Kab. Pangandaran	8,10
5.	Kab. Garut	7,85	19.	Kota Bogor	10,71
6.	Kab. Tasikmalaya	7,97	20.	Kota Sukabumi	10,38
7.	Kab. Ciamis	8,10	21.	Kota Bandung	11,07
8.	Kab. Kuningan	7,90	22.	Kota Cirebon	10,53
9.	Kab. Cirebon	7,65	23.	Kota Bekasi	11,79
10.	Kab. Majalengka	7,53	24.	Kota Depok	11,59
11.	Kab. Sumedang	8,74	25.	Kota Cimahi	11,52
12.	Kab. Indramayu	6,95	26.	Kota Tasikmalaya	9,63
13.	Kab. Subang	7,46	27.	Kota Banjar	8,83
14.	Kab. Purwakarta	8,14		Jawa Barat	8,87

Sumber: Provinsi Jawa Barat dalam Angka, BPS Tahun 2025



Gambar 2.21 RLS Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



2.1.12 Angka Harapan Hidup (AHH)

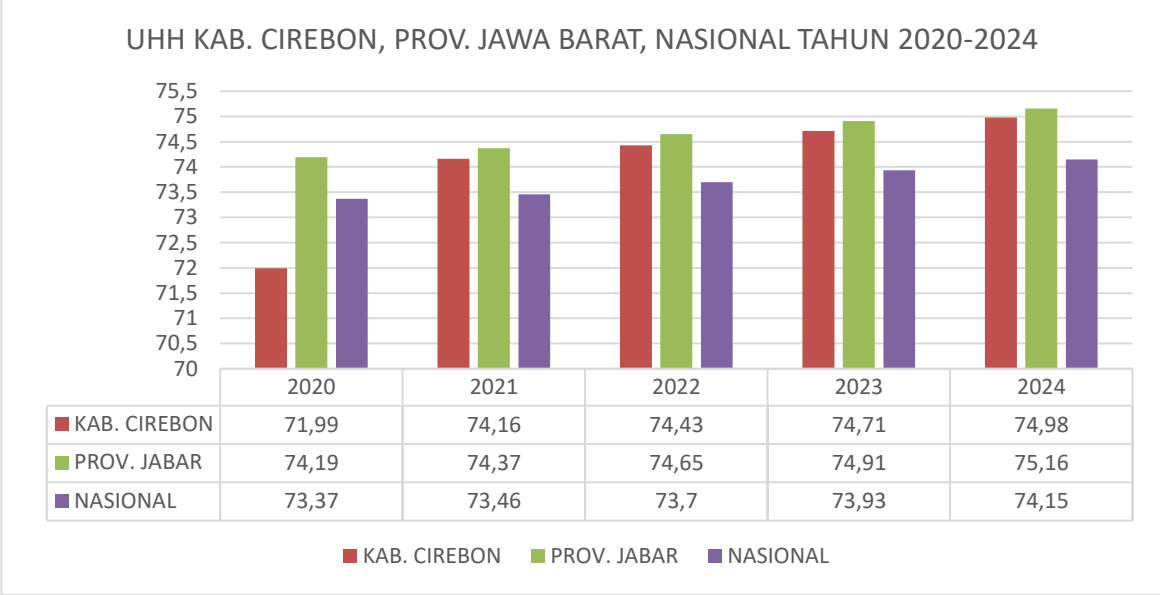
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan. Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

AHH Kabupaten Cirebon cenderung naik setiap tahun selama kurun waktu tahun 2020-2024 di mana pada tahun 2020 mencapai 73,97 tahun yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun dan di tahun 2024 meningkat menjadi 74,98 tahun yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memiliki



harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun AHH Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Jawa Barat, yakni 75,16 tahun, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan AHH Nasional, yakni 74,15 tahun.

Gambar 2.22 Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS; BPS Provinsi Jabar 2025; Statistik Indonesia 2025

Data UHH kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

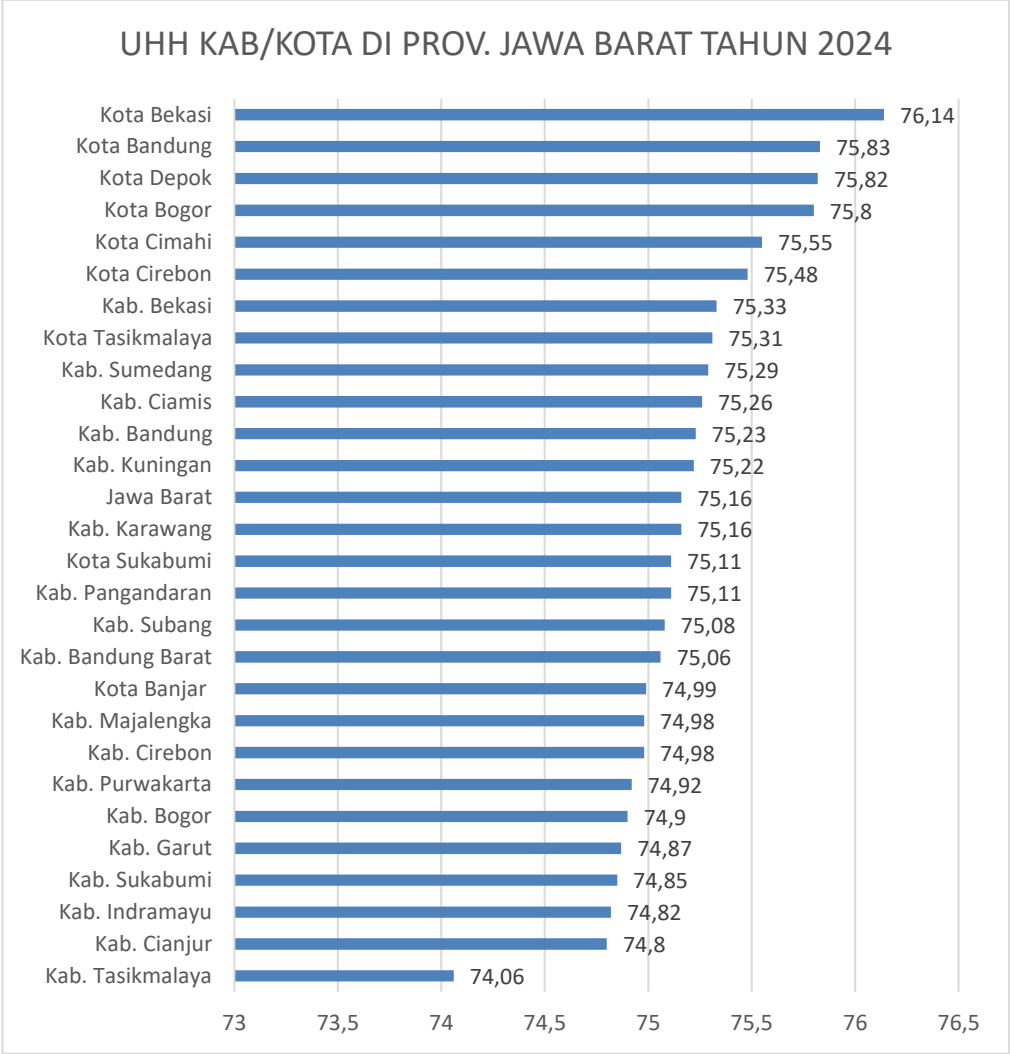
Tabel 2.19 UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	UHH	No.	Kabupaten/Kota	UHH
1.	Kab. Bogor	74,90	15.	Kab. Karawang	75,16
2.	Kab. Sukabumi	74,85	16.	Kab. Bekasi	75,33
3.	Kab. Cianjur	74,80	17.	Kab. Bandung Barat	75,06
4.	Kab. Bandung	75,23	18.	Kab. Pangandaran	75,11
5.	Kab. Garut	74,87	19.	Kota Bogor	75,80
6.	Kab. Tasikmalaya	74,06	20.	Kota Sukabumi	75,11
7.	Kab. Ciamis	75,26	21.	Kota Bandung	75,83
8.	Kab. Kuningan	75,22	22.	Kota Cirebon	75,48
9.	Kab. Cirebon	74,98	23.	Kota Bekasi	76,14
10.	Kab. Majalengka	74,98	24.	Kota Depok	75,82
11.	Kab. Sumedang	75,29	25.	Kota Cimahi	75,55
12.	Kab. Indramayu	74,82	26.	Kota Tasikmalaya	75,31
13.	Kab. Subang	75,08	27.	Kota Banjar	74,99
14.	Kab. Purwakarta	74,92		Jawa Barat	75,16

Sumber: Provinsi Jawa Barat dalam Angka, BPS Tahun 2025



Gambar 2.23 UHH Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)

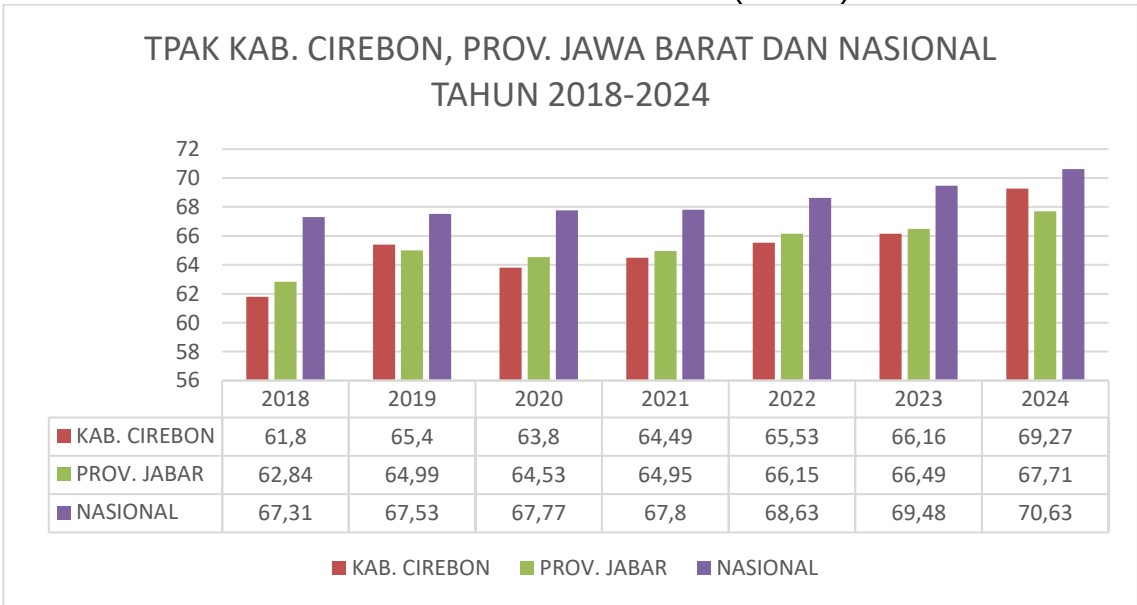


2.1.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).



Gambar 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2024 (Persen)



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS; BPS Provinsi Jabar 2025; Statistik Indonesia 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 TPAK sebesar 61,8% dan tahun 2024 naik menjadi 69,27%. Akan tetapi pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Cirebon sedikit mengalami penurunan hingga menjadi 63,8%. Penurunan TPAK ini terjadi dikarenakan beberapa kondisi dan salah satunya disebabkan dengan adanya pandemi covid-19. Penurunan ini lebih disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan manufaktur yang mempekerjakan karyawannya secara padat karya melakukan pembatasan kegiatan terutama pada lini produksinya. Akibatnya mendorong penurunan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tabel 2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024 (Persen)

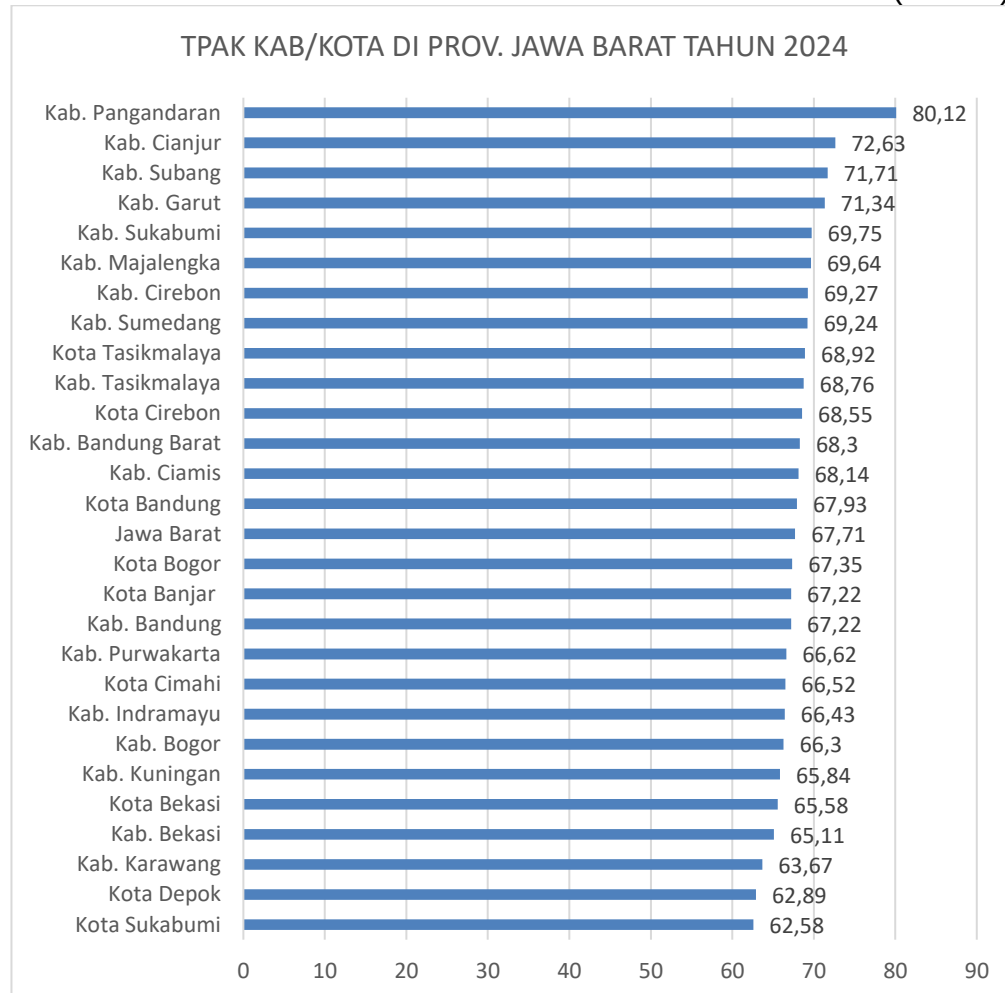
No.	Kabupaten/Kota	TPAK	No.	Kabupaten/Kota	TPAK
1.	Kab. Bogor	66,30	15.	Kab. Karawang	63,67
2.	Kab. Sukabumi	69,75	16.	Kab. Bekasi	65,11
3.	Kab. Cianjur	72,63	17.	Kab. Bandung Barat	68,30
4.	Kab. Bandung	67,22	18.	Kab. Pangandaran	80,12
5.	Kab. Garut	71,34	19.	Kota Bogor	67,35
6.	Kab. Tasikmalaya	68,76	20.	Kota Sukabumi	62,58
7.	Kab. Ciamis	68,14	21.	Kota Bandung	67,93
8.	Kab. Kuningan	65,84	22.	Kota Cirebon	68,55
9.	Kab. Cirebon	69,27	23.	Kota Bekasi	65,58
10.	Kab. Majalengka	69,64	24.	Kota Depok	62,89
11.	Kab. Sumedang	69,24	25.	Kota Cimahi	66,52



No.	Kabupaten/Kota	TPAK	No.	Kabupaten/Kota	TPAK
12.	Kab. Indramayu	66,43	26.	Kota Tasikmalaya	68,92
13.	Kab. Subang	71,71	27.	Kota Banjar	67,22
14.	Kab. Purwakarta	66,62		Jawa Barat	67,71

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025

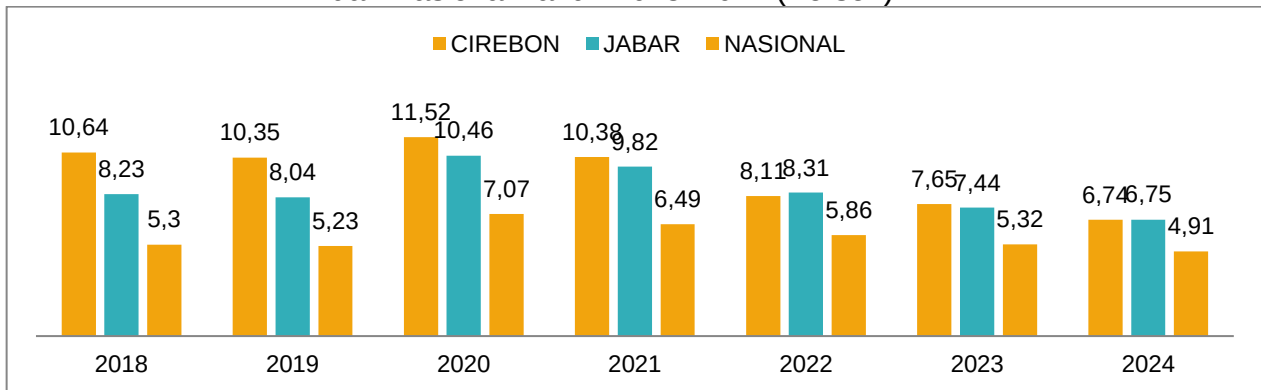
Gambar 2.25 TPAK Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.



Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018–2024 (Persen).



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025; BPS Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025; Statistik Indonesia, 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 angkanya mencapai 10,64 persen. Selanjutnya meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 10,35 persen, akan tetapi selanjutnya TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan menjadi 11,52 persen di tahun 2020 dan 10,38 persen di tahun 2021. Hal ini disebabkan dengan adanya dampak sistemik pandemi covid-19 yang secara global juga telah menimpa Indonesia dan salah satunya termasuk di Kabupaten Cirebon. Namun selanjutnya terus menurun di Tahun 2022 menjadi 8,11 persen dan di tahun 2023 menjadi 7,65 persen serta di tahun 2024 menjadi 6,74 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018-2021 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, selalu berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi di tahun 2022 berada di bawah TPT Provinsi Jawa Barat namun masih diatas TPT Nasional, dimana pada tahun 2022 TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen dan TPT Indonesia sebesar 5,86 persen, sedangkan Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya mencapai 8,11 persen. Namun pada tahun 2023, TPT Kabupaten Cirebon kembali berada di atas TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional dimana TPT Jawa Barat sebesar 7,44 persen dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen sedangkan TPT Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya hanya sebesar 7,65 persen. Selanjutnya di tahun 2024, TPT Kabupaten Cirebon kembali berada di bawah TPT Provinsi Jawa Barat akan tetapi masih di atas TPT Nasional, dimana TPT Jawa Barat sebesar 6,75 persen dan TPT Nasional sebesar 4,91 persen.

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, TPT Kabupaten Cirebon terjadi penurunan dari tahun 2020 sebesar 11,52% turun menjadi 6,74% di tahun 2024 hal ini



disebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama kepada pencari kerja lulusan sekolah baru (fresh graduate) dan peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.21 Tabel Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan KerjaKabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)			Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)			
	Bekerja	Pengan gguran	Total	Sekolah (Jiwa)	Mengurus RT (Jiwa)	dll	Total
2020	938.217	122.145	1.060.362	122.193	405.978	73.794	601.965
2021	970.262	112.429	1.082.691	117.222	414.458	64.444	596.124
2022	1.020.411	90.118	1.110.529	116.999	381.863	85.426	584.288
2023	1.101.094	91.266	1.192.360	119.390	417.828	72.526	609.744
2024	1.176.783	84.993	1.261.776	110.232	390.228	59.325	559.785

Sumber: Kab. Cirebon dalam Angka, 2021-2025

Tingkat Pengangguran Terbuka kabupaten/kota di Jawa Barat pada Tahun 2024 menunjukkan angka yang bervariasi antara 1,52 persen, yaitu TPT Kabupaten Pngandaran sampai dengan 10,52 persen, yaitu TPT Kota Cimahi. Dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 12 Kabupaten/Kota dengan TPT di bawah TPT Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut.

Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024

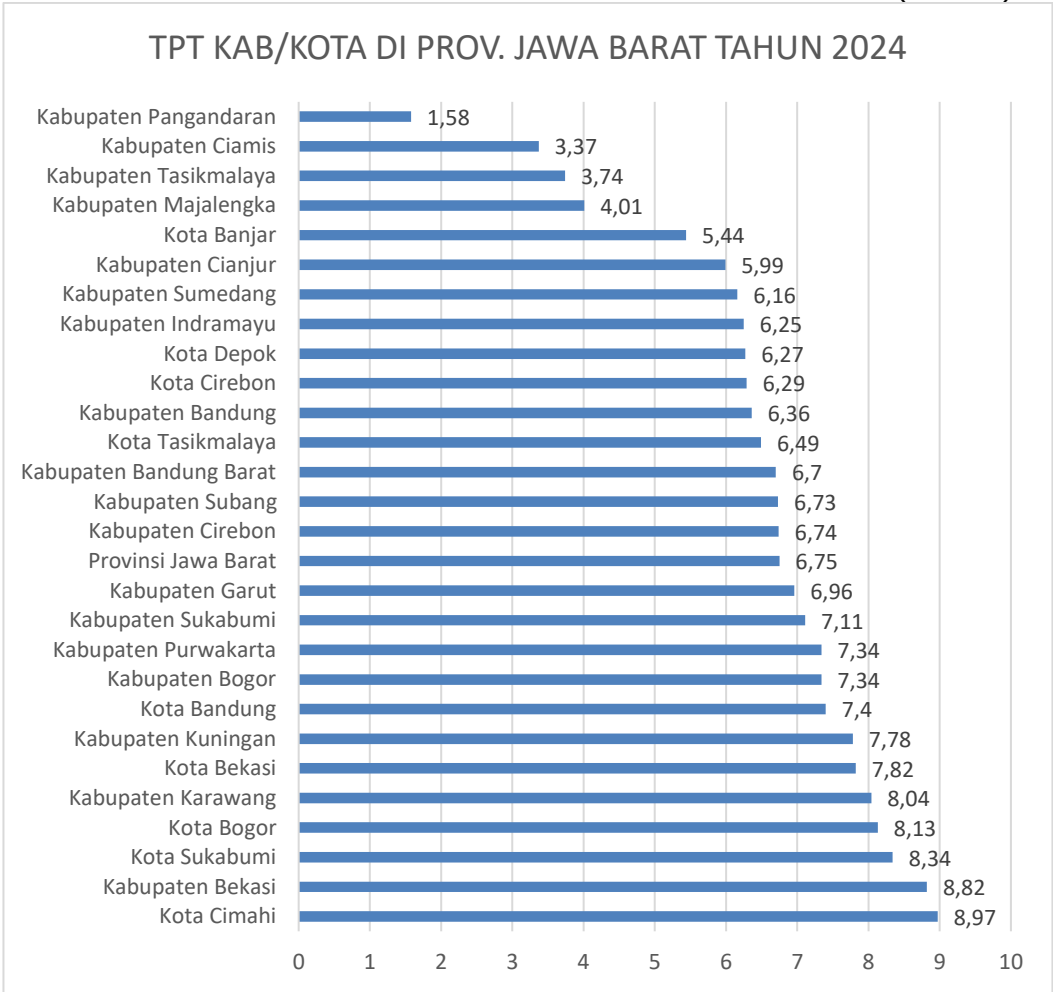
No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	9,83	9,11	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
2.	Kabupaten Sukabumi	7,84	8,05	9,60	9,51	7,77	7,32	7,11
3.	Kabupaten Cianjur	10,23	9,81	11,05	9,32	8,41	7,71	5,99
4.	Kabupaten Bandung	5,07	5,51	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36
5.	Kabupaten Garut	7,12	7,35	8,95	8,68	7,60	7,33	6,96
6.	Kabupaten Tasikmalaya	6,92	6,31	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
7.	Kabupaten Ciamis	4,64	5,16	5,66	5,06	3,75	3,52	3,37
8.	Kabupaten Kuningan	9,10	9,68	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
9.	Kabupaten Cirebon	10,64	10,35	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
10.	Kabupaten Majalengka	5,00	4,37	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
11.	Kabupaten Sumedang	7,54	7,70	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
12.	Kabupaten Indramayu	8,46	8,35	9,21	8,30	6,49	6,46	6,25
13.	Kabupaten Subang	8,71	8,68	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
14.	Kabupaten Purwakarta	9,94	9,73	11,07	10,70	8,75	7,72	7,34



15.	Kabupaten Karawang	9,12	9,68	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
16.	Kabupaten Bekasi	9,74	9,00	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
17.	Kabupaten Bandung Barat	8,55	8,24	12,25	11,65	9,63	8,11	6,7
18.	Kabupaten Pangandaran	3,59	4,52	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
19.	Kota Bogor	9,74	9,16	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
20.	Kota Sukabumi	8,57	8,49	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
21.	Kota Bandung	8,05	8,18	11,19	11,46	9,55	8,83	7,4
22.	Kota Cirebon	9,07	9,04	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29
23.	Kota Bekasi	9,14	8,30	10,68	10,88	8,81	7,90	7,82
24.	Kota Depok	6,66	6,12	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
25.	Kota Cimahi	8,00	8,09	13,30	13,07	10,77	10,52	8,97
26.	Kota Tasikmalaya	6,89	6,78	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
27.	Kota Banjar	5,95	6,16	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44
	Provinsi Jawa Barat	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.27 TPT Kab./Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



Pada RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, terdapat indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Berikut disajikan realisasi capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025.



2.1.14 Evaluasi Program 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomr 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 maka telah ditetapkan bupati terpilih Kabupaten Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, sebagai bupati Cirebon terpilih periode tahun 2025-2030. Adapun program 100 hari kerja Bupati Cirebon terpilih adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Izin Usaha

Program pelayanan izin usaha meliputi pelayanan izin Nomor Induk Berusaha (NIB), pelayanan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pelayanan izin sertifikasi halal, pelayanan izin Pembangunan Bangunan Gedung (PBG) dan pelayanan izin Lingkungan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.23 Pelayanan Izin Usaha Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	JENIS PELAYANAN IZIN USAHA	JUMLAH
1	Pelayanan Konsultasi Bisnis	56
2	Pelayanan Foto Produk	20
3	Pelayanan Izin NIB	5.709
4	Pelayanan Izin PIRT	10
5	Pelayanan izin sertifikasi halal	13
6	Pelayanan HAKI	3
7	Pelayanan Izin Lingkungan	63

2. Infrastruktur

Program pelayanan infrastruktur meliputi pelayanan rekonstruksi jalan dan pelayanan pemeliharaan jalan, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.24 Pelayanan Infrastruktur Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

No	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)
	TAHAP 1	
	UPTD. WILAYAH I	
1	Bayalangu-Panguragan	3.80
2	Bayalangu Kidul-Situs Makam Bayalangu	1.30
3	Jln. Jungjang	0.95
4	Arjawinangun-Karanganyar	0.95
5	Kimanten-Kebonpiring	0.75
6	Bayalangu-Kiwerga	2.20
7	Karangsambung-Jatianom	1.60
	UPTD. WILAYAH II	
1	Pasar Minggu-Kramat	7.40
2	Gempol - Pegagan	2.20



No	Nama Ruas	Panjang Penanganan (Km)
3	Bunder-Luwungkencana	5.90
4	Panongan-Balerante	0.80
	UPTD. WILAYAH III	
1	Bobos-Cikalahan	0.80
2	Bobos-Padabeunghar	1.80
3	Sidawangi - Matangaji	2.72
4	Plumbon - Marikangen	2.00
5	Sitiwinangun-Danawinangun	1.10
6	Marikangen-Kasugengan	1.94
7	Tukmudal-Walinanggung	1.80
	UPTD. WILAYAH IV	
1	Cirebon Girang-Wanasaba Kidul	2.00
2	Patapan-Cirebon Girang	2.10
3	Dawuan-Wanakaya	4.50
4	Batembat - Dawuan	2.00
5	Sarwadadi-Kubang	1.86
	UPTD. WILAYAH V	
1	Wanayasa - Sindanghayu	2.70
2	Bandengan - Setupatok	5.10
3	Halimpu - Wangkelang	10.50
4	Cipeujeuh - Kamarang	9.30
	UPTD. WILAYAH VI	
1	Pengarengan - Sindanglaut	5.10
2	Mertapada - Japura	2.70
3	Kanci - Astanajapura	0.60
4	Lemahabang - Leuwidingding	2.50
5	Sigong - Sarajaya	2.30
	UPTD. WILAYAH VII	
1	Cibogo-Waled	6.10
2	Ambit-Ciuyah	3.50
3	Waled-Gunungsari	2.20
4	Cikulak Induk-Cikulak Kidul	1.30
5	Cikulak-Jatirenggang	2.70
	UPTD. WILAYAH VIII	
1	Playangan - Bojongnegara	7.64
2	Gebangilir - Waled	10.50
3	Jatiseeng - Pabuaran	2.10
4	Cilengkrang - Cihowe	2.30
	Jumlah yang telah dilaksanakan	131.61



3. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program pelayanan administrasi kependudukan meliputi pelayanan penerbitan e-KTP, akte kematian, akte kelahiran, KIA dan KTP digital, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.25 Pelayanan Administrasi Kependudukan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	PELAYANAN	JUMLAH
1	Jumlah perekaman KTP elektronik	8.080
2	Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan	27.242
3	Jumlah KIA yang diterbitkan	9.214
4	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	8.483
5	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	2.366

4. Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan pelaksanaan kampung bersih, dan pelayanan bantuan sarana prasarana persampahan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.26 Pelayanan Persampahan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Bantuan sarana prasarana persampahan	1 unit motor roda 3
2	Pelanaan pelaksanaan kampung bersih	Kerja bakti di alun-alun desa, alun-alun kecamatan dan lapangan parkir

5. Penanganan Pengangguran

Pelayanan penanganan pengangguran meliputi pelayanan pelatihan calon tenaga kerja, pelayanan pemagangan calon tenaga kerja, pelayanan penempatan calon tenaga kerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.27 Pelayanan Penangan Pengangguran Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pelatihan yang dilakukan, jumlah peserta yang dilatih per tema	176
	Las Industri	32
	Teknik Sepeda Motor	32
	Menjahit	32
	Meubeulair Kayu	16
	Teknik Pendingin	16
	Audio Video	16
	Teknik Handphone	16
	Operator Komputer	16



No	Uraian	Jumlah
2	Jumlah peserta magang per tema	400
	Manufaktur	398
	Perbankan	1
	Retail	1
3	Jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan	0

Dari tabel di atas, sampai dengan Triwulan I jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 176 orang dan jumlah pencari kerja yang telah dilakukan pemagangan sebanyak 400 orang. Namun dari keseluruhan pencari kerja yang telah dilatih dan telah dilakukan pemagangan belum ada yang ditempatkan sehubungan masih dalam proses penyepakatan dan koordinasi dengan perusahaan yang akan ditempatkan. Mengingat memperhatikan juga kondisi perusahaan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terbaru.

6. Penanganan Banjir

Pelayanan penanganan banjir meliputi pelayanan normalisasi sungan dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.28 Pelayanan Penanganan Banjir Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	LOKASI PEKERJAAN	PANJANG PENANGANAN	WILAYAH
1	PEMBUANG SIMBAL	1,33 Km	Desa Jagapura wetan Kec Gegesik
2	PEMBUANG SIENDUT	1,55 Km	Desa Gegesik kulon Kec.Gegesik
3	PEMBUANG ANAK CANGKRING	1,30 Km	Desa Gesik Lor Kec. Gegesik
4	PEMBUANG DUKUH SUWUNG UDIK	1,20 Km	Desa Cupang Kec. Gempol
5	PEMBUANG DUKUH SUWUNG HILIR	1,30 Km	Desa Cupang Kec. Gempol
6	PEMBUANG JAMBLANG KANAN	1,66 Km	KEC. DEPOK
7	PEMBUANG KARANG GENTONG	1,20 Km	KEC. DEPOK
8	SALURAN PEMBUANG BAKUNG SELATAN	3,01 Km	KEC JAMBLANG
9	SAL.PEMB SIGELAP 1	1,50 Km	KEC.PLERED
10	SAL.PEMB SIKLUWEK	0,80 Km	KEC.PLERED
11	Saluran Pembuang Keputon Kecamatan Weru	2,56 Km	KEC. WERU
12	Saluran Pembuang Situnggak Kecamatan Mundu	1,00 Km	KEC. MUNDU
13	Sungai Keputon Kecamatan Plumbon	0,40 Km	KEC. PLUMBON
14	Sal. Pembuang Ketapang	0,36 Km	



NO	LOKASI PEKERJAAN	PANJANG PENANGANAN	WILAYAH
15	Kali Singaraja	0,35 Km	DESA PENGARENGAN KEC. PANGENAN
16	Kali Pacangkalan	0,96 Km	DESA KARANGSEMBUNG KEC. KARANGSEMBUNG
17	Pembuang Anak Kali Lamaran Desa Cisaat	1,00 Km	DESA CISAAT KEC. WALED
18	Pembuang Ciserut Desa Cisaat	1,50 Km	DESA CISAAT KEC. WALED
19	Pembuang Irigasi Desa Karangsari	1,50 Km	DESA KARANGSARI KEC. WALED
20	Saluran Pembuang Kebon Agung dan Saluran Pembuang Kali Ribut	3,22 Km	KEC. LOSARI
21	Saluran Pembuang Janggolan	0,80 Km	KEC. GEBANG
22	Saluran Pembuang Curah	1,60 Km	KEC.GEBANG
Jumlah		30,10 Km	

7. Renovasi Sarana dan prasarana Pendidikan

Pelayanan renovasi sarana dan prasarana Pendidikan meliputi pelayanan pembangunan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan toilet sekolah dan rehabilitasi toilet sekolah dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.29 Pelayanan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

No	Nama Kegiatan	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah yang direhab (lokal)
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Tegalwangi	Weru	3
2	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Mandala	Dukupuntang	4
3	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 3 Cisaat	Dukupuntang	2
4	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Prajawinangun Wetan	Kaliwedi	4
5	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Palimanan Timur	Palimanan	3
6	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Palimanan Timur	Palimanan	1
7	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Pasaleman	Pasaleman	3
8	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Trusmi Wetan	Plered	3
9	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Kejiwan	Susukan	1
10	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Warugede	Depok	1



No	Nama Kegiatan	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah yang direhab (lokal)
11	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 2 Gebang Kulon	Gebang	3
12	Rehabilitasi Ruang Kelas	SDN 1 Waled Kota	Waled	3

8. Jaminan Kesehatan

Pelayanan jaminan Kesehatan meliputi pelayanan Kesehatan agi peserta PBI, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Peserta JKN	2.451.841
2	Jumlah Non Peserta JKN	722
3	Total Jumlah Penduduk	2.452.563

Dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebesar 2.452.563 jiwa, cakupan kepesertaan JKN sebesar 2.451.841 jiwa atau sebesar 99,97% dengan rincian kepesertaan JKN sebagai berikut:

Tabel 2.31 Pelayanan Kepesertaan JKN Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	KEPESERTAAN JKN	JUMLAH
1	PBI APBD	393.258
2	PBI PUSAT	1.228.816
3	Bukan Pekerja/Peserta Mandiri	26.971
4	Pekerja Bukan Penerima Upah	299.895
5	Pekerja Penerima Upah Badan Usaha	396.415
6	Pekerja Penerima Upah Penyelenggaraan Negara	106.486

9. Penyediaan Pangan Murah

Pelayanan penyediaan pangan murah meliputi pelayanan Gerakan pangan murah yang dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.32 Pelayanan Penyediaan Pangan Murah Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	TANGGAL	KECAMATAN
1	12 Februari 2025	Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	18 Maret 2025	Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani
3	20 Maret 2025	Desa Sigong Kecamatan Lemahabang
4	22 April 2025	Halaman Kantor Kecamatan Weru
5	24 April	Halaman Kantor Kecamatan Mundu

10. Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan meliputi pelayanan pengembangan kampung literasi di lokasi Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala dengan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.33 Kegiatan Pengembangan Kampung Literasi yang Telah dilaksanakan

NO	KEGIATAN
1	Penyusunan komsep program kampung literasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat, integrasi dengan program desa serta dukungan stakeholder literasi daerah
2	Penyusunan draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Kampung Literasi di Desa Suranenggala Kidul sebagai lokasi percontohan kampung literasi di Kabupaten Cirebon

Adapun konsep program kampung literasi Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34 Kegiatan Pengembangan Kampung Literasi

NO	ASPEK LITERASI	KEGIATAN
1	Literasi Digital	a. Pelatihan dan seminar digital b. Kelas membuat konten positif
2	Literasi Sosial dan Kewargaan	a. Kelas Bicara public dan simulasi musyawarah b. Diskusi kampung tematik pendidikan, lingkungan, ekonomi
3	Literasi Budaya dan Ekspresi Lokal	a. Pojok budaya, ruang baca koleksi budaya local dan ekspresi seni b. Kelas tari tradisional c. Festival literasi budaya
4.	Literasi Finansial	a. Pelatihan pencatatan keuangan UMKM berbasis digital b. Seminar pintar mengelola keuangan sejak dini
5.	Literasi Kreatif berbasis inklusi sosial	a. Pelatihan ekonomi kreatif (merajut, memasak, digital marketing, dll) b. Pelatihan daur ulang sampah
6.	Literasi Baca Tulis dan Numerasi	a. Pelatihan membaca nyaring b. Pelatihan teknik membaca cepat

11.Percepatan SILTAP dan APBDes

Pelayanan percepatan penyerapan SILTAP dan APBDes meliputi realisasi penyerapan anggaran dan realisasi jumlah desa yang telah melaksanakan proses penetapan APBDes dan Penyerapan anggarannya, dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.35
Pelayanan Percepatan SILTAP dan APBDes Periode 100 Hari Kerja Bupati Terpilih

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Realisasi SILTAP	Rp. 45.287.905.968,00
2	Realisasi Jumlah Desa yang melaksanakan tahap penetapan APBDes	317 desa
3	Realisasi jumlah desa yang mengajukan pencairan SILTAP	390 desa

2.1.15 Evaluasi Inovasi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan penelitian dan pengembangan sangat berkaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen yang berjudul *Research and Development, Innovation and The Science and Engineering Workforce* (2012) kegiatan penelitian dan pengembangan memainkan peran penting dalam mengarahkan perkembangan dan pembangunan di suatu bangsa. Dalam hal ini kegiatan penelitian dan pengembangan wajib dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan di kota/kabupaten di Indonesia sebagai upaya memajukan pembangunan dan mewujudkan tujuan negara Indonesia. Simpul penting yang mampu mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan adalah peran dari lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam menghasilkan temuan-temuan penting yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan daerah.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan pengambilan langkah dan kebijakan, karena rekomendasi yang dihasilkan didukung oleh data dan fakta yang valid. Selain diperlukan dalam hal identifikasi masalah-masalah strategis baik yang bersifat aktual dan potensial, termasuk yang diprediksikan akan dihadapi pemerintah daerah dalam jangka menengah atau jangka panjang, fungsi penelitian dan pengembangan juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Kepala Daerah dalam pengambilan langkah dan kebijakan strategis jangka pendek untuk menyikapi dinamika dan situasi di daerah. Hal ini penting, mengingat hasil-hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat dapat mengarah pada terciptanya efektivitas pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing wilayah serta terwujudnya pemerintahan yang transparan.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 menyatakan bahwa riset merupakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah melalui Riset Nasional yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Litbang yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan riset/penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan. Dengan adanya fakta tersebut, sudah seharusnya kegiatan penelitian dilaksanakan secara optimal. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas dan kerangka kebijakan arah penelitian dan pengembangan iptek yang dituangkan dalam kebijakan strategi nasional iptek, yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan dan strategi penelitian di daerah.

Inovasi daerah merupakan sarana pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi daerah, lembaga penelitian dan pengembangan di Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah untuk kemudian dirumuskan berbagai rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang secara lebih lanjut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Tujuan dari pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- b. Mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon agar sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan *good governance*;
- c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap proses Inovasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;



- d. Meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga dapat diterima masyarakat, tepat dan berkelanjutan; dan
- e. Memberikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.
- f. Mengukur tingkat Inovasi Daerah di Kabupaten Cirebon;
Inovasi Daerah yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon memenuhi bentuk inovasi sebagai berikut:
 - a. Inovasi tata kelola pemerintah daerah.
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kriteria Inovasi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. Dapat direplikasi.

Inovator dan sumber daya manusia yang mengembangkan inovasi daerah di Kabupaten Cirebon dapat berasal dari:

- a. Bupati;
- b. Anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah; dan
- e. Anggota masyarakat.

Proses pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Cirebon melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pengusulan Inisiatif Inovasi;
2. Uji coba pelaksanaan inovasi;
3. Penerapan inovasi;
4. Penetapan inovasi daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah;



- 5. Penilaian inovasi daerah di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
- 6. Pemberian insentif inovasi daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor Bupati Nomor 050/Kep.166-Bappelitbangda/2023 Tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2023, telah ditetapkanlah daftar inovasi daerah untuk tahun 2023 dan seterusnya. Adaun evaluasi daftar inovasi daerah per triwulan I di Kabupaten Cirebon tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36
Daftar Inovasi Daerah Per Triwulan I Di Kabupaten Cirebon Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Status Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	Sistem Informasi Laporan Individu Sekolah (SILAIS)	Aktif	
2. a.	Dinas Kesehatan	Sistem Sigap Cepat Eman Rakyat (SICERIA)	Aktif	
		Surat Ijin Praktik (SIP) <i>Online</i>	Aktif	
		Aplikasi untuk Mendukung Gizi Seimbang Cegah Stunting (Zi-Banting)	Aktif	Updating Menu Baru di Aplikasi Android Zi-Banting
b.	UPTD Puskesmas Cibogo	Gerakan Baca Buku Tujuh Menit (GERBABUKATUM)	Aktif	
		Temukan dan Kawal Ibu Hamil Resiko Tinggi (MUKA BURI)	Aktif	
		Serentak Jemur Ibu Hamil (SEMUR BUMIL)	Aktif	
c.	UPTD Puskesmas Gegesik	Jaring Ibu Hamil Resti agar Penanganan Maksimal (JABURE APEM)	Aktif	
		Temukan ODGJ Mengunjungi Rumah Agar Mendapatkan Terapi (TOMAT)	Aktif	
		Periksa Jantung (EKG) untuk Kesehatan (PEJANTAN)	Aktif	
d.	UPTD Puskesmas Waled	Jemput Layani Penderita TB Paru dengan Skreening Kencing Manis (JELITA TB MANIS)	Aktif	
e.	UPTD Puskesmas Gembongan	Temukan Obati Bersama Team TB (TOBAT TB)	Aktif	
		Aksi Peduli Stunting (AKTING)	Aktif	
f.	UPTD Puskesmas Sindangjawa	Elektronik Sistem Pendaftaran Pasti Bebas Antri (ENTER SPASI)	Aktif	
g.	UPTD Puskesmas Gunungjati	Gerakan Masyarakat Pendukung Air Susu Ibu (GEMPA SUSI)	Aktif	
h.	UPTD Puskesmas Pabuaran	Turunkan Kasus Darah Tinggi dan Diabetes Melitus (TUAN SUDARTING & BI NTUS)	Aktif	
i.	UPTD Puskesmas Astanalanggar	Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk (GEMA PETIK)	Aktif	
j.	UPTD Puskesmas Ciperna	Bareng Kader Jaring dan Temukan TB (BAKAR JAMU TB)	Aktif	
		Gerakan Mama Berikan ASI Eksklusif (GEMA ASIEK)	Aktif	



No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Status Inovasi Daerah	Keterangan
k.	UPTD Puskesmas Jamblang	Sistem Informasi Aplikasi Internal Puskesmas (SIAPIK)	Aktif	
		Inovasi dalam Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jamblang	Aktif	
l.	UPTD Puskesmas Waruroyom	Program DARING BERGENGSI (Deteksi, Atasi dan Rawat Stunting Berbasis gizi dan Sanitasi)	Aktif	
		Program JERUK PERES PAHIT (Jaring dan Kurangi Hipertensi Diabetes Pengobatan Hingga Terkontrol)	Aktif	
		Program KNALPOTT (Kenali, Periksa dan Obati Tuberkulosis Sampai Tuntas)	Aktif	
		Program PLACENTA (Persalinan Lancar Aman Tertangani)	Aktif	
3.	RSUD Waled	Peresep-an Obat Elektronik	Aktif	
		Skrining/Pelayanan Talasemia dan Tuberkulosis Resisten Obat	Aktif	
		Ruang Prosedur Terpadu	Aktif	
4.	RSUD Arjawinangun	Sistem Pelayanan Rujukan dan Pendaftaran Rawat Jalan (SIRUDAL)	Aktif	
5.	DPKPP	Inovasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.	Aktif	
		Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda yang Dimohon SKPD serta Updating Database Pertanahan	Aktif	
6.	Dinas Sosial	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Aktif	
		Sistem Informasi Pepek (SIPEPEK)	Aktif	
7.	Satpol PP	<i>Mini Command Center</i>	Aktif	Aplikasi Berubah Nama Menjadi Lapor Praja
8.	DPMPTSP	Pengaduan <i>Online</i>	Aktif	
		Replikasi Jabar Jelita (Jabar <i>Electronic Assistance</i>)	Tidak Aktif	Aplikasi di gantikan OSS Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
		Mal Pelayanan Publik (MPP)	Aktif	
9.	Disarpus	Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)	Aktif	
10.	Disdukcapil	Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (SINTREN)	Tidak Aktif	Inovasi sudah tidak lagi digunakan
		Terpadu Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran Juga Akta Kematian (TAPAK JALAK)	Aktif	



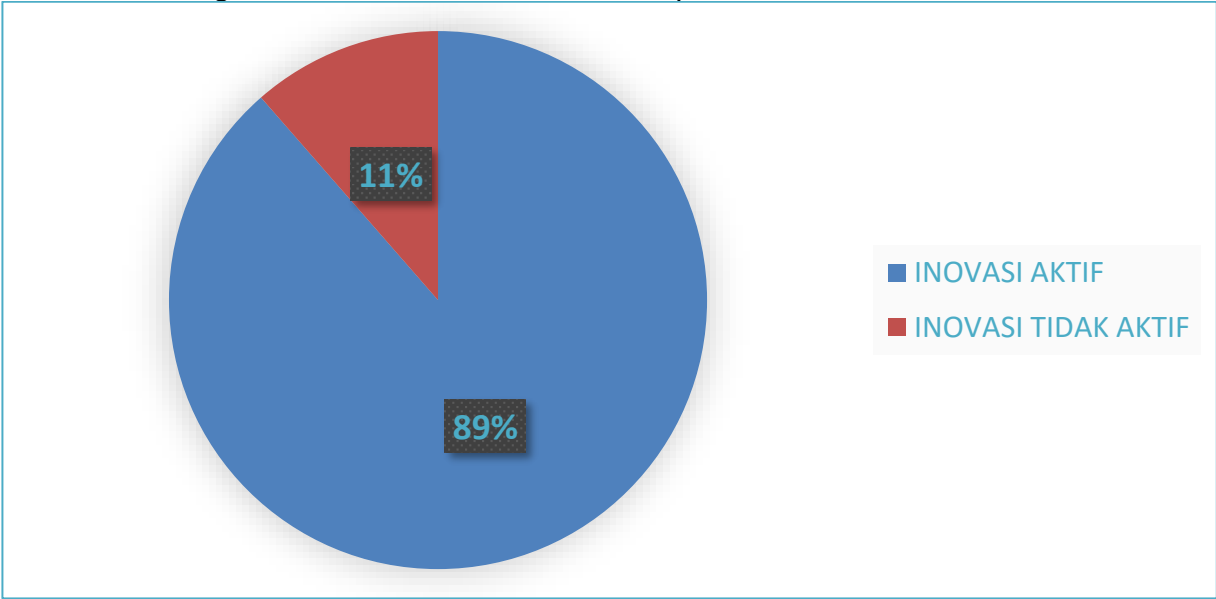
No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Status Inovasi Daerah	Keterangan
11.	Bappelitbangda	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan (SILITBANG)	Aktif	
		E-Perencanaan yang terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan Daerah (EPERENCANAAN)	Aktif	
		Sistem Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi dalam e-Perencanaan dan Penganggaran (SIMISKIN RANGGA).	Tidak Aktif	Inovasi sudah tidak lagi digunakan
		Rumah Aspirasi Masyarakat Kabupaten Cirebon (MAHAR MAS KATON).	Aktif	
		Pedoman Verifikasi Renja dan Sistem Analisis Penilaian Prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah (PADO SIAP KERJA)	Aktif	
		Augmented Reality (AR) Cakrabuwana	Aktif	
		Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Wilayah	Tidak Aktif	Inovasi sudah tidak lagi digunakan
12.	Bapenda	Optimalisasi Penyusunan Data Potensi Pajak Daerah Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Potensi Pajak Daerah (SIPJEH)	Tidak Aktif	Digantikan oleh Inovasi Akang Surja
		Aplikasi Kanggo Sedulur Pajak (AKANG SURJA)	Aktif	
13.	Disbudpar	Logo dan Tagline Pariwisata "CIREBON KATON"	Aktif	
		Cirebon Katon <i>Tour on Bus</i> (CITROS)	Aktif	
14.	Disperdagin	E-Retribusi Pasar	Aktif	
15.	DKPP	Sistem Informasi Kelembagaan dan Produksi Kelautan dan Perikanan (SIKDPKP)	Aktif	
16.	BKAD	Transformasi Layanan Melalui Penjaminan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Aktif	
		Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Penyediaan Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan) di Kabupaten Cirebon (PETERPAN)	Aktif	
		Sistem Informasi Rekonsiliasi Perbendaharaan <i>On Line</i> Untuk SKPD di Kabupaten Cirebon (SIREBON)	Aktif	
		Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Cirebon (SIKATON)	Tidak Aktif	digantikan aplikasi SIPD
		Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIP BMD)	Aktif	
		Sistem Verifikasi Keuangan <i>Online</i>	Aktif	
		Aplikasi Bayar Retribusi Daerah <i>Online</i> (BARIDIN)	Aktif	
		Sistem Informasi Rekonsiliasi <i>Online</i> SKPD (SIRAOS)	Aktif	
		Evaluasi Dokumen Perencanaan Anggaran (EDOCANG)	Aktif	
17.	BKPSDM	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Aktif	
		Sistem E-Kinerja Pegawai (EKIN)	Aktif	



No	Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Status Inovasi Daerah	Keterangan
		Presensi ASN Kab. Cirebon (M-PRAS)	Aktif	
18.	Dinas Pertanian	Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTANI)	Aktif	
		Pertanian Ramah Lingkungan (PERANG)	Tidak Aktif	Inovasi sudah tidak lagi digunakan
19.	DPPKBP3A	Sistem Informasi Kabupaten Layak Anak (SIKLA)	Aktif	
20.	Dinas Perhubungan	Call Center Penerangan Jalan Umum (PJU)	Aktif	
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Bank Sampah Katon Bersih (SEBANGSA KABEH)	Tidak Aktif	Inovasi sudah tidak lagi digunakan
JUMLAH INOVASI			70 INOVASI	

Sumber Evaluasi Inovasi Per Triwulan I Tahun 2025

Gambar 2.28
Grafik Tingkat Keberhasilan Inovasi di Kabupaten Cirebon Per Triwulan I 2025



Sumber Evaluasi Inovasi Per Juni 2024

Berdasarkan Grafik di atas, Disimpulkan bahwa Inovasi yang ada di Kabupaten Cirebon memiliki tingkat keberhasilan sebesar 88,57% atau terdapat 62 Inovasi yang masih aktif dari total 70 Inovasi yang ada, Dimana tingkat kegagalan Inovasi yang ada sebesar 11,43% atau terdapat 8 Inovasi yang tidak aktif / tidak digunakan lagi.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan daerah di satu sisi telah memunculkan *outcome* yang bermanfaat kepada Masyarakat dan berbagai pemangku



kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi pemangku kepentingan.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) kategori permasalahan yang perlu diidentifikasi yakni permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yang keduanya saling terkait satu dengan lainnya.

2.2.1 Permasalahan Daerah

Permasalahan daerah mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus. Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Beberapa permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37 Identifikasi Permasalahan Pokok Daerah
(Permasalahan Makro Pembangunan)

NO	PERMASALAHAN POKOK	ANALISA
1.	Pertumbuhan ekonomi telah mengalami pertumbuhan positif akan tetapi belum berada pada level semestinya dikarenakan Kabupaten Cirebon memiliki potensi daerah yang berdaya saing baik	Pada tahun 2020 - 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon cenderung berfluktuatif. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2020 sebesar -1,08 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mampu bergerak positif sebesar 3,74 persen dan Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Cirebon mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai 5,45 persen. Lalu terjadi sedikit perlambatan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 4,85 persen dan mengalami peningkatan Tahun 2024 sebesar 5,83 persen. Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebanyak 5 (lima) lapangan usaha mengalami pertumbuhan di atas 10 persen, yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,49 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sebesar 14,76 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,06 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,36 persen, serta lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,49 persen. Atas dasar tersebut, maka dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon difokuskan kepada 4 (empat) potensi sektor unggulan, yaitu: 1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 2. Sektor Industri Pengolahan 3. Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 4. Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum



NO	PERMASALAHAN POKOK	ANALISA
2.	Kualitas SDM belum optimal	Angka IPM Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebanyak 4,25 poin dari 69,61 poin di tahun 2020 menjadi 72,30 poin di tahun 2024. Walaupun IPM Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 namun pencapaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM nasional dan IPM Jawa Barat. IPM Jawa Barat di tahun 2024 sebesar 74,92 poin sedangkan IPM Nasional di tahun 2024 sebesar 75,02 poin. Hal ini menunjukkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah agar penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya masih memerlukan upaya kolaboratif dan sinergi bersama. Adapun masing-masing komponen IPM dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan sebanyak 2,99 poin dari 71,99 tahun di tahun 2020 menjadi 74,98 tahun di tahun 2024 yang berarti bahwa setiap bayi baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Meskipun angka ini cukup tinggi, namun AHH Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Jawa Barat, yakni 75,16 tahun, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan AHH Nasional, yakni 74,15 tahun. b. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 0.17 poin dari 12,25 tahun di tahun 2020 menjadi 12,42 tahun di tahun 2024. Namun HLS Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Barat sebesar 12,80 tahun dan HLS Nasional sebesar 13,21 tahun. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pemerintah Kabuaten Cirebon dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan penduduk agar memiliki SDM yang berdaya saing tinggi. c. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 0,73 tahun dari 6,92 tahun di tahun 2020 menjadi 7,65 tahun di tahun 2024. Walaupun RLS Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 namun pencapaiannya di tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan RLS nasional yang mencapai 8,85 tahun, serta RLS Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,87 tahun. Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui intervensi berbagai program pada jalur pendidikan. Namun RLS Kabupaten Cirebon masih tergolong rendah, yaitu penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 7,65 tahun atau Kelas 2 SMP semester kedua.
3.	Daya saing tenaga kerja masih rendah	TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,78 persen dari 11,52 persen di tahun 2020 turun menjadi 6,74 persen di tahun 2024., dimana pada tahun 2020 angkanya mencapai 11,52 persen. Walaupun TPT Kabupaten Crebon terus mengalami penurunan namun pencapaiannya di tahun 2024 masih dibawah pencapaian nasional walaupun diatas pencapaian Provinsi Jawa Barat. dimana TPT Jawa Barat sebesar 6,75 persen dan TPT Nasional sebesar 4,91 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, kabupaten Cirebon berada di posisi 13 dari 27 daerah. Daya saing tenaga kerja di Kabupaten Cirebon masih perlu peningkatan baik melalui pelatihan dan pemagangan serta penempatan tenaga kerja dengan bekerja sama bersama perusahaan yang telah memiliki tata kelola yang baik dan standar kompetensi tenaga kerja yang terstandar baik secara regional maupun secara global.



NO	PERMASALAHAN POKOK	ANALISA
4.	Masih ada kelompok Masyarakat yang rentan miskin	Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang hidup di bawah garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalai fluktuatif dimana tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 11,24 persen (atau setara dengan 247.940 jiwa) dan meningkat di tahun 2021 menjadi 12,30 persen (atau setara dengan 271.020 jiwa) dan terus menurun di tahun 2022-2024 sebesar 12,01 persen (atau setara dengan 266.100 jiwa) di tahun 2022 dan terakhir di tahun 2024 sebesar 11,00 persen (atau setara dengan 245.920 jiwa). Walaupun terus mengalami penurunan selama kurun waktu 2022-2024 namun pencapaiannya di tahun 2024 masih dibawah pencapaian Provinsi Jawa Barat 7,46 persen dan pencapaian nasional sebesar 9,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi yang disebabkan oleh masih kurangnya faktor-faktor produksi sehingga mengakibatkan masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja dan bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sementara dilain pihak garis kemiskinannya meningkat.
5.	Ketimpangan Pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi	Capaian indeks gini Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan sebesar 0.036 poin dari tahun 2020 sebesar 0,338 poin menjadi 0,374 poin di tahun 2024. Walaupun indeks gini Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan naum pencapaiannya masih di bawah indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Tahun 2024 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat sebesar 0,421 poin dan indeks gini nasional sebesar 0,379 poin. Hal ini menunjukkan tingkat perekonomian cukup kondusif mengingat selama 3 tahun terakhir, pandemi covid-19 cukup berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat walaupun kondisi ekonomi mulai pulih kembali. Ketimpangan di Kabupaten Cirebon termasuk kedalam klasifikasi Moderat.
6.	Pendapatan perkapita masyarakat yang relatif rendah	Pendapatan per Kapita Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan sebesar 6,27 juta rupiah per kapita per tahun dari 21,87 juta rupiah per kapita per tahun di tahun 2020 menjadi 28,14 juta rupiah per kapita per tahun di tahun 2024. Walaupun pendapatan per kapita Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan akan tetapi pencapaiannya masih dibawah pencapaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pendapatan perkapita Provinsi Jawa di tahun 2024 sebesar 56,08 juta rupiah per kapita per tahun dan pendapatan perkapita nasional di tahun 2024 sebesar 78,62 juta rupiah per kapita per tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat maka Kabupaten Cirebon berada di peringkat 4 daerah PDRB per kapita terendah.

2.2.2 Permasalahan Terkait Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pada aspek ini merupakan permasalahan Pembangunan sesuai urusan pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permasalahan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari kajian masing-masing bidang/urusan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Cirebon terhadap kinerja capaian masing-masing urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, penyajian permasalahan dilakukan dengan memadukan dan mempertimbangkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan



pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Adapun identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.38 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalah
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN	Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Sedangkan masih belum meratanya rasio guru PNS di tingkat SD dan SMP, tidak berbanding lurus dengan jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahunnya sekitar 200 guru
		Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok, masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga
		pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terqualifikasi baik, sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah
		Aksesibilitas Pendidikan masih rendah
		Kompetensi dan profesionalisme Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah
2	KESEHATAN	Mutu dan jumlah sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan masih kurang
		Tata Kelola Pendidikan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup (continuum of care)
		Masih tingginya persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dengan risiko tinggi.
		Masih tingginya anemi pada remaja putri
		Masih tingginya prevalensi balita wasting (gizi kurang)
		Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang layak (sehat)
		Masih rendahnya PHBS masyarakat di semua tatanan
		Makin luasnya potensi bencana dan masalah/krisis kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan Belum terpenuhinya SDM kesehatan baik kualitas, kuantitas maupun distribusinya di puskesmas dan Rumah sakit
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sarana kesehatan
		Belum optimalnya pengawasan PIRT
		Masih terjadi keracunan makanan di masyarakat
		Masih rendahnya PHBS di semua tatanan



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan masih rendah
		masih rendahnya pemanfaatan TT RSUD, capaian persentase penggunaan tempat tidur (BOR 65% - 85%)
		Kualitas pelayanan publik belum optimal
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Keterbatasan sumber air baku termasuk sumber air permukaan (sungai) dan sumber mata air; Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah; Tingginya kebocoran dan pendangkalan saluran irigasi
		Keterbatasan penyediaan infrastruktur pengelolaan SDA serta Keterbatasan cakupan pelayanan air bersih, terutama di musim kemarau di daerah yang tidak/kurang mempunyai potensi sumber air
		Tingginya potensi banjir di desa-desa/kawasan permukiman dan Potensi genangan pada titik-titik tertentu
		Meningkatnya intensitas kemacetan di Kecamatan alun dan Kecamatan Kedawung
		Terbatasnya pembangunan infrastruktur perdesaan; Keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
		Masih tingginya pola BABS masyarakat melalui pemanfaatan sungai untuk kegiatan MCK
		Terbatasnya fasilitas pengolahan limbah cair (IPAL) dan belum adanya IPLT; Masih terbatasnya capaian pengurangan sampah; Keterbatasan cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah
		Sosialisasi/edukasi terkait perizinan PBG; Pengawasan dan penertiban bangunan; Keterbatasan pelayanan informasi jasa konstruksi
		Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung pengelolaan infrastruktur (mis. uji konstruksi dalam penanganan jalan)
		Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon serta Belum optimalnya penanganan permukiman pada kawasan strategis
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pendataan Belum Optimal dalam pengelolaan database Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Keterbatasan pembiayaan/anggaran penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
		Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan PSU



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Masih banyaknya RTLH yang belum teridentifikasi dan tertangani
		Belum tertibnya administrasi pertanahan
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal, belum optimalnya penataan toleransi kehidupan beragama masyarakat, kegiatan dan personal linmas masih terbatas; dan upaya penegakan Perda belum optimal
		Koordinasi penanganan gangguan ketentraman masih rendah; kurangnya pemahaman SDM dan jabatan fungsional Satpol PP terhadap tugas dan fungsi; belum optimalnya penanganan bencana; dan masih rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan bencana
6	SOSIAL	Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Cirebon mengakibatkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin
		Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal
		Masih tingginya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya belum optimal
		Belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial
		Rendahnya kesediaan masyarakat menjadi relawan sosial
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	
1	TENAGA KERJA	Perencanaan kebutuhan tenaga kerja mikro dan makro yang belum match dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
		Kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
		Minimnya pelibatan balai latihan kerja pemerintah, swasta maupun komunitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
		Sarana dan prasarana pelatihan kerja yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelatihan kerja
		Rendahnya penyerapan angkatan kerja terutama yang memiliki kompetensi
		Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat bekerja di sektor formal



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Masih terdapat CPMI unprosudural
		Kondusifitas hubungan industrial
		Terbatasnya SDM Pegawai dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Cirebon, sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan/pembinaan sesuai dengan kewenangan
		Kompetensi SDM pegawai belum mampu mengimbangi dinamika peraturan perundang-undangan, dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri
		Belum optimalnya penggunaan/pemanfaatan Tekhoologi Informasi (IT) berbasis Web/aplikasi untuk penyebaran informasi ketenagakerjaan, membangun database Ketenagakerjaan mandiri
		terutama menunjang Pelayanan publik bidang ketenagakerjaan
		Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan publik urusan Ketenagakerjaan maupun back office, baik Bangunan, hardware dan software penunjangnya
2	URUSAN PANGAN	Belum terbentuknya lembaga otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD) Kab. Cirebon
		Masih terdapat heuleur yang belum maksimal sanitiasi hygiene sesuai standar kewanaman pangan; Masih ditemukan bahan pangan segar dan jajanan yang tidak aman dikonsumsi; kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pola konsumsi makanan yang B2SA
		Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (Daya beli) dan Fisik; Sebaran wilayah produksi hanya di daerah - daerah tertentu dimana arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen
		Rantai Distribusi yang panjang yang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen; Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Masih terdapat desa rentan rawan pangan
		Pengembangan perikanan tangkap per kecamatan masih belum merata
		masih terbatasnya teknologi yang dihadapi oleh nelayan tangkap; masih terbatasnya pengembangan perikanan budidaya, termasuk ketersediaan lahan untuk budidaya; terbatasnya pemahaman pembudidaya ikan mengenai konsep-konsep produksi; kurang optimalnya penggunaan balai benih ikan



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		kurang optimalnya kawasan khusus budidaya perikanan serta belum cukup tertatanya pasar dalam pengembangan perikanan budidaya; kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah; Sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan yang belum optimal Pasar masih berkembang dengan jaringan yang bersifat individu masih bersifat konvensional memerlukan terobosan dengan sistem e-commerce dengan optimalisasi teknologi Perlunya penataan sistem pemasaran berbasis korporasi yang terintegrasi dengan para produsen yaitu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta faktor produksi lainnya; belum dapat dipenuhi secara optimal permintaan perikanan; masih tebatasnya jumlah usaha yang bergerak pada industri pengolahan perikanan
3	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	Target pemantauan kualitas air cenderung fluktuatif karena masalah jumlah sumur pantau serta adanya pencemaran air baku pada lokasi sumur pantau Penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis serta target IKU yang fluktuatif dan cenderung berkurang Pembangunan wilayah menyebabkan konversi lahan Adanya penurunan capaian akibat peningkatan pertambahan volume sampah yang tidak diimbangi kapasitas angkut dan pengelolaan di TPA; Adanya penurunan pengelolaan sampah karena unit pengelola yang tidak beroperasi maksimal akibat masalah anggaran pada masa pandemi Hanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam kegiatan, sementara penyelenggaraan KLHS tidak digunakan / tidak masuk dalam kegiatan Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta penyiapan prasarana dan sarana dalam mendukung program KEHATI; Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas pengawas (PPLH); Tidak ada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 tidak digunakan



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan serta Koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dirasa tidak optimal
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pendampingan serta Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menyebabkan perlunya perencanaan Gerakan Peduli LH yang lebih komprehensif, operasional, dan tepat sasaran
4	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya capaian kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 18 Tahun Ke atas
		Belum optimalnya capaian kepemilikan Akta Kematian dan kepemilikan Buku pokok pemakaman
		Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan
		Proses pelayanan administrasi kependudukan memerlukan waktu yang lama
		Keterbatasan blanko KTP-el, sering terjadi gangguan jaringan serta ketersediaan peralatan pelayanan yang belum mencukupi
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum Optimalnya Penatausahaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan
		Belum Maksimal nya SDM Aparatur Pemerintahan Desa
		Masih banyak Bumdes Yang belum berbadan hukum
		Belum Optimalnya Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
		Belum optimalnya peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan sarpras desa
		Belum diberdayakan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
		Ekonomi Desa oleh Pemerintahan Desa dalam Proses pembangunan desa
		Terbatas nya jumlah sdm dinas PMD sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan desa dan masyarakat



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat; Masih tinggi angka unmetneed; Rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait dengan kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kurang pengetahuan Kader terkait dengan UPPKS; Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asus yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan
		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang belum di-Perdakan yang terintegrasi pada Sisitem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU)
		Pentingnya masyarakat atau Kepala Keluarga terpapar isi pesan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) pada advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan
		Pentingnya stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pembangunan Keluarga,
		Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana)
		Perlunya peninjauan kembali terkait Tugas dan Fungsi pada Kegiatan Sub Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan pada Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022, BAB II; Bagian Kelima pasal 7 huruf c) dan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.32-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 061.1/Kep.32-Org/2022 Nomor 2
		Belum maksimalnya kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Pentingnya Data Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) untuk mendukung Data Total Fertility Rate (TFR); Pentingnya Data Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun untuk mendukung Data Total Fertility Rate (TFR); Belum Tersedianya secara rutin Data Wanita Usia Subur yang melahirkan berdasarkan usia (15 Tahun - 49 tahun) untuk mendukung Data Angka Kelahiran Total (TFR)
		Belum Tersedianya secara rutin Data Laju pertumbuhan penduduk (LPP); Terbatasnya sarana dan prasarana ramah anak di Kabupaten Cirebon; belum bersinergi kerjasama unsur pemerintah dan dunia usah, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Kabupaten Layak Anak; kurang optimalisasi kegiatan di Pemenuhan Hak Anak; Rendahnya pemahaman pemerintah, dunia usaha, media serta LSM terkait pemenuhan hak anak
		Keterbatasan jumlah SDM di Puspaga; masih kuatnya beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan anak seperti faktor budaya, faktor keluarga dan pergaulan bebas
		Kurangnya sinergitas antar OPD dalam menjalankan program pencegahan perkawinan anak; keterlibatan anak dan keluarga dalam pencegahan masih minim; Terbatasnya kemampuan kelembagaan (Satgas PPA tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa); kurangnya penguatan kelembagaan lintas sectoral; Belum optimalnya kerjasama jejaring antar unsur
		pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media masa
		Belum optimalnya pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Rendahnya pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah
		Masih tingginya Perceraian di Kabupaten Cirebon; Masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Cirebon; Tingginya angka kelahiran; Prevalensi Stunting masih tinggi; Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan dan Anak; Masih tingginya kemiskinan pada kaum perempuan (kepala keluarga perempuan) di Kabupaten Cirebon; Rendahnya ketahanan keluarga
7	PERHUBUNGAN	Meningkatnya hambatan lalu lintas akibat aktivitas di pusat-pusat kegiatan (komersil)
		Perencanaan prasarana dan sarana jalan kurang berjalan
		Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Kebutuhan SDM yang didukung kemampuan dan perangkat serta pelayanan masyarakat tidak optimal
		Adanya kontradiksi antara nomenklatur urusan dengan kebijakan terkait kewenangan urusan daerah
		Angkutan umum kalah bersaing dari angkutan online dan sepeda motor yang lebih praktis
8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sekolah, UPT Puskesmas belum terkoneksi dengan jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Cirebon
		Perangkat Jaringan TIK Pemerintah Kabupaten Cirebon masih ada yang menggunakan teknologi Wireless, belum sepenuhnya menggunakan Fiber Optic (FO)
		Belum terintegrasinya layanan kegawatdaruratan; Belum adanya Disaster Recovery Center (DRC) sebagai back up data; Sistem Keamanan Informasi belum terstandardisasi ISO; Kurang tertatanya kabel-kabel jaringan Fiber Optic beserta tiang penyangga
		Proses bisnis dan data yang belum terintegrasi antar OPD serta Penguataan Implementasi SPBE
		Transformasi Digital serta banyaknya berita bohong yang berkembang di Kabupaten Cirebon
		Kurangnya koordinasi dan integrasi informasi antar perangkat daerah
		Ketidakseragaman penyajian informasi yang dibutuhkan; Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam hal publikasi; Keterbatasan
		anggaran dalam hal publikasi; Kurangnya akses informasi public
9	STATISTIK	ketersediaan data sektoral belum optimal
		pemanfaatan data sektoral belum Maksimal
		SDM pengelola data statistik belum maksimal
		Pemanfaatan Data Geospasial
10	PERSANDIAN	Belum adanya Dasar Hukum yang mengatur tentang Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon
		Penggunaan jaringan sandi (email dinas cirebonkab) belum optimal digunakan di lingkungan pemerintah kabupaten cirebon dalam komunikasi antar perangkat daerah
		Belum semua ASN di pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki Sertifikat Elektronik (TTE)
		Belum dilaksanakannya sertifikasi ISO 27001 untuk mendukung keamanan informasi



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Masih belum terintegrasinya sistem yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Cirebon
		Standarisasi website dan aplikasi belum optimal
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Masih rendahnya daya saing koperasi
		Rendahnya daya saing usaha mikro
12	PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya promosi investasi dilakukan
		Belum optimalnya regulasi kebijakan daerah dalam mendukung kemudahan penanaman modal
		Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kurangnya optimalisasi peran serta pemuda dalam pembangunan
		Kurangnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai
		Kurangnya jumlah atlet yang berprestasi
14	KEBUDAYAAN	Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah serta kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat (ritus, adat istiadat, kesenian dan kesusastraan)
		Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian daerah
		Belum optimalnya media promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan; Masih rendahnya apresiasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata terhadap kunjungan wisatawan; Belum optimalnya pelaksanaan event rutin tingkat nasional
		Belum terbentuknya komite ekonomi kreatif serta belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
		Belum ditetapkannya rencana induk pembangunan pariwisata kab/kota serta tidak adanya aset destinasi pariwisata pemerintah daerah untuk dikembangkan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana menuju destinasi wisata serta masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan tempat wisata
		Masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara serta rendahnya kompetensi sumber daya aparatur
15	KEARSIPAN	Pengelolaan Arsip dinamis daerah kabupaten Cirebon belum terkelola dengan tertib
		Perangkat daerah belum mengerti bahwa nilai pengelolaan arsip daerah merupakan salah satu indikator dalam penilaian SAKIP



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Arsip kesejarahan kabupetan cirebon belum diolah dan dipreservasi dengan baik
		Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon belum terkelola dengan baik
		Arsip akibat bencana belum terselamatkan
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten tidak dapat dilakukan
		Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten belum terselenggara dengan baik
		Pembudayaan Gemar Membaca di masyarakat masih belum optimal
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
1	PERTANIAN	Sarana pendukung produksi belum memadai; Prasarana pendukung produksi belum memadai; Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian; Rendahnya inovasi di sektor pertanian
		Dampak perubahan iklim; Degradasi dan berkurangnya lahan pertanian; Belum terlaksananya konservasi terhadap lahan dan air
2	PERIKANAN DAN KELAUTAN	Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Tingginya ketergantungan nelayan terhadap tengkulak sehingga nilai tawar nelayan rendah
		Kepatuhan nelayan dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
		Masih rendahnya produksi dan produktivitas perikanan
		Tingginya harga pakan ikan
		Masih rendahnya penanganan olahan ikan yang berkualitas dan aman
		Minimnya pengetahuan masyarakat tentang olahan ikan yang aman dan berkualitas
		Cuaca ekstrim
3	PERDAGANGAN	Masih banyak ditemukan alat UTTP yang tidak bertanda sah serta rendahnya pengetahuan masyarakat/pemilik UTTP/Perusahaan tentang kewajiban tera/tera ulang alat UTTP nya
		Masih banyak perusahaan/IKM/UKM yang belum mengetahui peraturan mengenai pelabelan kemasan, penggunaan satuan ukuran, dll dalam hal BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang sesuai dengan UU Metrologi Legal No. 2 Tahun 1981
		Banyak Masyarakat umum/konsumen yang belum mengetahui tentang Metrologi Legal



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Minimnya fasilitas alat penunjang/SARPRAS/kendaraan untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan/Penyuluhan serta pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal
		Masih ada alat standar yang belum terkalibrasi/terverifikasi, sehingga legalitas alat untuk pengujian BDKT dan Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP kepada masyarakat belum maksimal
		Tidak adanya reward dan punishment kepada masyarakat/pemilik UTTP/Perusahaan serta tidak adanya Data Base untuk Data Potensi UTTP dan BDKT
		Banyak masyarakat umum/konsumen yang tidak yakin dengan hasil takaran/timbangan serta banyaknya aduan masyarakat yang merasa takaran PU BBM/SPBU tidak sesuai
		Terbatasnya kemampuan SDM kemetrologian; Banyak UTTP yang belum bisa di tera/tera ulang; kurangnya Inovasi Pelayanan tera/tera ulang uttp
		Masih kurangnya pemahaman pemanfaatan bahan baku; belum berkembangnya produk-produk olahan berbahan baku local; Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industry
		kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan standardisasi dan sertifikasi produk industry; Kurangnya Komitmen Pelaku Usaha dalam Penerapan dan Keberlanjutan standardisasi dan sertifikasi produk industry; Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk industry
		Belum terintegrasinya data dan informasi industri; Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan kegiatan industry;
		Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan industry
4	PERENCANAAN	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tingkat pemerintah masih perlu ditingkatkan
		Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal
		Belum teridentifikasinya permasalahan primer yang di-breakdown dalam skala prioritas pembangunan pada masing-masing perangkat daerah
5	KEUANGAN	Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja core values ASN "BERAKHLAK" dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" yang merupakan strategi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
		Sinergi dan koordinasi antar unit kerja belum optimal
		Tingkat pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan barang milik daerah terhadap regulasi belum memadai
		Kurang tertibnya pengelolaan barang milik daerah pada semua perangkat daerah
		Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum terintegrasi
		Penyerapan belanja pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan alokasi yang telah diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran
		Digitalisasi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah belum berjalan optimal
		Tingkat pemahaman alur proses penatausahaan keuangan dan barang milik daerah di masing-masing perangkat daerah masih rendah
		Verifikator di perangkat daerah belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
		Penggunaan aplikasi SIPD Kemendagri belum dapat berjalan secara optimal dan masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD
		Penggunaan aplikasi E-BMD Kemendagri belum dapat berjalan optimal dan masih menggunakan aplikasi tersendiri dalam proses pengelolaan barang milik daerah
		Pensertifikatan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa tanah masih belum optimal
		Penyusunan RKBMD perangkat daerah baik pengadaan maupun pemeliharaan belum mengacu pada kartu inventaris barang sebagai dasar pengalokasian anggaran
		Terkait dengan bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang optimal, permasalahan yang dihadapi adalah belum teridentifikasinya barang milik daerah yang tidak terpakai yang di perangkat daerah
		Penyesuaian kebijakan dan regulasi mengenai kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah



No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Ketersediaan data subjek dan objek pajak masih rendah
		Penggunaan sistem informasi dan teknologi pengelolaan pajak daerah masih rendah
		Ketersediaan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pajak Daerah masih kurang
		Kesadaran dan Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan masih rendah
3	KEPEGAWAIAN	Adanya deviasi antara jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan jumlah pemenuhan pegawai menyebabkan ketidak seimbangan distribusi beban kerja. Hal tersebut dikarenakan jumlah ASN baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang pension
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis belum merata. Hal tersebut dikarenakan Target ASN mengikuti diklat sebanyak 20 JPL/ASN per tahun belum tercapai sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam layanan kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara manual
5	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Pemerintah masih belum optimal
		Adanya pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan aparat pemerintah (ASN)
		Hasil temuan pemeriksaan BPK yang masih tinggi
		Standar kompetensi APIP secara kualitas/kuantitas belum sepenuhnya terpenuhi
		Belum optimalnya pemberdayaan Ormas sehingga tercapai Indeks Kinerja Ormas
		Belum optimalnya partisipasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Parpol
		Belum optimal dalam Pencapaian Indeks Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
		Belum optimal dalam Pencapaian Indeks Ketahanan Ideologi
		Belum optimal dalam Pencapaian Indeks Kewaspadaan Nasional



2.2.3 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025

Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dan memperkuat faktor-faktor pendorong. Selain itu diperlukan rencana tindak lanjut untuk memastikan agar target pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat meningkat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun factor pendorong, factor enghambat dan rencana tindak lanut hasil evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.39 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja pada pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Dukungan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana - Kerja sama dan koordinasi yang baik - Pengisian Simonek megacu pada Anggaran Kas dan Target Realisasi	Kurangnya komunikasi antar Bagian terkait capaian output tiap bulannya - Banyaknya output yang targetnya di akhir tahun (Bulan Desember)	Koordinasi dengan masing-masing Bagian yang ada di Sekretariat Daerah terkait capaian kinerja per bulannya
2.	SEKRETARIAT DPRD	1. Substansi raperda yang masih bersifat umum 2. Tahapan penyusunan dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pembahasan raperda sudah lengkap 3. Pemahaman materi raperda oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda dan Pemerintah Daerah yang bisa dipahami secara menyeluruh 4. Adanya Komitmen bersama tentang batas waktu penyelesaian pembahasan raperda 5. Adanya komitmen dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja	1. Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang waktunya bersamaan 2. Jadwal penyelesaian pembahasan raperda yang tidak disepakati di awal pembahasan 3. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja 4. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja	1. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana penunjang kinerja 2. Optimalisasi koordinasi antar unit kerja dan lembaga DPRD 3. Perlunya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Menghadapi kendala administrasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang bernuansa politis, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berupaya memberikan pemahaman yang logis dan rasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Dalam menghadapi kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan permintaan pegawai sesuai dengan kriteria yang diperlukan
3.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Ketercapaian kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 81,10% telah tercapai target tahun 2024 sebesar 75%, untuk target	Belum optimalnya upaya pengembangan kapasitas SDM terutama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih	Diperlukan sosialisasi dan kerjasama dalam fasilitasi program beasiswa pendidikan



		tahun 2025 sebesar 75,5% diharapkan bias dilakukan perubahan untuk menaikan targetnya di P-RKPD 2025	tinggi dalam program beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri	
4.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Digitalisasi dalam proses administrasi bidang keuangan telah berjalan dengan baik	Adanya penambahan alamat, letak dan luasan tanah sehingga proses sertifikasi belum tercapai optimal	melakukan penelusuran ulang kembali terhadap data objek tanah yang baru
5.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapainya 7 unsur prioritas dalam pencapaian IKD	1. Belum optimalnya dukungan anggaran dan SDM 2. belum adanya dukungan dari SKPD terkait untuk mencapai IRBI	Berkoordinasi melalui daftar pertanyaan untuk memenuhi data informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat memiliki eviden yang akurat
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, faktor pengawasan dan pengendalian secara optimal, kanal pembayaran online	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, piutang pajak yang tidak bias ditagih, inflasi	1. Sinergi seluruh stakeholder dan para pemangku kebijakan di pemerintah kabupaten Cirebon 2. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah 3. Upaya pengendalian dan pengawasan dilakukan secara maksimal
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Adanya Pengembangan aplikasi simonek (sistem informasi monitoring evaluasi kinerja) 2. Bappelitbangda berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi terkait entry aplikasi Satu Data sebagai basis data perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Keterlambatan penyampaian laporan dari perangkat daerah terkait tahapan perencanaan untuk kebutuhan dalam penyusunan RKPD; 2. Belum terkonsolidasinya data indikator tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan di dalam RPJMD di akhir tahun dikarenakan sumber data berasal dari institusi eksternal (BPS)	1. Segera memulai pendataan dari level paling bawah 2. Evaluasi capaian kerja secara rutin untuk mengurangi resiko kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan



			3. Belum teridentifikasinya permasalahan primer yang dibreakdown dalam skala prioritas penelitian dan pengembangan dalam menyelesaikan isu strategis permasalahan pembangunan	
8.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Ketercapaian nilai tingkat kegemaran membaca sebesar 68,97 poin dari target 44,67 poin atau sebesar 154,40%.	Indeks Pembangunan Literasi Tahun 2024 sebesar 57,56 poin dari target sebesar 62,20 poin atau sebesar 92,54%;	Diperlukan upaya digitalisasi surat dan arsip
9.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 0,37 % diharapkan dapat terus meningkat hingga target tercapai sebesar 10%.	1. Kesulitan untuk mendapatkan data PDRB sektor pariwisata yang di keluarkan dari BPS dikarenakan rilis pada akhir february 2025. 2. Kenaikan kunjungan wisatawan ke kabupaten cirebon tidak berdampak pada market share kunjungan wisatawan provinsi jawa barat yang mengakibatkan target market share tidak tercapai	1. Perlu ada evaluasi target market share kunjungan pariwisata provinsi jawa barat. 2. Perlu ada event skala besar untuk meningkatkan PAD dan PDRB sektor Pariwisata (Akomodasi, Mamin dan Hiburan)
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Persentase pemuda yang aktif, produktif dan kreatif meingkat sebesar 0,6% diharapkan terus meningkat hingga target sebesar 6,02% tercapai di akhir tahun.	Pemeliharaan sarana prasarana untuk fasilitas kepemudaan dan olahraga masih minim sehingga tidak optimal pemanfaatannya.	Diperlukan upaya kolaboratif dalam pemberdayaan kepemudaan
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Keluarga dengan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Lengkap sebesar 58,20% dari target sebesar 84%.	Ketercapain kinerja Perangkat Daerah yang masih belum optimal yaitu -Rata-rata Prosentase Keluarga dengan Kepemilikan Dokumen	Diperlukan upaya sosialisasi dan pengendalian terhadap data kependudukan baik yang masih aktif ataupun yang sudah tidak aktif atau sudah meninggal



			Kependudukan yang lengkap (KK, KTPel, KIA, Akta Kelahiran 0-18 thn) sebesar 85,28%	
12	DINAS KESEHATAN	Tahun 2024 sudah dilaksanakan percepatan peningkatan IKS, melalui kegiatan pertemuan koordinasi dan monitoring rutin -kerjasama tim yang baik - bidang yang kooperatif dalam menyiapkan data yang diminta	belum dilakukan update data pada aplikasi oleh kemenkes, update data terakhir pada bulan juni 2024 sampai sekarang belum ada update	mengelola data secara manual pebilaiian organiasai sudah selesai, tinggal menunggu hasil penilaian dari Inspektorat
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Peningkatan produksi didorong dengan tingginya permintaan pasar akan produk perikanan, baik intensitas pendampingan akan kapasitas pelaku usaha	Terdapat penurunan pada produksi budidaya, hal tersebut dikarenakan dampak ROB air laut dan berkurangnya lahan produktif untuk budidaya ikan	Perlu dilakukan mitigasi resiko dampak usaha dan dilakukan pembinaan terhadap masyarakat. Selain itu, perlu didorong dengan penyediaan Infrastruktur dan sarana prasarana dalam meningkatnya produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks SPBE Tahun 2024 sebesar 3,1 poin dari target 2,97 poin. Unuk tahun 2025 target sebesar 3,5 poin	Indeks keamanan informasi masih berada pada level 2	Diperlukan upaya peningkatan indeks keamanan informasi yang masih level 2
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Tercapainya 6 unsur prioritas dalam pencapaian IKK/IKU Dinas Koperasi dan UKM	Belum optimalnya dukungan terkait SDM	Terus melakukan koordinasi dan evaluasi terkait kinerja agar menghasilkan data yang lebih akurat
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan pelayanan persampahan sebesar 85,02 persen sudah mencapai target pada tahun 2024 sebesar 60 persen diharapkan tahun 2025 lebih ditingkatkan lagi.	Indeks kualitas air dan udara tahun 2024 belum mencapai target, yaitu sebesar 45,93 poin dari 49,50 poin dan 76,86 poin dari 77,22 poin. Untuk tahun 2025 targetnya sebesar 72,17 untuk indeks kualitas air dan 61,31 poin untuk indeks kualitas udara.	Diperlukan upaya kolaborasi bersama pentahelix dalam upaya penghijauan dan penanganan sampah



17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Persentase Intensitas tanam sebesar 33,33 persen dari target sebesar 90 persen	Persentase penyediaan sistem air minum tahun 2024 sebesar 47,31 persen dari target 64,01 persen. Untuk tahun 2025 diharapkan dapat ditingkatkan pencapaiannya	Diperlukan pendampingan dan kolaborasi bersama dalam pembangunan desa dan kabupaten baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
18	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Dukungan anggaran, SDM, saran dan prasarana serta manajemen yang handal	Kurangnya petugas, belum terlaksananya pelaksanaan penanggulangan kebakaran	Evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas dan pembinaan staf
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Indeks Desa Membangun tahun 2024 sebesar 0,797 poin dari target 0,75 poin. Untuk tahun 2025 ditargetkan 0,79 poin	Persentase Desa yang laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah terverifikasi masih belum optimalnya, di tahun 2025 ditargetkan 15 persen	Diperlukan pendampingan dan kolaborasi bersama dalam pembangunan desa dan kabupaten baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2,63 Trilyun dari target 10 trilyun atau sebesar 26,30 persen	Peningkatan investasi daerah perlu lebih ditingkatkan lagi	Masih diperlukan upaya optimal untuk peningkatan investasi daerah baik melalui promosi maupun temu bisnis
21	DINAS PENDIDIKAN	Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 84,41 persen dari target 94,50 persen agar dapat ditingkatkan pada Triwulan berikutnya	Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon masih belum optimal yaitu sebesar 93,13 persen	Diperlukan pembiayaan yang mencukupi untuk pemenuhan SPM pendidikan, baik yang bersumber dari APBD Kab, Banprov, DAK maupun APBN
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Total Fertility Rate sebesar 2,12 poin dari target 2,18 poin atau sebesar 2,18 poin	Rasio perempuan dan anak yang terlindungi sebesar 0,02 persen dari target 0,55 persen	Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk



23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024 sebesar 12,10 persen dari target 11,36 persen. Untuk tahun 2025 targetnya sebesar 25 persen	PDR sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor perlu lebih dioptimalkan	Diperlukan koordinasi lintas sektor terutama untuk pengendalian inflasi pada sektor perdagangan kebutuhan pokok masyarakat
24	DINAS PERHUBUNGAN	Rasio ketersediaan sarpras Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik sebesar 84,63 persen dari target 71,79 persen atau sebesar 117,89 persen. Diharapkan dapat diefisiensikan pembiayaannya	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi dari 7 titik baru 1 titik, diharapkan dapat tercapai targetnya di akhir tahun 2025	Diperlukan pembiayaan yang mencukupi untuk pembangunan jalan yang mantap dari APBN, DAK, Banprov.
25	DINAS PERTANIAN	- Alasan untuk JUT = adanya pola anggaran BANKEUDESUS sehingga pembangunan JUT & Irigasi pertanian meskipun bukan menjadi kewenangan pemda tetapi tetap bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa. - Alasan untuk (jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara & disegerakan pajak dan Perizinannya) - Sebagai kendaraan dinas sudah ditarik oleh BKAD sesuai dengan aturan maka dari itu kami tidak merealisasikan anggaran sesuai yang sudah di rencanakan	Proses penyusunan aturan sebagai payung hukum BANKEUDESUS lambat	1. Evaluasi pelaksanaan tahun ini sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan BANKEUDESUS Tahun 2025 2. Dinas sudah berkoordinasi dengan kementerian pertanian dan BKAD Kabupaten Cirebon bahwasannya kita harus mengikuti aturan yang berlaku
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Persentase permukiman yang Tertata tahun 2024 sebesar 99,14 persen dari target 100 persen. Diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2025	Prosentase tingkat kualitas permukiman sehat dan aman didukung dengan PSU sebesar 99,14 persen dari target 100 persen. Diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2025	Diperlukan pembiayaan yang mencukupi untuk penanganan kawasan kumuh baik dari DAK, Banprov maupun dari non APBD



27	DINAS SOSIAL	Persentase PPKS yang terlayani Kebutuhannya sebesar 2,962 persen dari target 15,52 persen. Diharapkan akhir tahun 2025 dapat tercapai target kinerjanya	Masih rendahnya motivasi PPKS untuk hidup layak, yaitu tahun 2024 -Prosentase Kemauan PPKS untuk Hidup Layak sebesar 2,004 persen.	Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk peningkatan penanganan PPKS terutama dengan membekali keterampilan untuk bekerja dan berpenghasilan tetap.
28	DINAS KETENAGAKERJAAN	karena adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait, prosentase tingkat produktivitas tenaga kerja meningkat	Karena belum ada tindaklanjut yang konkret/nyata	Perlu adanya koordinasi dengan berbagai pihak secara rutin
29	INSPEKTORAT	1. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap IRB dan MCP berjalan dengan baik 2. Penilaian IRB dan MCP diakhir tahun dan akan dilaunching di bulan Januari tahun depan berjalan dengan lancar 3. Penilaian IKM berjalan dengan baik.	1. Beberapa subkegiatan pelaksanaannya berada diakhir tahun seperti penjiilidan dokumen, dan belanja modal peralatan jaringan 2. Penginputan pelaksanaan subkegiatan terkendala dan terhambat karena SIPD yang sering sulit diakses 3. Sebagian besar subkegiatan dilaksanakan di semester II atau di akhir tahun	Membentuk Tim Khusus untuk pemantauan dan pengendalian (pemenuhan dokumen yang dibutuhkan)
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan tahun 2024 sebesar 76,19 persen dari target 76,50 persen atau sebesar 99,59 persen. Diharapkan pencapaiannya di tahun 2025 lebih baik lagi	Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan sebesar 6,33 persen dari total 76,55 persen atau sebesar 8,27 persen. Agar bisa dioptimalkan pencapaiannya hingga akhir tahun 2025 melalui upaya Tindak lanjut setiap pelanggaran atau pengaduan masyarakat terkait K3.	Memperbaiki pengisian capaian indikator sasaran



31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Terpenuhinya segala unsur dari indikator dari sasaran dari setiap program dan kegiatan di tahun 2024	Tidak ada faktor penghambat yang signifikan di tahun 2024	Penyelarasan dari rumusan dan sasaran yang lebih terfokuskan sehingga tercapainya target yang lebih terukur sesuai dari target yang telah ditetapkan persentasenya untuk setiap program dan kegiatan selanjutnya/periode berikutnya
32	KECAMATAN ARJAWINANGUN	Adanya Anggaran untuk menunjang target kinerja	kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
33	KECAMATAN ASTANAJAPURA	Adanya Anggaran untuk menunjang target kinerja	kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
34	KECAMATAN BABAKAN	Adanya Anggaran untuk menunjang target kinerja	kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
35	KECAMATAN BEBER	Adanya Anggaran untuk menunjang target kinerja	kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
36	KECAMATAN CILEDUG	Adanya Anggaran untuk menunjang target kinerja	kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka menyamakan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
37	KECAMATAN CIWARINGIN	1. Status indeks desa membangun dari total 8 desa, 6 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 8	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan



			desa, 2 desa belum berstatus desa mandiri	
38	KECAMATAN DEPOK	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
39	KECAMATAN DUKUPUNTANG	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
40	KECAMATAN GEBANG	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
41	KECAMATAN GEGESIK	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
42	KECAMATAN GEMPOL	1. Status indeks desa membangun dari total 8 desa, 2 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 8 desa, 6 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
43	KECAMATAN GREGED	1. Status indeks desa membangun dari total 10 desa, 8 desa berstatus desa mandiri.	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah



		2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 10 desa, 2 desa belum berstatus desa mandiri	2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
44	KECAMATAN GUNUNGJATI	1. Status indeks desa membangun dari total 15 desa, 3 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 15 desa, 12 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
45	KECAMATAN JAMBLANG	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
46	KECAMATAN KALIWEDI	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
47	KECAMATAN KAPETAKAN	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
48	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan



49	KECAMATAN KARANGWARENG	1. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 1 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 8 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
50	KECAMATAN KEDAWUNG	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
51	KECAMATAN KLANGENAN	1. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 3 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 6 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
52	KECAMATAN LEMAHABANG	Tercukupinya anggaran pada tahun berjalan	Kurangnya pemahaman pegawai untuk mencapai target kinerja	Selalu melaksanakan breafing dan rapat internal terkait tupoksi masing-masing bidang dan terkait target dan capaian kinerja



53	KECAMATAN LOSARI	1. Status indeks desa membangun dari total 10 desa, 4 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 10 desa, 6 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
54	KECAMATAN MUNDU	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
55	KECAMATAN PABEDILAN	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
56	KECAMATAN PABUARAN	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
57	KECAMATAN PALIMANAN	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
58	KECAMATAN PANGENAN	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
59	KECAMATAN PANGURAGAN	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan



60	KECAMATAN PASALEMAN	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
61	KECAMATAN PLERED	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
62	KECAMATAN PLUMBON	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
63	KECAMATAN SEDONG	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
64	KECAMATAN SUMBER	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
65	KECAMATAN SURANENGKALA	1. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 1 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 8 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
66	KECAMATAN SUSUKAN	1. Status indeks desa membangun dari total 12 desa, 5 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa,



		pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 12 desa, 7 desa belum berstatus desa mandiri	kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
67	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	1. Status indeks desa membangun dari total 13 desa, belum ada desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 13 desa, semua desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
68	KECAMATAN TALUN	1. Status indeks desa membangun dari total 11 desa, 7 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 11 desa, 4 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan



69	KECAMATAN TENGAH TANI	1. Status indeks desa membangun dari total 8 desa, 4 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 8 desa, 4 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan
70	KECAMATAN WALED	Adanya anggaran untuk menunjang target kinerja	Kurangnya pemahaman pegawai dalam mencapai target kinerja	Rapat internal dalam rangka persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan
71	KECAMATAN WERU	1. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 2 desa berstatus desa mandiri. 2. Adanya dukungan anggaran baik dari alokasi anggaran pagu indikatif kewilayahan (PIK) maupun pagu indikatif sektoral (PIS)	1. Kurangnya kompetensi pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah baik di kecamatan maupun di desa 2. Status indeks desa membangun dari total 9 desa, 7 desa belum berstatus desa mandiri	1. Bimtek dan pngawasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan kolaborasi pembangunan dari level desa, kecamatan hingga kabupaten untuk pencapaian target kinerja pembangunan



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH



Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2023 dan Tahun 2024) hingga Triwulan II Tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator makro pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

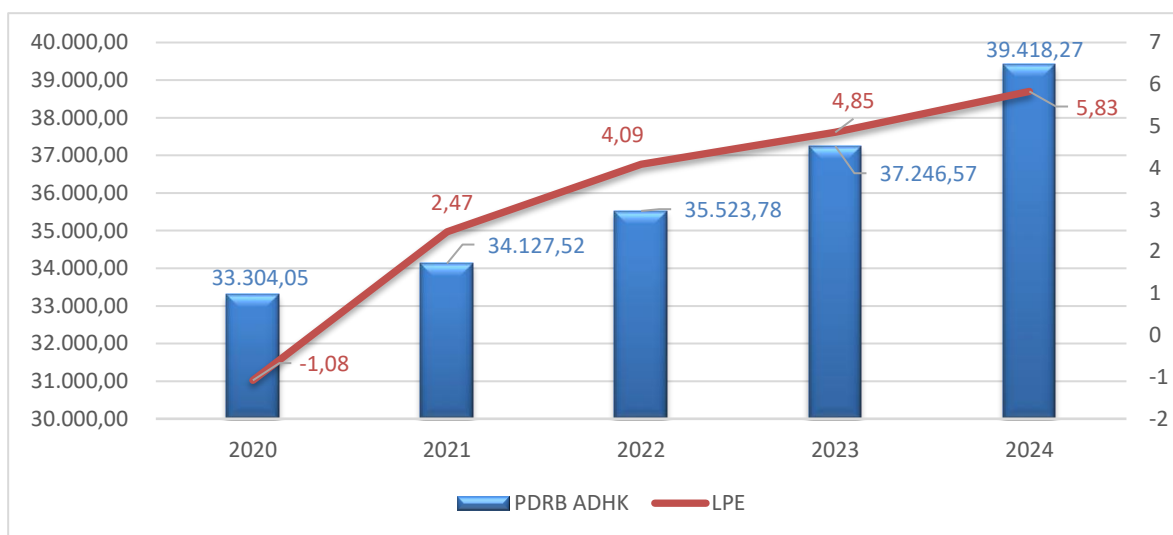
Arah kebijakan ekonomi daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan hasil pemutakhiran RKP Tahun 2025, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RKPD dan P-RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 serta dinamika perekonomian baik dalam skala lokal, regional maupun internasional yang terjadi hingga triwulan II tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi daerah untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

3.1.1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Hingga Triwulan II Tahun 2025

Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi dan peranannya dalam andil perekonomian Jawa Barat. Nilai PDRB Kabupaten Cirebon sebesar 67,196 trilyun memberikan kontribusi sebesar 2,38 persen terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2024 dan menempati peringkat 12 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara pada sektor lapangan usaha industri pengolahan, Kabupaten Cirebon menyumbang 1,18 persen terhadap PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jawa Barat.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon, yang salah satunya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari PDRB ADHK dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon selama 5 tahun terakhir (2020-2024) yang juga menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini Kabupaten Cirebon sebagaimana pada gambar berikut ini :

Gambar 3.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon, 2020-2024



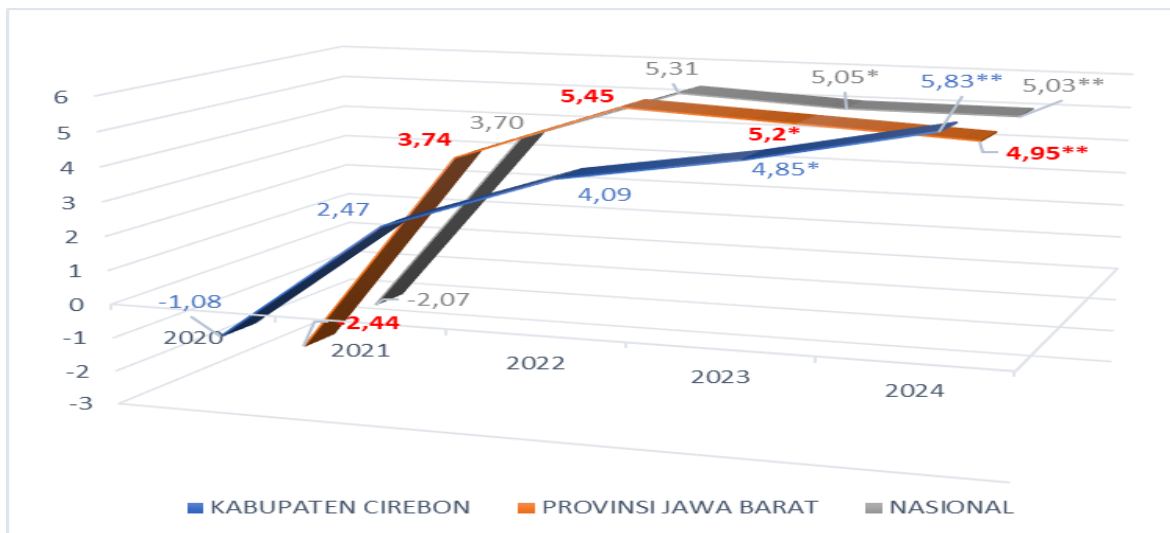
Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025, diolah
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Hingga akhir tahun 2024 pemulihan ekonomi Kabupaten Cirebon semakin menguat, hal tersebut ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,83 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan target daerah Kabupaten Cirebon tahun 2024 juga menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon **lebih baik** dari target daerah dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 5,08 persen. Selain itu, LPE Kabupaten Cirebon pada hingga akhir tahun 2024 sebesar 5,83 persen menunjukkan jika tingkat perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini Kabupaten Cirebon **tumbuh diatas 0 (nol)** bahkan pertumbuhannya **melebihi angka sebelum pandemi Covid-19** yang hanya berada dikisaran angka 4,68 persen. Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dengan rata-rata capaian wilayah lain di Jawa Barat sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini menunjukkan jika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan yang **lebih baik**, dimana LPE Kabupaten Cirebon sebelum pandemi covid-19 sebesar 4,68 persen tumbuh positif 1,15 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 5,83 persen



sedangkan rata-rata LPE wilayah lain di Jawa Barat sebelum pandemi covid-19 sebesar 5,66 persen tumbuh negatif 0,70 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 4,97 persen. Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan capaian nasional dan Jawa Barat disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024



Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025, diolah

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan capaian nasional dan Jawa Barat sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini juga menunjukkan jika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan yang **lebih baik**, dimana LPE Kabupaten Cirebon sebelum pandemi covid-19 sebesar 4,68 persen tumbuh positif 1,15 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 5,83 persen sedangkan capaian LPE nasional sebelum pandemi covid-19 sebesar 5,02 persen juga tumbuh positif namun hanya sebesar 0,01 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 5,03 persen.

3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif menuju tingkat keseimbangan pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19 pada beberapa sektor lapangan usaha, yang didorong oleh penormalan konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, terutama pada *peak season* hari besar keagamaan dan libur sekolah. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha 5 (*lima*) tahun terakhir disajikan pada table berikut ini :



Tabel. 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Lapangan Usaha	Laju Petumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.74	-0.09	4.00	-2.13	0,12
Pertambangan dan Penggalian	0.06	6.80	-0.05	-0.04	5,44
Industri Pengolahan	-1.15	2.56	4.69	5.38	5,87
Pengadaan Listrik dan Gas	-4.62	13.46	1.56	4.52	0,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.03	8.98	2.46	6.96	5,68
Konstruksi	-4.39	3.86	-0.03	-0.03	4,6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.03	3.32	2.30	2.02	2,54
Transportasi dan Pergudangan	-3.73	0.43	9.60	16.88	14,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9.54	-1.07	7.67	7.64	2,2
Informasi dan Komunikasi	30.47	4.88	6.10	5.51	20,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.33	4.74	0.85	4.97	5,11
Real Estat	1.26	9.30	4.77	4.19	15,98
Jasa Perusahaan	-10.31	8.12	9.96	8.76	0,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4.55	-0.92	-2.31	7.38	9,26
Jasa Pendidikan	7.59	0.08	2.95	9.85	2,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.92	7.37	5.05	4.90	2,05
Jasa lainnya	-2.36	1.21	12.59	13.35	5,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1.08	2.47	4.09	4.85	5,83

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai bidang dan sektor. Masa pemulihan dampak pandemi Covid-19, berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha menggambarkan bahwa hingga akhir tahun 2024 semua kategori lapangan usaha tumbuh positif. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 menggambarkan seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. PDRB dan LPE menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3.2.
PDRB dan LPE Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2023-2024

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2023*	2024**	LPE (%)	2023*	2024**	LPE (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.161,96	9.917,57	8,25	4.640,71	4.646,20	0,12
Pertambangan dan Penggalian	624,99	710,38	13,66	445,08	469,31	5,44
Industri Pengolahan	12.452,54	13.771,00	10,59	7.706,10	8.158,30	5,87
Pengadaan Listrik dan Gas	116,17	117,29	0,96	65,05	65,30	0,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	75,68	92,47	22,19	39,64	41,89	5,68
Konstruksi	6.551,08	7.051,00	7,63	4.015,83	4.200,44	4,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.333,98	8.774,19	5,28	5.256,04	5.389,80	2,54
Transportasi dan Pergudangan	6.257,44	7.631,90	21,97	3.312,59	3.806,34	14,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.078,30	2.191,56	5,45	1.269,89	1.297,80	2,20
Informasi dan Komunikasi	1.596,12	1.890,52	18,44	1.690,94	2.033,06	20,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.590,38	2.692,49	3,94	1.445,45	1.519,32	5,11
Real Estat	1.458,60	1.778,28	21,92	1.024,04	1.187,72	15,98
Jasa Perusahaan	586,82	595,47	1,47	373,06	373,84	0,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.667,37	1.755,76	5,30	896,17	979,15	9,26
Jasa Pendidikan	3.920,73	4.004,95	2,15	2.377,38	2.442,64	2,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.280,93	1.357,12	5,95	930,90	950,00	2,05
Jasa lainnya	2.556,68	2.864,09	12,02	1.757,71	1.857,14	5,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	61.309,76	67.196,03	9,60	37.246,57	39.418,27	5,83

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Laju PDRB ADHB Kabupaten Cirebon tahun 2024 menggambarkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang tumbuh 22,19 persen. Dominannya sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang ini disebabkan adanya kenaikan tarif PDAM Kabupaten Cirebon sebesar 18 persen pada tahun 2023. Selain sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami kenaikan sebesar 21,97 persen. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan harga BBM pada tanggal 10 Agustus 2024 sehingga berdampak pada kenaikan tarif transportasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang kuat ditunjukkan oleh berbagai sektor produksi terutama industri pengolahan, transportasi dan pergudangan serta perdagangan. Kinerja perekonomian Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi kinerja sektor industri karena sektor tersebut merupakan sektor dominan. Tahun 2023 sektor industri olahan nilainya sebesar 12,45 trilyun naik sebesar 10,59 persen menjadi sebesar 13,77 trilyun di tahun 2024. Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Cirebon memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bahan baku industri dan memberikan efek domino terhadap sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Peningkatan percepatan kinerja ekonomi dapat ditentukan dengan melihat



sektor unggulan disuatu wilayah berdasarkan struktur perekonomiannya. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase kontribusi suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dan atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha, 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)									
	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022*	2023**	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,93	15,20	15,57	14,94	14,76	13,70	13,36	13,35	12,46	13,32
Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,12	1,08	1,02	1,06	1,25	1,31	1,25	1,19	1,24
Industri Pengolahan	20,55	20,67	20,59	20,31	20,49	20,45	20,47	20,58	20,69	20,46
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,21	0,20	0,19	0,17	0,16	0,18	0,18	0,17	0,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,11	0,12	0,14	0,10	0,11	0,10	0,11	0,08
Konstruksi	10,92	11,39	11,17	10,69	10,49	11,62	11,77	11,31	10,78	12,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,48	14,79	14,21	13,59	13,06	14,64	14,76	14,50	14,11	15,57
Transportasi dan Pergudangan	8,29	8,14	8,81	10,21	11,36	7,73	7,58	7,98	8,89	7,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,16	3,06	3,25	3,39	3,26	3,33	3,21	3,32	3,41	3,64
Informasi dan Komunikasi	2,96	2,76	2,67	2,60	2,81	4,32	4,43	4,51	4,54	3,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	4,07	4,15	4,23	4,01	3,91	4,00	3,88	3,88	3,82
Real Estat	2,39	2,48	2,44	2,38	2,65	2,58	2,75	2,77	2,75	2,52
Jasa Perusahaan	0,84	0,86	0,91	0,96	0,89	0,87	0,91	0,97	1,00	0,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,01	3,08	2,74	2,72	2,61	2,59	2,50	2,35	2,41	2,68
Jasa Pendidikan	6,49	6,41	6,20	6,39	5,96	6,31	6,16	6,09	6,38	5,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,06	2,14	2,08	2,09	2,02	2,36	2,48	2,50	2,50	2,36
Jasa lainnya	3,65	3,50	3,82	4,17	4,26	4,09	4,04	4,37	4,72	4,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Struktur ekonomi Kabupaten Cirebon menggambarkan jika sektor industri pengolahan merupakan sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun. Selain itu sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menunjukan pergerakan dan terus memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Cirebon. Sektor industri pengolahan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu barometer perekonomian Jawa Barat berada pada urutan ke-13. Hal tersebut terlihat dengan adanya kecenderungan arus migrasi untuk mencari pekerjaan khususnya di daerah industri seperti Kecamatan Plered, Plumbon, Depok, Arjawinangun,



Astanajapura, Ciledug dan Losari. Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Cirebon yang mencapai angka 20,49 persen di Tahun 2024.

Perkembangan suatu sektor dalam kurun waktu tertentu harus memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB secara keseluruhan dengan kurun waktu yang sama. Seluruh sektor dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer merupakan sektor yang mengandalkan sumber langsung dari alam terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor yang mengolah bahan baku dari sektor primer maupun sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air serta sektor konstruksi. Sektor tersier dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa adalah sektor ekonomi yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan suatu jasa, termasuk dalam sektor tersier diantaranya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. PDRB ADHK dan peranannya menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Cirebon, 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
PDRB ADHK (Milyar Rupiah) dan Peranannya (Persen) Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
Primer	8.419,50	8.540,05	9.431,51	9.786,95	10.627,95
	16,99	16,33	16,65	15,96	15,82
Sekunder	15.750,55	16.936,41	18.168,72	19.195,46	21.031,76
	31,78	32,38	32,07	31,31	31,30
Tersier	25.391,25	26.833,48	29.053,41	32.327,36	35.536,33
	51,23	51,30	51,28	52,73	52,88
PDRB	49.561,30	52.309,94	56.653,64	61.309,77	67.196,04
	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sektor primer atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari 15,96 persen di tahun 2023 menjadi 15,82 persen di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan laju pertumbuhan sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor dominan pada sektor primer. Kontribusi sektor sekunder juga mengalami penurunan, hingga mencapai 31,30 persen pada tahun 2024 seiring dengan sektor lapangan usaha konstruksi yang mengalami pertumbuhan negatif.



3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan PDRB baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu Pemerintah Daerah. PDRB menurut lapangan usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan. Lebih spesifik PDRB menurut pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Pengeluaran konsumsi akhir dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga nonprofit yang Melayani Rumah tangga (LNPR) serta Pemerintah. Konsumsi yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka proses produksi disebut konsumsi antara dan bukan merupakan komponen PDRB menurut pengeluaran. Investasi dalam hal ini PMTB yang dilakukan oleh seluruh sektor pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, LNPR, pemerintah, korporasi baik swasta maupun BUMN dan BUMD juga menggambarkan agregat perubahan inventori, serta perdagangan luar wilayah baik antar provinsi maupun antar negara.

Tabel 3.5
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)				
	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	44.189,19	46.548,04	50.703,32	55.199,53	60.439,48
Pengeluaran Konsumsi LNPR	945,04	979,65	1.045,53	1.232,25	1.373,53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.527,80	3.716,91	3.734,37	3.880,57	3.824,95
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	14.704,55	15.531,32	16.430,18	17.130,00	17.324,56
Perubahan Inventori	829,66	- 477,19	117,08	96,46	376,82
Net (Ekspor-Impor)	-14.634,67	-13.988,80	-15.376,85	-16.229,04	-16.143,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	49.561,56	52.309,94	56.653,64	61.309,76	67.196,03

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Cirebon (ADHB) selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Peningkatan nilai juga mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa wilayah di pasar



nasional dan internasional. Hingga akhir tahun 2024 nilai PDRB Kabupaten Cirebon 67,196 triliun rupiah secara nilai berlaku. Komponen inventori mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,28 triliun rupiah, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang bertambah secara total sebesar 5,24 triliun rupiah dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang menurun secara total sebesar 0,06 triliun rupiah.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Sementara selama kurun waktu 2020–2024, beberapa komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024. Akibat pandemi, nilai PDRB ADHK pada tahun 2020 mengalami pengurangan yang cukup berarti. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik dan juga penurunan permintaan eksternal. Seiring pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, tahun 2024 PDRB ADHK menunjukkan kenaikan 17.634,47 miliar rupiah secara total, peningkatan nilai terjadi di seluruh komponen kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Net (Ekspor-Impor).

Tabel 3.6
Perbandingan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (Persen)	Laju Petumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (Persen)
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	89,95	4,45
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,04	6,95
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,69	-4,24
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	25,78	1,93
Perubahan Inventori	0,56	-
Net (Ekspor-Impor)	-24,02	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	5,83

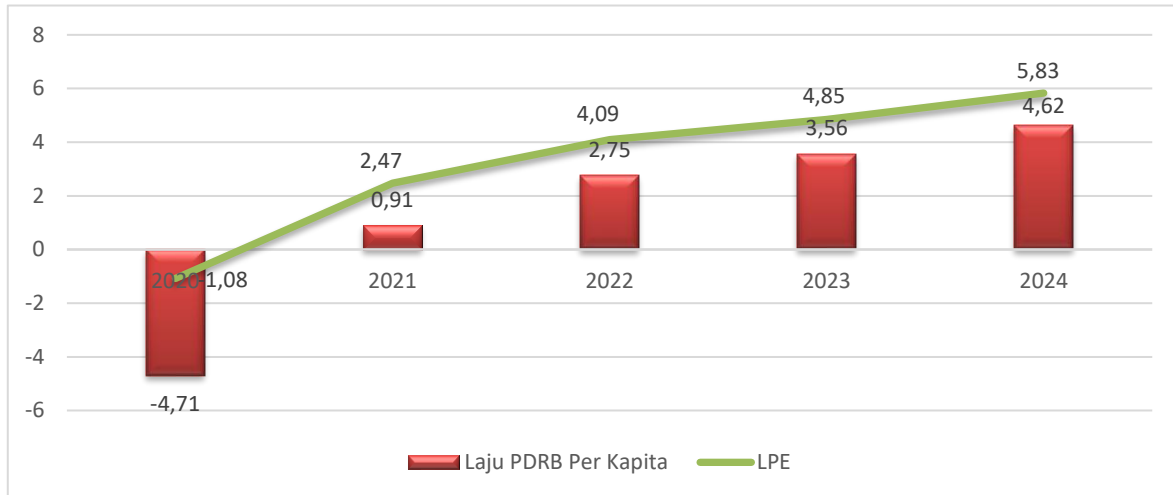
Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025
* Angka Sangat Sementara

3.1.2. PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Struktur ekonomi Kabupaten Cirebon di dominasi oleh sektor industri pengolahan. Peningkatan sektor industri pengolahan Kabupaten Cirebon pada tahun 2024, selain berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, juga menyebabkan

beberapa indikator ekonomi yang lain ikut meningkat seperti laju PDRB per kapita. Gambar berikut menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Cirebon bergerak searah dengan Laju PDRB Per Kapita.

Gambar 3.3
LPE dan Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon, 2020-2024



Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita ADHB	Perubahan	PDRB Per Kapita ADHK 2010	Perubahan
	(Jiwa)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
2019	2.192.900	22.506.000	7,64	15.421.000	4,34
2020	2.270.610	21.869.000	-2,83	14.696.000	-4,70
2021	2.291.000	22.730.000	3,94	14.829.000	0,90
2022	2.315.417	24.301.000	6,91	15.237.000	2,75
2023*	2.360.441	25.974.000	6,88	15.779.000	3,56
2024**	2.387.919	28.140.000	8,34	16.507.376	4,62

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

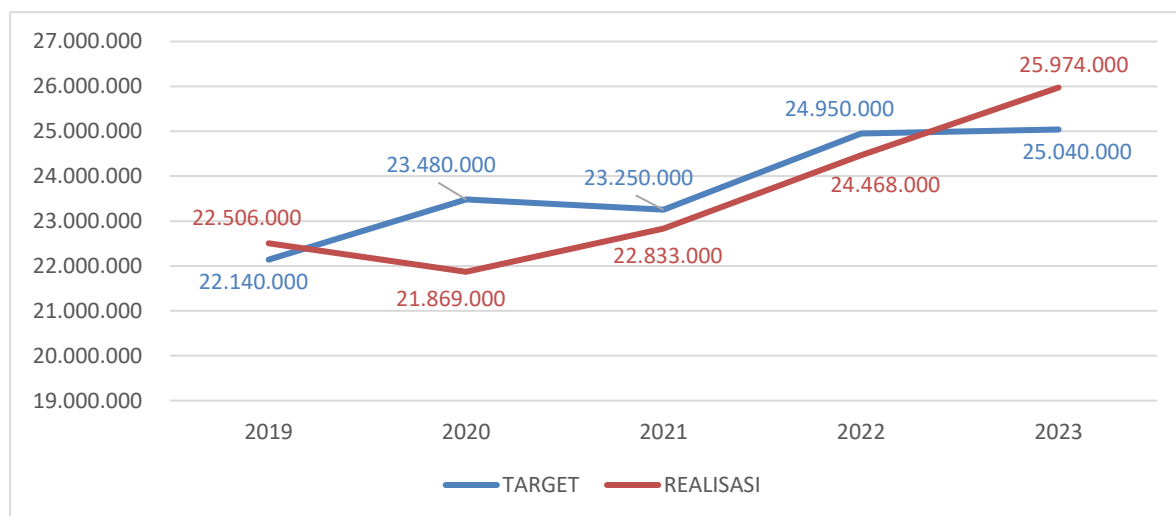
** Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Kabupaten Cirebon rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.387.919 jiwa, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 28.140.000,00. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8,34 persen dibandingkan tahun 2023. Secara riil



tingginya nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Cirebon disebabkan oleh peranan sektor industri pengolahan, hal ini tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Cirebon karena Sebagian dari hasil industri pengolahan yang di ekspor sehingga *multiplier effect* dari adanya industri belum cukup memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Perbandingan PDRB per kapita (ADHB) dengan target daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.4
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber Data : 1. BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025 (* Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara)
2. Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita secara nominal, hasil pemantauan perkembangan daya beli masyarakat secara riil dengan menggunakan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 16.507.376,00 atau meningkat sebesar 4,62 persen dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan daya beli Masyarakat yang cukup berarti pada tahun 2024.

3.1.3. Ekspor dan Impor Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.8
Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Milliar Rp)	- 14.634,67	- 13.988,80	- 15.376,85	- 16.229,04	- 16.143,32
b. ADHK 2010 (Milliar Rp)	- 8.409,14	- 7.650,36	- 7.706,87	- 7.321,45	- 6.804,98
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	-29,53	-26,74	-27,14	-26,47	-24,02

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tahun 2024 ini nilai nominal net ekspor Kabupaten Cirebon sama seperti tahun-tahun sebelumnya masih bernilai negatif, yang artinya neraca antar daerah di Kabupaten Cirebon mengalami defisit, nilai ekspor Kabupaten Cirebon lebih rendah dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2024, nilai net ekspor Kabupaten Cirebon adalah negatif 16.143,32 miliar rupiah. Bila dihitung berdasarkan harga konstan 2010 nilai net ekspor Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah sebesar negatif 6.804,98 miliar rupiah. Baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun konstan, nilai net ekspor Kabupaten Cirebon menunjukkan nilai yang meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 nilai ekspor Kabupaten Cirebon relatif meningkat jika dibandingkan dengan nilai impornya. Sepanjang tahun 2020 perekonomian global terdampak pandemi Covid-19 implikasinya terhadap transaksi perdagangan antar negara terjadi penurunan kinerja. Perekonomian di negara tujuan ekspor Kabupaten Cirebon yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Asia mengalami kontraksi sehingga penghematan anggaran belanja merupakan jalan keluar untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu secara global penurunan permintaan terhadap barang dan jasa juga karena daya beli masyarakat turut melemah karena pendapatan secara agregat mengalami penurunan. Ditambah memanasnya perang dagang antara Amerika dan China, hal ini secara langsung berdampak terhadap permintaan ekspor Kabupaten Cirebon sehingga kinerja positif tidak dapat dipertahankan.

3.1.4. Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Periode tahun 2023 realisasi investasi Kabupaten Cirebon adalah sebesar Rp 3.022.466.750.796, menurun dari tahun 2022 sebesar 0,22 persen, dimana realisasi investasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.029.228.360.286. Pada Tahun 2024 realisasi investasi Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan sebesar 3,10 persen dari tahun 2023 menjadi Rp. 3.116.260.557.562. Peningkatan investasi terjadi di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan; sektor jasa pendidikan; dan jasa lainnya. Meski terjadi penurunan, investasi di sektor industri pengolahan dan real estate masih mendominasi

sektor investasi di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi salah satu bagian penancangan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi di beberapa kawasan terpilih oleh Provinsi Jawa Barat melalui percepatan pembangunan di kawasan Rebana. Kawasan Rebana di Jawa Barat memiliki proporsi investasi yang rendah dibandingkan dengan total investasi di seluruh provinsi. Realisasi investasi di Kawasan Rebana hanya mencapai Rp17,83 Triliun atau sekitar 8,4 persen dari gabungan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Barat. Selama periode 2021-2024 total realisasi investasi di Kawasan Rebana sebesar Rp50,11 triliun, terdapat penurunan pada tahun 2022 tetapi kembali meningkat di tahun 2023.

3.1.5. Inflasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Cirebon masih tergolong terkendali yang merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Perbandingan perkembangan inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional 5 (*lima*) tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.5
Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024 (Persen)



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, Tahun 2025

Laju inflasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana Laju Inflasi pada tahun 2020 terendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 1,16 persen. Tahun 2022 inflasi di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni

sebesar 4,86 persen dan di tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,22 persen. Angka laju inflasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 berada di atas laju inflasi Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 2,48 persen dan laju inflasi nasional yang berada pada angka 2,61 persen. Penurunan inflasi ini terus berlangsung hingga akhir tahun 2024 yakni sebesar 1,1 persen dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Penurunan inflasi masih dipengaruhi oleh penurunan harga BBM non subsidi (fluktuasi minyak dunia) dan prospek perekonomian global mulai membaik walaupun mengalami perlambatan ditengah proses pemulihan daya beli masyarakat domestik yang terus berlangsung.

3.1.6. Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Keadaan ketenagakerjaan pada umumnya dapat diamati dari 2 (*dua*) aspek, yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan/permintaan (*demand*). Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Apabila kondisi tersebut belum dapat tercapai, maka akan terjadi pengangguran. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, namun mencakup karakteristik ketenagakerjaan lainnya seperti perubahan struktur umur, penduduk usia kerja, tingkat pendidikan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan dan sebagainya.

3.1.6.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

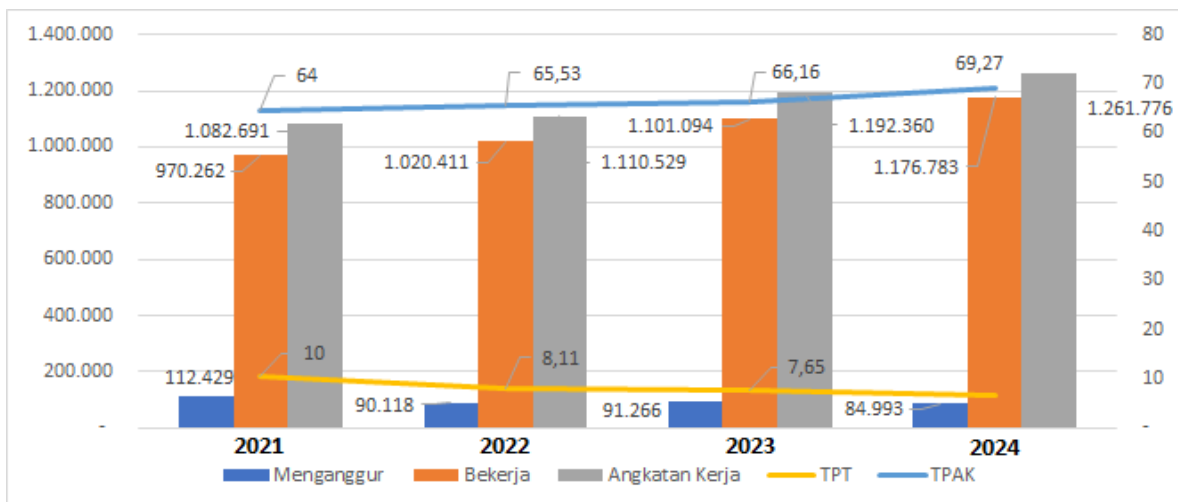
Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tahun 2024, penduduk usia kerja Kabupaten Cirebon mencapai 1.821.561 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar, yakni 1.261.776 jiwa, aktif dalam pasar kerja, sedangkan yang lainnya, berjumlah 559.785 jiwa, tidak tergabung dalam angkatan kerja. Struktur pasar kerja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 1.176.783 jiwa yang telah mendapatkan pekerjaan dan 84.993 jiwa yang menganggur. Secara tahunan, terjadi peningkatan angkatan kerja sekitar 69.416 jiwa dari tahun 2023. Jumlah individu yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 75.689 jiwa, dan terjadi penurunan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 6.273 jiwa. Peningkatan angkatan kerja disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai walau belum bisa mengakomodir seluruh angkatan kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2024, TPAK berada pada angka 69,27 persen meningkat 3,11 persen dari tahun 2023. TPAK merupakan proporsi dari angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah keseluruhan



individu dalam usia produktif, mencerminkan proporsi dari populasi yang aktif berkontribusi dalam ekonomi suatu negara atau wilayah.

TPAK Kabupaten Cirebon jika dilihat dari segi gender menggambarkan bahwa TPAK pria pada tahun 2024 adalah 43,50 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK wanita sebesar 25,77 persen. TPAK pria menunjukkan peningkatan sebesar 1,07 persen, dimana TPAK pria pada tahun 2023 adalah sebesar 42,43 persen meningkat menjadi 43,50 persen pada tahun 2024, sedangkan untuk TPAK Wanita mengalami peningkatan sebesar 2,04 persen, dimana TPAK Wanita pada tahun 2023 adalah sebesar 23,73 persen naik menjadi 25,77 persen pada tahun 2024.

Gambar 3.6
Perkembangan indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2021-2024



Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

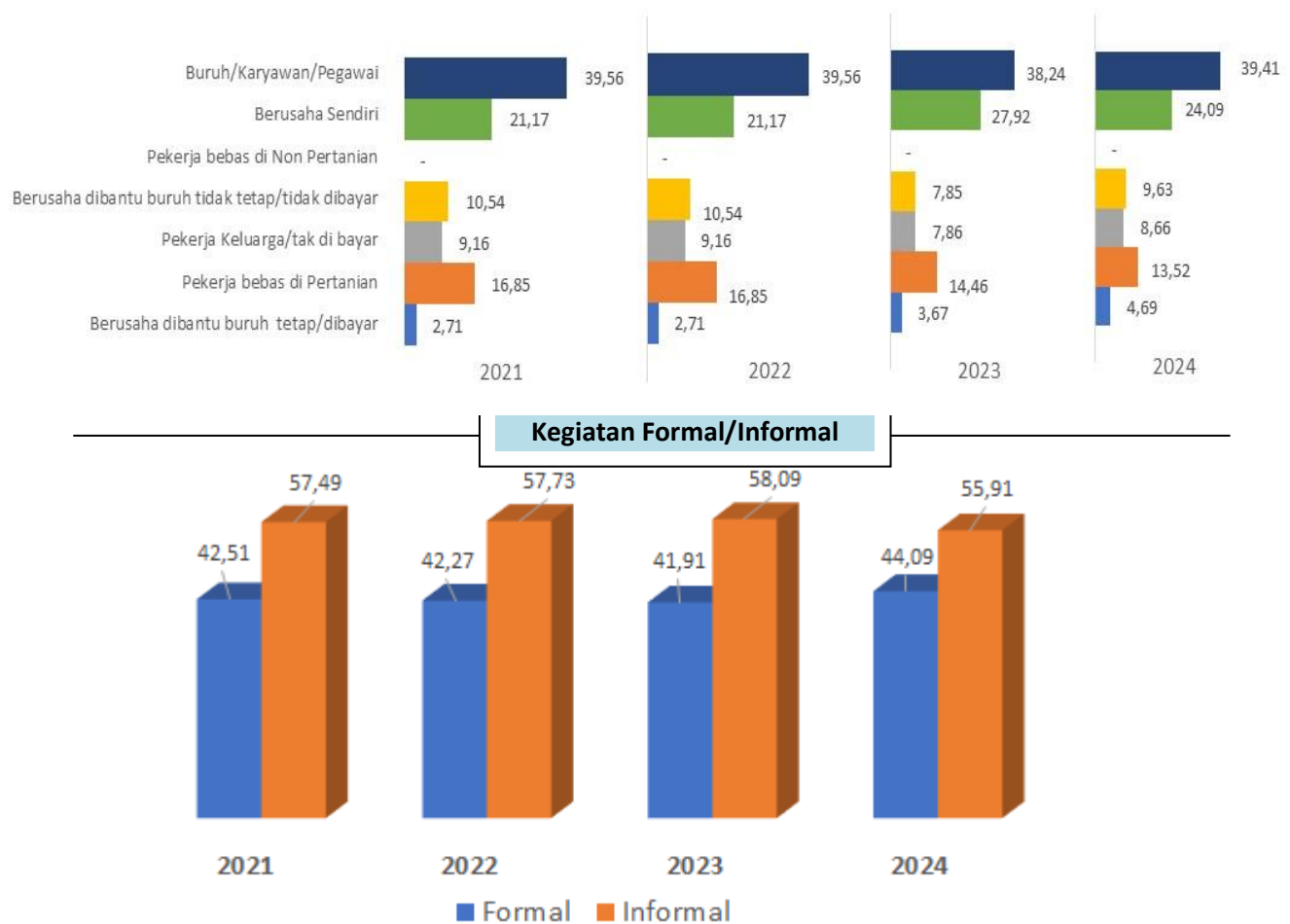
** Angka Sangat Sementara

3.1.6.2 Karakteristik Penduduk Bekerja di Kabupaten Cirebon

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi). Struktur pekerjaan utama penduduk bekerja di Kabupaten Cirebon menggambarkan distribusi angkatan kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2024 menunjukkan sektor yang paling banyak menyerap pekerja adalah sektor jasa, dengan proporsi sebesar 58,78 persen, pola distribusi tenaga kerja ini tetap konsisten dengan data pada tahun 2023. Sementara itu dalam daya serap tenaga kerja, sektor jasa adalah yang tertinggi dengan peningkatan sebanyak 53.212 jiwa dari tahun 2023. Struktur penduduk bekerja Kabupaten Cirebon jika dilihat dari status pekerjaan, menggambarkan lebih setengah dari total pekerja di Kabupaten Cirebon terlibat dalam kegiatan informal yakni sekitar 55,91 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi informal memainkan peran penting dalam menyediakan mata pencaharian bagi penduduk Kabupaten Cirebon. Kenaikan

jumlah pekerja di sektor informal sebesar 18.235 jiwa dari tahun sebelumnya dapat menunjukkan bahwa ada pergeseran dari pekerjaan formal ke informal, yang mungkin dipicu oleh ketidakpastian ekonomi, perubahan struktural dalam ekonomi, atau kurangnya penciptaan pekerjaan formal baru. Sektor informal sering kali lebih fleksibel namun kurang stabil dan sering kali tidak tercakup dalam jaminan sosial atau manfaat kerja formal, menimbulkan implikasi untuk kebijakan publik dalam hal perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi.

Gambar 3.7.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Cirebon (persen), 2021 - 2024



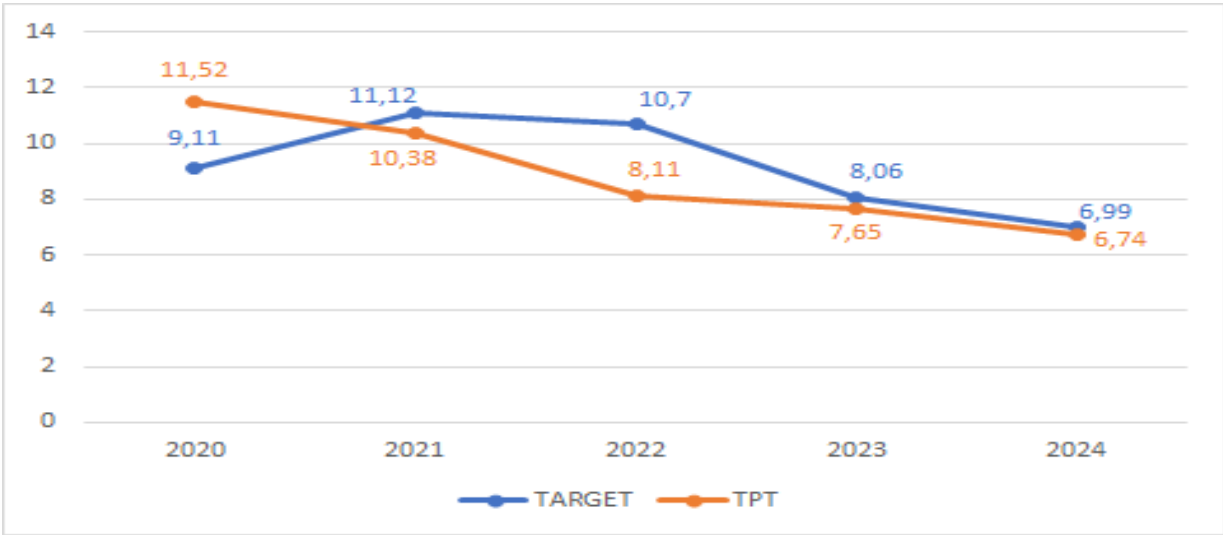
Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

3.1.6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengangguran terbuka sendiri didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja

tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Perbandingan TPT dengan target daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.8.
Perbandingan TPT dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon, 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, 2025, diolah

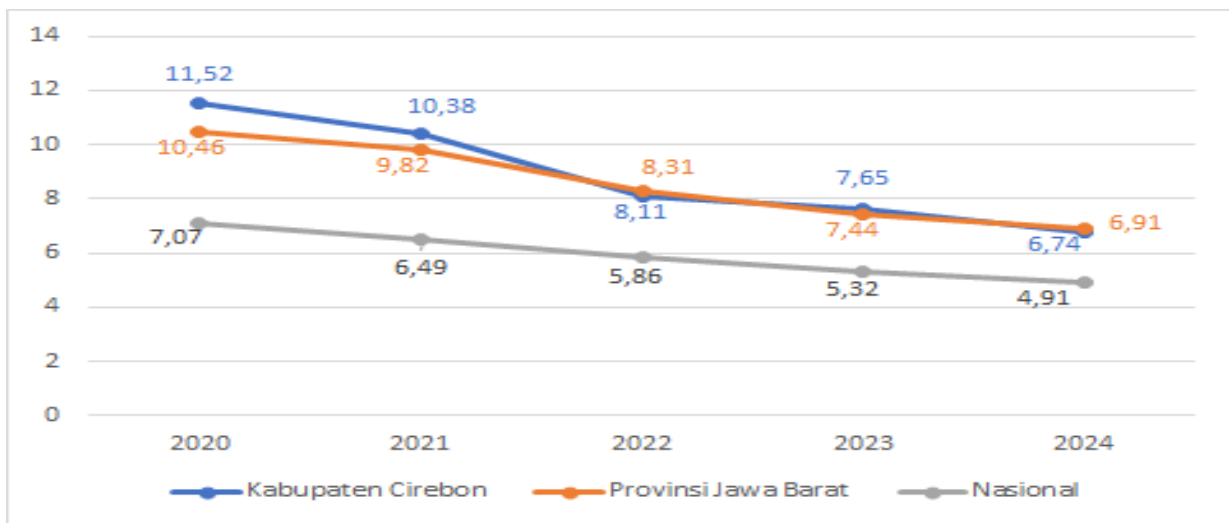
Pada tahun 2021-2024 pencapaian indikator TPT Kabupaten Cirebon melebihi target, dimana pada tahun 2021 target TPT Kabupaten Cirebon adalah sebesar 11,12 persen tercapai dengan adanya penurunan TPT hingga di angka 10,38 persen. Pada tahun 2022, TPT tercapai sangat signifikan jauh melebihi target, dimana target TPT pada tahun 2022 adalah sebesar 10,7 persen tercapai dengan terjadinya penurunan angka TPT hingga diangka 8,11 persen. Tahun 2023 angka TPT Kabupaten Cirebon juga tercapai melebihi target dimana TPT pada tahun 2023 adalah sebesar 8,06 persen menurun hingga di angka 7,65 persen. Dan pada tahun 2024 angka TPT Kabupaten Cirebon juga tercapai melebihi target dimana target TPT pada tahun 2024 adalah sebesar 6,99 persen tercapai sebesar 6,74 persen. Pencapaian ini disebabkan adanya intervensi program pemerintah melalui pelaksanaan Kegiatan *job fair* dan pelatihan vokasi berbasis penempatan yang dapat menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Selain itu berkembangnya sektor industri olahan di Kabupaten Cirebon juga mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Kenaikan jumlah tenaga kerja signifikan terjadi pada industri olahan roti dan makanan ringan juga pada industri konveksi. Kenaikan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil juga mempengaruhi pencapaian TPT Kabupaten Cirebon, dimana pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja pada



usaha mikro dan kecil Kabupaten Cirebon sebanyak 49.490 pelaku usaha mikro (*sumber: BPS Jawa Barat, 2023*) meningkat di tahun 2022 menjadi 200.083 pelaku usaha mikro dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 202.017 pelaku usaha mikro (*sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, 2024*).

Perbandingan perubahan pencapaian TPT daerah Kabupaten Cirebon dengan pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.9. berikut ini :

Gambar 3.9.
Perbandingan Perubahan Pencapaian TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon, 2025, diolah
2. BPS Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025
3. Statistik Indonesia, 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2024 tinggal di angka 6,74 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon tahun 2024 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, berada dibawah TPT Provinsi Jawa Barat namun masih diatas TPT nasional. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukkan angka yang bervariasi antara 1,52 persen. Perbandingan perubahan TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-rata capaian wilayah yang setara atau wilayah sekitar tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.9.
Perbandingan Perubahan TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-rata
Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar, 2020-2024

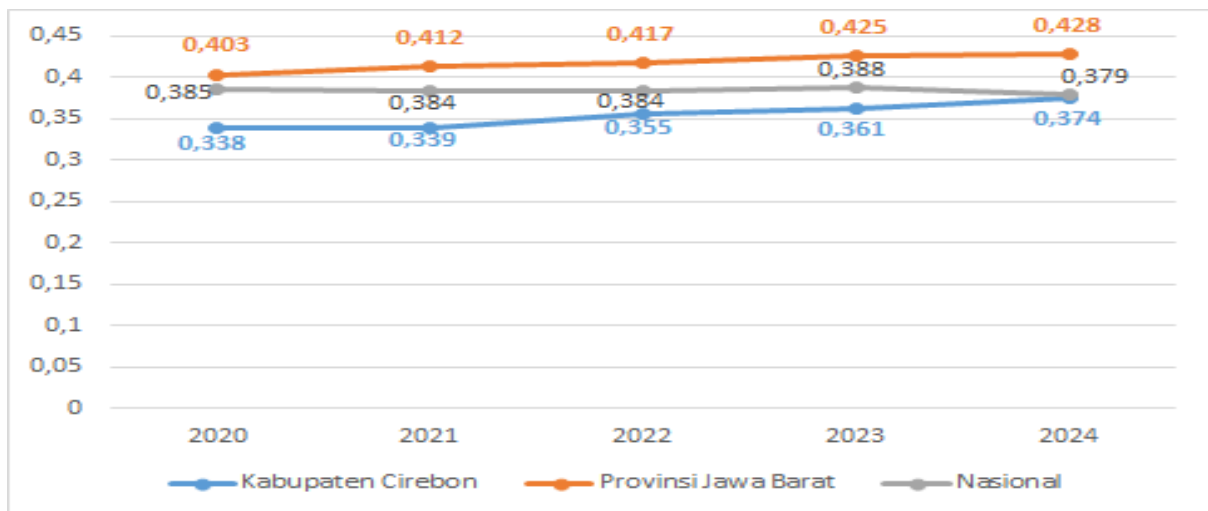
No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
2	Sukabumi	9,6	9,51	7,77	7,32	7,11
3	Cianjur	11,05	9,32	8,41	7,71	5,99
4	Bandung	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36
5	Garut	8,95	8,68	7,6	7,33	6,96
6	Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
7	Ciamis	5,66	5,06	3,75	3,52	3,37
8	Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
9	Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
10	Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
11	Sumedang	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
12	Indramayu	9,21	8,3	6,49	6,46	6,25
13	Subang	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
14	Purwakarta	11,07	10,7	8,75	7,72	7,34
15	Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
16	Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
17	Bandung Barat	12,25	11,65	9,63	8,11	6,7
18	Pangandaran	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
19	Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
20	Kota Sukabumi	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
21	Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83	7,4
22	Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29
23	Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,9	7,82
24	Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
25	Kota Cimahi	13,3	13,07	10,77	10,52	8,97
26	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
27	Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44
Provinsi Jawa Barat		10,46	9,82	8,31	7,44	6,75

Sumber: BPS Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025

3.1.7. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan pada bagian ini dijelaskan dengan melihat ketimpangan pendapatan menggunakan indeks gini. Perbandingan perubahan rasio gini daerah Kabupaten Cirebon, dengan rasio gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.10. berikut ini :

Gambar 3.10.
Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon, 2021-2025, diolah
2. RKP Tahun 2025, Bappenas RI, 2024, diolah
3. BPS Jawa Barat, 2025

Indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 0,374 poin, jika dibandingkan terhadap target indeks gini pada Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2024 memang belum tercapai. Namun jika dibandingkan dengan realisasi indeks gini secara regional maupun nasional, realisasi indeks gini Kabupaten Cirebon tahun 2023 jauh lebih baik. Ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Cirebon tidak setinggi ketimpangan pendapatan pada skala regional maupun nasional. Program revitalisasi pembangunan ekonomi desa (ROMANSA) yang dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Cirebon.

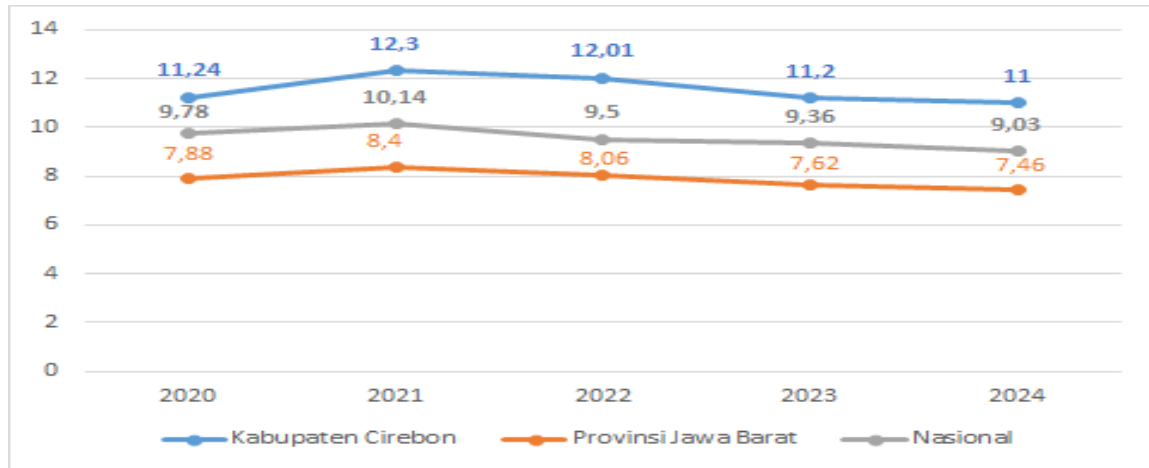
3.1.8. Kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin dibandingkan terhadap jumlah total penduduk dikali seratus persen. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 245,92 ribu jiwa atau 11 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Realisasi tersebut memenuhi target yang ditetapkan didalam P-RKPD Tahun 2024 yakni terjadi penurunan persentase penduduk miskin di angka 11 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menunjukkan capaian yang lebih baik, terjadi penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 249,18 ribu jiwa atau 11,20 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun



2024 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.11.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon, 2021-2025, diolah
2. RKP Tahun 2025, Bappenas RI (2024)
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Bappeda Provinsi Jabar (2024)

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, persentase penduduk miskin Kabupaten Cirebon masih berada diposisi tertinggi ke-4. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.



Tabel 3.10.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat,
2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
2	Sukabumi	7,09	7,7	7,34	7,01	6,87
3	Cianjur	10,36	11,18	10,55	10,22	10,14
4	Bandung	6,91	7,15	6,8	6,4	6,19
5	Garut	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
6	Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23
7	Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
8	Kuningan	12,82	13,1	12,76	12,12	11,88
9	Cirebon	11,24	12,3	12,01	11,2	11
10	Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
11	Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36	9,1
12	Indramayu	12,7	13,04	12,77	12,13	11,93
13	Subang	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
14	Purwakarta	8,27	8,83	8,7	8,46	8,41
15	Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
16	Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,8
17	Bandung Barat	10,49	11,3	10,82	10,52	10,49
18	Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
19	Kota Bogor	6,68	7,24	7,1	6,67	6,53
20	Kota Sukabumi	7,7	8,25	8,02	7,5	7,2
21	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
22	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
23	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,1	4,01
24	Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
25	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
26	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53	11,1
27	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85
Provinsi Jawa Barat		7,88	8,4	8,06	7,62	7,46

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya peningkatan pengeluaran penduduk miskin untuk makanan dan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) diatas garis kemiskinan pada sejumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon. Garis kemiskinan Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah sebesar Rp. 475.046,00/kapita/bulan.



Tabel 3.11.
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Total (Ribu)	Presentase
2020	393.452	247,94	11,24
2021	404.635	271,02	12,30
2022	416.914	266,10	12,01
2023*	451.853	249,18	11,20
2024**	475.046	245,92	11

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Cirebon masih tinggi walaupun mengalami penurunan di tahun 2024 yakni di angka 1,69. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Cirebon semakin jauh dari garis kemiskinan Kabupaten Cirebon.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Cirebon dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 nilainya fluktuatif, pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,24 poin terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 0,53 poin dan menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 0,36 poin, hal ini menunjukkan ada perbaikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,30	0,24
2021	1,94	0,47
2022	2,27	0,59
2023*	1,98	0,53
2024**	1,69	0,36

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

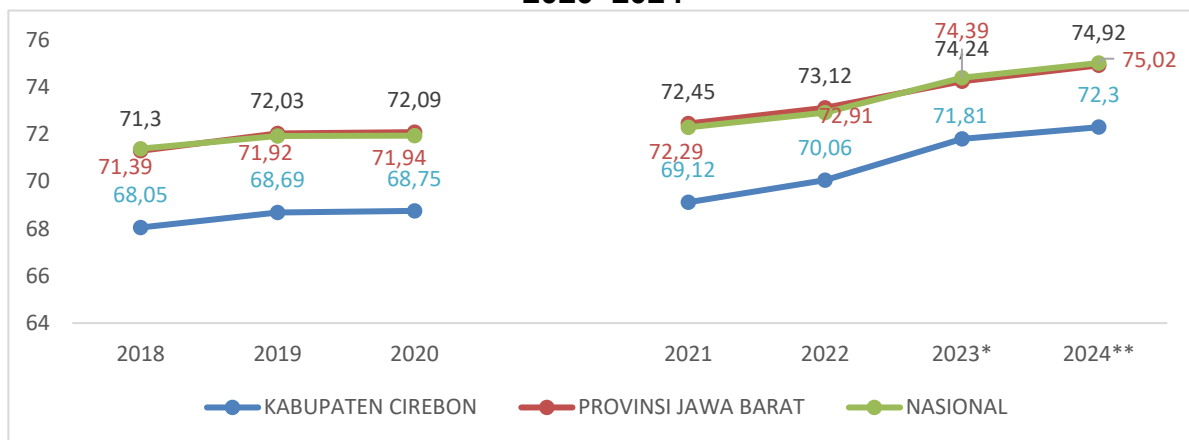
Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon. Upaya penanganan kemiskinan dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substantif) maupun secara makro (preventif).

3.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar 3.12.
Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020–2024



Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan angka 72,30 poin mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun masih dibawah angka regional dan nasional. Realisasi IPM Kabupaten Cirebon sebesar 72,30 poin tersebut jika dibandingkan dengan target IPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yakni sebesar 72,06 poin sudah memenuhi bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, data 5 (*lima*) tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Cirebon yaitu tahun 2020 - 2024 terus meningkat yaitu peringkat 19 pada tahun 2020-2021, tahun 2022 naik menjadi peringkat 18 dan tahun 2023-2024 bertahan di peringkat 17, sebagaimana data tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 3.13.
Capaian IPM Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten-Kabupaten di Sekitarnya, 2020–2024

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota (Umur Harapan Hidup/UHH Hasil LF SP2020*)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	71,63	71,83	72,45	73,02	73,63
2	Sukabumi	68,14	68,33	68,87	69,71	70,18
3	Cianjur	66,96	67,16	67,55	68,18	68,89
4	Bandung	72,69	73,03	73,46	74,03	74,59
5	Garut	67,2	67,53	68,51	69,22	69,91
6	Tasikmalaya	67,22	67,43	68,45	69,38	69,98
7	Ciamis	71,57	72	72,52	73,12	73,64
8	Kuningan	69,66	69,99	70,44	70,99	71,56
9	Cirebon	69,61	69,99	70,92	71,81	72,3
10	Majalengka	69,2	69,42	70,18	70,76	71,37
11	Sumedang	72,48	72,64	73,53	74,02	74,57
12	Indramayu	68,25	68,6	69,52	70,19	70,72
13	Subang	69,66	69,84	70,54	71,42	72,05
14	Purwakarta	72,15	72,31	72,89	73,43	73,99
15	Karawang	71,56	71,84	72,64	73,25	73,82
16	Bekasi	74,47	74,84	75,6	76,13	76,8
17	Bandung Barat	68,81	69,03	69,82	70,33	70,77
18	Pangandaran	69,24	69,46	70,21	70,57	71,03
19	Kota Bogor	76,63	77,11	77,68	78,36	79,03
20	Kota Sukabumi	75,06	75,44	76,24	77,16	77,69
21	Kota Bandung	81,78	82,23	82,75	83,29	83,75
22	Kota Cirebon	75,91	76,26	76,89	77,45	78,09
23	Kota Bekasi	81,5	81,99	82,52	83,06	83,55
24	Kota Depok	81,14	81,54	82,02	82,53	83,05
25	Kota Cimahi	78,09	78,31	79,01	79,69	80,3
26	Kota Tasikmalaya	74,04	74,31	74,84	75,47	76,03
27	Kota Banjar	73,08	73,3	73,93	74,45	75,01
	Provinsi Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24	74,92

Sumber: 1. Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

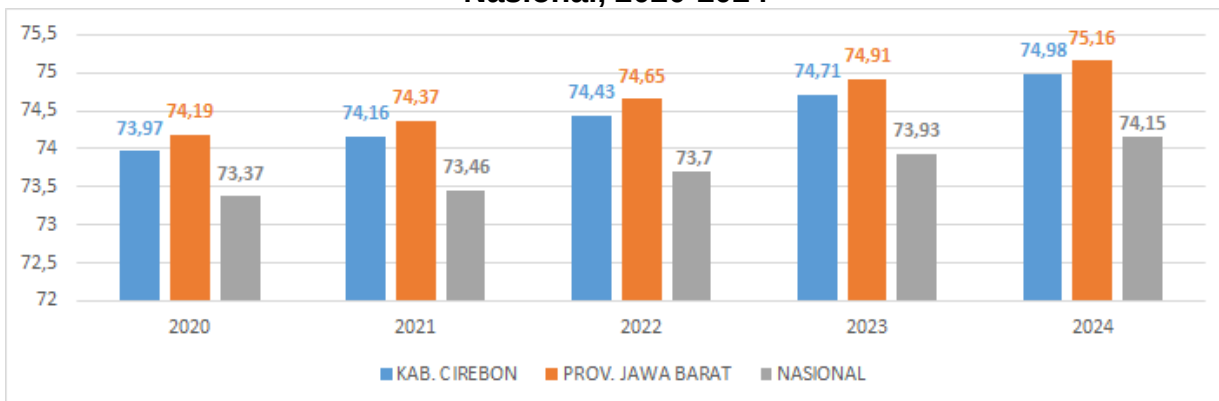
Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok (BPS Jabar, 2023). Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Empat kelompok tersebut adalah:

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka capaian IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 termasuk dalam kategori kelompok “TINGGI”. Kenaikan IPM Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 disebabkan meningkatnya angka komponen pembentuk IPM yang cukup signifikan, diantaranya angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan daya beli atau pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Komponen usia harapan hidup

periode tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan terakhir di tahun 2024 umur harapan hidup bayi yang lahir di tahun 2024 adalah sebesar 74,98 tahun.

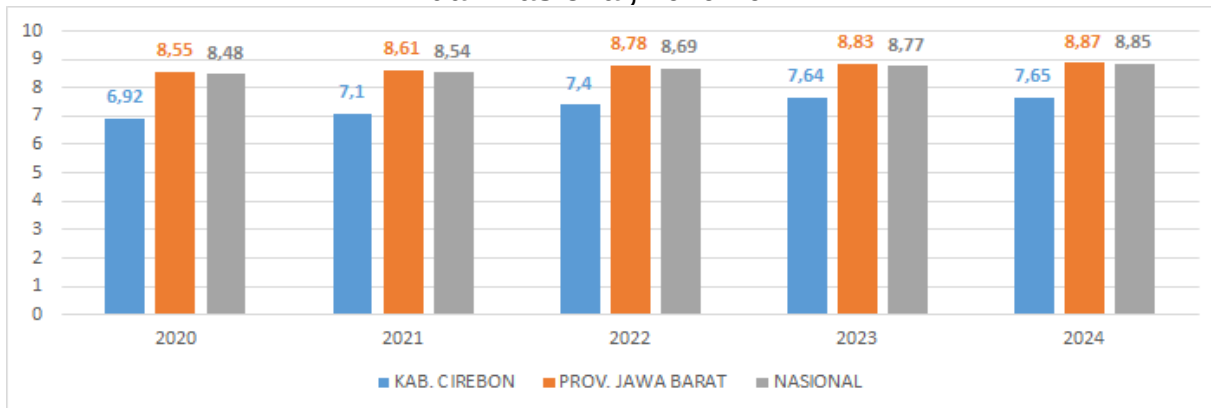
Gambar 3.13.
Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024



Sumber : 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS
2. BPS Provinsi Jabar, 2025.
3. Statistik Indonesia, 2025

Kenaikan IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 juga dipengaruhi kenaikan komponen rata-rata lama sekolah yang meningkat sebesar 0,13 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, dimana pada tahun 2023 angka komponen rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon adalah sebesar 7,64 tahun meningkat menjadi 7,65 tahun di tahun 2024.

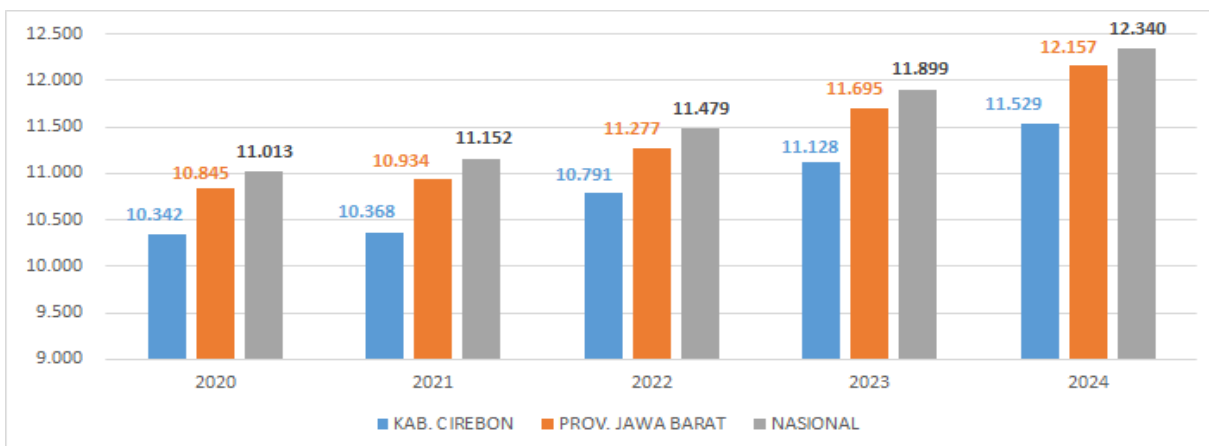
Gambar 3.14.
Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024



Sumber : 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS
2. BPS Provinsi Jabar, 2025
3. Statistik Indonesia, 2025

Komponen pembentuk IPM yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 dan mempengaruhi pencapaian IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 lainnya adalah komponen pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita riil disesuaikan Kabupaten Cirebon meningkat sebesar Rp. 401.000,00/kapita/tahun dari Rp. 11.128.000,00 /kapita/tahun di tahun 2023 menjadi Rp. 11.529.000,00 /kapita/tahun di tahun 2024.

Gambar 3.15.
Realisasi Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024 (Ribuan Rupiah)



Sumber : 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS
2. BPS Provinsi Jabar, 2025
3. Statistik Indonesia, 2025

3.1.10. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Cirebon tahun 2024 dan tahun 2025 tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan, prospek dan arah kebijakan perekonomian baik pada tataran global, nasional maupun regional.

3.1.10.1. Tantangan Ekonomi Global

Pada Januari 2024, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 2,7 persen. Tantangan ekonomi global pada tahun 2024 diprediksi akan melibatkan pengetatan kebijakan moneter sebagai respons terhadap inflasi yang tinggi, invasi Rusia ke Ukraina, dan dinamika geopolitik di Timur Tengah terkait konflik Israel-Palestina, serta dampak El Nino terkait perubahan iklim. Secara regional, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami pelemahan terbesar di Amerika Utara, Eropa, Asia Tengah, dan Asia-Pasifik, terutama karena perlambatan pertumbuhan di China, menurut Bank Dunia. Meskipun sedikit perbaikan diharapkan di Amerika Latin dan Karibia dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, peningkatan yang lebih signifikan diperkirakan terjadi di Timur Tengah dan Afrika. Negara-negara berkembang diperkirakan akan menjadi yang paling terdampak dalam jangka menengah akibat lesunya perdagangan global dan kondisi keuangan yang ketat yang memberatkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek diproyeksikan tetap lemah, memberikan tekanan khususnya pada negara-negara berkembang, terutama yang terjebak dalam perangkap utang yang tinggi dan menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan. Di sisi lain, potensi ledakan investasi dapat menjadi katalis untuk

mengubah nasib negara-negara berkembang, membantu mempercepat transisi energi dan mencapai berbagai tujuan pembangunan.

Awal tahun 2025, perang dagang antara Amerika dan china semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat *Donald Trump* mengumumkan tarif import baru pada awal April 2025 yang kemudian dibalas oleh China. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China memberikan dampak langsung terhadap industri, termasuk bagi Indonesia. Cina menjadi pusat perdagangan di Asia, maka dampak limpahan yang ditularkan melalui jaringan produksi ke negara tetangga mungkin cukup besar dan dapat menyebabkan perlambatan perdagangan serta hilangnya daya saing Indonesia.

Tarif impor yang dikenakan AS pada barang-barang yang berasal dari China, akan menyebabkan peningkatan harga produk China untuk konsumen Amerika. Kenaikan harga dapat menimbulkan tiga tanggapan yang berbeda. Pertama, konsumen AS beralih ke produk domestik (Amerika) sehingga mengurangi impor dari China. Kedua, konsumen AS mengganti barang China dengan barang dari negara lain (misalnya dari negara-negara Asia lainnya). Ketiga, konsumen AS terus mengimpor barang-barang China dan terpaksa membayar harga yang lebih tinggi.

Produk Indonesia sebagian besar diekspor sebagai bahan baku atau barang setengah jadi. Persentase ekspor Indonesia bahan baku dan barang perantara dari Indonesia terus meningkat. Proporsi ekspor bahan baku dan perantara yang besar ini menyiratkan bahwa, jika Cina dan mitra Asia menggunakan input dari Indonesia untuk kepentingan produksi barang ekspor ke AS, maka ketika terjadi kenaikan tarif akibat perang dagang dapat mempengaruhi ekspor Indonesia secara tidak langsung.

Sebagai contoh, jika akibat kenaikan tarif yang diberlakukan oleh AS ke Cina menyebabkan penurunan permintaan pada barang-barang Cina yang kebetulan mengandung bahan baku dari Indonesia, maka secara tidak langsung dapat merugikan ekspor Indonesia. Namun, Jika Amerika Serikat mengalihkan pembeliannya ke produk Asia daripada produk Cina, dan dengan asumsi bahwa produk Asia mengandung bahan baku Indonesia, hal tersebut dapat menguntungkan ekspor Indonesia secara tidak langsung. Jika Amerika memutuskan untuk mengkonsumsi barang dalam negeri dan mengurangi impor dari China atau negara asing lainnya, maka bahan baku yang diekspor Indonesia ke China untuk diolah dan diekspor kembali ke AS tidak akan ada lagi.

Spillover effect (dampak tidak langsung) dari pengenaan tarif antara AS dan China akan menyebabkan menurunnya ekspor China ke AS. Jika tarif dikenakan pada barang antara juga maka kerugian bagi China semakin besar. Bagi Indonesia, kebijakan AS ini berdampak (*spillover effect*) pada menurunnya ekspor total yang

ditujukan untuk pasar AS melalui China. Sebaliknya, pengenaan tarif oleh China pada AS akan menyebabkan penurunan ekspor AS. *Spillover effect* dari kebijakan ini bagi Indonesia adalah menurunnya ekspor pada China yang melalui AS. Jika China dan AS mengalihkan permintaan ke pasar Asia lainnya yang dapat memproduksi barang substitusi, maka dampak negatif terhadap Indonesia dapat dikurangi.

Dampak perang dagang AS dan China terhadap daya saing akan muncul seiring dengan kenaikan harga AS dan China akibat tarif. Setelah bea masuk diterapkan, harga barang ekspor meningkat yang menyebabkan penurunan daya saing ekspor. Hilangnya daya saing ekspor China dan AS akibat tarif juga menular ke Indonesia. Dalam konteks *Global Value Chains* Indonesia menghadapi suasana yang kompleks. Perubahan 1% pada harga ekspor dari China akan menyebabkan apresiasi harga barang Indonesia sebesar 0,19%. Ini artinya perubahan harga barang di China akan menyebabkan perubahan substansial dalam permintaan terhadap *export* Indonesia. Relatif tingginya respons juga memperlihatkan bahwa Indonesia semakin rentan terhadap guncangan dalam perdagangan yang terjadi di kasus negara seperti Cina, Eropa dan Amerika Utara yang merupakan *trade hub* dunia. Walaupun elastisitas permintaan nilai tambah Indonesia cukup tinggi (tidak gampang disubstitusi negara lain), namun demikian Indonesia tetap akan terdampak. Jika dilihat dari perspektif value-added perang dagang AS-China berdampak kecil bagi ekspor Indonesia.

3.1.10.2. Tantangan Ekonomi Nasional

Tantangan nasional bersumber dari dua aspek, yaitu inflasi, serta perdagangan dan investasi. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan bergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2024. Stabilitas inflasi domestik dan meredanya tekanan pasar keuangan di Indonesia membuka peluang untuk kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2024. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait suku bunga global yang fluktuatif tetap menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia berada dalam kewaspadaan. Diperkirakan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga sebesar 50-75 basis poin pada tahun 2024, bergantung pada kebijakan dovish yang diambil oleh *Federal Reserve* Amerika Serikat. Tantangan juga bersumber dari sektor perdagangan dan investasi. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan surplus perdagangan, proyeksi harga komoditas yang tinggi, pertumbuhan permintaan domestik yang kuat, dan kinerja investasi yang tangguh dapat menyebabkan neraca transaksi berjalan tetap defisit sebesar 0,5 persen dari PDB pada tahun mendatang. Selain itu, konsumsi domestik menjadi faktor penting dalam dinamika ekonomi Indonesia. Evaluasi konsumsi domestik pasca kenaikan

harga bahan bakar pada tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang signifikan pada pertengahan tahun 2023. Stabilitas harga dan peningkatan impor barang konsumsi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memfasilitasi pemulihan ini. Dengan mempertahankan stabilitas harga dan menanggulangi tantangan impor barang konsumsi, Indonesia dapat menjaga keberlanjutan pemulihan konsumsi domestik. Terakhir, ketergantungan pada pasar ekspor untuk pertumbuhan ekonomi merupakan dinamika yang perlu diperhatikan. Meskipun Indonesia telah lama mengandalkan pasar ekspor sebagai pendorong pertumbuhan, penurunan harga komoditas telah memengaruhi *terms of trade*. Diversifikasi ekspor menjadi strategi yang semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Perubahan paradigma ini akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka jalan menuju keberlanjutan dan ketahanan ekonomi di masa depan.

Tahun 2023 dan 2024, perekonomian Indonesia diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 4,3 persen dan 4,7 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024 dipengaruhi oleh efektivitas penanganan COVID-19 serta kebijakan nasional dalam memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi. Tantangan ekonomi nasional antara lain dampak dari konflik di Ukraina, meningkatnya kembali kasus dan varian baru COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

3.1.10.3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Regional Jawa Barat

Tantangan dan prospek ekonomi regional Jawa Barat di dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menjelaskan bahwa tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota.

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat. Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB

Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis *high tech*;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
6. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi :
 - a. Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS- RBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching, market sounding, link and match* investor industri kecil dan industri besar; dan
 - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada sektor industri :
 - a. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
 - b. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
 - c. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Substitusi bahan baku import
 - e. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
 - f. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM :
 - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa

Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.

4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
 - b. Pengembangan Desa Wisata;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional; dan
 - d. Percepatan Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).
 - e. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi;
 - b. Pasar rakyat yang memenuhi SNI;
 - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
 - d. Market intelligence untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;
 - e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga.
6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan:
 - a. Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
 - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
 - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan
 - d. Peningkatan produktivitas bahan pangan; dan
 - e. Peningkatan Produksi Pertanian potensi ekspor.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
 - c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan
 - e. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2024 dan 2025 sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.14. Nilai PDRB pada tahun 2024 ditargetkan



untuk bertambah sekitar 14 persen dengan asumsi PDRB pada tahun 2023 mencapai 2.500 triliun rupiah, dan pada 2025 bertambah sekitar 4 persen dari tahun 2024. Proyeksi ini tidak terlepas dari kondisi industri pengolahan yang menyumbang lebih dari 40 persen dan perdagangan yang menyumbang lebih dari 14 persen terhadap PDRB Jawa Barat, masih tumbuh di atas 4 persen, dan peluang pertumbuhan lebih besar di masa depan seiring peningkatan teknologi, infrastruktur, dan tenaga kerja yang dapat mendorong produktivitas sektor tersebut.

Meskipun demikian, tantangan juga muncul dari sektor pertanian yang menyumbang sekitar 9 persen nilai PDRB Jawa Barat pada tahun 2023, dimana pertumbuhan sektor ini terlihat sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Pada kuartal III 2023, pertumbuhan sektor ini mencapai -1,90 persen, dimana pada kuartal ini adalah puncak fenomena el-nino yang telah menyebabkan kemarau berkepanjangan. Tantangan ini juga dirasakan oleh negara dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian, seperti Brazil dan India. Akibat el-nino, India mengalami penurunan produksi pada komoditas pangan pokok, biji-bijian untuk minyak, dan sereal bernutrisi dengan rata-rata penurunan produksi sekitar 9 persen. Sementara itu Brazil mengalami penurunan sekitar 7 persen pada produksi komoditas gandum.

Indikator pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan berada di kisaran lebih besar dari 5,5 persen, meskipun capaian pertumbuhan kuartal III 2023 yang berada di bawah 5 persen. Optimisme ini didukung oleh pertumbuhan sektor lapangan usaha jasa yang masih positif, dan kuatnya permintaan domestik dalam mengimbangi penurunan permintaan luar negeri atas berbagai produk, terutama produk industri pengolahan.

Tabel 3.14
Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Indikator	Realisasi 20231)	Target			
			2024		2025	
			RPD2)	Hasil Perhitungan3)	RPD2)	Hasil Perhitungan3)
1	Nilai PDRB ADHB (triliun rupiah) kumulatif	1.953,42		2853,56		2990,98
2	Laju Pertumbuhan PDRB (y-o-y, %)	4,57	5,67	4,75	5,81	4,87-5,37
3	Inflasi Tahunan (%)	2,48	N/A	1,5 - 3,5		1,5-3,5
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)2)	48,324)	57,28	51,00	61,57	61,57
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (y-o-y, %) Agustus	7,44	8,01	7,41 - 7,16	7,45-7,26	7,25



No	Indikator	Realisasi 2023 ¹⁾	Target			
			2024		2025	
			RPD ²⁾	Hasil Perhitungan ³⁾	RPD ²⁾	Hasil Perhitungan ³⁾
6	Persentase penduduk Miskin (%) Maret 2023	7,62	7,34	7,48 - 7,03	7,13)	7,13
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	162,43	532,22	600,03	542,86	639,59

Sumber : 1) BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (Triwulan III);
2) RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Jawa Barat;
3) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023; dan
4) BPS Provinsi Jawa Barat 2022.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Informasi dan Komunikasi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Persen)

Lapangan Usaha		Share	Realisasi	Proyeksi	
		2023	2023 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,07	-1,90	1,51	1,58
B	Pertambangan dan Penggalan	1,00	0,44	-0,79	-0,80
C	Industri Pengolahan	41,55	4,72	4,31	4,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	-0,34	3,99	3,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	-3,29	4,82	4,90
F	Konstruksi	8,42	5,88	5,78	5,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,47	4,32	3,70	3,78
H	Transportasi dan Pergudangan	5,84	12,44	6,62	6,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,95	7,76	6,44	6,60
J	Informasi dan Komunikasi	3,77	6,31	8,38	8,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,85	4,93	3,99	4,01
L	Real Estate	1,15	5,72	5,29	5,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	6,31	7,08	7,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,63	-5,74	2,09	2,00
P	Jasa Pendidikan	3,31	1,08	6,07	6,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	6,74	7,36	7,60



R,S,T, U	Jasa Lainnya	2,15	9,86	6,48	6,71

Sumber : 1) BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2023 (distribusi PDRB ADHB)
2) BPS Provinsi Jawa Barat Triwulan III 2023 (yoy) dan;
3) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 digerakkan oleh komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Kinerja PMTB diproyeksikan mengalami kenaikan pertumbuhan seiring dengan masuknya investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, khususnya pada kawasan industri pada wilayah WPPI I dan II, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, serta pusat pertumbuhan lainnya. Sementara di sektor pelayanan publik, agenda pembangunan beberapa infrastruktur strategis di Jawa Barat tahun 2024 seperti Tol Patimban, Tol Jakarta-Cikampek II, Tol Getaci juga akan turut mendorong kinerja PMTB.

Kinerja Ekspor Jawa Barat tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,23 persen dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan. Penguatan peran dan fungsi pelabuhan patimban dan BIJB secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2024.

Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan meningkat seiring dengan membaiknya ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, serta sistem kesehatan daerah yang lebih resiliensi terhadap potensi ancaman penyakit infeksi menular-pandemi. Risiko penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari tekanan inflasi tahun 2024 dikendalikan melalui sinergi program penguatan ketahanan pangan serta program pengendalian inflasi daerah. Inflasi daerah tahun 2024 dikendalikan pada level (2,5+1) persen.

Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2024-2025

Komponen Pengeluaran		Realisasi 2023 ¹⁾	2024 ²⁾	Proyeksi 2025 ³⁾
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,83	4,08	3,94
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	21,17	12,58	3,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,34	2,35	2,46
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,4	5,17	4,10
5	Ekspor	14,63	5,05	5,52
6	Impor	22,28	4,65	5,07

Sumber : 1) BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (yoy);
2) RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat dan;
3) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi



2023.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.17 dibawah ini.

Tabel 3.17
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	TARGET	
		2025 ¹⁾	2025 ²⁾
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	N/A	74,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,96 – 5,37	5,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,42 – 6,99	7,25
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,85 – 6,46	7,13
5	Indeks Gini (Poin)	0,383 – 0,390	0,383
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	N/A	1,02
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	N/A	61,57

Sumber : 1) Target Nasional terhadap Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil rakortekbangnas 2024

2) Hasil Perhitungan Tim KEMD Provinsi Jawa Barat berdasarkan kondisi 2023.

3.1.10.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Cirebon

Tantangan ekonomi Kabupaten Cirebon yang struktur ekonominya di dominasi oleh sektor industri pengolahan adalah bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi yang berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu beberapa tantangan lain diantaranya :

1. Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Kabupaten Cirebon, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri Pengolahan Kabupaten Cirebon dan berpengaruh terhadap *share* sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Cirebon;
2. Perubahan iklim juga memberikan andil terhadap sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan, selain itu perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Kabupaten Cirebon dan penyerapan tenaga kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon belum berada pada level semestinya,

dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun regional Jawa Barat;

4. Pendapatan perkapita masyarakat yang relatif rendah;
5. Ketimpangan Pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi;
6. Daya saing tenaga kerja masih rendah;
7. Kualitas SDM belum optimal; dan
8. Masih ada kelompok masyarakat yang rentan miskin, sehingga memberikan kontribusi terhadap *share* ekonomi dari sisi pengeluaran;
9. Mengoptimalkan peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian;
10. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing;
11. Meningkatkan pengelolaan dan produktivitas tanaman pangan utama;
12. Penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi Masyarakat;
13. Mengoptimalkan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut :

1. Tantangan pada sektor investasi
 - a. Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dengan menyediakan RUPM, peta potensi dan peluang investasi digital, kebijakan penanaman modal yang memberi kemudahan bagi investor, fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan berbasis *online* dan penyelesaian kasus antara pekerja dan perusahaan.
 - b. Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - d. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*, *link and match investor* industri kecil dan industri besar; dan
 - e. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada Sektor Industri dan Perdagangan
 - a. Meningkatkan nilai ekspor melalui fasilitasi produk-produk unggulan berorientasi ekspor dan memperluas pameran dagang internasional
 - b. Penyusunan RPIK, dan Penumbuhan *cluster* industri
 - c. Fasilitasi perizinan bagi IKM dan sertifikasi produk IKM
 - d. Penerapan Teknologi Industri
 - e. Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI (Pasar Pemda)

- f. Pencapaian Stabilitas harga 9 komoditas kebutuhan pokok masyarakat
 - g. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
 - h. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
 - i. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. Substitusi bahan baku impor;
 - k. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
 - l. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada Sektor Koperasi dan UMKM
- a. Meningkatkan kualitas lembaga koperasi
 - b. Fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam
 - c. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Kabupaten Cirebon melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
 - d. Meningkatkan usaha mikro yang menjadi wirausaha dan meningkatkan *omzet* para pelaku usaha mikro melalui fasilitasi akses permodalan, peningkatan kualitas dan pengembangan pelaku usaha mikro (keterampilan teknis dan manajerial), fasilitasi perizinan usaha mikro (kemudahan proses layanan perizinan, pembebasan biaya perizinan dan fasilitasi HAKI usaha), fasilitasi peningkatan kualitas, sertifikasi dan diversifikasi produk usaha mikro, fasilitasi pemasaran produk pelaku usaha mikro (segmentasi dan positioning produk, perluasan cakupan promosi, perluasan informasi pasar, *branding*, optimalisasi *e-commerce*), tata kelola data UMKM (pendataan dan *update* data UMKM), kemitraan (kemitraan antar UMKM dan kemitraan UMKM dan usaha besar), serta penyediaan sarana prasarana UMKM (pembangunan sentra UMKM, bantuan sarana prasarana dan keringanan biaya sarana dan prasarana); dan
 - e. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir;
4. Tantangan pada Sektor Pertanian
- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas sektor pertanian melalui pengembangan *green economy*;
 - b. Sarana pendukung produksi belum memadai;
 - c. Prasarana pendukung produksi belum memadai;
 - d. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian;
 - e. Rendahnya inovasi di sektor pertanian
 - f. Dampak perubahan iklim;
 - g. Degradasi dan berkurangnya lahan pertanian; dan
 - h. Belum terlaksananya konservasi terhadap lahan dan air
5. Tantangan pada Sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan
- a. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas sektor perikanan melalui pengembangan *blue economy*;

- b. Belum terbentuknya lembaga otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD) Kab. Cirebon;
- c. Masih terdapat heuleur yang belum maksimal sanitiasi *hygiene* sesuai standar kewanamanan pangan;
- d. Masih ditemukan bahan pangan segar dan jajanan yang tidak aman dikonsumsi;
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pola konsumsi makanan yang B2SA;
- f. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik;
- g. Sebaran wilayah produksi hanya di daerah - daerah tertentu dimana arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen
- h. Rantai Distribusi yang panjang yang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen;
- i. Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- j. Masih terdapat desa rentan rawan pangan
- k. Pengembangan perikanan tangkap per kecamatan masih belum merata
- l. Masih terbatasnya teknologi yang dihadapi oleh nelayan tangkap;
- m. Masih terbatasnya pengembangan perikanan budidaya, termasuk ketersediaan lahan untuk budidaya;
- n. Terbatasnya pemahaman pembudidaya ikan mengenai konsep-konsep produksi;
- o. Kurang optimalnya penggunaan balai benih ikan
- p. Kurang optimalnya kawasan khusus budidaya perikanan serta belum cukup tertatanya pasar dalam pengembangan perikanan budidaya;
- q. Kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah;
- r. Sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan yang belum optimal
- s. Pasar masih berkembang dengan jaringan yang bersifat individu masih bersifat konvensional memerlukan terobosan dengan sistem *e-commerce* dengan optimalisasi teknologi
- t. Perlunya penataan sistem pemasaran berbasis korporasi yang terintegrasi dengan para produsen yaitu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta faktor produksi lainnya;
- u. Belum dapat dipenuhi secara optimal permintaan perikanan;
- v. Masih terbatasnya jumlah usaha yang bergerak pada industri pengolahan perikanan;
- w. Optimalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- x. Cuaca ekstrim;

- y. Tingginya harga pakan ikan.
- 6. Tantangan pada Sektor Pariwisata
 - a. Pengembangan *orange economy*;
 - b. Fasilitasi HKI ekonomi kreatif;
 - c. Fasilitasi sertifikasi/standarisasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata Kabupaten Cirebon melalui pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas (kemudahan akses, pergerakan dan kenyamanan wisatawan) destinasi pariwisata Kabupaten Cirebon, pemasaran pariwisata (promosi, pengembangan citra pariwisata, dan pengembangan pariwisata Kabupaten Cirebon), penguatan kelembagaan pariwisata (penguatan tata kelola usaha kepariwisataan, penyediaan SDM pariwisata, dan penguatan strategi kepariwisataan) serta pertumbuhan industri pariwisata (melalui kemudahan investasi dan keterlibatan UMKM bidang pariwisata);
 - e. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
 - f. Pengembangan Desa Wisata;
 - g. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional;
 - h. Percepatan Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE); dan
 - i. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.
- 7. Tantangan pada Sektor Ketenagakerjaan
 - a. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja mikro dan makro yang belum *match* dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
 - b. Kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
 - c. Penguatan balai latihan kerja pemerintah, swasta maupun komunitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
 - d. Sarana dan prasarana pelatihan kerja yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelatihan kerja
 - e. Rendahnya penyerapan angkatan kerja terutama yang memiliki kompetensi
 - f. Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat bekerja di sektor formal
 - g. CPMI *unprocedural*
 - h. Kondusifitas hubungan industrial

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten



Cirebon yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Realisasi dan Proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.18.
Realisasi Tahun 2022-2024 dan Proyeksi Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha untuk 4 (Empat) Sektor Dominan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kategori Lapangan Usaha		Realisasi i 2022	2023			2024			2025	
			Perubahan RPJMD	RKPD	Realisasi	Perubahan RPJMD	Target Penyesuaian dalam P-RKPD	Realisasi	RPD	Target Penyesuaian (P-RKPD)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4	2,31	2,31	-2,13	2,54	2,31	0,12	4,63	4,63
B	Industri Pengolahan	4,69	4,41	4,84	5,38	5,07	5,07	5,87	5,43	5,43
C	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,30	5,5	2,9	2,02	5,75	3,05	2,54	2,66	2,66
D	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.67	4,93	7,26	7,64	5,23	7,77	2,20	8,88	8,88

Sumber: Data Diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2025

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Cirebon diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2025. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Cirebon dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.19.
Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

No.	Indikator Makro Pembangunan	Kabupaten Cirebon			
		Realisasi 2024	Target 2025 berdasarkan RPD	Target 2025 berdasarkan Hasil Kesepakatan dengan Provinsi Jawa Barat (RKPD)	Target 2025 (P-RKPD)
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,30	73,65	72,57	72,57



No.	Indikator Makro Pembangunan	Kabupaten Cirebon			
		Realisasi 2024	Target 2025 berdasarkan RPD	Target 2025 berdasarkan Hasil Kesepakatan dengan Provinsi Jawa Barat (RKPD)	Target 2025 (P-RKPD)
2	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	11	10,84	10,50	10,50
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	6,74	6,65	6,65	6,65
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,83	5,30	5,30	5,30
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)	28,14	27,493	27,493	29,25
6	Indeks Gini (Poin)	0,374	0,330	0,330	0,349–0,362
7	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCo2e)	-	-	-106.542,83	-106.542,83

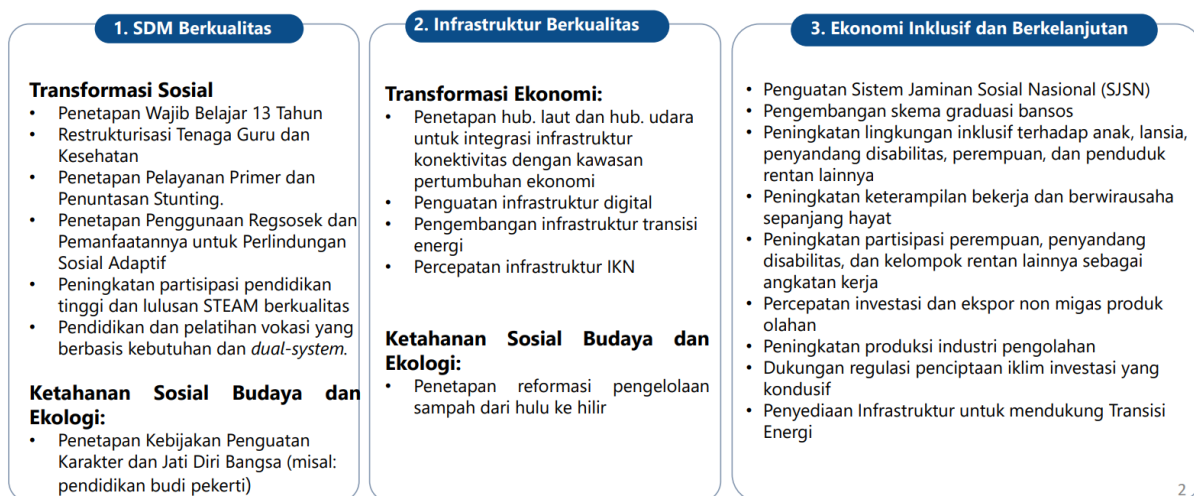
Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon, 2025
2. Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2025
3. RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

3.1.11. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.11.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Tema yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 di dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” dengan arah kebijakan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3.16.
Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

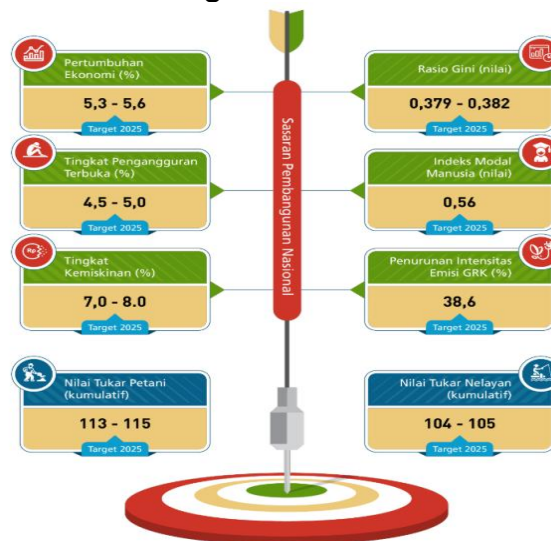


Sumber : RKP Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Sasaran Pembangunan didalam RKP tahun 2025 sebagaimana pada gambar berikut ini :

Gambar 3.17.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

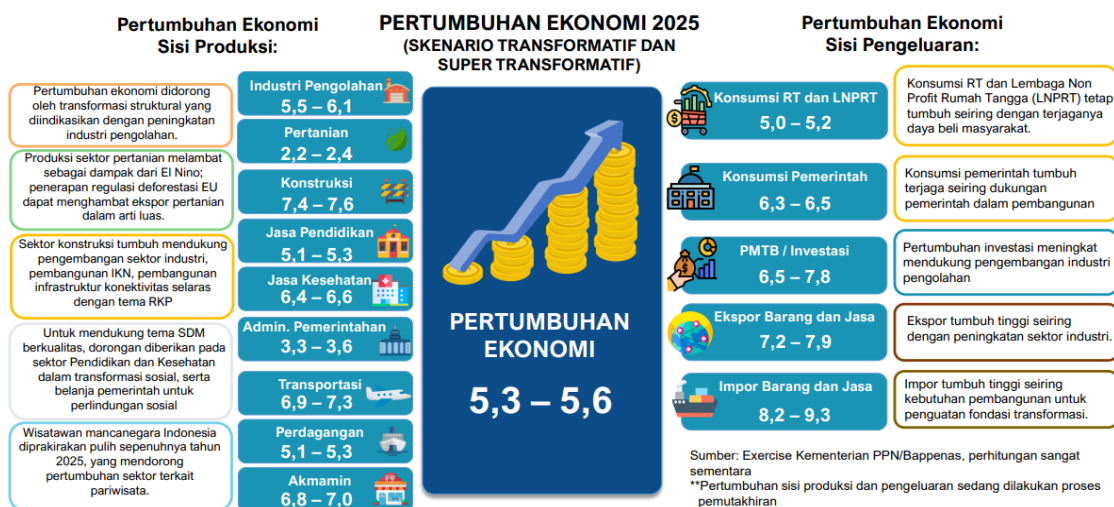


Sumber : RKP Tahun 2025

Sasaran pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) baik dari sisi produksi maupun dari sisi pengeluaran di dalam RKP Tahun 2025 sebagaimana pada gambar berikut ini :

Gambar 3.18.

Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025



Sumber : RKP Tahun 2025

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada



kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Sasaran ekonomi makro nasional Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20.
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , <i>yoy</i>): Akhir Periode	1,5–3,5 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000–15.400 ^{b)}
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5–153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1–6,1 ^{c)}
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)–(0,2) ^{d)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,3–19,6
7	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,6
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	11,20–12,00
10	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00–0,00 ^{d)}
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,80) ^{d)}
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,78–39,30
13	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2–1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber : RKP Tahun 2025

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$. Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi :

1. sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi supply termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor;
2. harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi;
3. peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan *Exporter Tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan;
4. integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara realtime;
5. fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi market intelligence, dan pengamanan pasar ekspor;
6. penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif;
7. penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global;
8. penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antar daerah dan dengan global melalui strategi :

1. integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah,
2. promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi,
3. peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah,
4. stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah,
5. pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standarisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan,
6. optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah,
7. penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik,
8. peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya,

9. peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp.1.868-1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Ratio* diupayakan agar semakin baik, yakni pada angka 6,3-6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong Transformasi Ekonomi antara lain :

1. sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga;
2. penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta
3. peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena *El Nino* dan *La Nina* terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,1 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri

pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,3-19,6 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain :

1. beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten dan proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat;
2. peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik;
3. permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta
4. keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Prospek positif pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diharapkan akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan akan berada pada kisaran 4,5–5,0 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga diharapkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah juga akan menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Jawa ditargetkan sebesar 5,1–5,6 persen. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada:

1. penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja;
2. penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; belanja pemerintah yang bersifat padat karya; dan
3. penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif.

Kemudian, strategi penyiapan kebhkerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan berada di kisaran 7,0-8,0 persen. Hal ini mempertimbangkan banyak hal antara lain kondisi dan capaian tingkat kemiskinan sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen bahwa target ini dapat tercapai sehingga tidak mengganggu Visi Indonesia Emas 2045 menuju

kemiskinan 0 persen. Beberapa hal diupayakan pemerintah antara lain melalui penyusunan peta jalan pengurangan kemiskinan dengan melakukan analisis per provinsi untuk mengkaji permasalahan di masing-masing daerah yang berpotensi memengaruhi capaian tingkat nasional. Berdasarkan dua strategi besar pengurangan kemiskinan, yaitu strategi makro dan mikro, maka dibutuhkan kondisi yang optimal di masing-masing strategi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dijaga inklusif serta stabilitas inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan sarana dan prasarana dasar; akses terhadap informasi; layanan dasar; serta kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Arah kebijakan mikro atau program-program afirmasi disempurnakan dalam payung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui beberapa fokus, yaitu :

1. perluasan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan pensasaran program;
2. peningkatan kapasitas pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti;
3. penguatan dan pelaksanaan skema graduasi program-program bantuan sosial dan komplementaritasnya dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja;
4. integrasi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan dengan pendekatan adaptif dan penyaluran nontunai;
5. penyempurnaan sasaran program utamanya untuk pilar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga secara tepat menyasar kelompok miskin dan rentan;
6. penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta
7. penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan terutama yang berada di luar keluarga.

Arah kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Kedua masyarakat tersebut membutuhkan arah kebijakan dan strategi yang berbeda. Kebijakan yang tepat untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah kebijakan yang dapat mempertahankan daya beli dan meningkatkan pendapatan. Sementara, untuk masyarakat berpenghasilan tinggi, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan yang dapat menciptakan redistribusi yang merata. Kemudian, arah kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa strategi yang harus di implementasikan. Strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok masyarakat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor antara lain melalui :

1. pengembangan registrasi sosial-ekonomi;
2. peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial;
3. integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan;
4. penguatan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah;
5. penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi;
6. meningkatkan penerimaan pajak dan mulai mengurangi kebijakan terkait relaksasi pajak (tax amnesty);
7. pemberian bantuan sosial langsung dan bantuan sosial sembako untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah; dan
8. reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan.

Upaya tersebut dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kelompok tersebut dapat mengalami kenaikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok 20 persen teratas. Diharapkan strategi tersebut dapat mengurangi Rasio Gini menjadi lebih kecil dan dapat mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu 0,379-0,382.

3.1.11.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2025 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
 - b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
 - c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
 - d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
 - e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;

- f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
 - h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
 - i. Peningkatan perhutanan sosial;
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
 - b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
 - c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
 3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan :
 - a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
 - b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
 - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
 - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;
 - e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
 - f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.

3.1.11.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Cirebon

Tema Pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 adalah “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”. Sesuai tema tersebut, pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tahun 2025 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Arah pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tahun 2025 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan di sektor pertanian, dengan arah kebijakan :
 - a. Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian;
 - b. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan;
 - c. Peningkatan Cakupan Binaan Kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan;

- d. Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan;
- e. Pengembangan Ekonomi Hijau;
- f. Pengembangan Ekonomi Biru;
- 2. Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis *smart economy* dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor;
 - b. Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal;
 - c. Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
 - d. Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon
 - e. Pengembangan Ekonomi Oranye
 - f. Peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif
- 3. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran;
 - c. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni;
 - e. Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa;
 - f. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - g. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas
 - h. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi
- 4. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan untuk pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan
 - c. Penataan alun-alun kecamatan sebagai RTH dan ruang interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
- 5. Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal, dengan arah kebijakan :

- a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan Masyarakat
 - b. Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau
 - c. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)
6. Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat, dengan arah kebijakan :
- a. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha
 - b. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - d. Pemberdayaan Perempuan

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Cirebon berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

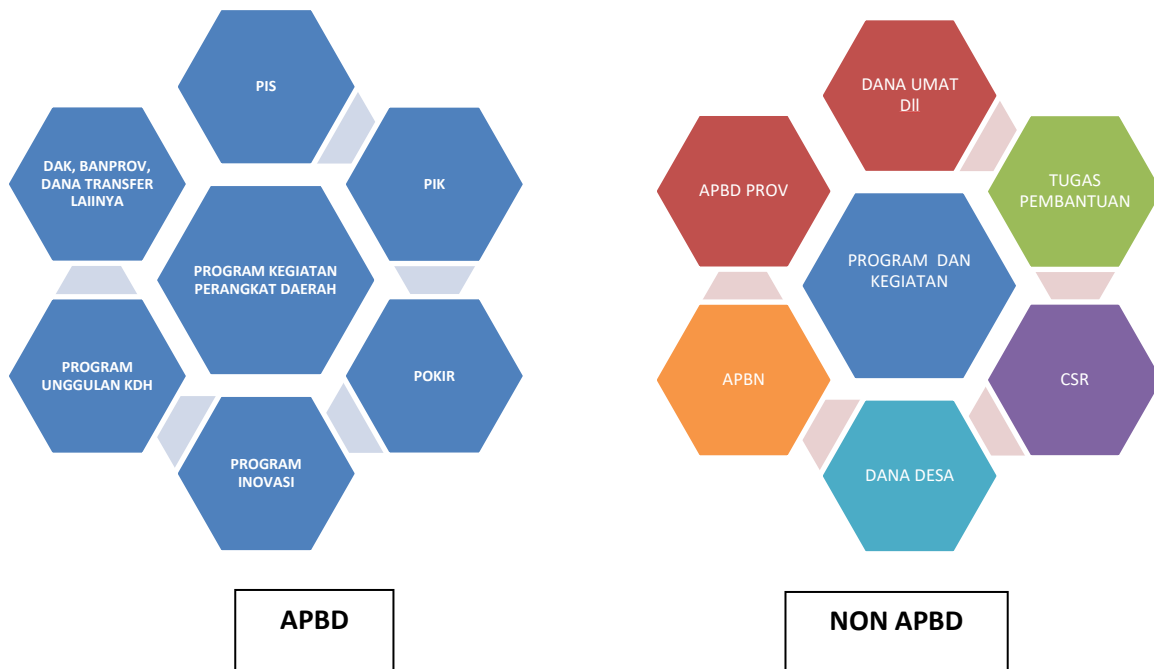
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, memiliki rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,057 termasuk dalam kategori kapasitas fiskal daerah rendah. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah, Kabupaten Cirebon telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kabupaten Cirebon juga melalui optimalisasi pendanaan non APBD. Kebijakan kolaborasi pendanaan Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.19.

Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon



Sumber : RPD Tahun 2025-2026 Kabupaten Cirebon

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RKP tahun 2025 serta kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang direncanakan dalam RKPD tahun 2025. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

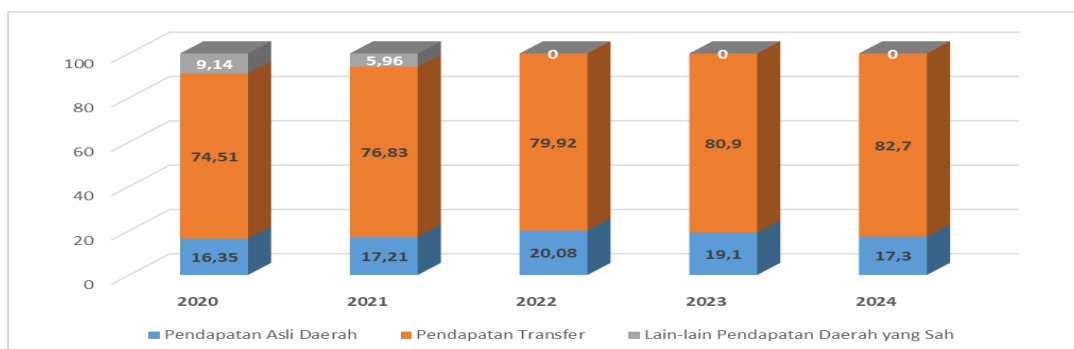
Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2022 dan 2023, target tahun berjalan 2024 serta proyeksi/target pendapatan tahun 2025 dan 2026.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer yang meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat dan/ atau
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Cirebon secara umum masih didominasi oleh sumber dana transfer, sementara kemampuan PAD hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan. Perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Cirebon 5 (*lima*) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.20.
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, 2019-2023



Sumber Data : LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon



Pada P-RKPD tahun 2025, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp. 4.567.739.032.900,72 meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.011.917.750.233,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 3.524.373.596.487,72 dan Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan Rp. 31.447.686.180,00. PAD yang bersumber dari pajak pada P-RKPD tahun 2025 diproyeksikan turun dari anggaran APBD tahun 2025 sebesar 3,66 persen yakni dari sebesar Rp. 587.949.082.583,00 pada APBD tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 566.449.082.583,00 pada P-RKPD tahun 2025. Komponen pajak yang turun secara signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mengalami penurunan sebesar 4,26 persen dari sebesar Rp. 105.552.250.000,00 pada APBD tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 566.449.082.583,00 pada P-RKPD tahun 2025. Komponen pajak yang juga mengalami penurunan cukup signifikan adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan sebesar 9,75 persen dari sebesar Rp. 106.901.081.138,00 pada APBD tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 96.474.493.638,00 pada P-RKPD tahun 2025. Komponen pajak selain PBBP2 dan BPHTB yang mengalami penurunan secara signifikan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mengalami penurunan sebesar 4,56 persen dari APBD tahun 2025 atau sebesar Rp. 6.955.287.500,00.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan mengalami penurunan terutama pendapatan transfer pemerintah pusat yang mengalami mengalami penurunan sangat signifikan. Penurunan cukup signifikan tersebut disebabkan adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama DAK fisik akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sebagai tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Perkembangan realisasi pendapatan tahun 2022-2023, target tahun Berjalan 2024 dan troyeksi / target pendapatan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025– 2026 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.21.
Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2023, Target Tahun Berjalan 2024 dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

No	Uraian	Jumlah (Rp.)							
		Realisasi Tahun 2022 (APBD) ¹⁾	Realisasi Tahun 2023 (APBD) ²⁾	Tahun Berjalan 2024 (Realisasi APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (RKPD) ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (APBD) ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (P-RKPD) ⁴⁾	Bertambah/(Berkurang)	Proyeksi / Target pada Tahun 2026 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)-(7)	(10)
4.	PENDAPATAN	3.960.950.401.341,52	4.017.267.994.687,82	4.464.635.080.497,28	5.970.555.424.785,00	4.628.091.592.372,00	4.567.739.032.900,72	(60.352.559.471,28)	4.795.642.946.112,03
4.1.	Pendapatan asli daerah	795.263.842.278,52	744.524.538.980,82	772.488.538.477,28	1.046.827.423.586,00	1.067.915.168.215,00	1.011.917.750.233,00	(55.997.417.982,00)	1.201.933.890.059,45
4.1.01.	Pajak daerah	308.442.409.838,00	328.734.776.136,00	348.566.584.116,00	566.861.337.954,00	587.949.082.583,00	566.449.082.583,00	-21.500.000.000,00	624.316.255.052,33
4.1.02.	Retribusi daerah	27.897.867.887,00	32.401.830.073,00	385.446.568.081,28	455.364.410.642,00	455.372.410.642,00	417.421.928.532,00	-37.950.482.110,00	516.465.036.553,17
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.702.211.968,00	14.458.949.796,00	14.683.818.841,00	15.853.360.903,00	15.853.360.903,00	15.853.360.903,00	-	18.294.195.793,42
4.1.04.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	445.221.352.585,52	368.928.982.975,82	23.791.567.439,00	8.748.314.087,00	8.740.314.087,00	12.193.378.215,00	-3.453.064.128,00	42.858.402.660,53
4.2.	Pendapatan Transfer	3.165.686.559.063,00	3.272.743.455.707,00	3.692.146.542.020,00	4.910.288.961.199,00	3.546.737.384.157,00	3.524.373.596.487,72	(22.363.787.669,28)	3.593.709.056.052,58
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.706.565.604.541,00	2.796.514.952.898,00	3.142.049.119.624,00	4.039.415.935.106,00	3.286.947.759.000,00	3.227.087.990.811,72	59.859.768.188,28	3.074.087.879.856,21
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	459.120.954.522,00	476.228.502.809,00	550.097.422.396,00	870.873.026.093,00	259.789.625.157,00	297.285.605.676,00	-37.495.980.519,00	519.621.176.196,37
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	13.439.040.000,00	13.439.040.000,00	31.447.686.180,00	18.008.646.180,00	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-	13.439.040.000,00	13.439.040.000,00	13.439.040.000,00	-	-
4.3.02.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	18.008.646.180,00	18.008.646.180,00	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)		3.960.950.401.341,52	4.017.267.994.687,82	4.464.635.080.497,28	5.970.555.424.785,00	4.628.091.592.372,00	4.567.739.032.900,72	(60.352.559.471,28)	4.795.642.946.112,03

Sumber Data : - ¹⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ²⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ³⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (audited) BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁴⁾ Proyeksi BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁵⁾ Perda APBD TA. 2025, BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁶⁾ RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat. Sumber pendapatan dari PAD sampai saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menghendaki adanya penyesuaian ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (*satu*) Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap target PAD untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025. Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan pada tahun 2023 dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut beberapa peraturan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
7. Ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peningkatan PAD juga diupayakan dengan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi, menyederhanakan prosedur perizinan, menyehatkan iklim ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedur, memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang akan dideklarasikan secara bersama semua *stakeholders* melalui *Cirebon Investment Summit*, layanan perizinan dilakukan secara daring untuk memudahkan jangkauan Masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Cirebon. Upaya tersebut diharapkan dapat terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang mencabut beberapa peraturan sebagai berikut :



1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam optimalisasi PAD dilakukan dengan inovasi-inovasi di sektor pajak dan retribusi sebagai berikut :

1. Pemberlakuan e-retribusi;
2. Reklame dengan pola zonasi;
3. PBB dan PHTB dilakukan dengan penilaian objek dan subjek pajak;
4. Pajak restoran akan didorong melalui system report pajak secara *online*; dan
5. Peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan didorong melalui perluasan MoU dengan desa-desa dalam pelayanan pengelolaan sampah.
6. Perbaikan Manajemen dimana setiap potensi pendapatan daerah diharapkan dapat direalisasikan melalui perbaikan manajemen. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur (biaya dan waktu).
7. Optimalisasi aset daerah melalui peningkatan penggunaan aset daerah untuk menambah PAD dengan perbaikan administrasi aset, peningkatan perputaran

(*turn over*), dan bekerjasama dengan swasta. Perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru diperlukan dalam rangka optimalisasi aset daerah.

Upaya untuk peningkatan pendapatan dari pendapatan transfer tetap dilakukan melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Pendapatan dari dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah akan berkorelasi positif dengan pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam APBD ditujukan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah serta mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Berlandaskan pada kondisi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Cirebon saat ini, serta belajar dari dampak pandemi COVID-19, maka Kabupaten Cirebon harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian Kabupaten Cirebon antara sektor industri pengolahan; sektor pertanian, perikanan, kelautan; sektor perdagangan dan pariwisata. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan *outcome* yang jelas serta terukur dan dalam implementasinya benar-benar menyentuh serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2025.

Indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya terutama pada komponen pajak daerah yang meningkat cukup signifikan dengan adanya opsen PKB dan BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga ke daerah pada tahun anggaran 2025 ini juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan anggaran Kabupaten Cirebon tahun 2025.

Perubahan RKPD tahun anggaran 2025 ini mengakomodir kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Arah kebijakan belanja daerah terkait efisiensi anggaran sesuai peraturan Bupati Cirebon nomor : 900.1.12/11/BKAD tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, diantaranya :

- a. membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
- b. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
- d. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- e. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya; dan
- f. melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Identifikasi atas efisiensi belanja dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
- b. kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
- c. batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan penandaan di SIPD-RI.

Selain kebijakan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2025 untuk mengakomodir kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat, P-RKPD juga memberikan arah kebijakan belanja daerah sesuai yang ditetapkan pada RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2025 yakni :

1. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang, Pokok – pokok Pikiran DPRD dan “MAHAR MAS KATON” (Rumah Aspirasi Masyarakat Kabupaten Cirebon);
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi: honor TTK; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet; dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
3. Dialokasikan untuk belanja mandatori atau belanja penugasan wajib yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya : belanja terkait fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari pendapatan yang bersumber dari dana transfer umum, belanja peningkatan kapasitas SDM sebesar 0,16 persen dari total belanja daerah dan belanja penguatan APIP sebesar 0,3 persen – 0,9 persen dari total belanja daerah;
4. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah serta penerapan pelayanan dasar, diantaranya:
 - a. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, ada 7 (*tujuh*) prioritas : 1) Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK; 2) Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau; 3) Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan; 4) Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial; 5) Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah; 6) Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup; 7) Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan;
 - b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan kabupaten, meliputi 19 (*sembilan belas*) jenis pelayanan dasar yaitu: SPM Pendidikan (pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan), SPM Kesehatan (pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif), SPM Pekerjaan Umum (pemenuhan kebutuhan pokok air minum

sehari-hari; dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik), SPM perumahan rakyat (penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota), SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) dan SPM sosial (rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota);

- c. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's).
- d. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2025.
- e. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Cirebon secara konsisten dan berkesinambungan, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
- f. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
- g. Pengalokasian untuk pendanaan Bantuan Keuangan Desa Khusus untuk akseleratif pencapaian target-target pembangunan strategis daerah yang makin dirasakan masyarakat daerah.
- h. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah.
- i. Penyediaan alokasi Gaji dan Tunjangan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Revitalisasi Kantor Dinas, Kecamatan, Kantor Cabang Dinas/Balai/UPTD dan Satuan Pelayanan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi dan revitalisasi.
- k. Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;

- l. Pemberian penghargaan inovasi daerah kepada perangkat daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat umum yang inovatif;
 - m. Pendukungan event olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat maupun nasional Tahun 2025.
5. Mengedepankan program-program kolaboratif yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan persampahan, upaya penanganan stunting dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. *Cost sharing* untuk optimalisasi pencapaian dari sektor pajak kendaraan
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah tahun 2025, belanja diproyeksikan mengalami penurunan pada P-RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2025 yakni menjadi sebesar Rp. 4.648.293.342.699,00 meliputi komponen Belanja Operasi sebesar Rp. 3.502.710.543.550,00; Belanja Modal sebesar Rp. 424.950.424.385,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 710.632.374.764,00. Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2025 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Cirebon, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Secara rinci, daftar rencana belanja daerah untuk rencana program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran Buku II RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2025. Sedangkan Realisasi Belanja tahun 2022-2023, target tahun berjalan 2024 dan proyeksi/target belanja Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 3.22.
Realisasi Belanja Tahun 2022 - 2023, Target Tahun Berjalan 2024 dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

No	Uraian	Jumlah (Rp.)							
		Realisasi Tahun 2022 (APBD) ¹⁾	Realisasi Tahun 2023 (APBD) ²⁾	Tahun Berjalan 2024 (Realisasi APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (RKPD) ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (APBD) ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (P-RKPD) ⁴⁾	Bertambah/(Berkurang)	Proyeksi / Target pada Tahun 2026 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
5.	BELANJA	3.988.922.622.626,00	4.132.750.422.628,47	4.608.556.270.530,00	6.245.043.537.640,00	4.728.637.373.172,00	4.648.293.342.699,00	(80.344.030.473,00)	4.955.027.358.658,54
5.1.	BELANJA OPERASI	2.985.149.828.252,00	3.039.524.743.697,47	3.410.559.545.501,00	3.290.719.707.466,00	3.372.410.263.004,00	3.502.710.543.550,00	130.300.280.546,00	3.729.416.173.854,60
5.1.01.	Belanja pegawai	1.561.612.475.084,00	1.609.712.189.701,00	1.849.376.765.355,00	2.213.762.318.096,00	2.080.541.333.289,00	2.084.271.333.289,00	3.730.000.000,00	2.117.942.266.515,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.315.507.381.917,00	1.266.210.801.307,47	1.331.187.948.343,00	997.461.408.770,00	1.171.273.028.116,00	1.259.147.279.362,00	87.874.251.246,00	1.418.401.617.789,37
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	83.174.048.251,00	139.814.249.339,00	218.601.651.803,00	71.025.423.600,00	111.205.967.599,00	148.049.264.999,00	36.843.297.400,00	168.859.642.394,17
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	24.855.923.000,00	23.787.503.350,00	11.393.180.000,00	8.470.557.000,00	9.389.934.000,00	11.242.665.900,00	1.852.731.900,00	24.212.647.156,06
5.2.	BELANJA MODAL	314.155.622.794,00	373.623.487.361,00	478.767.157.553,00	2.151.506.841.474,00	399.332.697.004,00	424.950.424.385,00	25.617.727.381,00	472.387.312.375,50
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.691.148.916,00	250.600.000,00	-	55.000.000.000,00	6.850.000.000,00	676.260.000,00	(6.173.740.000,00)	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.156.368.652,00	140.514.929.375,00	148.888.092.294,00	550.452.174.965,00	107.278.475.786,00	163.636.245.416,00	56.357.769.630,00	79.419.648.691,43
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.119.333.179,00	56.348.808.375,00	115.833.547.378,00	860.582.911.809,00	76.750.581.318,00	72.861.276.969,00	(3.889.304.349,00)	41.015.829.144,97
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.695.224.847,00	175.083.760.411,00	213.012.113.581,00	684.421.234.700,00	206.843.389.600,00	186.065.059.700,00	(20.778.329.900,00)	351.635.054.313,21
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	493.547.200,00	1.425.389.200,00	1.033.404.300,00	333.806.000,00	893.536.300,00	994.868.300,00	101.332.000,00	316.780.225,89
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	716.714.000,00	716.714.000,00	716.714.000,00	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.656.013.104,00	24.313.927.365,00	9.344.507.869,00	35.000.000.000,00	235.694.286.000,00	10.000.000.000,00	(225.694.286.000,00)	82.364.220.147,94
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	20.656.013.104,00	24.313.927.365,00	9.344.507.869,00	35.000.000.000,00	235.694.286.000,00	10.000.000.000,00	(225.694.286.000,00)	82.364.220.147,94
5.4.	BELANJA TRANSFER	668.961.158.476,00	695.288.264.205,00	709.885.059.607,00	767.816.988.700,00	721.200.127.164,00	710.632.374.764,00	(10.567.752.400,00)	670.859.652.280,50
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	24.700.989.476,00	28.784.091.205,00	34.252.775.007,00	60.886.756.200,00	37.051.670.264,00	30.051.670.264,00	(7.000.000.000,00)	60.279.169.887,57
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	644.260.169.000,00	666.504.173.000,00	675.632.284.600,00	706.930.232.500,00	684.148.456.900,00	680.580.704.500,00	(3.567.752.400,00)	610.580.482.392,93
JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)		3.988.922.622.626,00	4.132.750.422.628,47	4.608.556.270.530,00	6.245.043.537.640,00	4.728.637.373.172,00	4.648.293.342.699,00	(80.344.030.473,00)	4.955.027.358.658,54
SURPLUS / (DEFISIT)		(27.972.221.284,48)	(115.482.427.940,65)	(143.921.190.032,72)	(274.488.112.855,00)	(100.545.780.800,00)	(80.554.309.798,28)		(159.384.412.546,51)

Sumber Data : - ¹⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ²⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ³⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (audited) BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁴⁾ Proyeksi BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁵⁾ Perda APBD TA. 2025, BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁶⁾ RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa. ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kabupaten Cirebon sudah mengembangkan e-ASB yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan dimulai sejak tahun 2015. e-ASB yang dikembangkan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah Kabupaten Cirebon yang sudah berjalan yaitu e-perencanaan. Pada tahun 2021 Kabupaten Cirebon menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan perencanaan tahunan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a) Informasi Pembangunan Daerah; b) Informasi Keuangan Daerah; dan c) Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk

diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (*satu*) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan serta penatausahaan keuangan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Kabupaten Cirebon.

Dalam proses belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, Kabupaten Cirebon juga telah menggunakan *e-procurement* sejak tahun 2011. *e-procurement* yang digunakan diantaranya Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang beralamat di <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/> dan LPSE yang beralamat di <http://lpse.cirebonkab.go.id/eproc4>.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam sistem penganggaran daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan pada prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga defisit anggaran tersebut dapat ditanggulangi. Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Cirebon tahun 2025 diantaranya :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. SiLPA yang bersumber dari sisa belanja transfer yang bersifat spesifik akan dipergunakan kembali untuk belanja yang bersifat spesifik sesuai petunjuk teknisnya. SiLPA yang berasal dari Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer, Penghematan Belanja, dan Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang sifatnya tidak spesifik diprioritaskan untuk belanja yang menjadi kewajiban daerah berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan jika masih ada lebih akan digunakan untuk belanja sesuai prioritas daerah;
2. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu;

Realisasi pembiayaan tahun 2022 - 2023, target tahun berjalan 2024 dan proyeksi/target pembiayaan Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.23.
Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 - 2023, Target Tahun Berjalan 2024 dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

No	Uraian	Jumlah (Rp.)							
		Realisasi Tahun 2022 (APBD) ⁽¹⁾	Realisasi Tahun 2023 (APBD) ⁽²⁾	Tahun Berjalan 2024 (Realisasi APBD) ⁽³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (RKPD) ⁽⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (APBD) ⁽⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (P-RKPD) ⁽⁴⁾	Bertambah/(Berkurang)	Proyeksi / Target pada Tahun 2026 ⁽⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	372.930.148.719,34	299.957.927.771,86	129.584.120.169,00	274.488.112.855,00	100.545.780.800,00	80.554.309.798,28	(19.991.471.001,72)	159.384.412.546,51
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	378.206.410.319,34	344.957.927.434,86	224.475.499.831,21	284.488.112.855,00	106.545.780.800,00	80.554.309.798,28	(25.991.471.001,72)	165.384.412.546,51
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	378.206.410.319,34	344.957.927.434,86	184.475.499.831,21	284.488.112.855,00	106.545.780.800,00	80.554.309.798,28	(25.991.471.001,72)	165.384.412.546,51
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	40.000.000.000,00	-	-	-	-	-
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	378.206.410.319,34	344.957.927.434,86	224.475.499.831,21	284.488.112.855,00	106.545.780.800,00	80.554.309.798,28	(25.991.471.001,72)	165.384.412.546,51
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.276.261.600,00	44.999.999.663,00	-	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	(6.000.000.000,00)	6.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-	40.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.276.261.600,00	4.999.999.663,00	-	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	(6.000.000.000,00)	6.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.276.261.600,00	44.999.999.663,00	-	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	(6.000.000.000,00)	6.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (6.1-6.2)	372.930.148.719,34	299.957.927.771,86	224.475.499.831,21	274.488.112.855,00	100.545.780.800,00	80.554.309.798,28	(19.991.471.001,72)	159.384.412.546,51
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	344.957.927.434,86	184.475.499.831,21	80.554.309.798,49	-	-	-		-

Sumber Data : - ¹⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ²⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ³⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (audited) BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁴⁾ Proyeksi BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁵⁾ Perda APBD TA. 2025, BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁶⁾ RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026



3.3. Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah di Luar APBD

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Cirebon dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kabupaten Cirebon. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) Dana Masyarakat/Umat; 3) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)). Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1. APBN

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Cirebon selain bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci menghadapi keterbatasan fiskal dalam APBD baik pada masa maupun pasca pandemi COVID-19. Sumber pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten.

Tabel 3.24.
Alokasi APBN-TP Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024

No	Dana APBN-TP	Kementerian	2023	2024
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.179.365.000	-
2.	Pengembangan sarana perdagangan dan kapasitas logistik	Kementerian Perdagangan	3.000.000.000	-
3.	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	1.400.000.000
Jumlah			5.179.365.000	1.400.000.000

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Kegiatan APBN/PHLN Tugas Pembantuan, 2023-2024, data diolah

3.3.2. Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar, tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kabupaten Cirebon secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.3.3. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Program Kepedulian Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan bahwa Perum dan Persero BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina

lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan perlu ada sinkronisasi perencanaan pembangunan dan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon.

Alternatif pembiayaan yang bersumber dari dana CSR adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Strategi di dalam penguatan peran CSR dalam pembiayaan pembangunan daerah melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Peningkatan efektivitas CSR dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan, komunikasi yang baik, pelibatan pemangku kepentingan, serta sinkronisasi program CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun beberapa strategi yang akan diterapkan, antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola CSR:

- **Membentuk Forum CSR Daerah:**

Forum ini dapat menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah.

- **Meningkatkan Kapasitas SDM:**

Memberikan pelatihan dan pendidikan terkait CSR kepada aparatur pemerintah daerah dan perwakilan perusahaan.

- **Menyusun Pedoman Teknis CSR:**

Pedoman ini dapat memberikan panduan bagi perusahaan dalam menjalankan program CSR yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

- **Menerapkan Standar ISO 26000:**

Standar ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial.

2. Peningkatan Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder:

- **Sosialisasi Program CSR:**

Mensosialisasikan program CSR kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan dampak positifnya.

- **Membangun Kemitraan:**

Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR.

- **Pelibatan Masyarakat:**
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR.
3. Sinkronisasi Program CSR dengan RPJMD:
- **Identifikasi Prioritas Pembangunan:**
Berdasarkan RPJMD, identifikasi sektor-sektor prioritas yang membutuhkan dukungan CSR.
 - **Penyelarasan Program:**
Memastikan program CSR yang dijalankan oleh perusahaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
 - **Evaluasi dan Pelaporan:**
Melakukan evaluasi berkala terhadap program CSR dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
- **Pengembangan Platform Digital:**
Membangun platform digital untuk memfasilitasi komunikasi, pelaporan, dan monitoring program CSR.
 - **Pemanfaatan Media Sosial:**
Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang program CSR dan membangun kesadaran masyarakat.
5. Penguatan Peran Pemerintah Daerah:
- **Penyediaan Insentif:** Memberikan insentif kepada perusahaan yang menjalankan program CSR yang efektif.
 - **Penyederhanaan Regulasi:** Mempermudah proses perizinan dan birokrasi terkait pelaksanaan CSR.
 - **Pengawasan dan Evaluasi:** Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR.
6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:
- **Kampanye Publik:** Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya CSR.
 - **Pendidikan Karakter:** Memasukkan materi tentang CSR dalam kurikulum pendidikan.

Dalam pelaksanaannya program ini di bagi menjadi :

1. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil atau Program Kemitraan, dimana program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri; dan
2. Program Bina Lingkungan atau Program BL adalah program pemberdayaan kondisi

sosial masyarakat oleh BUMN.

Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah:

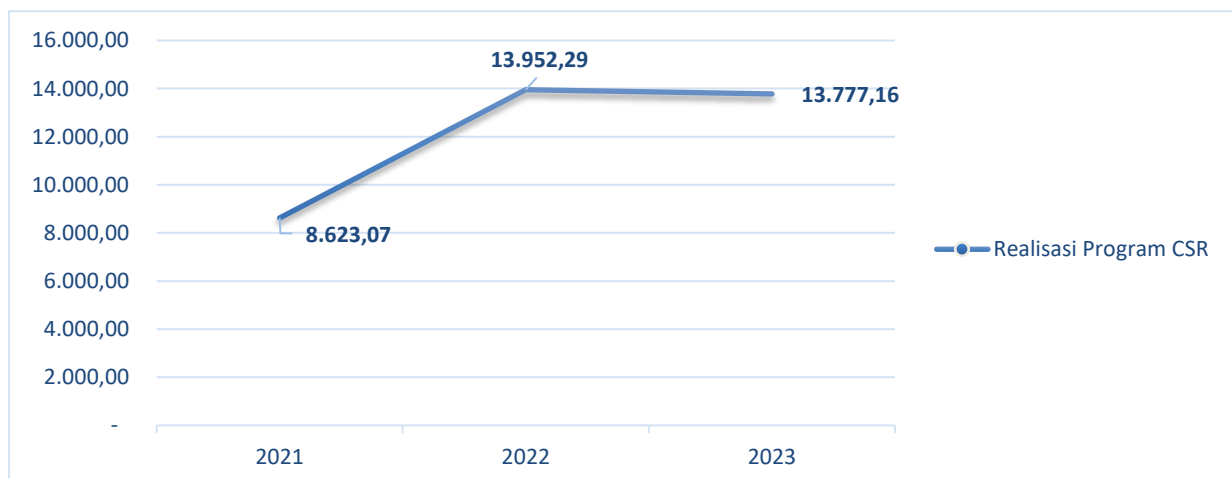
1. mensinergiskan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon; 2.
2. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon;
3. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Bina lingkungan;
4. Peningkatan daya beli;
5. Sosial;
6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
7. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut ini :

Gambar 3.21.
Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023



Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA-Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2021-2023, data diolah



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Bab IV dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan pembangunan. Substansi dalam bab ini berfungsi untuk merinci *sasaran pembangunan daerah* yang merupakan penjabaran operasional dari tujuan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025–2026 serta hasil evaluasi capaian RPJMD Tahun 2019–2024. Di samping itu, bab ini menetapkan *prioritas pembangunan tahunan* sebagai bentuk respon terhadap dinamika isu strategis, hasil Musrenbang, serta arahan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 berlandaskan pada beberapa instrumen perencanaan dan evaluasi, antara lain:

1. Hasil evaluasi capaian indikator makro dan indikator kinerja utama daerah dalam periode sebelumnya;
2. Arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029;
3. Visi dan misi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045;
4. Arah pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 serta keterkaitan dengan agenda pembangunan kewilayahan;
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat isu prioritas pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Perubahan kondisi faktual dan tantangan pembangunan Kabupaten Cirebon berdasarkan data statistik tahun berjalan dan proyeksi ke depan.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan target indikator makro pembangunan yang diselaraskan dengan target pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagai acuan evaluatif dan arah kebijakan. Berikut ini disajikan target indikator makro pembangunan tahun 2025:

**Tabel 4.1 Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025**

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Nasional (RPJMN/RKP)	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Cirebon
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,99–74,02	74,39	72,57
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,0–8,0	5,85–6,46	10,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,5–5,0	6,42–6,99	6,65
4	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,3–5,6	4,96–5,37	5,3
5	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta Rp	-	57,14	27,49
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,379–0,382	0,383–0,390	0,349–0,362

Sumber: RPJMN 2025–2029, RKP 2025, RKPD Provinsi Jawa Barat, RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Target indikator makro yang ditetapkan untuk tahun 2025 mencerminkan kerangka kinerja pembangunan yang bersifat holistik dan integratif. Perbandingan antara target Kabupaten Cirebon dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional menunjukkan sejumlah kecenderungan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata nasional maupun provinsi, yang mencerminkan adanya tantangan serius dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan akselerasi kebijakan dan program yang mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah, akses pendidikan menengah dan tinggi, serta peningkatan mutu layanan kesehatan dasar yang merata, terutama di wilayah pedesaan dan kantong-kantong kemiskinan.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang tercatat lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat dan nasional menegaskan perlunya intervensi strategis yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. Program peningkatan kapasitas UMKM, integrasi perlindungan sosial dengan pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi pedesaan perlu menjadi bagian penting dari agenda percepatan pengurangan kemiskinan.



Sedangkan kemiskinan ekstrem kabupaten cirebon pada tahun 2024 tercatat diangka 1,13% atau sekitar 27.714 jiwa. Angka ini turun dari tahun 2023 yaitu 1,65% atau sekitar 36.640 jiwa. Strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya adalah Mengurangi Beban pengeluaran masyarakat miskin, Meningkatkan Kemampuan dan pendapatan Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Warga Miskin Untuk Memenuhi Kebutuhan Dan Pelayanan Dasar, Menciptakan Penghidupan Penduduk Miskin Dan Rentan Miskin Yang Berkelanjutan Melalui Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkualitas, Mewujudkan Sistem Perlindungan Sosial Yang Komprehensif, Mengembangkan Dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro Dan Kecil, Mensinergiskan Kebijakan Dan Program Penanggulan Kemiskinan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Cirebon berada pada tingkat yang relatif moderat. Meski sedikit di atas target nasional, capaian ini lebih baik dibandingkan dengan rerata provinsi. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketenagakerjaan lokal yang cukup baik. Namun demikian, peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja tetap dibutuhkan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis, terutama dalam menghadapi perkembangan industri dan transformasi digital.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang dipatok sebesar 5,30% menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Angka ini selaras dengan target provinsi dan nasional, dan didukung oleh potensi sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, jasa pariwisata, dan pertanian modern. Konsistensi kebijakan serta kemudahan investasi menjadi kunci dalam mewujudkan target tersebut.

Namun demikian, Pendapatan Per Kapita Kabupaten Cirebon yang masih jauh di bawah provinsi mengindikasikan adanya tantangan dalam produktivitas dan daya beli masyarakat. Hal ini perlu direspon melalui strategi peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, penguatan jejaring industri kecil dan menengah, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.

Terakhir, meskipun nilai Gini Ratio Kabupaten Cirebon tercatat lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional, yang menunjukkan distribusi pendapatan relatif lebih merata, kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses pertumbuhan ekonomi yang berlangsung tidak menciptakan kesenjangan baru, khususnya dalam akses terhadap pelayanan dasar, peluang ekonomi, dan kepemilikan aset produktif. Dengan demikian, pencapaian target



indikator makro tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan, tetapi juga sekaligus sebagai alat kendali arah kebijakan agar tetap inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan global maupun lokal.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai landasan perumusan sasaran pembangunan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan penelaahan secara komprehensif terhadap berbagai dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Cirebon tetap selaras dan sinergis dengan visi besar pembangunan Indonesia, termasuk visi Indonesia Emas 2045 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

4.1.1. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Penelaahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional dilakukan sebagai dasar untuk memastikan keterpaduan pembangunan daerah dengan agenda nasional jangka panjang. Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, visi Indonesia 2045 ditegaskan sebagai *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima sasaran utama pembangunan, yaitu: (1) pendapatan per kapita setara negara maju; (2) penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan; (3) peningkatan daya saing SDM; (4) peningkatan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional; serta (5) penurunan emisi gas rumah kaca menuju emisi nol bersih.

Lebih lanjut, RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen operasional lima tahunan menetapkan delapan misi pembangunan yang berfungsi sebagai kerangka pelaksanaan RPJPN. Delapan misi tersebut mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, penguatan hukum dan stabilitas, pembangunan kewilayahan yang adil, pembangunan infrastruktur hijau, ketahanan sosial-budaya dan ekologi, serta kesinambungan pembangunan. Masing-masing misi ini dijabarkan ke dalam 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama, yang harus diadopsi ke dalam perencanaan daerah secara adaptif.

Sasaran pembangunan tahun 2025 sesuai RKP tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan menurunkan Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan. Hal ini



dilaksanakan untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4.2.
Target Sasaran Pembangunan Nasional

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,5-5,0
3	Penduduk Miskin (%)	8,57	7,0-8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,379-0,382
5	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	75,02	73,99-74,02
6	Pendapatan Per kapita harga berlaku (juta rupiah)	78,6	-

Sumber: Statistik Indonesia 2025
RPJMN 2020-2025

Dalam konteks Kabupaten Cirebon, penelaahan ini menjadi referensi utama untuk menyusun sasaran pembangunan daerah yang responsif terhadap tantangan global dan nasional, seperti krisis iklim, ketahanan pangan, transformasi digital, dan agenda pembangunan rendah karbon. Selain RPJPN dan RPJMN, penyesuaian juga dilakukan terhadap kebijakan strategis lain seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Instruksi Presiden terkait prioritas nasional, dan arahan teknokratik pembangunan dari kementerian/lembaga sektoral. Penelaahan ini menjadi langkah awal dalam membangun fondasi yang kuat untuk integrasi program, anggaran, dan kolaborasi lintas sektor menuju pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Penyesuaian arah pembangunan Kabupaten Cirebon terhadap kebijakan nasional tidak hanya dilakukan pada level prinsip dan visi, tetapi juga menyentuh sasaran sektoral dan kebijakan afirmatif. Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari wilayah metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana), termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Percepatan Pembangunan Ekonomi yang diatur dalam RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, prioritas nasional yang diarahkan secara spesifik mencakup pengembangan infrastruktur konektivitas, transformasi industri manufaktur dan logistik, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas SDM melalui reformasi sistem pendidikan dan layanan kesehatan dasar.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM melalui reformasi sistem pendidikan, Kabupaten Cirebon telah mencanangkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber dengan luas lahan 57.791 m dan telah disurvey oleh kementerian Pekerjaan Umum, serta sudah diterbitkan Surat



Penetapan Lokasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029, mengarah pada visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah meluncurkan program untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), program tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG mendukung visi tersebut dengan memperbaiki gizi anak dan berkontribusi pada transformasi sosial yang inklusif dan adil, serta peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Pemerintah juga telah mengundang Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon sedang diperluas secara bertahap. Pada bulan Januari 2025 dapur MBG telah beroperasi di beberapa kecamatan, termasuk Gegesik, Sumber, Plumbon, dan Kedawung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan telah mendapat perhatian luas.

Selain sebagai intervensi gizi bagi pelajar, MBG juga berperan dalam menggerakkan ekonomi rakyat, dengan melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam penyediaan makanan. Pemerintah Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Pada Bulan Juni 2025* MBG telah beroperasi di Kecamatan Gegesik, Depok, Kedawung, Pasaleman, Babakan, Susukan Lebak, Suranenggala, dan Pabedilan dengan jumlah sasaran 21.070 siswa yang bersekolah di 112 sekolah dari mulai KB, TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK. (Kodim 0620/Kabupaten Cirebon)

Selain itu, pelaksanaan *Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)* juga menjadi acuan dalam menyusun sasaran pembangunan daerah. Kabupaten Cirebon merespons hal ini dengan menyelaraskan indikator lokal dengan 17 tujuan global, terutama dalam aspek pengurangan kemiskinan (TPB 1), pendidikan berkualitas (TPB 4), pekerjaan layak (TPB 8), serta perubahan iklim (TPB 13). Penjabaran strategis ini memastikan bahwa pembangunan daerah terhubung dengan peta jalan pembangunan nasional maupun komitmen internasional.



4.1.2. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat.” Tema ini diterjemahkan ke dalam empat tujuan pembangunan yang mencakup: penguatan kualitas SDM, penguatan ekonomi inklusif, pemerataan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Setiap tujuan dijabarkan dalam bentuk sasaran pembangunan strategis yang menjadi acuan sinkronisasi dengan kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat.

Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning diarahkan sebagai bagian dari Kawasan Timur dengan tema “Gerbang Timur Jawa Barat.” Kebijakan pengembangan di kawasan ini difokuskan pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Fokus pembangunan lainnya mencakup pengembangan wisata budaya-religi, pemanfaatan ruang berbasis tiga ring (jasa, industri lokal, dan bahan baku), serta penguatan ketahanan wilayah pesisir dan lingkungan hidup.

Untuk menjamin sinergi perencanaan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pemetaan keselarasan antara tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Barat dengan arah pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	Sasaran Sejalan Kabupaten Cirebon
1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	- Akses dan mutu pendidikan meningkat - Derajat kesehatan meningkat - Penurunan stunting dan pengangguran	- Peningkatan IPM, pendidikan vokasi, akses layanan kesehatan dasar - Penurunan pengangguran dan stunting
2. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	- Pertumbuhan sektor industri, pertanian, perdagangan, pariwisata - Investasi meningkat - Daya saing dan lapangan kerja meningkat	- Hilirisasi produk pertanian, penguatan UMKM, destinasi wisata Cirebon, digitalisasi pemasaran produk lokal
3. Pemerataan Wilayah, Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan	- Konektivitas meningkat - Infrastruktur dasar (air, sanitasi, transportasi) merata - Lingkungan hidup dan	- Penyediaan akses air bersih, pengendalian banjir, pembangunan jalan wilayah utara, konservasi mangrove di pesisir



Tujuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Sasaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	Sasaran Sejalan Kabupaten Cirebon
	mitigasi bencana terkelola	
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Demokrasi yang Inovatif dan Adaptif	- Nilai Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah meningkat - Partisipasi publik dan transparansi meningkat	- Perluasan pelayanan digital, penerapan MPP (mal pelayanan publik), inovasi desa cerdas

Sumber: - RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025,
- RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026.

Kabupaten Cirebon menempati posisi strategis dalam peta pembangunan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam kerangka pengembangan wilayah timur Jawa Barat yang diarahkan sebagai *Gerbang Timur Provinsi*. Sejumlah kebijakan dan prioritas Provinsi Jawa Barat dirancang secara khusus untuk mendukung transformasi struktural di Kabupaten Cirebon, dengan menyesuaikan pada potensi sumber daya lokal, posisi geostrategis, serta tantangan sosial-ekonomi wilayah.

Salah satu kebijakan afirmatif yang menonjol adalah pengembangan **Kampus ITB Cirebon** sebagai pusat pendidikan tinggi dan riset di wilayah timur Jawa Barat. Pembangunan kampus ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi lokomotif inovasi dan kolaborasi riset antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri lokal.

Selain itu, Kabupaten Cirebon juga menjadi fokus pengembangan **kawasan budaya dan pariwisata religi**, dengan revitalisasi kompleks Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi provinsi dalam memperkuat ekonomi berbasis kebudayaan dan pelestarian warisan sejarah, sekaligus mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke kawasan Cirebon Raya.

Dalam aspek lingkungan dan ketahanan wilayah, Provinsi Jawa Barat mendorong **penguatan infrastruktur pengelolaan pesisir dan lingkungan hidup** di Kabupaten Cirebon, termasuk rehabilitasi hutan mangrove, pengendalian banjir rob, serta pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) terpadu. Langkah ini bertujuan menanggulangi risiko bencana ekologis di kawasan pesisir utara yang terus meningkat akibat perubahan iklim dan tekanan aktivitas ekonomi.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari wilayah pengaruh Kawasan Metropolitan Rebana, Kabupaten Cirebon diarahkan menjadi *hinterland logistik dan industri*



pendukung melalui pengembangan infrastruktur konektivitas, kawasan industri terpadu, dan sistem transportasi multimoda. Kebijakan ini sejalan dengan pengembangan pusat pertumbuhan baru Jawa Barat berbasis manufaktur, perdagangan, dan jasa logistik, dengan Cirebon berperan sebagai simpul penting yang menghubungkan pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan jalur pantura Jawa.

Keseluruhan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi sekaligus subjek aktif dalam agenda pembangunan provinsi yang lebih besar, dengan potensi untuk tumbuh sebagai pusat pendidikan, budaya, industri, dan lingkungan berkelanjutan di wilayah timur Jawa Barat.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 ditetapkan sebagai bentuk penjabaran atas visi dan arah pembangunan jangka menengah dalam RPD 2025–2026, yang sekaligus merespons isu-isu strategis daerah serta menjamin keterkaitan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi. Secara umum, pembangunan daerah diarahkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan wilayah, kualitas SDM yang belum merata, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta lemahnya daya saing sektor ekonomi lokal. Isu-isu ini juga sejalan dengan tantangan yang diidentifikasi dalam RPJMN 2025–2029 dan RPD Provinsi Jawa Barat, seperti penguatan ekonomi hijau, transformasi sosial, serta peningkatan infrastruktur dasar yang merata.

Merespons isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan lima tujuan pembangunan utama. Tujuan pertama adalah **meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang berkeadilan**, dengan fokus pada penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan dan pariwisata. Tujuan ini selaras dengan arah pembangunan nasional dalam mendorong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta sejalan dengan sasaran Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan daya saing ekonomi wilayah timur.



Tabel 4.4.
Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cirebon 2025-2026

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
1. Perekonomian yang belum tumbuh secara optimal 2. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah 3. Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan
		Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Pengangguran dan Kemiskinan 5. Kualitas Sumber Daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
6. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat
7. Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Meningkatnya kondusifitas Wilayah
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum

Sumber : Dokumen RPD Kabupaten Cirebon 2025-2026

Seluruh tujuan dan sasaran tersebut telah dirinci ke dalam 19 indikator kinerja utama daerah, seperti: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, angka kemiskinan, IPM, TPT, Indeks Ketimpangan (Gini), serta Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Inovasi Daerah. Setiap indikator ini dirancang untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Cirebon berada dalam koridor yang sinergis dengan agenda nasional dan provinsi.



Tabel 4.5.
Indikator Tujuan dan Sasaran dan Target 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
1,1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kinerja: Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,85 Persen	5,08	5,30	5,70	5,70	BPBD; DINAS PUTR; DINKOP UKM; DISBUDPAR; DISHUB; DISPERDAGIN; DISTAN; DKPP; DLH; DPKPP; DPMD; DPMPTSP
1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,13 Persen	4,41	4,63	4,86	4,86	DISTAN; DKPP
		Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan	5,38 Persen	5,39	5,43	5,70	5,70	DINKOP UKM; DISPERDAGIN
		Kinerja: Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tolok Ukur: Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,02 Persen	2,54	2,66	2,80	2,80	DINKOP UKM; DISPERDAGIN
		Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	7,64 Persen	8,46	8,88	9,32	9,32	DISBUDPAR



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
		Kinerja: Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB), Tolok Ukur: Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)	17.130,00 Milyar Rp	17.230,00	17.418,38	18.289,30	18.289,30	DPMPTSP
1.1.2	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kinerja: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap	88,53 Nilai	88,93	89,23	89,81	89,81	DINAS PUTR; DISHUB; DPKPP
		Kinerja: Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa, Tolok Ukur: Indeks Desa Membangun (IDM)	0,78 Nilai	0,79	0,81	0,83	0,83	DPMD
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kinerja: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,96 Nilai	60,80	62,74	64,74	64,74	DLH
		Kinerja: Menurunnya Risiko Bencana Daerah, Tolok Ukur: Indeks Risiko Bencana	144,56 Persen	142,50	140,25	138,50	138,50	BPBD
1.1.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketahanan Pangan	82,03 Nilai	82,20	82,60	83,26	83,26	DKPP
1,2	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Kinerja: Meningkatnya derajat pembangunan manusia, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,81 Poin	72,75	73,65	74,53	74,53	DINKES; DINSOS; DISARPUS; DISDIK; DISNAKER; DISPORA; DPPKBP3A
1.2.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya derajat pendidikan daerah, Tolok Ukur: Indeks Pendidikan	59,93 Nilai	60,42	61,26	62,11	62,11	DISDIK



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
		Kinerja: Meningkatnya budaya literasi masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2,09 Nilai	4,42	5,42	6,42	6,42	DISARPUS
1.2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat, Tolok Ukur: Usia Harapan Hidup (UHH)	74,71 Usia	74,95	75,20	75,45	75,45	DINKES; DISPORA
		Kinerja: Meningkatnya pembangunan gender daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketimpangan Gender	0,45 Nilai	0,43	0,40	0,38	0,38	DPPKBP3A
1.2.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Kinerja: Menurunnya tingkat kemiskinan, Tolok Ukur: Angka Kemiskinan	11,20 Persen	10,84	10,50	9,75	9,75	DINSOS
		Kinerja: Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Tolok Ukur: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,65 Persen	7,10	6,65	6,10	6,10	DISNAKER
		Kinerja: Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, Tolok Ukur: PDRB Perkapita	25.970,00 Juta Rupiah	27.493,16	27.493,16	30.892,34	30.892,34	
		Kinerja: Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Gini	0,35 nilai	0,34	0,33	0,32	0,32	
1,3	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Kinerja: Meningkatnya kinerja sistem tata kelola pemerintahan, Tolok Ukur: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	67,83 Poin	68,00	69,00	70,00	70,00	BADAN KESBANGPOL; BAPENDA; BAPPELITBANGDA; BKAD; BKPSDM; BPBD; DINAS PUTR; DINKES; DISARPUS; DISBUDPAR; DISDAMKAR; DISDIK; DISDUKCAPIL; DISKOMINFO; DISNAKER; DISPERDAGIN; DISPORA; DISTAN; DLH; DPKPP;

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
								DPMD; DPMPTSP; INSPEKTORAT; KEC. ASTANAJAPURA; KEC. AWN; KEC. BABAKAN; KEC. BEBER; KEC. CILEDUG; KEC. CIWARINGIN; KEC. DEPOK; KEC. DUKUPUNTANG; KEC. GEBANG; KEC. GEGESIK; KEC. GEMPOL; KEC. GNJATI; KEC. GREGED; KEC. JAMBLANG; KEC. KALIWEDI; KEC. KAPETAKAN; KEC. KARANGSEMBUNG; KEC. KEDAWUNG; KEC. KLANGENAN; KEC. KRGWARENG; KEC. LEMAHABANG; KEC. LOSARI; KEC. MUNDU; KEC. PABEDILAN; KEC. PABUARAN; KEC. PALIMANAN; KEC. PANGENAN; KEC. PANGURAGAN; KEC. PLERED; KEC. PLUMBON; KEC. PSLMN; KEC. SEDONG; KEC. SUMBER; KEC. SURANENGGALA; KEC. SUSUKAN; KEC. SUSUKANLEBAK; KEC. TALUN; KEC. TTANI; KEC. WALED; KEC. WERU; SATPOL PP; SETDA;



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
								SETWAN
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Nilai SAKIP	67,84 Nilai	68,00	68,50	69,00	69,00	BADAN KESBANGPOL; BAPENDA; BAPPELITBANGDA; BKAD; BKPSDM; BPBD; DINAS PUTR; DISARPUS; DISBUDPAR; DISDAMKAR; DISDIK; DISDUKCAPIL; DISKOMINFO; DISPERDAGIN; DISPORA; DISTAN; DKPP; DLH; DPKPP; DPMD; DPMPTSP; DPPKBP3A; INSPEKTORAT; KEC. ASTANAJAPURA; KEC. AWN; KEC. BABAKAN; KEC. BEBER; KEC. CILEDUG; KEC. CIWARINGIN; KEC. DEPOK; KEC. DUKUPUNTANG; KEC. GEBANG; KEC. GEGESIK; KEC. GNJATI; KEC. GREGED; KEC. JAMBLANG; KEC. KALIWEDI; KEC. KAPETAKAN; KEC.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
								KEDAWUNG; KEC. KRGWARENG; KEC. LEMAHABANG; KEC. LOSARI; KEC. MUNDU; KEC. PABEDILAN; KEC. PABUARAN; KEC. PALIMANAN; KEC. PANGENAN; KEC. PANGURAGAN; KEC. PLUMBON; KEC. PSLMN; KEC. SEDONG; KEC. SUMBER; KEC. SURANENGGA; KEC. SUSUKAN; KEC. SUSUKANLEBAK; KEC. TALUN; KEC. WALED; KEC. WERU; SATPOL PP; SETDA; SETWAN
		Kinerja: Terpenuhinya target opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4,00 Opini	4,00	4,00	4,00	4,00	BKAD
		Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pengendalian instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Maturitas SPIP	3,00 Level	3,00	3,00	3,00	3,00	INSPEKTORAT
		Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, Tolok Ukur: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,07 Nilai	3,20	3,25	3,27	3,27	DISARPUS; DISKOMINFO



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
1.3.2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya kualitas kebijakan daerah, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Kebijakan	0,00 Nilai	0,00	50,00	60,00	60,00	SETDA; SETWAN
		Kinerja: Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	84,25 Nilai	86,25	87,50	88,75	88,75	DISDUKCAPIL; KEC. ASTANAJAPURA; KEC. AWN; KEC. BABAKAN; KEC. BEBER; KEC. CILEDUG; KEC. CIWARINGIN; KEC. DEPOK; KEC. DUKUPUNTANG; KEC. GEBANG; KEC. GEGESIK; KEC. GEMPOL; KEC. GNJATI; KEC. GREGED; KEC. JAMBLANG; KEC. KALIWEDI; KEC. KAPETAKAN; KEC. KARANGSEMBUNG; KEC. KEDAWUNG; KEC. KLANGENAN; KEC. KRGWARENG; KEC. LEMAHABANG; KEC. LOSARI; KEC. MUNDU; KEC. PABEDILAN; KEC. PABUARAN; KEC. PALIMANAN; KEC. PANGENAN; KEC. PANGURAGAN; KEC. PLERED; KEC. PLUMBON; KEC. PSLMN; KEC. SEDONG; KEC. SUMBER; KEC. SURANENGGA; KEC. SUSUKAN; KEC. SUSUKANLEBAK; KEC.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target tahun		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2026		
								TALUN; KEC. TTANI; KEC. WALED; KEC. WERU
		Kinerja: Meningkatnya kualitas profesionalisme ASN, Tolok Ukur: Indeks Profesionalisme ASN	75,52 Nilai	75,00	76,50	78,00	78,00	BKPSDM
		Kinerja: Meningkatnya Inovasi Daerah, Tolok Ukur: Indeks Inovasi Daerah	47,15 Nilai	57,00	58,00	60,00	60,00	BAPPELITBANGDA
		Kinerja: Meningkatnya rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, Tolok Ukur: Rasio Kamandirian Fiskal	0,19 Nilai	0,20	0,21	0,22	0,22	BAPENDA
1,4	Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Kinerja: Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	Nilai	0,00	60,00	65,00	65,00	BADAN KESBANGPOL; DISDAMKAR; SATPOL PP
1.4.1	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Kinerja: Meningkatnya kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Kondusifitas Wilayah (IKW)	0,00 Nilai	84,34	84,84	85,34	85,34	BADAN KESBANGPOL
1.4.2	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Kinerja: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00 Nilai	52,00	53,00	54,00	54,00	DISDAMKAR; SATPOL PP

Sumber : RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026



Dengan kerangka tujuan dan sasaran yang terintegrasi dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan bahwa pembangunan tahun 2025 bukan hanya menjadi kelanjutan administratif dari siklus tahunan, tetapi juga menjadi titik akselerasi transformasi daerah menuju pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

4.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 dirumuskan sebagai respons terhadap tantangan pembangunan daerah yang kompleks serta untuk menjamin efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025–2026. Perumusan strategi ini juga bertujuan untuk menjaga keselarasan dengan kerangka kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Secara umum, strategi pembangunan daerah tahun 2025 difokuskan pada lima pilar utama, yaitu: (1) penguatan ekonomi lokal dan daya saing wilayah; (2) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan hidup; (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi layanan dasar; (4) transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan partisipatif; serta (5) penguatan ketahanan sosial dan keamanan wilayah. Kelima pilar ini menjadi dasar perumusan arah kebijakan lintas sektor dan program prioritas yang akan diimplementasikan oleh perangkat daerah.

Dalam sektor ekonomi, arah kebijakan ditujukan pada penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, industri kecil menengah (IKM), perdagangan, dan pariwisata. Pengembangan kawasan agropolitan, hilirisasi hasil pertanian, serta digitalisasi pemasaran UMKM menjadi langkah kunci untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Di bidang infrastruktur, strategi difokuskan pada penyediaan akses air bersih, peningkatan kualitas jalan antarwilayah, sanitasi layak, serta konservasi lingkungan pesisir. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur juga mencakup dukungan terhadap pengembangan kawasan Rebana sebagai hinterland logistik dan industri serta keterhubungan antarwilayah dalam koridor Ciayumajakuning.



Untuk sektor sosial, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan stunting, penguatan pendidikan vokasi, dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar di wilayah perdesaan dan pesisir. Hal ini diperkuat dengan strategi integrasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.

Dalam bidang pemerintahan, strategi diarahkan pada reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta peningkatan kualitas data pembangunan melalui sistem *Cakra Data Kabupaten Cirebon*. Transformasi layanan publik berbasis digital menjadi tulang punggung peningkatan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan.

Sementara itu, arah kebijakan di bidang keamanan dan sosial kemasyarakatan difokuskan pada peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat, penguatan lembaga adat dan sosial, serta pencegahan konflik sosial dan bencana melalui penguatan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan.

Secara keseluruhan, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 disusun untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, dengan menekankan sinergi antarsektor, integrasi lintas dokumen perencanaan, serta penguatan peran masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Strategi ini menjadi panduan utama dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta dalam penyusunan Perubahan Renja, KUA-PPAS, dan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2025.



Tabel 4.6.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PD Pengampu
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan di sektor pertanian	1. Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian	Dinas Pertanian
			2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan	Dinas Pertanian
			3. Peningkatan Cakupan Binaan Kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			4. Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan	DKPP
			5. Pengembangan Ekonomi Hijau	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			6. Pengembangan Ekonomi Biru	DKPP
		Peningkatan daya saing produk-produk unggulan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis smart economy	1. Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			2. Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (<i>public private partnership</i>) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			3. Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			4. Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerja sama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PD Pengampu
			Cirebon	
			5. Pengembangan Ekonomi Oranye	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			6. Peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif	DPMPTSP
	1.2. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	DPUTR
			2. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			3. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
			4. Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni	DPKPP
			5. Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa	DPMD
			6. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	DPKPP
			7. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	DPUTR
			8. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi	DPUTR
	1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PD Pengampu
	Hidup	hidup dan persampahan	2. Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup
			3. Penataan alun-alun kecamatan sebagai RTH dan ruang interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup
		Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alam dan non alam	1. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	BPBD
			2. Peningkatan Upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana	BPBD
			3. Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Dinas Sosial
			5. Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	Dinas Sosial
	1.4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan local	1. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	DKPP
			2. Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	DKPP
			3. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	DKPP
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender (opsi	2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok	1. Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Dinas Pendidikan
			2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online	Dinas Pendidikan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PD Pengampu
berkeadilan gender)	2.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu layanan dan akses kesehatan yang lebih terjangkau	3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online	Dinas Pendidikan
			1. Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (Berintegrasikan dengan Kartu PEPEK)	Dinas Kesehatan
			2. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu)	Dinas Kesehatan
			3. Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya	Dinas Kesehatan
	2.3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat	4. Peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD	Dinas Kesehatan
			1. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	Dinas Ketenagakerjaan
			2. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni	DPKPP
			3. Pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD
3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan Reformasi Birokrasi	4. Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP3A
			1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (<i>Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance</i>)	Sekretariat Daerah
			2. Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah
			3. Pengembangan <i>Smart Governance</i> yang unggul	Sekretariat Daerah dan Diskominfo
			4. Penguatan dan Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	PD Pengampu
			5. Penerapan sistem merit secara konsisten	BKPSDM
			6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan <i>corporate university</i>	BKPSDM
			7. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Bappeda, BKAD, Diskominfo, dan Inspektorat
			8. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi	Diskominfo, Sekretariat Daerah, DPMPSTSP dan Didukcapil
	3.2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan penerapan inovasi pelayanan masyarakat	1. Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Disdukcapil
			2. Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan	DPMPSTSP
			3. Peningkatan Layanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			4. Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Seluruh Kecamatan
4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	4.1. Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi	1. Meningkatkan kebebasan demokrasi	Badan Kesbangpol
			2. Meningkatkan penyelenggaraan	Badan Kesbangpol
			3. ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Badan Kesbangpol
			4. Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	Badan Kesbangpol
			5. Meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi	Badan Kesbangpol
	4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP
			2. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP
			3. Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas	Satpol PP
			4. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP

Sumber : RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Penetapan prioritas pembangunan daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan konsistensi perencanaan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan tahunan. Tahun 2025 menjadi titik awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon 2025–2026 yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing daerah secara menyeluruh.

4.2.1. Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Penetapan isu strategis pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan terkini. Sejumlah isu yang menonjol meliputi masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah, belum optimalnya produktivitas sektor unggulan, rendahnya kualitas pelayanan dasar, serta ancaman degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan dataran rendah. Isu-isu tersebut mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk mempercepat transformasi struktural dalam pembangunan ekonomi dan sosial di daerah. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 meliputi:

1. Perekonomian yang belum tumbuh secara optimal

- a. Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan
- c. Peningkatan fasilitas cakupan layanan penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis kemandirian
- d. Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk-produk perikanan menuju agroindustri perikanan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan dalam upaya Peningkatan Produksi Perikanan
- f. Peningkatan ilmu dan teknologi perikanan
- g. Peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor
- h. Meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (public private partnership) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal
- i. Percepatan pembentukan rintisan desa/kampung budaya dan dukungan akses



- j. Peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerja sama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon
- 2. Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya**
 - a. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - b. Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan
- 3. Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah**
 - a. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - b. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran
 - c. Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni
 - d. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
 - e. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas
- 4. Pengangguran dan Kemiskinan**
 - a. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha
 - b. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni
 - c. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - d. Pemberdayaan Perempuan
 - e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat
 - f. Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau
 - g. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)
- 5. Kualitas Sumber Daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat**
 - a. Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok
 - b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online
 - d. Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasikan dengan Kartu PEPEK)



- e. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu)
- f. Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya
- g. Peningkatan kualitas dan kelas layanan Puskesmas/RSUD

6. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

- a. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (*Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance*)
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Pengembangan Smart Governance yang unggul
- d. Penguatan dan Penataan Organisasi
- e. Penerapan sistem merit secara konsisten
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan *corporate university*
- g. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi
- h. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi
- i. Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- j. Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan
- k. Peningkatan Layanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD
- l. Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan

7. Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

- a. Meningkatkan kebebasan demokrasi
- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat
- c. Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi
- d. Meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi
- e. Pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- f. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada
- g. Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas
- h. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
- i. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- j. Peningkatan Upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana



- k. Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana
- l. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- m. Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 ditetapkan sebagai *“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.”* Tema ini dipilih untuk memperkuat pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah pasca pandemi, mendorong hilirisasi potensi unggulan lokal, serta memastikan investasi pembangunan manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta arah pembangunan Provinsi Jawa Barat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Berdasarkan isu strategis dan tema pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon merumuskan prioritas pembangunan tahun 2025 untuk menjamin konsistensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Prioritas ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif melalui Musrenbang, serta diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Prioritas pembangunan daerah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal yang berkeadilan, meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan dasar, memperkuat daya saing sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang inklusif dan tangguh, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif. Seluruh prioritas ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk keterkaitan terhadap permasalahan dan arah kebijakan, dukungan pokok-pokok pikiran DPRD, sinergi dengan prioritas nasional, serta program prioritas kabupaten yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.

4.2.1.1. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Permasalahan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilakukan dengan mengaitkan langsung antara permasalahan utama pembangunan, isu-isu strategis daerah, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD 2025–2026 dan KLHS RPJMD. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prioritas tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menjawab akar



persoalan yang dihadapi masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara konkret.

Permasalahan pembangunan yang mengemuka antara lain adalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, serta rendahnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan-permasalahan ini telah dikaji lebih lanjut melalui identifikasi isu strategis berbasis capaian TPB, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tekanan sosial-ekonomi akibat urbanisasi dan perubahan iklim.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui strategi peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan industri lokal; revitalisasi infrastruktur dasar dan wilayah pesisir; penguatan kualitas SDM dan reformasi pelayanan publik; serta pengarusutamaan keberlanjutan lingkungan dalam seluruh program pembangunan. Dengan demikian, setiap prioritas yang dirumuskan merupakan representasi dari solusi sistematis yang berbasis data, berpihak pada masyarakat, dan selaras dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



Tabel 4.7.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	1.2. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
			2. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran	
			3. Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni	
			4. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	
			5. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	
			6. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi	
	1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	1. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	
			2. Peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
		Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alam dan non alam	3 Penataan alun-alun kecamatan sebagai RTH dan ruang interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	
			1 Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	
			2 Peningkatan Upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan korban bencana	
			3 Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan korban bencana	
			4 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	
			5 Rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	
	1.4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal	1 Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan
			2 Peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			3 Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender (opsi berkeadilan gender)	2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok	1 Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK
			2 Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online	
			3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online	
	2.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu layanan dan akses kesehatan yang lebih terjangkau	1 Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (Berintegrasikan dengan Kartu PEPEK)	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau
			2 Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); peningkatan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu)	
			3 Peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagi sumber biaya	
			4 Peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
	2.3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat	1 Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha 2 Peningkatan akses terhadap rumah layak huni 3 Pemberdayaan masyarakat dan desa 4 Pemberdayaan Perempuan	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial
3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan Reformasi Birokrasi	1 Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance) 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 3 Pengembangan Smart Governance yang unggul 4 Penguatan dan Penataan Organisasi 5 Penerapan sistem merit secara konsisten	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
			6 Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan corporate university	
			7 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	
			8 Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi	
	3.2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan penerapan inovasi pelayanan masyarakat	1 Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
			2 Peningkatan layanan dan kemudahan perijinan	
			3 Peningkatan Layanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	
			4 Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	
4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	4.1. Meningkatnya Kondusifitas Daerah	meningkatkan kondusifitas kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam	1 Meningkatkan kebebasan demokrasi	Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah
			2 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
		berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi	3 Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	
			4 Meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi	
	4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1 Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
			2 Peningkatan penegakan Perda dan Perkada	
			3 Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas	
			4 Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	

Sumber : Data diolah Bappelitbangda, 2024.



Tabel 4.8.
Keterkaitan isu strategis Kabupaten Cirebon dengan Isu strategis Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Isu Strategi RPD Kabupaten	Isu Strategis Provinsi jabar
Perekonomian yang belum tumbuh secara optimal	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan
Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	
Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan
Pengangguran dan Kemiskinan	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat	
Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	

Sumber : RPD Kabupaten Cirebon 2025-2026



4.2.1.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Cirebon memandang bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan pilar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dirumuskan dengan mengakomodasi dan mengintegrasikan *Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD* yang dihimpun berdasarkan hasil reses, penjaringan aspirasi masyarakat, dan kajian kebijakan di masing-masing komisi DPRD.

Pokir DPRD Tahun 2025 mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah dan sektor, seperti permintaan peningkatan infrastruktur dasar (jalan lingkungan, air bersih, dan irigasi), peningkatan kualitas dan daya tampung fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, pertanian, dan perikanan. Aspirasi tersebut telah dikelompokkan dan dipetakan dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD), untuk kemudian disandingkan dengan isu strategis dan arah kebijakan daerah.

Melalui forum Musrenbang dan rapat koordinasi teknis, berbagai aspirasi DPRD ini direspons dalam bentuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, yang selanjutnya diselaraskan dengan tema pembangunan dan kerangka anggaran tahun 2025. Dengan keterpaduan tersebut, Pokir DPRD tidak hanya menjadi instrumen representatif dari konstituen, tetapi juga menjadi penguat legitimasi kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *bottom-up planning* yang menjadi landasan perencanaan daerah berbasis inklusi dan keadilan sosial.

Berikut di sampaikan poin-poin Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon untuk pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar
 - a. Rata-rata Sekolah Menuju 12 Tahun
 - b. 100 % UHC
 - c. Administrasi Kependudukan Prima
2. Pembangunan Infrastruktur
 - a. Cirebon Terang
 - b. Cirebon Bebas Banjir
 - c. Cirebon Bebas Sampah
 - d. Cirebon Bebas Jalan Berlubang
3. Pengangguran dan Kemiskinan
 - a. Angka Kemiskinan Menuju 5%



- b. Angka Pengangguran Menuju 5%
- 4. Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah
 - a. PDRB (ADHB) menuju 100 triliun/Tahun
 - b. Pajak Daerah menuju 1 Triliun /Tahun
 - c. Memperbaiki Pelayanan dan infrastruktur BPR
 - d. Pembuatan *Holding* Bumdes
- 5. Pembangunan Berbasis Kawasan
 - a. Kawasan Ibukota Sumber
 - b. Kawasan Industri Cirebon Timur
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata

Tabel keterkaitan antara Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 mencerminkan adanya konsolidasi visi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merespons kebutuhan pembangunan secara komprehensif. Pokir DPRD tidak semata menjadi representasi aspirasi politik konstituen, tetapi telah mengalami proses penguatan substansi melalui pengelompokan tematik yang selaras dengan arah kebijakan daerah.

Makna utama dari keterpaduan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Cirebon dirancang secara kolaboratif, tidak bersifat sektoral semata, namun berbasis kawasan dan lintas isu. Keterlibatan DPRD menegaskan pentingnya aspek pemerataan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, sebagai landasan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aspirasi yang mengarah pada peningkatan infrastruktur dan sistem perlindungan sosial juga memperkuat kerangka keadilan spasial dan sosial.

Selain itu, Pokir yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, melalui penguatan kelembagaan BUMDes, sektor pariwisata, hingga pencapaian target PDRB dan pajak daerah, menunjukkan bahwa DPRD mendorong kemandirian fiskal daerah berbasis inovasi kebijakan dan transformasi kelembagaan. Artinya, sinergi eksekutif dan legislatif dalam perencanaan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis untuk mengakselerasi capaian pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Tabel 4.9.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Program Prioritas Daerah

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Pokok-pokok Pikiran DPRD
1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar a. Rata-rata Sekolah Menuju 12 Tahun
2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar b. 100 % UHC



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Pokok-pokok Pikiran DPRD
3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	5. Pembangunan Berbasis Kawasan a. Kawasan Ibukota Sumber b. Kawasan Industri Cirebon Timur c. Kawasan Strategis Pariwisata
4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial	4. Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah c. Memperbaiki Pelayanan dan infrastruktur BPR d. Pembuatan <i>Holding</i> Bumdes
5	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	3. Pengangguran dan Kemiskinan a. Angka Kemiskinan Menuju 5% b. Angka Pengangguran Menuju 5%
6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	2. Pembangunan Infrastruktur a. Cirebon Bebas Banjir b. Cirebon Bebas Sampah c. Cirebon Bebas Jalan Berlubang d. Cirebon Terang
7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan publik	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar c. Administrasi Kependudukan Prima 4. Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah a. PDRB (ADHB) menuju 100 triliun/Tahun b. Pajak Daerah menuju 1 Triliun /Tahun

Sumber : Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

4.2.1.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional pada RKP 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 dirancang agar sejalan dan terintegrasi dengan agenda prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Hal ini penting untuk memastikan sinergi vertikal antara kebijakan pusat dan daerah, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan program strategis nasional di wilayah Kabupaten Cirebon. RKP 2025 mengusung tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”, yang dijabarkan dalam tujuh arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain penguatan ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi dan tata kelola, pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Kabupaten Cirebon merespons arah kebijakan tersebut dengan menetapkan prioritas pembangunan yang mendukung hilirisasi sektor pertanian dan industri pengolahan, transformasi layanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Program pembangunan daerah yang berfokus pada sektor unggulan (pertanian, perikanan, UMKM, dan



pariwisata) juga turut mendukung prioritas nasional terkait penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal.

Selain itu, melalui keterlibatan aktif dalam kawasan pengembangan Rebana dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kabupaten Cirebon mengambil peran penting dalam mendukung agenda pembangunan wilayah dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagaimana diarahkan dalam RPJMN dan RKP. Dengan menyelaraskan prioritas daerah terhadap prioritas nasional, Kabupaten Cirebon tidak hanya memperkuat efektivitas perencanaan dan penganggaran, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas pemerintah dan pendanaan yang lebih luas, baik dari APBN, skema KPBU, maupun dukungan mitra pembangunan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi:

Tabel 4.10.
Penjelasan atas Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator sasaran pembangunan prioritas nasional
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Asian Power Index, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Indeks Ketahanan Energi, rumah tangga dengan akses sanitasi aman, indeks ekonomi hijau, indeks kualitas lingkungan hidup
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%), Rasio Kewirausahaan (%) Rasio PDB Pariwisata, Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%),Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun), Harapan lama sekolah (tahun) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
		Peringkat Indeks Inovasi Global, Tingkat Pengangguran Terbuka (%),Usia Harapan Hidup (tahun) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Rasio PDB Industri Pengolahan (%) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB), Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) Biaya Logistik (% PDB)



Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator sasaran pembangunan prioritas nasional
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) Persentase desa mandiri (%) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Return on Asset (ROA) BUMN (%), Indeks Integritas Nasional, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Pembangunan Hukum, tingkat inflasi (%)
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%), Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Tabel 4.11.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL		PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PK5	Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah
PN2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PK6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
PN4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PK1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK
		PK2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau
		PK4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL		PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	
PN5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PK7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan
PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PK6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
		PK4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial

Sumber : Bappelitbangda, data diolah 2024

4.2.1.4. Program Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Program prioritas Kabupaten Cirebon tahun 2025 disusun untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Setiap program dirancang berdasarkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), yang mengaitkan langsung antara permasalahan strategis, arah kebijakan daerah, dan keterkaitan dengan prioritas nasional serta pokok-pokok pikiran DPRD. Program-program ini tidak hanya mencerminkan jawaban atas kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai katalisator transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Utama dalam penjabaran 7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai amanat RPD Kabupaten Cirebon 2025-2026, dengan uraian di bawah ini:

Prioritas 1: Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK

- 1. Rehab prasarana sekolah (rehabilitasi ruang kelas SD, SMP);
- 2. Pembangunan sekolah berwawasan lingkungan (sanitasi sekolah, drainase dan biopori);
- 3. Pendidikan paket kesetaraan (Paket B dan C) lanjutan dengan kriteria yang memenuhi syarat (SKB: 1 kecamatan minimal 1 kelas 1,5 – 1,8 juta/orang).



Prioritas 2: Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau

1. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita dengan status gizi sangat kurus (indeks BB/TB < -3 SD) di wilayah dengan risiko prevalensi stunting $\geq 14\%$).
2. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA < 23,5 cm di wilayah dengan risiko persentase ibu hamil KEK $\geq 10\%$;
3. Skrining Kesehatan Usia Produktif dan Kesehatan Mental;
4. Kegiatan Operasi Katarak;
5. Kompetisi Sepak bola U10 dan U12 serta Olah Raga Permasalahan (Senam, Fun Bike dan lain-lain) (Mandatory Kecamatan).

Prioritas 3: Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing serta Ketahanan Pangan

1. Pemagangan Kelompok Pertanian (Petani: Adaptasi teknologi pertanian) dan kelompok Perikanan (Pembudidaya ikan, petambak garam dan nelayan);
2. Pelatihan pelaku industri komprehensif (CIC);
3. Festival tematik, Sholawatan dan pentas seni pertunjukan tradisional Cirebonan (Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif) ex: pentas wayang kulit dan golek (minimal tingkat kecamatan) (Mandatory Kecamatan);
4. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (Bankeu Desus) (APBD: APBDes=80%: min 20%) – Maksimal 200 juta.
 - a) Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan - Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES); dan jalan usaha tani (JUT) – syarat: harus masuk LSD.;
 - b) Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP):
 - i. Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata a.l.: perbaikan dan pembukaan jalan akses destinasi wisata; pembangunan sarana prasarana; atraksi; sarana utilitas).
 - ii. Pembangunan kawasan Pertanian, Peternakan dan Perikanan berkelanjutan (*eco-mixed farming*);
5. Pelatihan vokasional berbasis penempatan (Pelaksanaan di BLK atau di LPK/BLK Komunitas), boleh di Kecamatan (SKB: untuk kecamatan yang lokasinya jauh dari BLK atau LPK/BLK komunitas).
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), shelter PKL, Pusat Wisata Kuliner

Prioritas 4: Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat Serta Sistem Perlindungan Sosial

1. Peningkatan Kapasitas SDM PSKS
2. Pelatihan PERJAKA (Perempuan Penanggung Jawab Keluarga) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan;



3. Pelatihan PESONA (Perempuan Penuh Semangat, Optimis, Nyata dan Amanah) bagi Kelompok Pekka;
4. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga (20 juta maksimal/kecamatan atau 1,5 juta perdesa), bukan untuk honor pengurus PKK (Mandatory Kecamatan).

Prioritas 5: Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah

1. Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana;
2. Pembentukan dan Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Tingkat Kecamatan).
3. Persiapan dan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) (Mandatory Kecamatan).

Prioritas 6: Infrastruktur Wilayah yang Baik dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Pengembangan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi (SKB) -> Bantuan Keuangan Desa Khusus 350 juta (APBD: APBDes (80%:20%) mendukung Desa ODF dan Stunting.
2. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) (1 kecamatan minimal 20 unit dan harus diinput di aplikasi hibah bansos) (rincian: 15 juta fisik, jamban 2,5 juta dan 2,5 juta upah, total 20 juta);
3. Pembangunan / Peningkatan (rekonstruksi) jalan dan drainase (minimal 500 juta) dan jembatan;
4. Rehabilitasi Jalan dan Drainase (pemeliharaan berkala) (min 300 juta);
5. Rehabilitasi Jembatan;
6. Rehabilitasi Drainase;
7. Normalisasi Sungai/ Saluran Pembuang;
8. PJU dan Sarana Lalulintas (ZOSS, marka jalan, rambu, pengaman jalan, dll).
9. Pembangunan sumur resapan (Lubang Biopori);
10. Pembangunan daerah konservasi (dengan syarat ketentuan berlaku) diperuntukkan sebagai kawasan mangrove, kawasan sumber daya air;
11. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
12. Penyediaan sarana dan Pemberdayaan pengelolaan persampahan dan Lingkungan Hidup serta Edukasi Pengelolaannya di Kecamatan;
13. Revitalisasi Alun-alun Kecamatan
14. Pembangunan Landmark kecamatan (ikon khas kecamatan yang tidak ada di tempat lain)
15. Penataan kawasan perkotaan, PSU Perumahan.

Prioritas 7 : Reformasi Birokrasi serta Inovasi Pelayanan

1. Kecamatan Penerima Insentif Desa Mandiri :
 - a) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana layanan Publik Rehab disertai DED atas penilaian dari DPUTR;



- b) Peningkatan kemampuan (kompetensi) aparatur kecamatan untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian desa mandiri
- 2. Pemutakhiran data pembangunan tingkat kecamatan (Pusdatin di Kecamatan) Rp. 10.000.000,- per kecamatan (Mandatory Kecamatan);
- 3. Pembiayaan MTQ Kecamatan (35-50 juta) (Mandatory Kecamatan).

Untuk pemerataan dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah, sebagian diberikan kepada kecamatan untuk menentukan prioritas wilayah masing-masing melalui musrenbang kecamatan. Prioritas tersebut diberikan pagu indikatif yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan beberapa indikator (Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Rumah Tangga Miskin). Sedangkan Program prioritas daerah yang dalam implementasi kegiatan sudah menjadi Kewenangan Desa akan dialokasikan dalam program keuangan desa khusus yang akan di atur dalam peraturan daerah tersendiri.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 merupakan wujud sinergi perencanaan lintas pemerintahan. Kesesuaian ini mencerminkan upaya harmonisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi, terutama dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis kawasan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah timur Jawa Barat, termasuk kawasan strategis Cirebon dan Rebana.

Tabel 4.12.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Prioritas Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Daerah	
PP1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan
PP2	Pembangunan Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama	PK1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK
PP3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PK2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau



Prioritas Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Daerah	
PP4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PK4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial
		PK5	Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah
PP5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Gerakan Membangun Desa	PK6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
PP6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PK7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan

Keterpaduan antara prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, dan indikator kinerja utama Kabupaten Cirebon tahun 2025. Penyusunan tabel ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prioritas yang ditetapkan memiliki arah capaian yang jelas dan terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator yang digunakan merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program prioritas dan menjadi dasar dalam evaluasi pencapaian pembangunan tahunan secara kuantitatif.

Tabel 4.13.
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Sasaran pembangunan Daerah dan Indikator sasaran daerah Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran pembangunan daerah kabupaten	Indikator sasaran
1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks pendidikan
2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan
			Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB)



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran pembangunan daerah kabupaten	Indikator sasaran
4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)
			Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
			Indeks Gini
5	Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum
6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap
			Indeks Desa Membangun (IDM)
7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemda
			Opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemda
			Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik
			Maturitas SPIP

Dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 maka prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang tersusun pada tabel berikut ini.



Tabel 4.14.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Daerah dan Program Tahun Anggaran 2025

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Dinas Kesehatan



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
			KESEHATAN	
3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan UKM
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi dan UKM
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi dan UKM
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan UKM
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
		Unggulan		
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi dan UKM
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Industri
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Industri
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan Industri
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Dinas Perdagangan dan Industri
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas PPKB P3A
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas PPKB P3A
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas PPKB P3A
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas PPKB P3A
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas PPKB P3A
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas PPKB P3A
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas PPKB P3A
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas PPKB P3A
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan
5	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satpol Pamong Praja
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol Pamong Praja



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Damkar dan Penyelamatan
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol Pamong Praja
6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas PUTR
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas PUTR
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas PUTR
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas PUTR
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas PUTR



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Kimrumtan
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Kimrumtan
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Kimrumtan
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Kimrumtan
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Dinas Kimrumtan
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Kimrumtan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas PMD
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas PMD
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Dukcapil
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Dukcapil
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Dukcapil
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Dukcapil
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Dukcapil
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Kominfo
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Disarpus
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Disarpus
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Setda
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Setda
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappelitbangda



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappelitbangda
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bappenda
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Bappelitbangda
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
		Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon	Sasaran Daerah	Program	Perangkat Daerah Pengampu
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan

Sumber : Bappelitbangda, data diolah 2024

Dalam rangka penyelerasan pembangunan di Tingkat Nasional dan Regional Provinsi Jawa Barat maka dilakukan persandingan yang menunjukkan dukungan Program Prioritas Daerah pada RKPD 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan RKP 2025 dan dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 4.15.
Dukungan Program Prioritas Daerah pada RKPD 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi RKPD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengelolaan Energi Terbarukan		
	Program Pengelolaan Hutan		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		
	Program Penyuluhan Pertanian	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber daya Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber daya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		
	Program Penyuluhan Pertanian		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
	(UMKM)		
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		
	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
	(UMKM)		Dan Ekonomi Kreatif
	1. Program Pengembangan Ekspor		
	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
	1. Program Pengembangan Ekspor		
	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	2. Program Pengembangan Sumber		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
	2. Program Pengembangan UMKM		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian
P2 Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Guru dan Tenaga Kependidikan		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
	Program Pengelolaan Pendidikan		Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		Program Pengelolaan Permuseuman Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengembangan Daya Saing Olahraga	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
	Program Kepegawaian Daerah	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program pengembangan kebudayaan	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	Program Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak
P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana		
P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Rehabilitasi Sosial		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
			Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Hutan		
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		1. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penaatan Bangunan dan Lingkungannya	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Program Penatagunaan Tanah
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Hutan		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Kawasan Permukiman	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Penerbangan



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Program Pengelolaan Persampahan
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Kawasan Permukiman	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Program Penatagunaan Tanah Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
			Hukum Adat
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penanggulangan Bencana	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Program Penatagunaan Tanah Program Perencanaan Lingkungan Hidup
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Pengelolaan Hutan		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penataan Organisasi	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Program Pendaftaran Penduduk		
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengendalian Penduduk	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Kepegawaian Daerah
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	Program Pembinaan Perpustakaan



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Program Penataan Organisasi	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa



PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Sumber : Bappelitbangda, data diolah 2024



Tabel 4.16.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL		Dukungan Anggaran	PRIORITAS PEMBANGUNAN Provinsi Jawa Barat		Dukungan Anggaran	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN Cirebon		Dukungan Anggaran
PN1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	18.503.122.500				PK5	Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	71.899.452.040
PN2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	77.882.828.662				PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	134.572.396.958
PN3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	399.536.820.037	PP 5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Gerakan Membangun Desa	416.756.700.847	PK6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	406.348.055.047
PN4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	2.799.359.501.396	PP 2	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama	379.856.222.118	PK1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	1.638.133.604.037
			PP 3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	1.102.840.770.959	PK2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau	1.102.840.770.959
						PK4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial	79.328.651.634



PN5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	24.198.915.648				PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	134.572.396.958
PN6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	755.713.137.350	PP 1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	137.309.523.558	PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	134.572.396.958
PN7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	516.590.117.955	PP 6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	2.524.291.965.950	PK7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	1.213.620.123.631
PN8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	54.958.610.758	PP 4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	85.687.870.874	PK6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	406.348.055.047
						PK4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial	79.328.651.634

Sumber : Rekap Prioritas e-Perencanaan RPD 2025-2026, Bappelitbangda, 2025



Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025 dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk penguatan konsistensi dan integrasi kebijakan antar level pemerintahan. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa program prioritas daerah mendukung agenda pembangunan provinsi, khususnya dalam pengembangan wilayah timur Jawa Barat, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta perluasan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan.

Tabel 4.17.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025

Prioritas Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Daerah	
PP1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	PK3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan
PP2	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	PK1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK
PP3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PK2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau
PP4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PK4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial
		PK5	Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah
PP5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Gerakan Membangun Desa	PK6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
PP6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	PK7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan



4.3. Inovasi yang Mendukung Penyelesaian Permasalahan dan Isu Strategis

Inovasi daerah merupakan sarana pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Kabupaten Cirebon tengah bergerak maju dengan semangat inovasi. MABES GEN-I (MARKAZ BESAR GENERASI INOVATIF) menjadi wadah bagi ide-ide kreatif dan solusi inovatif untuk mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan visi "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Inovasi Mabes Gen-I adalah salah satu inovasi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan perkembangan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya inovasi Mabes Gen-I, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat menjadi lebih maju, modern, dan sejahtera melalui berbagai program inovatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Empat pilar utama MABES GEN-I yang menawarkan solusi terpadu untuk berbagai sektor, serta mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Cirebon untuk membangun untuk masyarakat, yaitu:

1. Peningkatan Aktivitas Ekonomi untuk Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
2. Digitalisasi Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Berbasis Penempatan
3. Pengolahan Sampah, Ketahanan Pangan dan Potensi Ekonomi Masyarakat
4. Pelayanan Penduduk Miskin

Pelaku usaha mikro di Kabupaten Cirebon berjumlah 202.017, hal tersebut merupakan potensi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro diantaranya adalah lemahnya SDM, lemahnya legalisasi, peredaran belum maksimal, kemasan masih sederhana, kurangnya inovasi, kurangnya modal serta pemasaran merek masih seadanya.

Inovasi MABES GEN-I memfasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh konsultan/pendamping Business Development Service (BDS), dapat membantu untuk berdaya saing dan meningkatkan omset, yaitu dengan



konsultasi bisnis serta pemasaran baik offline di gerai UMKM maupun pemasaran online (market place). Inovasi yang dikembangkan berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah:

1. Fasilitasi perizinan melalui gerai konsultasi dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Akademisi, Forum UMKM, Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Relawan Ekonomi Desa, Kelompok Sadar Wisata, Konsultan BDS, Kantor Pajak, Para Pendamping Halal, Pendamping UMKM Juara serta unsur lainnya.
2. Gerai display produk dengan melibatkan tim kurasi dari para pendamping UMKM, Praktisi Akademisi, Perbankan, serta unsur lainnya.
3. Kemitraan yang akan dilakukan dengan kolaborasi dengan toko oleh-oleh, pengusaha besar, PHRI, Toko Modern, Koperasi, BumDes.
4. Display Produk (Bazar), mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dispora, Disbudpar, perbankan, kantor lelang, terminal serta event-event lainnya.

Inovasi MABES GEN-I membuat pelatihan bagi Caruban Milenial yang berupa pelatihan pemasaran usaha pada ekosistem digital. Keunggulan dari inovasi ini adalah (1) Pelatihan dilakukan ke arah pemasaran yang mandiri yaitu pesanan langsung terhubung dengan akun bisnis pelaku usaha, dengan demikian dapat mengurangi biaya promo (2) Para Pelaku Usaha Mikro yang sudah selesai mengikuti pelatihan diberikan fasilitas akses ke market place milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dikelola BDS yaitu “Galeri Caruban”. Pada tahun 2022, peserta pelatihan Caruban Milenial mencapai 600 pelaku usaha mikro, ditargetkan pada tahun 2024 pelatihan Caruban milenial bisa mencapai 1000 pelaku usaha mikro.

Inovasi MABES GEN-I memberikan pelatihan vokasi berbasis penempatan dengan meningkatkan keterlibatan Perusahaan di Kabupaten Cirebon. Keunggulan dari inovasi ini adalah adanya Jaminan Penempatan Kerja sesuai kompetensi bagi peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi pada Perusahaan yang telah bekerja sama (memiliki MoU) dengan UPTD Pelatihan Kerja Disnaker Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2022, Jumlah Peserta Pelatihan Vokasi dengan Sertifikasi Kompetensi dan Penempatan Kerja mencapai 400 orang dan target pada tahun 2024 adalah 592 orang.

Produksi sampah di Kabupaten Cirebon mencapai 1.200 ton per hari dan penanganannya masih terdapat kendala di lapangan. Jika dibiarkan terus menerus hal ini tentu akan berdampak buruk bagi lingkungan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu kendala tersebut disebabkan oleh perilaku masyarakat yang belum mengutamakan pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya (Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)). Hal ini karena sumber penghasil sampah terbesar saat ini berasal rumah tangga. Kurangnya edukasi di tingkat masyarakat khususnya pedesaan



mengenai cara membuang sampah yang baik dan bagaimana mengurangi sampah yang dibuang dengan cara mengolah sampah sehingga dapat dioptimalkan kembali merupakan salah satu penyebab penumpukan sampah di TPA atau TPST.

Inovasi MABES GEN-I menyadari kebutuhan teknologi pengolahan sampah organik yang berasal dari limbah sisa makanan pada skala rumah tangga sehingga dapat mengurangi volume timbunan sampah yang dibuang ke TPA atau TPST. Salah satu inovasi MABES GEN-I untuk permasalahan ini adalah Vertical Composter Garden (VCG) yang merupakan salah satu teknologi tepat guna yang berfungsi menampung limbah sisa makanan (organik) untuk diubah menjadi pupuk padat dan cair sekaligus dapat digunakan untuk menanam tanaman sayuran seperti cabe, kangkung, pakcoy, dan sebagainya. Pembuatan VCG sangat mudah dan murah sehingga dapat direplikasi oleh seluruh Masyarakat dengan perlengkapan yang ada di rumah. Aplikasi VCG pada skala rumah tangga juga sangat mudah dan Masyarakat akan mendapatkan keuntungan memiliki tanaman sayuran organik yang secara tidak langsung dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memperoleh pupuk organik padat dan cair yang dapat digunakan pada tanaman lain atau dijual sebagai tambahan penghasilan Masyarakat.

Salah satu Inovasi MABES GEN-I lainnya adalah Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah aplikasi kepanjangan dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Ruang lingkup pelayanan aplikasi SIPEPEK adalah Pelayanan Bantuan kesehatan (KIS APBD dan APBD), Pelayanan Bantuan subsidi Listrik, Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pelayanan Pendidikan, dan pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jumlah penduduk miskin yang terlayani layanan dinas sosial meningkat sejak 6 bulan diluncurkan mencapai 32.190 penduduk miskin. Penduduk miskin yang terlayani pada tahun 2023 sebanyak 20.296 orang, sedangkan pada tahun 2024 (Juni 2024) terlayani sebanyak 18.618 penduduk miskin. Dalam 1 (satu) hari sistem ini dapat melayani 300 penduduk miskin yang tersebar di 40 Kecamatan. Proses pengajuan bantuan penduduk miskin dalam sistem informasi ini bisa secara mandiri di aplikasi dengan ponsel atau dengan bantuan PUSKESOS.

4.4. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Cirebon tahun 2025 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, memperkuat konektivitas, dan



mengoptimalkan potensi kawasan secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan wilayah didasarkan pada karakteristik geografis, fungsi kawasan, serta integrasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah, termasuk dukungan terhadap pengembangan kawasan strategis seperti Rebana, wilayah pesisir, dan sentra-sentra pertanian produktif.

Tabel 4.18.
Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat

No	Nama Proyek Strategis Nasional	Lokasi / Wilayah Terdampak	Sektor / Fokus	Keterangan Penting
1	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Subang – Patimban – Cirebon	Infrastruktur & Logistik	Mendukung akses industri dan pelabuhan ekspor nasional
2	Pelabuhan Patimban (lanjutan & optimalisasi)	Subang	Transportasi Maritim	Hub logistik utama nasional bersama Tj. Priok & Perak
3	Pengembangan Bandara Internasional Kertajati	Majalengka – Cirebon Raya	Transportasi Udara & Pariwisata	Mendukung konektivitas wilayah Rebana
4	Pembangunan Transmisi Pipa Gas Cirebon–Semarang	Cirebon – Brebes – Semarang	Energi & Ketenagalistrikan	Dukungan energi untuk kawasan industri timur Jawa Barat
5	SPAM Regional Jatigede	Sumedang – Cirebon – Indramayu	Infrastruktur Air Minum	Penyediaan air baku regional untuk kawasan Rebana
6	Kawasan Rebana (Rebana Metropolitan Development)	Cirebon, Majalengka, Subang	Kawasan Ekonomi Terpadu	Kawasan prioritas nasional berdasarkan Perpres No. 87/2021
7	Kampus ITB Cirebon	Kabupaten Cirebon	Pendidikan Tinggi & Riset	Mendukung riset dan inovasi wilayah timur Jabar
8	Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional	Jawa Barat (termasuk Cirebon Raya)	Perumahan & Pemukiman	Dukungan rumah MBR dan urbanisasi terkendali

Sumber : RPJMN 2025-2029



4.4.1. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah kabupaten/kota maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan.

Strategi kebijakan pengembangan wilayah di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 terdiri dari Pembagian 6 (*enam*) Wilayah Pengembangan (WP), yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Setiap WP ditetapkan tema, arah dan fokus pengembangan serta sektor unggulan dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keterpaduan pembangunan), meliputi: WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur-Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, dan WP KK Cekungan Bandung. Kabupaten Cirebon termasuk di dalam WP Ciayumajakuning.

WP Ciayumajakuning berdasarkan Keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP), yang ditujukan untuk meningkatkan sinergi dan integrasi pengembangan wilayah antar WP untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, termasuk di dalam Kawasan Utara dan Kawasan Timur. Tema pengembangan Kawasan Timur adalah “Mendorong Pengembangan Wilayah Gerbang Timur Jawa Barat” dengan sektor unggulan : tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agrobisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Arah pengembangan Kawasan Timur Provinsi Jawa Barat khususnya di WP Ciayumajakuning adalah :

1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL;
2. Mengembangkan infrastruktur strategis pola ruang PKN dalam bentuk (Ring 1 : jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2 : industri berbasis lokal, dan Ring 3 : penyedia bahan baku);
3. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam;
4. Mendorong agrobisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran;
5. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak;
6. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir.



Sedangkan khusus untuk Kabupaten Cirebon fokus pengembangannya adalah bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral, industri kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis *folklore* (batik trusmi).

4.4.2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang efisien, berkelanjutan, berdaya saing menuju Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri, pariwisata, perdagangan dan jasa skala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi, pertanian, permukiman, fasilitas perkotaan dan infrastruktur yang integratif dan inklusif.

Kebijakan untuk mewujudkan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten yang efisien, berkelanjutan, berdaya saing antara lain, meliputi :

1. Pengembangan sistem pelayanan perkotaan dalam upaya mendukung pengembangan fungsi sebagai Pusat kegiatan Nasional (PKN Sumber) dan pusat pelayanan regional Cirebon Raya;
2. Pemanfaatan peran kecamatan di wilayah kabupaten sesuai fungsi yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat kegiatan Lokal;
3. Pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana dan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang integratif dan berkelanjutan;
4. Pengembangan struktur ruang antar wilayah untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Strategi untuk kebijakan Pemanfaatan peran kecamatan di wilayah kabupaten sesuai fungsi yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat kegiatan Lokal, meliputi:

1. Meningkatkan peran Pusat kegiatan Nasional sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitasi ekonomi skala lokal pada setiap Kawasan;
2. Mewujudkan kawasan perkotaan baru yang tepadu di wilayah Pusat Kegiatan Lokal dengan mengintegrasikan pusat kegiatan lokal dan Kawasan permukiman baru di Kawasan tersebut;
3. Meningkatkan peran pusat kegiatan lokal sebagai Kawasan perkotaan dan sebagai penghubung pergerakan dari pusat permukiman ke pusat kegiatan nasional terdekat



- melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya dan
4. Menata perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah Barat, Tengah dan Timur dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Strategi untuk kebijakan Pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana dan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang integratif dan berkelanjutan antara lain meliputi :

1. mengembangkan sistem jaringan jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah;
2. melaksanakan kerja sama regional antar daerah di Kawasan Cirebon raya/Ciayumajakuning untuk pengembangan sistem transportasi/angkutan umum massal regional berbasis rel;
3. pengembangan jalan arteri primer dan jalan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan lokal;
4. mengembangkan sistem dan prasarana pengelolaan sampah perkotaan;
5. meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana dan sistem pendistribusian sumber daya air pada Kawasan pertanian, Kawasan peruntukan industri dan Kawasan pariwisata.

Strategi untuk kebijakan Pengembangan struktur ruang antar wilayah untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan Kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, meliputi :

1. Menjaga keterkaitan dan keterpaduan dalam mengembangkan kawasan perbatasan dengan kabupaten/ kota tetangga;
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga; dan

Secara ringkas Isu, Strategi dan Kebijakan Pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 disajikan pada berikut ini:

Tabel 4.19.
Isu, Strategi dan Kebijakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044

Isu	Kebijakan	Strategi
Sentra Pertanian	a. Pengembangan kawasan pertanian untuk meningkatkan produktivitas Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;	1. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan regional 2. Mengembangkan jaringan irigasi dan pengembangan lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian; 3. Merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi



Isu	Kebijakan	Strategi
		teknis dan non teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah 4. Meningkatkan aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian terhadap sentra pemasaran pertanian sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian
Sentra Industri	1. Pengembangan kawasan peruntukan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan	1. Mendorong penyediaan Kawasan industri secara terpadu dan terintegrasi yang didukung logistik 2. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri 3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat 4. Pengembangan industri secara tematik berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia; 5. Menyediakan sistem transportasi regional yang mendukung Kawasan peruntukan industri yang handal dan aksesibilitas baik untuk menekan biaya logistik 6. Penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan peruntukan industri untuk meningkatkan minat investasi dan daya saing industri 7. Mengembangkan dan menata sentra industri;kecil dan menengah melalui pembangunan infrastruktur dan distribusi pemasaran yang memadai sesuai dengan rencana pola ruang yang dikembangkan; 8. Mengendalikan perkembangan kegiatan industry yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu Kawasan resapan air; 9. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
Sentra Pariwisata	1. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata untuk meningkatkan keterpaduan antar pusat aktivitas pariwisata	1. Merehabilitasi kawasan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; 2. Mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan 3. Mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan 4. Memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata dan 5. Meningkatkan keterkaitan kegiatan pariwisata. Lain di provinsi dalam kesatuan tujuan pariwisata

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044



4.5. Program Kolaborasi

Program kolaborasi pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode oleh organisasi perangkat daerah tertentu yang lintas sektor yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis tertentu yang dianggap penting untuk diselesaikan secara komprehensif dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

4.5.1. Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing UMKM

Kabupaten Cirebon kaya akan warisan budaya dan sejarah, sehingga menyimpan potensi luar biasa dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian kabupaten Cirebon. Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing UMKM Kabupaten Cirebon hadir sebagai katalisator strategis untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sehingga merupakan platform strategis untuk memperkuat UMKM lokal dan mengantarkan mereka menuju ketahanan, daya saing lokal, dan kesuksesan berkelanjutan.



Tabel. 4.20.
Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing UMKM

NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Wirausaha Baru	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
				Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
				Usaha Kecil	
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
				Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
				Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pelaku Usaha	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
	Mikro yang Terfasilitasi pengembangan an UMKM	dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	yang dikembangkan teknik produksi dan omsetnya.	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Proyek Investasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
ROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rasio Perizinan yang di terbitkan sesuai SOP	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
		Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Elektronik20 Pelaku Usaha Kelompok Sasaran Sub Kegiatan Masyarakat / Pelaku Usaha yang Mengadukan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Per Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DINAS KESEHATAN					
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase IRTP laik higiene Sanitasi Pangan yang dilakukan pembinaan (IKL)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memiliki sertifikat laik sehat/laik higiene Sanitasi	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
PROGRAM INFORMATIKA APLIKASI	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain DiLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
PROGRAM PARIWISATA PEMASARAN	Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Promosi Pariwisata yang dipasarkan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media, Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI					
ROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPIK Kab. Cirebon sampai dengan ditetapkan menjadi RAPERDA	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
DINAS PERKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkontruksi ditahun	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
			berjalan		
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
ROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase rata-rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJP D, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
				Bidang Perekonomian	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					
ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan olahraga	Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan olahraga yang diselenggarakan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
DINAS KETENAGAKERJAAN					
ROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi				
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
	- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH					
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah	Jumlah Kelompok Perikanan tangkap yang	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
		Kabupaten/Kota	terbina		
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat pelelangan ikan yang beroperasi	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2. Jumlah Produksi Pembenihan Ikan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif,



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
		Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah pembudidayaan ikan kecil yang diberdayakan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembenih dan pembudidayaan ikan yang terbina	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
				Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan dan Pemantauan dan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan 2. Jumlah Konsumsi Ikan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah hasil perikanan yang terbina	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi bahan baku industri pengolahan ikan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DANPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
DINAS PERHUBUNGAN					



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen andalalin yang di setujui dan dilaksanakan dengan baik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Terpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara



NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
DINAS PERTANIAN					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas tanam padi	Pembangunan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi

Sumber : Bappelitbangda, 2024



4.5.2. Program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2025 adalah upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya ini, program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat akan fokus pada beberapa strategi penting, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:



Tabel 4.21.
Tagging Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2025

No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					
1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase kecamatan / wilayah yang telah tercukupi pangannya secara mandiri	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<i>Coefisien Variasi</i> (CV) harga pangan beras medium di tingkat konsumen	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang didistribusikan dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
					Toko Tani Indonesia	Dikembangkan
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
					Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal
					Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan
					Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
					Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota
					Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis
					Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)
		Persentase Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun	Kegiatan penyusunan Pencapaian Target Konsumsi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
			sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang dikelola dalam rangka menjaga keseimbangan kebutuhan pangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
					Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan	Jumlah Dokumen Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
			Pemerintah Provinsi	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		
3)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Desa Rawan pangan yang di tangani	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penanganan kerawanan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota
					Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
					Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
4)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Kegiatan penyusunan Pencapaian Target Konsumsi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
			sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
5)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman di konsumsi	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
					Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
					Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
					Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
					Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
6)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia
			Pemberdayaan	Jumlah Kelompok	Pengembangan Kapasitas	Jumlah Nelayan Kecil



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
			Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	nelayan yang diberdayakan	Nelayan Kecil	yang Meningkatkan Kapasitasnya
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat pelelangan ikan yang dikelola	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
7)	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Prosentase kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam	Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
		perikanan	Kabupaten/Kota	dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten		Kabupaten/Kota
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
8)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha Pengolah perikanan yang dibina	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
						Usaha dan Risiko
			Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
9)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ikan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu)	Jumlah Dokumen Rekomendasi yang diterbitkan bagi pembudidaya ikan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi,



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
			Daerah Kabupaten/Kota		atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
			Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat pendampingan dalam pengelolaan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
				pembudidayaan ikan		
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
1)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
4	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH					
1)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Prosentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
5	DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI					
1)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar	Jenis Kepokmas dan barang penting yang harganya	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
		penting	Kabupaten/Kota	terkendali	(Satu)Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1)	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
7	DINAS KESEHATAN					
1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Angka kematian ibu (AKI)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (12 Pelayanan)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi
		- Angka kematian Bayi (AKB)				
8	DINAS SOSIAL					



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	; - Cakupan Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		- Cakupan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tervalidasi				
9	DINAS PERTANIAN					
1)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1) Persentase pengembangan benih padi	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan perbenihan padi unggul di lahan pertanian	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
		2) Persentase pengembangan benih mangga	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengembangan wilayah sentra mangga	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak



No	NAMA PD/ Nama Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
		3) Persentase pengembangan bibit domba	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu dan peredaran bibit ternak melalui IB	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas tanam padi	Pembangunan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara
					Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara
					Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasional Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi



4.5.3. Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Pariwisata hadir sebagai katalisator strategis untuk membangkitkan sektor pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Dalam upaya ini, program Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Pariwisata akan fokus pada beberapa strategi penting, sebagaimana tertuang pada tabel berikut:



Tabel 4.22.
Tagging Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Pariwisata Tahun 2025

No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
1)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata sebesar 34,48 %	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman (3 DTW)	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (30 Orang)
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
			Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pemegang TDUP yang sudah memegang SOP Kepariwisata	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi
2)	Program Pemasaran Pariwisata	Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Promosi Pariwisata yang dipasarkan	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (1 Dokumen) : Pembuatan sistem Informasi Pariwisata Daerah, penyiapan tenaga konten kreator
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (5 Even)
					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media, Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (3 media promosi, TV Nasional, youtube, Tiktok, Reels)



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
3)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase HKI Ekonomi Kreatif yang dikembangkan (100 %)	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia
			Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (16 Dokumen)	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
					Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual P	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (15 Produk)
4)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Bersertifikat	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (51 Orang)	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (50 Orang)
2	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
1)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi / direkonstruksi di tahun berjalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomianyang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1)	Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro yang berkembang nilai Omsetnya	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, Sdm, Serta Desain Dan Teknologi	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Ratio Perizinan yang di terbitkan sesuai SOP	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelaku Usaha Kelompok Sasaran Sub Kegiatan Masyarakat / Pelaku Usaha yang Mengadukan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Per Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
1)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukumadat	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
			Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
7	DINAS KETENAGAKERJAAN					
1)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n
		- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
8	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH					
1)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
			Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1)	Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
	Pembuatan Biopori					
11	DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI					
1)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPIK Kab. Cirebon sampai dengan ditetapkan menjadi RAPERDA	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan	Tercapainya Penerimaan	Perencanaan Pengelolaan Pajak	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
			pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Daerah	
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
13	DINAS PERHUBUNGAN					



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Meningkatnya Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen andalalin yang di setuju dan dilaksanakan dengan baik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Terpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
14	DINAS PERTANIAN					
1)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas tanam padi	Pembangunan prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun, terehabilitasi dan terpelihara	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara

Sumber : Bappelitbangda, 2024



4.5.4. Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan kumuh di daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kawasan kumuh seringkali diidentifikasi sebagai daerah yang memiliki kualitas lingkungan yang buruk dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Untuk meningkatkan kualitas kawasan kumuh, program ini akan melibatkan berbagai stakeholders yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, termasuk pengusaha, investor, akademisi, serta lembaga pemerintahan terkait. Pada Tahun 2025, Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh menitikberatkan pada satu lokasi yaitu Desa Sarabau, Kecamatan Plered yang akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh lintas pemangku kepentingan baik itu dari unsur Pemerintah, Desa, Masyarakat dan diupayakan Sektor Swasta terlibat.

Gambar 4.1.
Strategi Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh



Sumber : Bahan Paparan Kick Off Meeting RKPD Tahun 2025

Dalam upaya ini, program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh akan fokus pada beberapa strategi penting, antara lain:

1. Rehabilitasi fisik dan non-fisik

Dalam upaya meningkatkan kualitas kawasan kumuh, pemerintah daerah dapat melaksanakan program rehabilitasi fisik dan non-fisik. Rehabilitasi fisik meliputi



perbaikan sarana dan prasarana publik, seperti Kelayakan dan Keteraturan Bangunan, jalan, jembatan, drainase, penataan sempadan sungai dan normalisasi sungai yang melintasi Kawasan kumuh serta ruang terbuka public sebagai tempat interaksi masyarakat di Kawasan kumuh. Sedangkan rehabilitasi non-fisik meliputi peningkatan akses ke layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

2. Pengembangan ekonomi lokal

Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh juga akan menekankan pada pengembangan ekonomi lokal di kawasan kumuh. Dalam upaya ini, pemerintah daerah dapat membuka peluang usaha dan memberikan dukungan finansial serta fasilitas yang memadai. Sementara itu, sektor swasta dan masyarakat juga dapat berkontribusi dengan berinvestasi di sektor-sektor yang potensial dan menciptakan lapangan kerja.

3. Pengelolaan lingkungan yang baik

Pengelolaan lingkungan yang baik juga menjadi fokus dalam program ini. Dalam upaya ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan program pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi dan penghijauan kawasan kumuh serta pengurangan banjir di Kawasan kumuh melalui pemanfaatan teknologi biopori dan proyek percontohan pembangunan sumur resapan. Selain itu, penggunaan energi yang ramah lingkungan juga dapat diupayakan dengan memasang lampu LED dan mengembangkan program energi terbarukan. Teknologi-teknologi yang diterapkan pada kawasan kumuh diharapkan mengubah citra kawasan yang tadinya kumuh menjadi kawasan berwawasan lingkungan.

4. Pemberdayaan masyarakat

Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh akan menekankan pada pemberdayaan masyarakat di kawasan kumuh. Dalam upaya ini, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi masyarakat setempat serta pendampingan pengelolaan fasilitas-fasilitas fisik yang sudah terbangun di Kawasan kumuh sampai dengan masyarakat setempat dapat mengelola secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga dapat diberdayakan dengan memberikan kesempatan untuk mengelola usaha kecil dan mikro serta memperoleh akses ke layanan publik yang memadai.

Dalam jangka panjang, program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan kumuh. Dengan melibatkan berbagai stakeholders dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah.



Tabel 4.23.
Indikasi Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh

No	Daftar Program Kolaboratif	Lokasi	Sub Kegiatan	Dampak yang diharapkan	SKPD Penanggung Jawab
1	Penyediaan APAR pada Kawasan Pemukiman Kumuh	Desa Sarabau	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Upaya proteksi dan pencegahan bahaya kebakaran di Kawasan Kumuh	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	Pembangunan/Perluasan SPAM pada Kawasan Kumuh (Target SR Keluarga Miskin)	Desa Sarabau	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pemenuhan infrastruktur dasar air minum bagi masyarakat miskin di Kawasan Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Normalisasi Kali Condong (Hilir Pembuang Sungai Sikenanga)	Desa Sarabau	Normalisasi/Restorasi Sungai	Pengurangan Banjir di Kawasan Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Rehabilitasi Tanggul Sungai Sikenanga	Desa Sarabau	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pengurangan Banjir di Kawasan Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pembangunan Sumur Resapan/Lubang Biopori pada Lokasi Banjir	Desa Sarabau	Pelaksanaan rehabilitasi	Konservasi Air dan Pengurangan Banjir di Kawasan Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup
6	Pendampingan Pengelolaan TPS3R	Desa Sarabau	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup



No	Daftar Program Kolaboratif	Lokasi	Sub Kegiatan	Dampak yang diharapkan	SKPD Penanggung Jawab
7	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Desa Sarabau	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Kumuh	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pemugaran Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten (Penanganan Jalan dan Drainase)	Desa Sarabau	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar di Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh (Desa Sarabau)	Desa Sarabau	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar di Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Pendampingan Edukasi Kebencanaan pada Lokasi Banjir	Desa Sarabau	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Teredukasinya Masyarakat terhadap ancaman bencana di Kawasan Kumuh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber : Bappelitbangda, 2024



4.5.5. Program Kolaboratif Penanggulangan Kemiskinan

Program Kolaboratif penanggulangan Kemiskinan merupakan sebuah inisiatif strategis dalam mempercepat penanganan masalah kemiskinan di daerah dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, program ini melibatkan peran aktif dari masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi yang kuat. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam Program Kemiskinan Kolaboratif antara lain:

- a. Memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat memulai usaha mandiri dan meningkatkan pendapatan keluarga.
- b. Memberikan bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan yang berkualitas.
- c. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperluas akses terhadap layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.
- d. Meningkatkan akses terhadap fasilitas publik, seperti jalan raya, air bersih, dan sanitasi, agar masyarakat dapat hidup lebih sehat dan nyaman.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di daerah melalui berbagai forum partisipasi dan konsultasi publik.

Program kolaboratif penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mengatasi kemiskinan di daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kemiskinan, diharapkan program ini mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.



Gambar 4.2.
Program Kolaboratif Penanggulangan Kemiskinan

Denanggulangan Kemiskinan Kolaboratif Kabupaten Cirebon						
Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Warga Miskin untuk Memenuhi Kebutuhan dan Pelayanan Dasar;	Menciptakan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang Berkelanjutan melalui Pembangunan yang Inklusif dan Berkualitas	Mewujudkan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif	Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan usaha Mikro dan Kecil	Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
Pemberian Bantuan Sosial Regular seperti PKH, PIP, BOSDA DINSOS, DISDIK	Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar melalui Program Padat Karya dan Bantuan Individu/Kelompok seperti Padat Karya Tunai DPUTR, DLH, PEMERINTAH DESA	Warga Miskin Diberi Ruang untuk Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Serta Diajak menubah Mentalitasnya BAPPELTBANGDA, DPMD, DINSOS, CAMAT, PEMERINTAH DESA	Pembangunan yang Memberi Ruang, Memberi Akses serta Melibatkan atau Partisipasi Warga Miskin dalam Forum Perencanaan, Penciptaan Lapangan Kerja Produktif melalui Job Fair Padat Karya Tunai, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial BAPPELTBANGDA, DPUTR, DINSOS, CAMAT, PEMERINTAH DESA	Memberikan Bansos seperti PKH, BPNT, KUBE, Bantuan Sembako, BST, BLT dari Dana Desa, Kartu PEPEK Sejahtera DINSOS, PEMERINTAH DESA	Peningkatan Kapasitas UMKM Khususnya Warga Miskin melalui Peningkatan Akses Pasar, Pendampingan dan Penguatan Kewirausahaan atau Usaha Mikro, Kecil, Pelaku Industri Kecil seperti Pendampingan Usaha DINKOP UKM, DINSOS, DINAS DAGIN	Tata Kelola Data Kemiskinan melalui Penentuan Kebijakan Kriteria Penduduk Miskin, Mengembangkan Aplikasi Pendataan Penduduk Miskin, Pendataan Penduduk Miskin, Update Data Penduduk Miskin. BAPPELTBANGDA, DINSOS, DISKOMINFO, CAMAT, PEMERINTAH DESA
Bantuan Sosial Khusus seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT dari Dana Desa), Bantuan Beras DINSOS, PEMERINTAH DESA	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Program Vokasi dan Pelatihan DISNAKER, DISTAN	Pemenuhan Bantuan Pangan Pokok Terutama untuk Warga Miskin yang Kelaparan, Jompo Terlantar, Disabilitas Terlantar, Subsidi Pangan Murah DINSOS, DISDAGIN, DISHANGKANKAN		Meningkatkan Jumlah PBI-Jaminan Kesehatan dari APBD Prov dan APBD Kab, bagi Warga Miskin DINAS KESEHATAN	Mengoptimalkan BOSDA, Memberikan Bantuan Perlengkapan Siswa bagi Siswa Miskin. Bantuan PIP, Bantuan Beasiswa bagi Siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) DINAS PENDIDIKAN	Membuat dan Menetapkan Data Kemiskinan yang Telah Diverifikasi dan Diupdate sebagai Dasar atau Acuan Bersama bagi Program Penanggulangan Kemiskinan dari Berbagai Perangkat Daerah PEMERINTAH DESA, BAZNAS, PIHAK SWASTA
Subsidi Energi berupa Subsidi Gas Elpiji 3 kg		Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi dengan Memberi Subsidi Tarif, dan Pemasangan Jaringan/Saluran Air Bersih DINAS PUTR, DPKPP, PDAM			Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM melalui Peningkatan Akses terhadap Lembaga Keuangan Formal baik Bank maupun Non Bank seperti KUR DINKOP UKM, BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	
		Memenuhi Kebutuhan Tempat Tinggal Layak Huni dengan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Warga Miskin, Subsidi Rumah DINSOS, DPKPP				
		Kebutuhan Sandang dengan Memberikan Bantuan Paksiain Laik Pakai DINSOS, DPKPP			Bantuan Subsidi Pupuk bagi Petani yang Masuk Kategori Penduduk Miskin DINAS PERTANIAN	
		Pelayanan Pendidikan dengan memberikan Beasiswa, Akses Layanan Pendidikan yang Terjangkau, Bantuan perlengkapan siswa. DINAS PENDIDIKAN			Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Warga Miskin DINSOS, DPKPP, BAZNAS	
		Pelayanan Kesehatan dengan Mempermudah Akses Layanan Kesehatan pada Fasilitas Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Memadai pada Fasilitas Pertama DINAS KESEHATAN			Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) DINSOS, DPKPP, BAZNAS	

Sumber : Bappelibangda, 2024 Data yang diolah

Perangkat daerah yang melaksanakan program kolaborasi penanggulangan kemiskinan berjumlah 17 perangkat daerah dengan uraian program seperti tersaji pada tabel berikut.



Tabel 4.24.
Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Strategi : Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat miskin			
Dinas Pendidikan			
1	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar
		Pengelolaan Pendidikan SMP	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Dinas Sosial			
1	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosia Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
			Penyediaan Sandang
Strategi : Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat miskin			
Dinas PMD			



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayan Desa dan Lembaga Adat tk daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup			
1	Program Peningkatan Pendidikan pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
			Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup
Dinas Ketenagakerjaan			
1	Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Di daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar Kerja
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
			Job Fair/Bursa Kerja
		Perlindungan PMI (Pra dan Paska Penempatan) Di daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
1	Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	Program Pengelolaan Perikanan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	tangkap	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
		Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Program pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Perencanaan dan pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Dinas Pertanian			
1	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Strategi : Pemberdayaan Warga Miskin untuk Memenuhi kebutuhan dan Pelayanan Dasar			
Bappelitbangda			
1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
1	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat Kabupaten Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Dinas Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Dinas Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Dinas Sosial			
1	Program Rehabilitasi Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDs dan Napza di luar panti sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
			Pemberian Layanan Rujukan
Dinas Pertanian			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Strategi : Menciptakan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan Miskin yang Berkelanjutan melalui pembangunan yang inklusif dan Berkualitas			
Bappelitbangda			



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Dinas PMD			
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayan Desa dan Lembaga Adat tk daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Dinas PUTR			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai Pembangunan Tanggul Sungai Reahabilitasi Tanggul Sungai
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Strategi : Mewujudkan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif			
Dinas Sosial			



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Alat bantu
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Dinas Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Pertanian			
1	Program Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Strategi : Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil			
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Indutri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kgiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
Dinas Koperasi dan UMKM			



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
6	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Sekretariat Daerah			
1	Program Perekonomian dan pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Strategi : Mensinergikan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan			
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak			
	Program Pengendalian Penduduk	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
		Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan Ber KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Dinas Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Bappelitbangda			
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Dinas Komunikasi dan Informatika			
1	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Sumber : Bappelibangda, 2025



4.5.6. Program Kolaboratif Penurunan Stunting

Program Penurunan Stunting Kolaboratif merupakan sebuah inisiatif strategis dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempercepat menurunkan angka stunting dan mencegah terjadinya kasus stunting baru.

Dalam upaya mengatasi masalah stunting, program ini melibatkan peran aktif dari masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menciptakan sinergi dan kolaborasi yang kuat. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam Program Penurunan Stunting Kolaboratif antara lain:

- Melakukan intervensi spesifik sektor kesehatan
- Melakukan intervensi sensitif sektor non kesehatan

Dengan adanya peran aktif dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan akan mendukung upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting hingga menjadi 13 persen pada tahun 2025.

Gambar 4.3.
Penanggulangan Stunting Kolaboratif



Sumber : Bappelitbangda, 2025

Berikut disampaikan perangkat daerah pengampu dan pendukung serta program, kegiatan dan subkegiatan pendukung percepatan penurunan stunting tahun 2025 pada Tabel 4.25 :



Tabel 4.25.
Daftar Perangkat Daerah Pengampu Dan Pendukung Serta
Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendukung Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025

No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1	DINAS KESEHATAN					
1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Angka kematian Bayi (AKB)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2	DINAS PPKBP3A					
1)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
				(PKB/PLKB)		
		Peningkatan jumlah akseptor MKJP	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Jumlah pendidik/Motivator sebaya	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya cakupan laporan Program Bangga Kencana di desa/kelurahan tanpa PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2)	Program Pengendalian Penduduk	tersedianya informasi data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
		tersedianya informasi data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya
3)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota bina keluarga yang ber-KB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
		Persentase anggota bina keluarga yang ber-KB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3	DINAS PUTR					



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAL) di Daerah Kab/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat
2)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase cakupan akses air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kab/Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman
4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN					



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok / jenis pangan yang kecukupan gizinya memenuhi target	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Publikasi Program-Program Pembangunan dan Hasil-Hasil di Media TV
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Luar Ruang yang dicetak dan dipublikasikan



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik yang dibuat dan dipublikasikan
6	DINAS SOSIAL					
1)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
7	DINAS PENDIDIKAN					
1)	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peserta Didik Pra Sekolah (Pendidikan Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui jenjang Pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Program Pendaftaran	Cakupan Jumlah Keluarga yang	Pelayanan Pendaftaran	Jumlah Dokumen yang diterbitkan dari	Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan



No	Perangkat Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
	Penduduk	sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA	Penduduk	tiap-tiap Sub Kegiatan	Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukumadat	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatan ya Aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Sumber : Bappelibangda, 2024



4.5.7. Program Kolaboratif Pengendalian Inflasi Daerah

Di tengah gejolak ekonomi global dan nasional, inflasi menjadi isu krusial yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Inflasi yang tak terkendali dapat menggerus daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berinisiatif meluncurkan Program Kolaboratif Pengendalian Inflasi Daerah sebagai upaya bersama untuk memerangi inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi di wilayahnya. Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak inflasi dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kabupaten Cirebon bertumpu pada empat pilar utama, bagaikan tiang kokoh yang menopang ketahanan ekonomi:

1. Keterjangkauan Harga:

- Operasi Pasar Murah: operasi pasar murah hadir dengan harga bersahabat, meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
- Pemantauan Harga: mengawasi pergerakan harga dan menindak tegas pelanggaran.

2. Ketersediaan Pasokan:

- Jaringan Distribusi Efisien: Membangun jalan raya bagaikan membuka akses baru, memperlancar jalur distribusi dan meminimalisir hambatan.
- Cadangan Pangan Strategis: Gudang cadangan bagaikan benteng pertahanan, menyimpan persediaan pangan untuk mengantisipasi gejolak harga dan memastikan ketersediaan di masa sulit.

3. Kelancaran Distribusi:

- Infrastruktur Penunjang Distribusi: Membangun jembatan dan pelabuhan bagaikan membuka jalur baru, memperlancar akses distribusi dan meminimalisir biaya logistik.
- Sinergi Antar Instansi: Kerjasama bagaikan orkestra yang harmonis, menyatukan langkah dan peran berbagai pihak untuk memastikan kelancaran distribusi.

4. Komunikasi Efektif:

- Penyebaran Informasi Harga: Memberikan informasi harga secara akurat dan transparan bagaikan peta yang jelas, membantu masyarakat dalam mengambil keputusan pembelian.
- Kampanye Hemat Konsumsi: Mengedukasi masyarakat bagaikan menanamkan budi pekerti luhur, mendorong konsumsi bijak dan meminimalisir pemborosan.



Gambar 4.4.
Strategi Pengendalian Inflasi

1. Keterjangkauan harga	2. Ketersediaan Pasokan
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN: 1. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN: 1. Koordinasi & Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting di Tingkat Agen & Pasar Rakyat DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN: 1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemkab
3. Kelancaran Distribusi	4. Komunikasi Efektif
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN: 1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 35.610.090.700 DINAS PERTANIAN: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp.26.667.526.800 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rp.10.155.946.600 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Rp.39.932.000 4. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Rp.303.143.200	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN: 1. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 2. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rp.463.819.600

BAB V**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH****5.1. Rencana Program Prioritas Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025**

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dilakukan pengurangan atau penambahan program atau kegiatan baru terhadap APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025. Adapun perubahan yang dilakukan berupa: 1) penambahan atau pengurangan anggaran, dan 2) keluaran (*output*) kegiatan.

Beberapa hal penting atau urgensi yang menjadi alasan perubahan program atau kegiatan RKPD Tahun 2025, secara umum diuraikan sebagai berikut:

- 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 3 Penyesuaian program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2029 berdasarkan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.
- 4 Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 900.1.12/11/BKAD Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 5 Penyesuaian dengan target RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 khususnya untuk pelaksanaan Tahun 2025 sebagai tahun pertama. Pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta program unggulan daerah terutama yang mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon.
- 6 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 khususnya triwulan I. Terdapat hal-hal yang mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sebagaimana rencana dan kegiatan yang perlu ditambahkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
- 7 Dana Transfer Pemerintah Daerah melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang masuk di Tahun 2025 di Parsial I.



8 Selebihnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025 hanya melanjutkan atau melaksanakan kegiatan di APBD Tahun 2025.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Cirebon Tahun 2025 (**data detil terdapat pada Buku II Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025**), termasuk penjabaran kinerja kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Selanjutnya, secara rekapitulasi anggaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah
Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

NO	PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN					
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah / Berkurang	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK	2.532.652.937.890	40,55	1.620.749.367.537	34,87	-911.903.570.353	-36,01
2	Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau	975.237.147.725	15,62	1.085.334.487.913	23,35	110.097.340.188	11,29
3	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	190.931.091.574	3,06	137.135.159.158	2,95	-53.795.932.416	-28,18
4	Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta sistem perlindungan sosial	83.068.711.549	1,33	79.611.688.434	1,71	-3.457.023.115	-4,16
5	Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah	77.478.379.018	1,24	65.447.244.410	1,41	-12.031.134.608	-15,53
6	Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	930.748.910.548	14,90	432.496.569.047	9,30	-498.252.341.501	-53,53
7	Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan	1.454.926.359.336	23,30	1.226.318.826.200	26,38	-228.607.533.136	-15,71
JUMLAH PAGU PRIORITAS DAERAH		6.245.043.537.640	100,00	4.647.093.342.699	100,00	-1.597.950.194.941	-25,59
TOTAL BELANJA RKPD AKHIR		6.245.043.537.640		4.647.093.342.699			

Sumber: diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 2025
(aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Dari Tabel 5.1 diatas terdapat proyeksi penurunan anggaran hampir pada semua prioritas pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kembali rencana riil pendapatan transfer khususnya DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat



pasca di tetapkannya APBD 2025 dan APBD 2025 Parsial I yang telah dimasukan ke dalam komponen Pendapatan Transfer selamaTriwulan I Tahun 2025. Selain itu informasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 900.1.12/11/BKAD Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebabkan terjadi penurunan rencana belanja pada masing-masing prioritas pembangunannya.

5.2. Rencana Pendanaan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 membutuhkan dukungan pendanaan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melakukan analisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemuktahiran dari analisis yang telah dilakukan pada RKPD Tahun 2025. Kerangka anggaran daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2
Rencana Kerangka Anggaran Perubahan RKPD
Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.970.555.424.785,00	4.567.739.032.900,72	-1.402.816.391.884,28	-23,50
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.046.827.423.586,00	1.011.917.750.233,00	-34.909.673.353,00	-3,33
4.1.01.	PAJAK DAERAH	566.861.337.954,00	566.449.082.583,00	-412.255.371,00	-0,07
4.1.02.	RETRIBUSI DAERAH	455.364.410.642,00	417.421.928.532,00	-37.942.482.110,00	-8,33
4.1.03.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	15.853.360.903,00	15.853.360.903,00	0,00	0,00
4.1.04.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	8.748.314.087,00	12.193.378.215,00	3.445.064.128,00	39,38
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	4.910.288.961.199,00	3.524.373.596.487,72	-1.385.915.364.711,28	-28,22
4.2.01.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.039.415.935.106,00	3.227.087.990.811,72	-812.327.944.294,28	-20,11
4.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	870.873.026.093,00	297.285.605.676,00	-573.587.420.417,00	-65,86
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.439.040.000,00	31.447.686.180,00	18.008.646.180,00	134,00
4.3.01.	PENDAPATAN HIBAH	13.439.040.000,00	13.439.040.000,00	0,00	0,00
4.3.03.	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN		18.008.646.180,00	18.008.646.180,00	#DIV/0!



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PERUNDANG-UNDANGAN				
	JUMLAH PENDAPATAN	5.970.555.424.785,00	4.567.739.032.900,72	-1.402.816.391.884,28	-23,50
5.	BELANJA DAERAH	6.245.043.537.640,00	4.648.293.342.699,00	-1.596.750.194.941,00	-25,57
5.1.	BELANJA OPERASI	3.290.719.707.466,00	3.502.710.543.550,00	211.990.836.084,00	6,44
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	2.213.762.318.096,00	2.084.271.333.289,00	-129.490.984.807,00	-5,85
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	997.461.408.770,00	1.259.147.279.362,00	261.685.870.592,00	26,24
5.1.05.	BELANJA HIBAH	71.025.423.600,00	148.049.264.999,00	77.023.841.399,00	108,45
5.1.06.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.470.557.000,00	11.242.665.900,00	2.772.108.900,00	32,73
5.2.	BELANJA MODAL	2.151.506.841.474,00	424.950.424.385,00	-1.726.556.417.089,00	-80,25
5.2.01.	BELANJA MODAL TANAH	55.000.000.000,00	676.260.000,00	-54.323.740.000,00	-98,77
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	550.452.174.965,00	163.636.245.416,00	-386.815.929.549,00	-70,27
5.2.03.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	860.582.911.809,00	72.861.276.969,00	-787.721.634.840,00	-91,53
5.2.04.	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	684.421.234.700,00	186.065.059.700,00	-498.356.175.000,00	-72,81
5.2.05.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	333.806.000,00	994.868.300,00	661.062.300,00	198,04
5.2.06.	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	716.714.000,00	716.714.000,00	0,00	0,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-25.000.000.000,00	-71,43
5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-25.000.000.000,00	-71,43
5.4.	BELANJA TRANSFER	767.816.988.700,00	710.632.374.764,00	-57.184.613.936,00	-7,45
5.4.01.	BELANJA BAGI HASIL	60.886.756.200,00	30.051.670.264,00	-30.835.085.936,00	-50,64
5.4.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	706.930.232.500,00	680.580.704.500,00	-26.349.528.000,00	-3,73
	JUMLAH BELANJA	6.245.043.537.640,00	4.648.293.342.699,00	-1.596.750.194.941,00	-25,57
	SURPLUS/(DEFISIT)	-274.488.112.855,00	-80.554.309.798,28	193.933.803.056,72	-70,65
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	274.488.112.855,00	80.554.309.798,28	-193.933.803.056,72	-70,65
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	284.488.112.855,00	80.554.309.798,28	-203.933.803.056,72	-71,68
6.1.01.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	284.488.112.855,00	80.554.309.798,28	-203.933.803.056,72	-71,68
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	284.488.112.855,00	80.554.309.798,28	-203.933.803.056,72	-71,68
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00	
	PENYERTAAN MODAL DAERAH	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	274.488.112.855,00	80.554.309.798,28	-193.933.803.056,72	0,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 2025
(aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Dari Tabel 5.2 di atas, terdapat penurunan Proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp. -1.380.253.912.013,00 yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.-1.402.816.391.884,28 atau (-23,50%) yang secara detil disebabkan penurunan proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat



sebesar Rp. -812.327.944.294,28 atau (-20,11%) dimana berasal dari Rencana DAK dan DBH yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi. Hal yang serupa juga berasal dari penurunan proyeksi Pendapatan Transfer Daerah (Provinsi Jawa Barat) sebesar Rp. -573.587.420.417,00 atau (-65,86%) yang dominan bersumber dari ketidaksesuaian rencana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang diajukan dengan hasil penetapannya. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi di tahun mendatang di dalam penyusunan rencana pendapatan baik berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat supaya antara rencana dan realisasi tidak berbeda signifikan. Sementara itu, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah secara umum mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp. – 34.909.673.353,00 atau (-3,33%) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya pada proyeksi rencana kerangka anggaran P-RKPD 2025 dengan berbasis pada evaluasi APBD Triwulan I dan APBD Parsial I Tahun 2025, dapat disajikan perbandingannya pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
Rencana Kerangka Anggaran Perubahan RKPD 2025
Terhadap APBD 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		APBD 2025	P-RKPD 25	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.628.091.592.372,00	4.567.739.032.900,72	-60.352.559.471,28	-1,30
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.067.915.168.215,00	1.011.917.750.233,00	-55.997.417.982,00	-5,24
4.1.01.	PAJAK DAERAH	587.949.082.583,00	566.449.082.583,00	-21.500.000.000,00	-3,66
4.1.02.	RETRIBUSI DAERAH	455.372.410.642,00	417.421.928.532,00	-37.950.482.110,00	-8,33
4.1.03.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	15.853.360.903,00	15.853.360.903,00	0,00	0,00
4.1.04.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	8.740.314.087,00	12.193.378.215,00	3.453.064.128,00	39,51
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.546.737.384.157,00	3.524.373.596.487,72	-22.363.787.669,28	-0,63
4.2.01.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.286.947.759.000,00	3.227.087.990.811,72	-59.859.768.188,28	-1,82
4.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	259.789.625.157,00	297.285.605.676,00	37.495.980.519,00	14,43
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.439.040.000,00	31.447.686.180,00	18.008.646.180,00	134,00
4.3.01.	PENDAPATAN HIBAH	13.439.040.000,00	13.439.040.000,00	0,00	0,00
4.3.03.	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		18.008.646.180,00	18.008.646.180,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.628.091.592.372,00	4.567.739.032.900,72	-60.352.559.471,28	-1,30
5.	BELANJA DAERAH	4.728.637.373.172,00	4.648.293.342.699,00	-80.344.030.473,00	-1,70
5.1.	BELANJA OPERASI	3.372.410.263.004,00	3.502.710.543.550,00	130.300.280.546,00	3,86
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	2.080.541.333.289,00	2.084.271.333.289,00	3.730.000.000,00	0,18
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.171.273.028.116,00	1.259.147.279.362,00	87.874.251.246,00	7,50
5.1.05.	BELANJA HIBAH	111.205.967.599,00	148.049.264.999,00	36.843.297.400,00	33,13
5.1.06.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9.389.934.000,00	11.242.665.900,00	1.852.731.900,00	19,73
5.2.	BELANJA MODAL	399.332.697.004,00	424.950.424.385,00	25.617.727.381,00	6,42
5.2.01.	BELANJA MODAL TANAH	6.850.000.000,00	676.260.000,00	-6.173.740.000,00	-90,13
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	107.278.475.786,00	163.636.245.416,00	56.357.769.630,00	52,53



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		APBD 2025	P-RKPD 25	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.03.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	76.750.581.318,00	72.861.276.969,00	-3.889.304.349,00	-5,07
5.2.04.	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	206.843.389.600,00	186.065.059.700,00	-20.778.329.900,00	-10,05
5.2.05.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	893.536.300,00	994.868.300,00	101.332.000,00	11,34
5.2.06.	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	716.714.000,00	716.714.000,00	0,00	0,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	235.694.286.000,00	10.000.000.000,00	-225.694.286.000,00	-95,76
5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	235.694.286.000,00	10.000.000.000,00	-225.694.286.000,00	-95,76
5.4.	BELANJA TRANSFER	721.200.127.164,00	710.632.374.764,00	-10.567.752.400,00	-1,47
5.4.01.	BELANJA BAGI HASIL	37.051.670.264,00	30.051.670.264,00	-7.000.000.000,00	-18,89
5.4.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	684.148.456.900,00	680.580.704.500,00	-3.567.752.400,00	-0,52
	JUMLAH BELANJA	4.728.637.373.172,00	4.648.293.342.699,00	-80.344.030.473,00	-1,70
	SURPLUS/(DEFISIT)	-100.545.780.800,00	-80.554.309.798,28	19.991.471.001,72	-19,88
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	100.545.780.800,00	80.554.309.798,28	-19.991.471.001,72	-19,88
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.545.780.800,00	80.554.309.798,28	-25.991.471.001,72	-24,39
6.1.01.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	106.545.780.800,00	80.554.309.798,28	-25.991.471.001,72	-24,39
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.545.780.800,00	80.554.309.798,28	-25.991.471.001,72	-24,39
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	0	-6.000.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETO	100.545.780.800,00	80.554.309.798,28	-19.991.471.001,72	-19,88
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 2025
(aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Dari Tabel 5.2 di atas, terdapat penurunan Proyeksi Pendapatan Transfer sebesar Rp.-22.363.787.669,28 atau -0,63%. Secara detil berasal dari penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. -59.859.768.188,00 atau -1,82% dimana berasal dari DAU sebesar Rp. -13.002.524.000,00 (-0,72%) dan DAK Fisik sebesar Rp.- 48.466.180.000,00 atau -5,30% dan penambahan dana transfer antar daerah melalui kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar Rp.12.960.076.119,00 atau 4,99% dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.24.535.904.400,00 atau 100% walaupun terdapat pengurangan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi yang sebelumnya sudah ditetapkan. Hal ini didasarkan adanya Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 900.1.12/11/BKAD Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja



Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Sementara itu, sejalan dengan adanya pengurangan pendapatan transfer maka dilakukan efisiensi terhadap belanja yang bersumber dari Dana Transfer Pusat dan belanja-belanja pendukung seperti: kegiatan seremonial, kajian, perjalanan dinas, studi banding, seminar, percetakan, publikasi, honorarium dan belanja lainnya yang tidak memiliki output yang terukur. Efisiensi belanja-belanja pendukung tersebut berkisar antara 15-50%.

Hal penting lainnya adalah terkait komponen belanja wajib khususnya proporsi belanja pegawai. Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 khususnya kebijakan APBD dalam hal belanja daerah bahwa Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Saat ini, belanja pegawai di Kabupaten Cirebon masih di angka 36,53% dikarenakan adanya penambahan belanja PPPK yang baru dilantik namun di sisi lain tidak terdapat penambahan dana transfer dari pusat sejumlah penambahan PPPK tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah berupaya menganalisis ulang kembali strategi belanja pegawai agar di beberapa tahun kedepan telah menyesuaikan dengan arahan dari permendagri tersebut. Salah satu strateginya adalah penambahan proporsi belanja langsung diluar belanja pegawai melalui pembiayaan dari pusat dan provinsi serta penambahan potensi pendapatan asli daerah.

Selanjutnya rincian pagu pendanaan indikatif perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mewujudkan terwujudnya capaian tujuan dan sasaran daerah pada RP Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:



Tabel 5.4
Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025

No	SKPD	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.359.588.767.111	3.031.193.438.213	(1.328.395.328.898)
1-1.0-0.0-0.01.	DINAS PENDIDIKAN	2.515.904.356.584	1.602.443.906.719	(913.460.449.865)
1-2.0-0.0-0.01.	DINAS KESEHATAN	954.068.369.125	1.065.108.924.313	111.040.555.188
1-3.0-0.0-0.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	777.296.686.650	281.958.347.237	(495.338.339.413)
1-4.2-10.0-0.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	21.543.763.200	22.545.361.000	1.001.597.800
1-5.0-0.0-0.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.253.069.900	18.013.821.800	760.751.900
1-5.0-0.0-0.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	22.425.715.206	18.668.947.160	(3.756.768.046)
1-5.0-0.0-0.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.759.410.412	7.120.694.750	(7.638.715.662)
1-6.0-0.0-0.01.	DINAS SOSIAL	36.337.396.034	15.333.435.234	(21.003.960.800)
2,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	355.100.293.911	323.322.697.292	(31.777.596.619)
2-7.3-32.0-0.01.	DINAS KETENAGAKERJAAN	19.811.626.849	17.089.042.660	(2.722.584.189)
2-9.3-25.0-0.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	56.793.540.484	15.821.218.510	(40.972.321.974)
2-11.0-0.0-0.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56.589.563.598	48.440.080.740	(8.149.482.858)
2-12.0-0.0-0.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.298.231.756	14.496.772.096	(801.459.660)
2-13.0-0.0-0.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.932.980.512	17.475.031.362	542.050.850
2-14.2-8.0-0.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30.014.301.400	46.510.168.900	16.495.867.500
2-15.0-0.0-0.01.	DINAS PERHUBUNGAN	74.886.300.600	79.355.506.370	4.469.205.770
2-16.2-20.2-21.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.665.095.192	17.363.686.848	698.591.656
2-17.0-0.0-0.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.635.575.002	7.270.463.952	634.888.950
2-18.0-0.0-0.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.735.526.006	9.500.489.718	(235.036.288)
2-19.0-0.0-0.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	21.168.778.600	20.225.563.600	(943.215.000)
2-22.3-26.0-0.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	15.481.288.906	13.634.289.918	(1.846.998.988)



No	SKPD	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
2-24.2-23.0-0.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15.087.485.006	16.140.382.618	1.052.897.612
3,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	91.938.739.442	85.099.055.800	(6.839.683.642)
3-27.0-0.0-0.01.	DINAS PERTANIAN	67.749.229.306	59.841.443.152	(7.907.786.154)
3-30.3-31.0-0.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	24.189.510.136	25.257.612.648	1.068.102.512
4,	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	339.900.137.899	193.268.195.003	(146.631.942.896)
4-1.0-0.0-0.01.	SEKRETARIAT DAERAH	240.997.704.799	100.121.220.803	(140.876.483.996)
4-2.0-0.0-0.01.	SEKRETARIAT DPRD	98.902.433.100	93.146.974.200	(5.755.458.900)
5,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	906.256.499.701	818.808.776.601	(87.447.723.100)
5-1.5-5.0-0.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18.017.428.884	15.805.687.764	(2.211.741.120)
5-2.0-0.0-0.01.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	820.476.138.176	738.348.157.772	(82.127.980.404)
5-2.0-0.0-0.02.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37.219.633.101	36.263.355.925	(956.277.176)
5-3.5-4.0-0.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30.543.299.540	28.391.575.140	(2.151.724.400)
6,	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	36.223.566.400	42.704.452.800	6.480.886.400
6-1.0-0.0-0.01.	INSPEKTORAT	36.223.566.400	42.704.452.800	6.480.886.400
7,	UNSUR KEWILAYAHAN	135.229.936.376	133.966.401.590	(1.263.534.786)
7-1.0-0.0-0.01.	KECAMATAN WALED	2.946.539.700	2.869.976.800	(76.562.900)
7-1.0-0.0-0.02.	KECAMATAN CILEDUG	3.150.465.810	3.117.932.420	(32.533.390)
7-1.0-0.0-0.03.	KECAMATAN LOSARI	2.671.422.400	2.694.812.100	23.389.700
7-1.0-0.0-0.04.	KECAMATAN PABEDILAN	3.185.592.100	2.976.325.400	(209.266.700)
7-1.0-0.0-0.05.	KECAMATAN BABAKAN	2.881.533.700	2.705.512.200	(176.021.500)
7-1.0-0.0-0.06.	KECAMATAN GEBANG	2.884.421.560	3.069.021.460	184.599.900
7-1.0-0.0-0.07.	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	2.586.760.900	2.405.422.600	(181.338.300)
7-1.0-0.0-0.08.	KECAMATAN LEMAHABANG	2.904.415.400	2.722.175.800	(182.239.600)
7-1.0-0.0-0.09.	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	2.768.122.100	2.754.980.500	(13.141.600)
7-1.0-0.0-0.10.	KECAMATAN SEDONG	2.805.462.400	2.882.939.800	77.477.400
7-1.0-0.0-0.11.	KECAMATAN ASTANAJAPURA	3.067.865.400	2.801.521.700	(266.343.700)
7-1.0-0.0-0.12.	KECAMATAN PANGENAN	2.540.502.500	2.401.084.000	(139.418.500)
7-1.0-0.0-0.13.	KECAMATAN MUNDU	3.152.659.700	2.738.023.100	(414.636.600)
7-1.0-0.0-0.14.	KECAMATAN BEBER	2.892.670.600	2.884.536.700	(8.133.900)
7-1.0-0.0-0.15.	KECAMATAN TALUN	2.631.986.800	2.654.309.000	22.322.200
7-1.0-0.0-0.16.	KECAMATAN SUMBER	27.142.394.870	26.929.347.470	(213.047.400)
7-1.0-0.0-0.17.	KECAMATAN DUKUPUNTANG	2.416.099.320	2.665.401.120	249.301.800



No	SKPD	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025		BERTAMBAH / BERKURANG
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
7-1.0-0.0-0.18.	KECAMATAN PALIMANAN	2.575.726.700	2.670.491.300	94.764.600
7-1.0-0.0-0.19.	KECAMATAN PLUMBON	2.663.930.520	2.740.287.720	76.357.200
7-1.0-0.0-0.20.	KECAMATAN DEPOK	2.575.970.100	2.645.620.200	69.650.100
7-1.0-0.0-0.21.	KECAMATAN WERU	2.527.016.700	2.663.586.100	136.569.400
7-1.0-0.0-0.22.	KECAMATAN KEDAWUNG	2.313.275.500	2.341.896.700	28.621.200
7-1.0-0.0-0.23.	KECAMATAN GUNUNGJATI	2.808.613.700	2.808.434.400	(179.300)
7-1.0-0.0-0.24.	KECAMATAN KAPETAKAN	2.313.211.600	2.337.479.600	24.268.000
7-1.0-0.0-0.25.	KECAMATAN KLANGENAN	2.684.721.300	2.507.425.000	(177.296.300)
7-1.0-0.0-0.26.	KECAMATAN ARJAWINANGUN	3.107.406.200	3.183.623.600	76.217.400
7-1.0-0.0-0.27.	KECAMATAN PANGURAGAN	2.309.562.100	2.302.750.500	(6.811.600)
7-1.0-0.0-0.28.	KECAMATAN CIWARINGIN	2.757.510.700	2.683.465.000	(74.045.700)
7-1.0-0.0-0.29.	KECAMATAN SUSUKAN	2.823.831.700	2.902.118.700	78.287.000
7-1.0-0.0-0.30.	KECAMATAN GEGESIK	3.315.761.600	3.432.904.600	117.143.000
7-1.0-0.0-0.31.	KECAMATAN KALIWEDI	2.693.705.400	2.724.465.800	30.760.400
7-1.0-0.0-0.32.	KECAMATAN KARANGWARENG	2.494.249.800	2.450.359.800	(43.890.000)
7-1.0-0.0-0.33.	KECAMATAN TENGAH TANI	2.894.603.000	2.834.567.400	(60.035.600)
7-1.0-0.0-0.34.	KECAMATAN GEMPOL	2.975.289.300	2.730.366.500	(244.922.800)
7-1.0-0.0-0.35.	KECAMATAN PASALEMAN	2.935.230.200	2.972.912.400	37.682.200
7-1.0-0.0-0.36.	KECAMATAN PLERED	2.758.625.296	2.936.888.400	178.263.104
7-1.0-0.0-0.37.	KECAMATAN PABUARAN	2.450.006.300	2.282.743.200	(167.263.100)
7-1.0-0.0-0.38.	KECAMATAN GREGED	2.809.860.700	2.728.925.200	(80.935.500)
7-1.0-0.0-0.39.	KECAMATAN JAMBLANG	2.616.616.100	2.659.392.500	42.776.400
7-1.0-0.0-0.40.	KECAMATAN SURANENGGA	3.196.296.600	3.152.374.800	(43.921.800)
8-1.0-0.0-0.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.805.596.800	19.930.325.400	(875.271.400)
J U M L A H		6.245.043.537.640	4.648.293.342.699	(1.596.750.194.941)

Sumber: diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 2025
(aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas, terdapat penurunan pagu indikatif Perangkat Daerah di Perubahan RKPD Tahun 2024 sebesar Rp.1.596.750.194.941,00. Hal ini disebabkan pada saat penetapan RKPD Murni Tahun 2025 telah mengakomodir rencana potensi DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang cukup besar. Namun, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 penetapan anggaran yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai yang diharapkan. Kondisi demikian akan menjadi bahan evaluasi perencanaan di tahun 2026 terkait rencana potensi pendapatan dan belanja yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang harus disesuaikan dengan realisasi di tahun-tahun sebelumnya. Informasi lainnya terkait penurunan di seluruh perangkat daerah

dikarenakan adanya efisiensi dan relokasi pagu di tahun 2025 sesuai dengan penjelasan informasi sebelumnya.

5.3. Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Rencana program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon 2025 merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan dinamika terakhir lingkungan perencanaan. Perencanaan pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah setelah terlebih dahulu dipenuhi pendanaan prioritas pembangunan utama berupa kegiatan dan program mandatori yang dalam hal ini guna pemulihan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Cirebon.

Lebih lanjut, agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus memberikan advice program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan outcome yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran terutama dalam pencapaian strategis berupa sasaran pokok daerah yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang telah dijabarkan dalam sasaran strategis Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (outcome), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta Perangkat Daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas pembangunan menitikberatkan pada urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 5.5, terdapat total penambahan 8 sub kegiatan dari 1128 menjadi 1.036 sub kegiatan di Perubahan RKPD Tahun 2025. Sedangkan jumlah Kegiatan dan jumlah Program tidak mengalami Perubahan dimana terdapat 306 Kegiatan dan 141 Program. Adanya Penambahan Sub Kegiatan ini untuk mengakomodir Dana DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang masuk di parsial I Tahun 2025 yang berasal dari Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Pertanian.



Tabel 5.5

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH SUB KEGIATAN		JUMLAH PAGU		Bertambah / Berkurang		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(Rp)	(%)	
1,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	31	31	75	75	377	380	4.359.144.308.011	3.030.825.404.313	(1.328.318.903.698)	(30,47)	
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	15	15	150	151	2.515.904.356.584	1.602.443.906.719	(913.460.449.865)	(36,31)	DISDIK
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	24	24	109	111	954.068.369.125	1.065.108.924.313	111.040.555.188	11,64	DINKES
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	11	24	24	73	73	777.296.686.650	281.958.347.237	(495.338.339.413)	(63,73)	DINAS PUTR
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6	6	17	17	46	46	21.099.304.100	22.177.327.100	1.078.023.000	5,11	DPKPP
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	19	19	93	93	54.438.195.518	43.803.463.710	(10.634.731.808)	(19,54)	SATPOL PP; DISDAMKAR; BPBD
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	16	16	55	55	36.337.396.034	15.333.435.234	(21.003.960.800)	(57,80)	DINSOS
2,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66	66	138	138	458	462	304.287.294.711	315.366.684.392	11.079.389.681	3,64	
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	19	19	47	47	19.672.887.849	17.020.015.460	(2.652.872.389)	(13,48)	DISNAKER
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	6	14	14	25	25	3.132.411.300	2.880.799.200	(251.612.100)	(8,03)	DPPKBP3A
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	16	16	64	64	12.322.704.784	12.652.980.910	330.276.126	2,68	DKPP
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	3	5	5	444.459.100	368.033.900	(76.425.200)	(17,20)	DPKPP
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	10	20	20	55	55	56.589.563.598	48.440.080.740	(8.149.482.858)	(14,40)	DLH
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	17	17	42	42	15.298.231.756	14.496.772.096	(801.459.660)	(5,24)	DISDUKCAPIL
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	12	12	70	70	16.932.980.512	17.475.031.362	542.050.850	3,20	DPMD
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	16	16	70	73	26.881.890.100	43.629.369.700	16.747.479.600	62,30	DPPKBP3A
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	23	23	112	112	74.886.300.600	79.355.506.370	4.469.205.770	5,97	DISHUB
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	10	10	45	45	16.194.621.392	16.906.862.548	712.241.156	4,40	DISKOMINFO



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH SUB KEGIATAN		JUMLAH PAGU		Bertambah / Berkurang		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(Rp)	(%)	
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	16	16	61	62	6.635.575.002	7.270.463.952	634.888.950	9,57	DINKOP UKM
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	14	14	44	44	9.735.526.006	9.500.489.718	(235.036.288)	(2,41)	DPMPSTP
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	15	15	49	49	21.168.778.600	20.225.563.600	(943.215.000)	(4,46)	DISPORA
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	5	5	350.747.900	360.188.800	9.440.900	2,69	DISKOMINFO
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	2	2	5	5	119.725.900	96.635.500	(23.090.400)	(19,29)	DISKOMINFO
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	5	14	14	43	43	8.833.405.306	8.547.507.918	(285.897.388)	(3,24)	DISBUDPAR
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	3	3	10	10	700.498.900	1.315.157.600	614.658.700	87,75	DISARPUS
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	14	14	35	35	14.386.986.106	14.825.225.018	438.238.912	3,05	DISARPUS
3,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23	23	48	48	118	119	143.196.197.742	93.423.102.600	(49.773.095.142)	(34,76)	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	9	9	18	18	44.470.835.700	3.168.237.600	(41.302.598.100)	(92,88)	DKPP
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	4	8	8	17	17	6.647.883.600	5.086.782.000	(1.561.101.600)	(23,48)	DISBUDPAR
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	5	16	16	50	51	67.749.229.306	59.841.443.152	(7.907.786.154)	(11,67)	DISTAN
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	7	18	18	45	45	23.036.907.936	23.803.796.448	766.888.512	3,33	DISPERDAGIN
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	9	9	1.152.602.200	1.453.816.200	301.214.000	26,13	DISPERDAGIN
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	1	1	1	2	2	138.739.000	69.027.200	(69.711.800)	(50,25)	DISNAKER
4,	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	4	28	28	100	100	339.900.137.899	193.268.195.003	(146.631.942.896)	(43,14)	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	19	19	71	71	240.997.704.799	100.121.220.803	(140.876.483.996)	(58,46)	SETDA
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	2	2	16	16	51	51	98.902.433.100	93.146.974.200	(5.755.458.900)	(5,82)	SETWAN
5,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9	9	29	29	178	178	906.256.499.701	818.808.776.601	(87.447.723.100)	(9,65)	
5.01.	PERENCANAAN	3	3	13	13	53	53	16.579.084.184	14.716.850.364	(1.862.233.820)	(11,23)	BAPPELITBANGDA
5.02.	KEUANGAN	4	4	14	14	101	101	857.695.771.277	774.611.513.697	(83.084.257.580)	(9,69)	BKAD; BAPENDA
5.03.	KEPEGAWAIAN	2	2	12	12	65	65	23.612.901.800	22.330.749.800	(1.282.152.000)	(5,43)	BKPSDM
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2	2	3	3	6.930.397.740	6.060.825.340	(869.572.400)	(12,55)	BKPSDM
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	3	3	10	10	1.438.344.700	1.088.837.400	(349.507.300)	(24,30)	BAPPELITBANGDA



NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH SUB KEGIATAN		JUMLAH PAGU		Bertambah / Berkurang		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	(Rp)	(%)	
6,	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	3	3	12	12	45	45	36.223.566.400	42.704.452.800	6.480.886.400	17,89	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	12	12	45	45	36.223.566.400	42.704.452.800	6.480.886.400	17,89	INSPEKTORAT
7,	UNSUR KEWILAYAHAN	6	6	19	19	73	73	135.229.936.376	133.966.401.590	(1.263.534.786)	(0,93)	
7.01.	KECAMATAN	6	6	19	19	73	73	135.229.936.376	133.966.401.590	(1.263.534.786)	(0,93)	KEC. WALED; KEC. CILEDUG; KEC. LOSARI; KEC. PABEDILAN; KEC. BABAKAN; KEC. GEBANG; KEC. KARANGSEMBUNG; KEC. LEMAHABANG; KEC. SUSUKANLEBAK; KEC. SEDONG; KEC. ASTANAJAPURA; KEC. PANGENAN; KEC. MUNDU; KEC. BEBER; KEC. TALUN; KEC. SUMBER; KEC. DUKUPUNTANG; KEC. PALIMANAN; KEC. PLUMBON; KEC. DEPOK; KEC. WERU; KEC. KEDAWUNG; KEC. GNJATI; KEC. KAPETAKAN; KEC. KLANGENAN; KEC. AWN; KEC. PANGURAGAN; KEC. CIWARINGIN; KEC. SUSUKAN; KEC. GEGESIK; KEC. KALIWEDI; KEC. KRGWARENG; KEC. TTANI; KEC. GEMPOL; KEC. PSLMN; KEC. PLERED; KEC. PABUARAN; KEC. GREGED; KEC. JAMBLANG; KEC. SURANENGKALA
8,	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6	6	13	13	82	82	20.805.596.800	19.930.325.400	(875.271.400)	(4,21)	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	13	13	82	82	20.805.596.800	19.930.325.400	(875.271.400)	(4,21)	BADAN KESBANGPOL
J U M L A H		141	141	306	306	1128	1136	6.245.043.537.640	4.648.293.342.699	(1.596.750.194.941)	(25,57)	

Sumber: diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)



Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk tahun 2025.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan pemutakhiran penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah kedalam suatu klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Walaupun di tahun 2024, Kemendagri kembali mengeluarkan update terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan terbitnya Kepemendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas serta berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, maka rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon beserta pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2025 dirumuskan sebagaimana terlampir pada **Buku II Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025**.

5.4. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat pada dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. SPM didasarkan pada pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun mengenai ketentuan



jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara detil informasi rencana pendanaan pelaksanaan SPM pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut:



Tabel 5.6
Alokasi Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perubahan RKPD Tahun 2025

No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
1,	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	679.764.477.700,00	784.542.447.300,00	104.777.969.600,00	15,41
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	475.334.548.700,00	487.595.731.500,00	12.261.182.800,00	2,58
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.209.804.000,00	10.279.572.000,00	69.768.000,00	0,68
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	193.024.000,00	193.024.000,00	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	160.000.000,00	368.876.200,00	208.876.200,00	130,55
		Pengadaan Mebel Sekolah	15.000.000.000,00	14.940.780.000,00	(59.220.000,00)	(0,39)
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	30.000.000.000,00	33.108.186.900,00	3.108.186.900,00	10,36
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	367.706.558.200,00	371.700.220.800,00	3.993.662.600,00	1,09
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188.952.000,00	173.434.700,00	(15.517.300,00)	(8,21)
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80.084.000,00	72.106.400,00	(7.977.600,00)	(9,96)
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.648.550.000,00	2.258.466.000,00	(390.084.000,00)	(14,73)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	607.599.600,00	561.087.600,00	(46.512.000,00)	(7,66)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	48.539.976.900,00	53.939.976.900,00	5.400.000.000,00	11,12
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	197.206.063.100,00	199.107.887.500,00	1.901.824.400,00	0,96
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.038.517.000,00	3.038.517.000,00	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.732.300.000,00	6.732.300.000,00	0,00	0,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	586.666.000,00	586.666.000,00	100,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	353.784.000,00	389.344.000,00	35.560.000,00	10,05
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	184.749.083.600,00	186.019.792.000,00	1.270.708.400,00	0,69



No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	177.713.000,00	177.713.000,00	0,00	0,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	254.688.000,00	263.578.000,00	8.890.000,00	3,49
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.799.977.500,00	1.799.977.500,00	0,00	0,00
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.340.034.300,00	78.986.503.900,00	74.646.469.600,00	1.719,95
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	336.000.000,00	331.875.000,00	(4.125.000,00)	(1,23)
		Pengadaan Mebel PAUD	137.732.000,00	137.732.000,00	0,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	7.645.326.000,00	7.645.326.000,00	100,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	249.199.600,00	1.446.399.600,00	1.197.200.000,00	480,42
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	161.451.900,00	125.968.000,00	(35.483.900,00)	(21,98)
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	247.910.400,00	67.029.271.200,00	66.781.360.800,00	26.937,70
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	121.100.000,00	96.900.000,00	(24.200.000,00)	(19,98)
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	209.500.000,00	209.500.000,00	0,00	0,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.228.500.000,00	1.228.500.000,00	0,00	0,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.648.640.400,00	735.032.100,00	(913.608.300,00)	(55,42)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.883.831.600,00	18.852.324.400,00	15.968.492.800,00	553,72
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.992.000,00	101.772.000,00	(48.220.000,00)	(32,15)
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	16.051.980.000,00	16.051.980.000,00	100,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.733.839.600,00	2.698.572.400,00	(35.267.200,00)	(1,29)
Sub			679.764.477.700,00	784.542.447.300,00	104.777.969.600,00	15,41
Total SPM Bidang Pendidikan						
Total belanja SKPD			1.574.305.115.019,00	1.602.443.906.719,00	28.138.791.700,00	1,79
Rasio belanja SPM			43,18	48,96	-	-
2,	Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.804.108.650,00	165.145.429.226,00	16.341.320.576,00	10,98



No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
		Peningkatan Pelayanan BLUD	148.804.108.650,00	165.145.429.226,00	16.341.320.576,00	10,98
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	148.804.108.650,00	165.145.429.226,00	16.341.320.576,00	10,98
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.217.953.300,00	28.435.787.700,00	19.217.834.400,00	208,48
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.217.953.300,00	28.435.787.700,00	19.217.834.400,00	208,48
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	586.358.400,00	11.796.031.900,00	11.209.673.500,00	1.911,74
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	206.970.000,00	103.796.400,00	(103.173.600,00)	(49,85)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	209.968.800,00	209.968.800,00	0,00	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	218.999.400,00	218.999.400,00	0,00	0,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	314.647.200,00	5.970.997.500,00	5.656.350.300,00	1.797,68
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	969.111.600,00	834.354.300,00	(134.757.300,00)	(13,91)
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	593.050.200,00	631.149.900,00	38.099.700,00	6,42
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	247.727.100,00	171.360.000,00	(76.367.100,00)	(30,83)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	213.710.100,00	181.202.400,00	(32.507.700,00)	(15,21)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	293.938.500,00	1.241.406.000,00	947.467.500,00	322,34
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	249.000.000,00	1.873.298.500,00	1.624.298.500,00	652,33
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.473.000.000,00	1.383.900.600,00	(89.099.400,00)	(6,05)
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.641.472.000,00	3.819.322.000,00	177.850.000,00	4,88
Sub			158.022.061.950,00	193.581.216.926,00	35.559.154.976,00	22,50
Total SPM Bidang Kesehatan						
Total belanja SKPD			925.381.485.731,00	1.065.108.924.313,00	139.727.438.582,00	15,10
Rasio belanja SPM			17,08	18,17	-	-



No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
3,	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47.684.222.997,00	47.318.559.297,00	(365.663.700,00)	(0,77)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	47.684.222.997,00	47.318.559.297,00	(365.663.700,00)	(0,77)
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.864.008.000,00	1.606.451.100,00	(257.556.900,00)	(13,82)
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.354.256.000,00	2.374.896.000,00	20.640.000,00	0,88
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	43.465.958.997,00	43.337.212.197,00	(128.746.800,00)	(0,30)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.269.504.000,00	4.782.554.200,00	(1.486.949.800,00)	(23,72)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.269.504.000,00	4.782.554.200,00	(1.486.949.800,00)	(23,72)
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	6.000.000.000,00	4.498.090.200,00	(1.501.909.800,00)	(25,03)
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	269.504.000,00	284.464.000,00	14.960.000,00	5,55
Sub Total SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			53.953.726.997,00	52.101.113.497,00	(1.852.613.500,00)	(3,43)
Total belanja SKPD			310.571.743.237,00	281.958.347.237,00	(28.613.396.000,00)	(9,21)
Rasio belanja SPM			17,37	18,48	-	-
4,	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	123.106.000,00	117.622.000,00	(5.484.000,00)	(4,45)
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42.968.000,00	51.130.200,00	8.162.200,00	19,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	42.968.000,00	51.130.200,00	8.162.200,00	19,00
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	80.138.000,00	66.491.800,00	(13.646.200,00)	(17,03)



No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	80.138.000,00	66.491.800,00	(13.646.200,00)	(17,03)
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	7.517.617.500,00	7.477.878.800,00	(39.738.700,00)	(0,53)
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	7.517.617.500,00	7.477.878.800,00	(39.738.700,00)	(0,53)
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.517.617.500,00	7.477.878.800,00	(39.738.700,00)	(0,53)
Sub Total SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			7.640.723.500,00	7.595.500.800,00	(45.222.700,00)	(0,59)
Total belanja SKPD			22.432.922.600,00	22.545.361.000,00	112.438.400,00	0,50
Rasio belanja SPM			34,06	33,69	-	-
5,	Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.000.000.000,00	99.100.000,00	(4.900.900.000,00)	(98,02)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	99.100.000,00	(4.900.900.000,00)	(98,02)
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	99.100.000,00	(4.900.900.000,00)	(98,02)
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.299.182.400,00	14.982.859.200,00	3.683.676.800,00	32,60
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.403.758.400,00	12.635.445.200,00	2.231.686.800,00	21,45
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6.820.118.400,00	8.216.455.200,00	1.396.336.800,00	20,47
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3.581.640.000,00	4.416.990.000,00	835.350.000,00	23,32



No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	895.424.000,00	2.347.414.000,00	1.451.990.000,00	162,16
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	895.424.000,00	2.347.414.000,00	1.451.990.000,00	162,16
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.274.977.200,00	2.331.727.300,00	56.750.100,00	2,49
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	210.707.000,00	164.905.600,00	(45.801.400,00)	(21,74)
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	210.707.000,00	164.905.600,00	(45.801.400,00)	(21,74)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.064.270.200,00	2.166.821.700,00	102.551.500,00	4,97
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	9.829.000,00	6.978.500,00	(2.850.500,00)	(29,00)
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	145.569.600,00	138.946.400,00	(6.623.200,00)	(4,55)
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.710.545.600,00	1.871.099.600,00	160.554.000,00	9,39
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	198.326.000,00	149.797.200,00	(48.528.800,00)	(24,47)
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	12.647.904.400,00	13.705.640.500,00	1.057.736.100,00	8,36
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.816.404.600,00	10.043.572.100,00	1.227.167.500,00	13,92
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	460.541.100,00	133.831.200,00	(326.709.900,00)	(70,94)
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.456.068.300,00	9.067.554.300,00	1.611.486.000,00	21,61
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	731.651.400,00	694.892.600,00	(36.758.800,00)	(5,02)



No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	147.441.600,00	136.610.000,00	(10.831.600,00)	(7,35)
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	20.702.200,00	10.684.000,00	(10.018.200,00)	(48,39)
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	199.999.200,00	104.549.200,00	(95.450.000,00)	(47,73)
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	99.999.200,00	53.299.200,00	(46.700.000,00)	(46,70)
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100.000.000,00	51.250.000,00	(48.750.000,00)	(48,75)
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	3.138.758.000,00	3.076.908.000,00	(61.850.000,00)	(1,97)
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	112.972.000,00	109.372.000,00	(3.600.000,00)	(3,19)
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	3.025.786.000,00	2.967.536.000,00	(58.250.000,00)	(1,93)
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	492.742.600,00	480.611.200,00	(12.131.400,00)	(2,46)
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	251.894.800,00	246.166.000,00	(5.728.800,00)	(2,27)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	240.847.800,00	234.445.200,00	(6.402.600,00)	(2,66)
Sub Total SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			31.222.064.000,00	31.119.327.000,00	(102.737.000,00)	(0,33)
Total belanja SKPD			52.093.018.740,00	43.803.463.710,00	(8.289.555.030,00)	(15,91)
Rasio belanja SPM			59,94	71,04	-	-
6,	Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.464.565.200,00	2.073.951.500,00	(390.613.700,00)	(15,85)



No	SPM	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=(5-6)	7
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.464.565.200,00	2.073.951.500,00	(390.613.700,00)	(15,85)
		Penyediaan Permakanan	536.824.800,00	362.797.500,00	(174.027.300,00)	(32,42)
		Penyediaan Alat Bantu	597.115.800,00	597.115.800,00	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	212.044.200,00	130.745.700,00	(81.298.500,00)	(38,34)
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	228.256.800,00	156.817.500,00	(71.439.300,00)	(31,30)
		Pemberian Layanan Kedaruratan	198.865.200,00	146.343.400,00	(52.521.800,00)	(26,41)
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	691.458.400,00	680.131.600,00	(11.326.800,00)	(1,64)
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.331.301.400,00	1.646.084.800,00	314.783.400,00	23,64
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.331.301.400,00	1.646.084.800,00	314.783.400,00	23,64
		Penyediaan Makanan	1.250.181.000,00	1.564.964.400,00	314.783.400,00	25,18
		Penyediaan Sandang	18.120.400,00	18.120.400,00	0,00	0,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
Sub Total SPM Bidang Sosial			3.795.866.600,00	3.720.036.300,00	(75.830.300,00)	(2,00)
Total belanja SKPD			52.093.018.740,00	43.803.463.710,00	(8.289.555.030,00)	(15,91)

Sumber: diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 2025
(aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)



BAB VI PENUTUP



Dalam menghadapi berbagai perubahan dan ketidaksesuaian keadaan, Pemerintah Kabupaten Cirebon merancang Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini merupakan dokumen resmi sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 juga menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, dan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun untuk menjadi dasar penganggaran, yang diawali penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon tentang Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 serta ditindaklanjuti melalui KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 melalui kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.



Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan di Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan berbagai prioritas dan kebijakan strategis yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
2. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program, dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2025 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya).
3. Setiap perangkat daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 melalui pengendalian dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
4. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.
5. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2025 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.



6. Bupati Cirebon, melalui Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025.
7. Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Cirebon Tahun berikutnya.

Selanjutnya, rencana tindak lanjut dari Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 yaitu menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 yang dalam proses penyusunannya akan dibahas secara keseluruhan dengan mitra pemerintah yaitu DPRD Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON

Drs. H. IMRON, M.Ag